LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Timur, Telp (0276) 321052, Faks (0276) 325363 Kemiri,
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Boyolali

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Boyolali, 24 Maret 2020

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

INSAN ADI ASMONO, S.STP, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19770605 199511 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
Telp 320009 ext. 1231 Email: inspektorat@boyolali.go.id
Web: inspektorat.boyolali.go.id

NASKAH HASIL REVIU LKjIP KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2019, masih terdapat beberapa kelemahan dan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. KELEMAHAN YANG DITEMUI

1. LKjIP Kabupaten Boyolali tidak menyajikan Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

Sasaran / Uraian	Indikator Kinerja Utama	Koordinator SKPD Pengampu
Terpenuhinya infrastruktur sosial	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	DISPORAPAR
Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	DP2KBP3A
Meningkatnya Derajad kesehatan	Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	DINKES
	Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	DINKES
	Rasio dokter	DINKES
	Rasio dokter gigi	DINKES
	Rasio perawat	DINKES
	Rasio bidan	DINKES
Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	APK SD	DISDIKBUD
	APK SMP	DISDIKBUD
	APM SD	DISDIKBUD
	APM SMP	DISDIKBUD
	Angka Putus Sekolah SD	DISDIKBUD
	Angka Putus Sekolah SMP	DISDIKBUD
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	DISDIKBUD
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	DISDIKBUD
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	DISDIKBUD
	Rasio Siswa terhadap Guru SD	DISDIKBUD
Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Jumlah produksi tanaman perkebunan :	
	- Tebu	DISPERTAN

Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	Produksi hasil peternakan	
	- Produksi daging	DISNAKKAN

2. **Terdapat perbedaan misi yang tersaji dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019**
   Kabupaten Boyolali memiliki 7 (tujuh) misi, namun terdapat 2 (dua) misi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 berbeda dengan misi yang disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021 dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2019, yaitu:

RPJMD	RKPD	LKjIP
Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi	Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi	Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi
Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan	Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan	Boyolali membangun untuk perubahan

3. **Terdapat ketidakseragaman penyajian sasaran strategis, yaitu:**

RPJMD	RKPD	LKjIP	IKU	Perjanjian Kinerja	RKT	Pengukuran Kinerja
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)
Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial
Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan
Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan	Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak	Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan

hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional	dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional	hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional
Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi

4. Terdapat ketidakseragaman penyajian indikator sasaran, yaitu:

RPJMD	LKjIP	IKU	Perjanjian Kinerja	Sumber Data dari OPD	RKT	Perjanjian Kinerja	Pengukuran Kinerja	OPD Pengampu
Terpenuhinya infrastruktur Penunjang								
Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Jumlah unit sumber Energi Baru terbarukan yang dibangun	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Jumlah unit sumber Energi Baru terbarukan yang dibangun (IPAL Biogas)	Jumlah unit sumber Energi Baru terbarukan yang dibangun	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	DLH
Terpenuhinya infrastruktur sosial								
Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	-	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	DISPORAPAR
Bertambahnya lapangan olahraga	Lapangan olahraga	Lapangan olahraga	Bertambahnya lapangan olahraga	Lapangan olahraga	Lapangan olahraga	Bertambahnya lapangan olahraga	Bertambahnya lapangan olahraga	DISPORAPAR
Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	DINAS ARPUS
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel								

Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKjIP)	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD)	Dokumen Laporan Pertangg ung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAM J, LPPD AMJ dan LKJIP)	Dokumen Laporan Pertangg ung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAM J, LPPD AMJ dan LKJIP)	Dokumen Laporan Pertanggu ng jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	SETD A
Menurunny a jumlah temuan/rek omendasi hasil pemeriksa an LKPD oleh BPK RI	Menurunny a jumlah temuan/rek omendasi hasil pemeriksa an LKPD oleh BPK RI.	Jumlah temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI menurun	Menurunny a jumlah temuan/rek omendasi hasil pemeriksa an LKPD oleh BPK RI	Jumlah temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI menurun	Jumlah temuan/ rekomen dasi hasil pemeriks aan LKPD oleh BPK RI menurun	Menurun nya jumlah temuan/r ekomend asi hasil pemeriks aan LKPD oleh BPK RI	Menurunn ya jumlah temuan/re komendasi hasil pemeriksa an LKPD oleh BPK RI	INSP EKTO RAT
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel								
Tersusunn ya kebijakan teknis bidang administras i kewilayaha n	Jumlah kebijakan teknis bidang administra si kewilayaha n yang tersusun	Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan yang tersusun	Tersusunn ya kebijakan teknis bidang administra si kewilayaha n	Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan yang tersusun	Jumlah kebijakan teknis bidang administr asi kewilaya han yang tersusun	Tersusun nya kebijakan teknis bidang administr asi kewilaya han	Tersusunn ya kebijakan teknis bidang administra si kewilayah an	SETD A
Tersusunn ya kebijakan teknis bidang kelembaga an	Tersusunn ya kebijakan teknis bidang kelembaga an	Jumlah kebijakan teknis bidang kelembagaa n yang tersusun	Tersusunn ya kebijakan teknis bidang kelembaga an	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaa n	Jumlah kebijakan teknis bidang kelemba gaan yang tersusun	Tersusun nya kebijakan teknis bidang kelemba gaan	Tersusunn ya kebijakan teknis bidang kelembag aan	SETD A
Rumusan kebijakan teknis pemerintah aan, ekonomi, pembangu nan, kesra dan administasi	Rumusan kebijakan teknis pemerintah aan, ekonomi, pembangu nan, kesra dan administasi	Jumlah rumusan kebijakan teknis pemerintaha an, ekonomi, pembanguna n, kesra dan administasi	Rumusan kebijakan teknis pemerintah aan, ekonomi, pembangu nan, kesra dan administasi	Rumusan kebijakan teknis pemerintaha n, ekonomi, pembanguna n, kesra dan administrasi	Jumlah rumusan kebijakan teknis pemerint ahaan, ekonomi, pembang unan, kesra dan administa si	Rumusan kebijakan teknis pemerint ahaan, ekonomi, pembang unan, kesra dan administa si	Rumusan kebijakan teknis pemerintа haan, ekonomi, pembangu nan, kesra dan administas i	SETD A
Nilai Survey Kepuasan Masyaraka t/ Indeks Kepuasan Masyaraka t Kabupaten Boyolali	Nilai Survey Kepuasan Masyaraka t/ Indeks Kepuasan Masyaraka t Kabupaten Boyolali	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	Nilai Survey Kepuasan Masyaraka t/ Indeks Kepuasan Masyaraka t Kabupaten Boyolali	Nilai IKM Kabupaten Boyolali	Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat/ Indeks Kepuasa n Masyara	Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat/ Indeks Kepuasa n Masyara	Nilai Survey Kepuasan Masyarak at/ Indeks Kepuasan Masyarak at Kabupaten Boyolali	SETD A

					kat Kabupaten Boyolali	kat Kabupaten Boyolali		
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Kepemilikan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	DISPENDUKCAPIL
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	Persentase fasilitasi layanan persandian	DISKOMINFO
Kualitas layanan e-procurement	Kualitas layanan e-procurement	Persentase pengajuan eprocurement yang terlayani	Kualitas layanan e-procurement	Kualitas layanan e-procurement	Kualitas layanan e-procurement	Kualitas layanan e-procurement	Kualitas layanan e-procurement	SETDA
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protocol yang dihasilkan	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	DISKOMINFO, SETDA
Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	BP3D

Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, Anggaran, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	Terlaksanya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial								
Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Luas Lingkungan pemukiman kumuh yang ditangani	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Luas Lingkungan pemukiman kumuh	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	DPKP
Meningkatnya Derajad kesehatan								
Rasio dokter	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter	Rasio dokter per satuan penduduk	DINKES
Rasio dokter gigi	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Rasio dokter gigi	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Rasio dokter gigi	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	DINKES
Rasio perawat	Rasio perawat per satuan penduduk	Rasio perawat per satuan penduduk	Rasio perawat	Rasio perawat per satuan penduduk	Rasio perawat per satuan penduduk	Rasio perawat	Rasio perawat per satuan penduduk	DINKES
Rasio bidan	Rasio bidan per satuan penduduk	Rasio bidan per satuan penduduk	Rasio bidan	Rasio bidan per satuan penduduk	Rasio bidan per satuan penduduk	Rasio bidan	Rasio bidan per satuan penduduk	DINKES
RSUD Pandan Arang	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit RSUD Pandan Arang	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	RSUD PANDAN ARANG

RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	RSUD SIMO
RSUD Banyudono	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	RSUD WARAS WIRIS
Meningkatnya daya saing industri								
IKM yang difasilitasi/ dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/ dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/ dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkatnya hasil produksi	IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM yang difasilitasi/ dibina dan meningkat hasil produksinya	DISDAGPERIN
Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Pembentukan kawasan peruntukan industri (PKPI)	Pembentukan kawasan peruntukan industri	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	Pembentukan kawasan peruntukkan industri	DISDAGPERIN
Meningkatnya daya saing perdagangan								
Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll)	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	Sarana dan prasarana perdagangan yang respresentatif(toko,kios,los,kantor,MCK,TPS dan mushola dll)	Sarpras perdagangan yang resprese ntatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola dll)	Sarpras perdagangan yang represent atif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	DISDAGPERIN
Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali.	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	DISDAGPERIN
Nilai ekspor barang (USD)	Ekspor bersih perdagangan	Ekspor bersih perdagangan	Ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Ekspor bersih perdagangan	Ekspor bersih perdagangan	Ekspor bersih perdagangan	DISDAGPERIN

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%)	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdaganga n terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdaganga n Bruto/PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	DISDAGPERIN
Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional								
Produksi pangan utama (Ton) : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	DISPERTAN
Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional								
Produksi ikan	Produksi perikanan	Produksi perikanan	Produksi ikan	Meningkatnya produksi ikan	produksi perikanan	Produksi ikan	Produksi perikanan	DISNAKKAN
Produksi daging	Produksi daging	Produksi daging	Produksi daging	Meningkatnya produksi daging	produksi daging	Produksi daging	Produksi daging	DISNAKKAN
Produksi susu (kilo liter)	Produksi susu (kilo liter)	Produksi susu (kilo liter)	Produksi susu (kilo liter)	Meningkatnya produksi susu	produksi susu (kilo liter)	Produksi susu (kilo liter)	Produksi susu (kilo liter)	DISNAKKAN
Populasi ternak	Populasi ternak	Populasi ternak	Populasi ternak	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	Populasi ternak	Populasi ternak	Populasi ternak	DISNAKKAN
Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali								
Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	DISPORAPAR
Meningkatnya PAD bidang Pariwisata	PAD bidang Pariwisata meningkat	PAD bidang Pariwisata meningkat	Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	PAD bidang Pariwisata meningkat	PAD bidang Pariwisata meningkat	Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	PAD bidang Pariwisata meningkat	DISPORAPAR

5. Kelemahan pada indikator sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	OPD Pengampu
indikator sasaran yang disajikan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 namun tidak ada sumber data dari OPD				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	- Target di RKT 60 skor - Target di Perjanjian Kinerja 1	67,18	SETDA

		- Target di Pengukuran kinerja 65		
indikator sasaran yang tidak disajikan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019				
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	64	65.01	Setda
	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	90	100	Setda
	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	75	70	Setda
	Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	19	19	Setda
	Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta	66	20	Setda
	Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan	100	100	Setda
	Tersusunnya Profil Kelurahan	6	6	Setda
	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	22	22	Setda
	Meningkatnya sarana dan prasarana promosi	-	2	Setda
	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	62	93,92	Setda, indikator yang sama diampu oleh DPUPR namun realisasi berbeda yaitu 62%
Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	97,56	97,56	Kankesbangpol
Meningkatnya Derajad kesehatan	Dokter dan Nakes DikirimPelatihan	30	36	Dinkes
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani	Volume Perdagangan Produk Usaha Pertanian	78.298,13	161.170,98	Dispertan

	Jumlah petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regristasi kebun, dan sertifikat mutu	1.062	1.440	Dispertan
Meningkatnya Produksi Ternak dan Pengolahan Hasil Ternak Untuk Berkontribusi Pada Pasar Nasional	Pengobatan ternak	37.000	19.015	disnakkan
	Pengobatan ternak	950	1.372	disnakkan
	Meningkatnya produk olahan ikan	69,62	99	disnakkan
Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	10	12	disdikbud
	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	11	12	disdikbud
	Pelaku seni dan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	41	66	disdikbud
	Pelaksanaan Gelar seni dan budaya	58	57	disdikbud
	Event seni dan budaya	4	5	disdikbud

6. Terdapat perbedaan target, yaitu:

Sasaran/ Indikator Sasaran	Target					OPD Pengampu
	RKT	Perjanjian Kinerja	Pengukuran Kinerja	LKjIP	Sumber data dari OPD	
Meningkatnya nilai investasi						
Nilai investasi	1.340.857.300.906	1.340.857.300 .906	1.340.857,30	1.340.857,30	1.340.857.300.906	DPMPTSP
Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan						
Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	67 %	67%	67,42	67,42	67	DISPERMASDES

7. Terdapat perbedaan realisasi, yaitu:

Sasaran/ Indikator Sasaran	Realisasi			OPD Pengampu
	Pengukuran Kinerja	LKjIP	Sumber data dari OPD	
Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi				
Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	90	90	50	DISKOMINFO
Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan				
Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	67,42	67,42	67	DISPERMASDES

8. **Terdapat target kinerja yang tidak tercapai namun disebutkan adanya efisiensi anggaran, antara lain :**

Sasaran/ Indikator Sasaran	capaian (%)	Keterangan	OPD Pengampu
Terpenuhinya infrastruktur Penunjang			
Penambahan titik lampu	67,90	dari anggaran sebesar Rp. 5.964.321.000,00 digunakan sebesar Rp. 5.886.192.340,00 ada efisiensi anggaran sebesar 1,31%	DISHUB
Meningkatnya daya saing perdagangan			
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	99,50	efisiensi anggaran sebesar Rp. 381.295.187,00 atau 19,50% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 1.954.979.000,00 terserap Rp. 1.573.683.813,00	DISDAGPERIN

B. Langkah/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka disarankan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 untuk :

1. LKjIP Kabupaten Boyolali agar menyajikan Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
2. Melakukan penyesuaian atas penyajian misi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas;
3. Melakukan penyesuaian atas perbedaan penyajian target dan realisasi sebagaimana tersebut di atas;
4. Melakukan revisi penyajian efisiensi anggaran agar disesuaikan dengan capaian target kinerja.

Demikian resume hasil reviu ini untuk menjadikan perhatian dan sebagai bahan mengambil langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Boyolali, 24 Maret 2019

PEJABAT YANG DIREVIU
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. MASRURI
Pembina Utama Muda
NIP. 19631012 199103 1 008

Tim Reviu

1. Ir. Ida Nawaksari ..... NIP. 19670315 199203 2 006
2. Bekti Sri Rahayu, SH ..... NIP. 19720304 199603 2 003
3. Eka Andriyani, S.Kom ..... NIP. 19831014 200903 2 005
4. Soegeng Widodo, SP ..... NIP. 19720903 200312 1 003
5. Syahadatul Achiroh, S.Sos ..... NIP. 19730419 199803 2 006
6. Dina Rohmani, SP ..... NIP. 19771122 200604 2 017
7. Lilik Ariyanto, SE, MM ..... NIP. 19760713 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kepemerintahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada satuan dan unit kerja perangkat daerah Kabupaten Boyolali dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indomesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dananalisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermafaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, 30 Maret 2020

BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
IKHTISAR EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan LKjIP 1
1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali 2
1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah 2
1.2.2 Gambaran Umum Daerah 7
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Kabupaten Boyolali 11
1.3 Sistematika Penyajian LKjIP 20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21
2.1 Perencanaan Kinerja 21
2.2 Perjanjian Kinerja 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 28
3.2 Penilaian Kinerja 248
3.3 Realisasi Keuangan 255
BAB IV PENUTUP 261
4.1 Simpulan 261
4.2 Saran Tindak Lanjut 261
DAFTAR LAMPIRAN
A. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021.
C. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.
D. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
E. Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
F. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
G. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar OPD dan Tugasnya	4
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1	29
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	30
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 3	34
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 4	38
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 5	40
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 5	40
Tabel 3.6	Daftar Embung yang tersebar di 22 Kecamatan	49
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran 6	51
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 7	58
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Sasaran 8	65
Tabel 3.10	Perbandingan Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai pada tahun 2019	76
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran 9	83
Tabel 3.12	Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019	95
Tabel 3.13	Daftar Peraturan Bupati Boyolali Tahun 2019	95
Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja Sasaran 10	117
Tabel 3.15	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	137
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja Sasaran 11	145
Tabel 3.17	Pencapaian Kinerja Sasaran 12	154
Tabel 3.18	Daftar test HIV pada tahun 2019	164
Tabel 3.19	Jumlah Posbindu 2019	166
Tabel 3.20	Pencapaian Kinerja Sasaran 13	185
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja Sasaran 14	197
Tabel 3.22	Pencapaian Kinerja Sasaran 15	200
Tabel 3.23	Pencapaian Kinerja Sasaran 16	207
Tabel 3.24	Neraca Ketersedian dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016 dan 2019 Kabupaten Boyolali	229
Tabel 3.25	Pencapaian Kinerja Sasaran 17	232
Tabel 3.26	Pencapaian Kinerja Sasaran 18	237
Tabel 3.27	Rekapitulasi RUP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2019	239
Tabel 3.28	Pencapaian Kinerja Sasaran 19	240
Tabel 3.29	Rekapitulasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 - 2019	245
Tabel 3.30	Capaian Kinerja yang Sangat Baik di atas 150%	248
Tabel 3.31	Capaian Kinerja yang Masih Kurang di bawah 55%	251
Tabel 3.32	Prosentase Capaian Kinerja per OPD	252
Tabel 3.33	Perbandingan Anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s.d 2019	255
Tabel 3.34	Realisasi Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2019untuk melaksanakan sasaran strategis	255

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali..... 8
Gambar 1.2 Unggulan Kabupaten Boyolali..... 11
Gambar 3.1 Grafik perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-2019..... 38
Gambar 3.2 Panjang ruas jalan kabupaten sepanjang 678,35 Km 74% kondisi baik..... 41
Gambar 3.3 Embung Giriroto Kabupaten Boyolali 40
Gambar 3.4 Grafik perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2019 55
Gambar 3.5 Grafik perkembangan prestasi PORDA Kabupaten Boyolali..... 58
Gambar 3.6 Penambahan jumlah klub olah raga di kabupaten boyolali dari tahun 2015-2019 59
Gambar 3.7 Grafik penambahan lapangan olah raga di Kabupaten Boyolali dari tahun 2015-2019..... 61
Gambar 3.8 Grafik cakupan ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan dari tahun 2016-2019..... 62
Gambar 3.9 Perpustakaan Boyolali..... 65
Gambar 3.10 Grafik nilai SAKIP dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019..... 69
Gambar 3.11 Grafik Trend Belanja Modal 2015-2019..... 76
Gambar 3.12 Grafik Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali dan Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016-2019..... 81
Gambar 3.13 Grafik Nilai SKM tahun 2016 – 2019..... 101
Gambar 3.14 Grafik cakupan pengelolaan arsip daerah dari tahun 2016-2019..... 110
Gambar 3.15 Grafik Prosentase sanggahan Lelang dari tahun 2016 dan 2019..... 112
Gambar 3.16 Jumlah Paket Pekerjaan yang dilelangkan di Bagian Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019..... 112
Gambar 3.17 Grafik Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupate, dan penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... . 120
Gambar 3.18 Grafik Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 - 2019..... 125
Gambar 3.19 Grafik cakupan penanganan PMKS dari tahun 2016-2019..... 129
Gambar 3.20 Grafik Perusahaan yang Menggaji Sesuai dengan Regulasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 131
Gambar 3.21 Grafik Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 133
Gambar 3.22 Grafik Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan Kejuruan pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019..... ... 134

Gambar 3.23 Grafik Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019 135
Gambar 3.24 Grafik perkembangan rasio rumah layak huni dari tahun 2017-2019..... 138
Gambar 3.25 Grafik penanganan lingkungan pemukiman kumuh dari tahun 2017-2019..... 139
Gambar 3.26 Grafik UMKM yang Dibina yang Meningkat Usahanya/Omzetnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 146
Gambar 3.27 Koperasi yang Dibina yang Meningkat Nilai Kesehatannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 147
Gambar 3.28 Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 149
Gambar 3.29 Gedung Workshop Otomotif di BLK Boyolali 150
Gambar 3.30 Grafik Data Posbindu di Kabupaten Boyolali..... 167
Gambar 3.31 Grafik Pemantauan Desa Menuju UCI (Komulatif Triwulanan) Tahun 2019..... 168
Gambar 3.32 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 199..... 178
Gambar 3.33 Grafik Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang, Simo, dan Waras Wiris dari Tahun 2016-2019..... 186
Gambar 3.34 Grafik Perkembangan APK PAUD dari tahun 2015-2019..... 188
Gambar 3.35 Grafik Perkembangan APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP Tahun 2015 sd 2019..... 189
Gambar 3.36 Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP dari Tahun 2015-2019 190
Gambar 3.37 Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP dari Tahun 2015-2019.. 190
Gambar 3.38 Grafik perkembangan Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi Baik tahun 2015-2019..... 191
Gambar 3.39 Grafik Perkembangan Persentase GURU SD dan GURU SMP Bersertifikat Pendidik tahun 2015-2019..... 193
Gambar 3.40 Grafik Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru SD dan SMP tahun 2015-2019 194
Gambar 3.41 Perkembangan Persentase SD dan SMP Berakreditasi Minimal B 196
Gambar 3.42 Gambar sistem penerimaan siswa baru/ PPDB Online SMP pada http://boyolali.ppdb-smart.net/ 197
Gambar 3.43 Grafik pertumbuhan industri dari tahun 2016-2019 199
Gambar 3.44 Grafik ekspor bersih perdagangan dari tahun 2016-2019 205
Gambar 3.45 Grafik kontribusi perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2019 206
Gambar 3.46 Grafik Produksi Padi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019..... 209
Gambar 3.47 Grafik Produktivitas jagung Kabupaten Boyolali dari tahun 2016-2019 212
Gambar 3.48 Grafik Produksi Kedelai di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019..... 213
Gambar 3.49 Grafik produksi tanaman hortikultura utama (pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dari tahun 2016 -2019..... 219
Gambar 3.50 Grafik produksi tanaman perkebunan dari tahun 2016-2019..... 227
Gambar 3.51 Grafik produksi dan populasi peternakan dari tahun 2016 – 2019..... 234

Gambar 3.52 Gedung server (pusat penyimpanan data) Boyolali..... 240
Gambar 3.53 Grafik Pengunjung Wisatawan dari Tahun 2015-2019 241
Gambar 3.54 Perkembangan PAD bidang pariwisata dari tahun 2016-2019..... 242
Gambar 3.55 Replika (tujuh) keajaiban dunia 244
Gambar 3.56 Pengiriman duta seni ke Eropa 245
Gambar 3.57 Perkembangan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya..... 246
Gambar 3.58 Tari Topeng Ireng Khas Boyolali 247

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 ini untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2019 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 adalah "*Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".* Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan upaya-upaya dengan menetapkan misi sebagai berikut : 1) *Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi;* 2) *Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan;* 3) *Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera;* 4) *Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing; 5) Boyolali lumbung padi dan pangan nasional; 6) Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan; dan 7) Boyolali lebih maju dan berteknologi*.

Dari ke tujuh visi di atas terdapat inovasi kinerja atau prestasi yaitu:

1. Misi pertama, Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi, adalah kelanjutan dari tahap lima tahun sebelumnya. Setelah Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Perizinan dari 30 menjadi 3 Perda, dan Penetapan Tarif Rp.0 atau "GRATIS" kecuali IMB. Capaian terpenting dari Misi pertama ini adalah adanya investasi rata -rata 1,5 Trilyun pertahun dan khusus tahun 2018 1,6 Trilyun, disamping itu sampai saat ini Boyolali kekurangan tenaga kerja untuk memenuhi pertumbuhan industri yang ada. PTSP beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya Unit kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2019, dan Role Model Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik Tahun 2019, serta Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;

2. Misi kedua Boyolali membangun untuk perubahan, diantaranya adalah infrastruktur dasar dengan pencapaian 74% kondisi baik untuk ruas jalan kabupaten sepanjang 678,35 Km, dari 44 pasar, tinggal 11 pasar yang belum direvitalisasi (6 pasar kondisi sedang dan 5 pasar kondisi tidak baik). Pembangunan embung pertanian 43 (empat puluh tiga) tersebar di 19 kecamatan, tahun 2019 ada penambahan pembangunan embung sebanyak 8 (Delapan) buah embung dengan total kapasitas yang dibangun sebesar 83.134m^3 dan total luas areal genangan 2,670 ha. Dengan jargon "kota kecil yang seksi", Boyolali berhasil menata perkantoran pemerintah dalam satu kawasan dilengkapi dengan pembangunan landmark Gedung Lembu Sora, Museum R. Hamong Wardoyo, Kebun Raya Indrokilo, DOM Mahesa lima tempat ibadah dalam satu kompleks, serta replika 7 (tujuh) keajaiban dunia (di simpang Srikanto dipasang Menara Pisa, Menara Eiffel, dan Patung Liberty. Sedangkan di Alun-Alun Lor dipasang replika Candi Borobudur, Masjid Taj Mahal, Spinx, dan, Piramida), setelah itu

pada pada tahun 2019 Kabupaten Boyolali membangun Stadion Kebo Giro di Kecamatan Cepogo, Relokasi Rumah Sakit Simo, Simpang Lima Selo, Relokasi Pasar Pengging dan beberapa pasar lainnya, serta Relokasi terminal. Boyolali juga memiliki Perpustakaan dengan SLIM (*System Library Informasi Managament*). Perpustakaan remen maos memiliki fasilitas berupa Buku Tamu *Online*, *BI Corner*, Wifi Area, Online Katalog (OPAC), Ruang Diskusi/Pertemuan, dan Ruang Bermain Anak. Sarana olah raga 20 (dua puluh) sarana olah raga sejak 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai 53 M;

3. Misi ketiga, Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera, ditandai dengan capaian LHKPN, LHKASN, dan SiharkaBoy, Keterbukaan harta kekayaan pejabat publik, Capaian Patuh tepat waktu 100% untuk Eksekutif, dan Legislatif, dan satu satunya Pemerintah Kabupaten yang wajib dan patuh dalam melaporkan LHKASN untuk wajib lapor Non LHKPN 5 tahun berturut turut. Menghentikan Gratifikasi, terkait penerimaan fee bank bagi bendahara SKPD dari bank pemberi pinjaman pegawai, menghapuskan seluruh honorarium yang merupakan patologi birokrasi bagian dari korupsi sistemik, melakukan efisiensi Belanja Pegawai, melaksanakan Non Cash Transactions (NCT) sejak 2015 dan telah memperoleh opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut serta adipura 13 (dua belas) kali berturut-turut. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019. Efisiensi cross cutting program yang tidak sesuai dengan RPJMD melalui refocusing sebesar 64,35%, atau dari 2.028 kegiatan menjadi 723 kegiatan di semua OPD. Melakukan perbaikan terhadap Rumah tidak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 2.971 rumah dengan nilai 16,8M. Efisiensi anggaran senilai Rp 32,463 Milyar. Postur keuangan daerah yang sehat perbandingan antara Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai ASN yaitu Tahun 2019 57:43. Trend Belanja Modal yang semakin meningkat dari tahun 2016 dari 396 di tahun 2016, 443M ditahun 2017, 521 M di tahun 2018, dan 555 M di tahun 2019. Pemberian Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) selain berdasarkan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas juga berdasarkan statis (kehadiran dan kinerja) dan dinamis (peran tertentu), semua honorarium pegawai sudah dihapus, sehingga penerimaan pegawai hanya melalui gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)

4. Misi keempat, Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing, ditunjukan dengan capaian, akreditasi paripurna dan *triangle sistem* RSUPA (Integrasi Tatakelola SIM RS, Mutu dan Remunerasi), Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 199, di replikasi secara nasional oleh kementrian kesehatan. Pendidikan, Pemberian penghargaan berupa smartphone kepada siswa berprestasi sebanyak 53 siswa SMP yang memiliki prestasi akademis Ujian Nasional dengan hasil nilai 100, serta duta seni ke luar negeri (prancis dan spanyol).

5. Misi kelima, Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional, capaiannya ditetapkannya Boyolali sebagai Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, surplus 7 dari 10 komoditas strategis, Neraca ketersedian dan kebutuhan pangan terutama komoditas padi (beras) di Kabupaten Boyolali tahun 2016 surplus 73.336,04 Ton Beras, tahun 2017 tercapai surplus beras sebesar 59.493,53 Ton, tahun 2018 tercapai surplus beras sebesar 63.805 ton, dan tahun 2019 surplus sebesar 63.807,16 Ton. Boyolali juga memberikan bantuan keringanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali berupa bantuan keringanan PBB 90% dan lahan irigasi teknis dengan kepemilikan ≤ 5.000 m2. Pemasaran Padi Organik Tahun 2018. Penjualan beras organik ke daerah Jakarta, Tangeang, Bekasi dan Jogja sebanyak 15 ton/bulan. Beras organik yang dipasarkan pada pasar dalam negeri dengan jenis Pandan Wangi Putih sebanyak 4 Ton/bulan; Pandan Wangi Coklat sebanyak 3 Ton/bulan; Beras Merah sebanyak 6 Ton/bulan; Beras hitam sebanyak 2 Ton/bulan. Beras organik yang dijual

di dalam negeri umumnya dijual di pasar modern, dengan kemasan 1 kg/pack, dengan harga Rp 20.000-/kg;

6. Misi keenam, Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan capaiannya adalah kota penghasil susu, produksi daging dan populasi sapi perah Boyolali terbesar di Jawa Tengah;
7. Misi ketujuh Boyolali, lebih maju dan berteknologi, sampai tahap infrastruktur mulai data center, jaringan, pengembangan sistem dan berbagai aplikasi yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Wifi gratis pada titik-titik di pusat kota dan kecamatan. Boyolali juga telah menerapkan pilkades elektronik.

RPJMD Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 memuat tujuan dan sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Boyolali), indikator kinerja dan rencana capaian target kinerja tahunan mulai tahun 2016-2021 serta arah kebijakan yang menjadi program utama. Program utama ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunan. Guna menjaga konsistensi penggunaan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun perencanaan, dibakukanlah sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan kinerja tahunan.

Berpedoman pada RPJMD dan IKU, Pemerintah Kabupaten Boyolali merencanakan kinerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki 19 sasaran strategis dengan 183 indikator kinerja. Prosentase Indikator Kinerja Utama menjadi indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% karena semua indikator kinerja dalam dokumen RPJMD dijadikan indikator dalam dokumen IKU.

Hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran tahun 2019 serta penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, dari 19 (sembilan belas) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, diperoleh:

1. Tiga belas (16) sasaran (84,21%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Tiga (2) sasaran (10,53%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Tiga (1) sasaran (5,26%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);

Prosentase capaian sasaran secara keseluruhan 134,03% (kategori sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum target kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 telah terpenuhi.

Tingkat capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2018, dari 183 (serratus delapan puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah :

1. Seratus tujuh (107) indikator kinerja (58,47%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Enam puluh empat (64) indikator kinerja (34,97%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Enam (6) indikator kinerja (3,28%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);
4. Lima (5) indikator kinerja (2,73%) dengan capaian kurang dari 55% (kategori Kurang);
5. Satu (1) Indikator Kinerja (0,55%) yang tidak memasang target di tahun 2019 ini.

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 secara keseluruhan 138,96% (kategori sangat baik).

Capaian kenerja per SKPD dari 31 OPD (tidak termasuk kecamatan) dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya sebagai berikut :

1. Tujuh belas (20) OPD (64,52%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Tiga belas (10) OPD (32,26%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Satu (1) OPD (3,22%) dengan capaian 55% sampai 75% (kategori cukup);

Prosentase capaian sasaran oleh OPD secara keseluruhan 125,28% (kategori sangat baik).

Anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2019 untuk belanja sebesar 2.468.421.561.000,00, dana yang terealisasi digunakan sebesar Rp. 2.381.601.864.739,00 atau 96,48% (Realisasi sebelum pemeriksaan BPK menuju audited).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengkuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas akuntabilitas unit kerja, dan entitas akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)*secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan kembali instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan kinerja dengan waktu penyusunan yang berbeda sesuai siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali;
3. bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali

Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari organisasi perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali.

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Daerah (20), yang terdiri dari:
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2) Dinas Kesehatan;
    3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    5) Dinas Sosial;
    6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    7) Dinas Ketahanan Pangan;
    8) Dinas Lingkungan Hidup;
    9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    11) Dinas Perhubungan;
    12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    13) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
    14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

17) Dinas Pertanian;

18) Dinas Peternakan dan Perikanan;

19) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

20) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan Daerah (3), yang terdiri dari:

1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

2) Badan Keuangan Daerah;

3) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

f. Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, masih melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan, ada 5 (lima) terdiri dari :

1) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang;

2) Rumah Sakit Umum Daerah Simo;dan

3) Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris.

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

i. Kecamatan (22), yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Karanggede, Kecamatan wonosegoro, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.

j. Kelurahan (6), yaitu Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Pulisen, Kelurahan Banaran, Kelurahan Sambeng, kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Kemiri.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar OPD dan Tugasnya

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
2.	Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3.	Inspektorat	Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5.	Dinas Kesehatan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
8.	Dinas Sosial;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
10.	Dinas Ketahanan Pangan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
11.	Dinas Lingkungan Hidup;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
14.	Dinas Perhubungan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
16.	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal, dan urusan energi dan sumber daya mineral
18.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan
20.	Dinas Pertanian;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan

No.	Nama SKPD	Tugas
1	2	3
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran
24.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
25.	Badan Keuangan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah
26.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah
27.	RSUD Pandan Arang	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
28.	RSUD Banyudono	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
29.	RSUD Simo	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana
31.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi

1.2.2 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Nama resmi Kabupaten Boyolali dengan ibu kota Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Boyolali 101.510,1955 ha (1.008,45 Km²) terdiri dari 22,49% berupa lahan basah dan 77,51% berupa tanah kering.

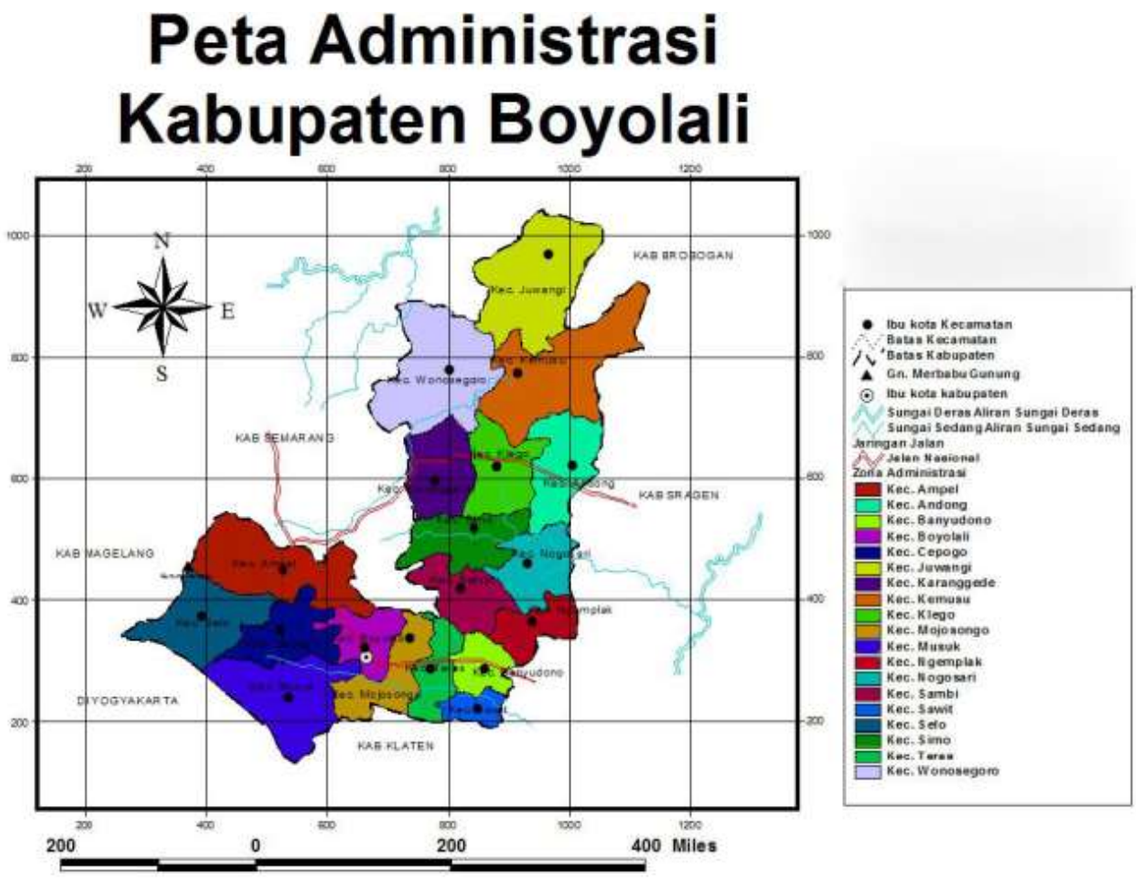
Secara wilayah administrasi terdiri dari 22 Kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Letak geografis Kabupaten Boyolali berada pada tiga kota besar yang lebih dikenal dengan Joglosemar (Jogjakarta, Solo, dan Semarang). Jarak bentang Barat - Timur sepanjngan 48 Km dan jarak Utara – Selatan sepanjang 54 Km. Batas wilayah Kabupaten Boyolali:

- Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo
- Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY
- Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung. Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh. Bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur. Secara topograsi wilayah mulai dari ketinggian 75 m diatas permukaan laut di wilayah bagian timur hingga 1.500 m diatas permukaan laut di wilayah bagian barat.

Di wilayah Kabupaten Boyolali terdapat 2 buah gunung menjadi ikon Kabupaten Boyolali, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari, dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan. Adanya kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik lahan, hasil tanaman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi fisik wilayah selatan pegunungan di bagian barat dan kearah timur melandai melewati Kota Boyolali hingga bagian timur berupa tanah yang relatif datar berupa sawah. Jenis tanah berpasir mempunyai porositas tinggi sehingga tanah lebih banyak mangandung air tanah yang lebih banyak. Di wilayah selatan-timur banyak terdapat banyak mata air dan sungai yang selalui mengalir airnya. Hasil bumi yang banyak diwilayah ini adalah tanaman sayuran dan tembakau di wilayah selatan-barat (pegunungan) dan padi di wilayah selatan timur. Di wilayah ini juga terdapat banyak tempat usaha/ industri menengah dan besar. Kemudahan akses jalan dan prasarana, ketersediaan air, dan kestabilan lahan merupakan penyebab tumbuhnya tempat usaha/ industri di wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara sebagian besar mempunyai jenis tanah kapur dan atau lempung, sebagian besar tanah berupa lahan kering. Hasil utama wilayah tersebut adalah hasil huta (terutama kayu) dan tanaman palawija.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali

Berikut beberapa keunggulan Kabupaten Boyolali yang dapat memberikan gambaran sekilas Kabupaten Boyolali yang menonjol :

1. Inovasi

   Kabupaten Boyolali meraih penghargaan bergengsi Innovative Government Award (IGA) 2017. Diseleksi dari seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Tanah Air, Kabupaten Boyolali meraih peringkat keenam dari 10 Kabupaten nominator. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Seno yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam agenda Malam Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif/ IGA Tahun 2017 dan Leadership Award di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jaya Jakarta. Inovasi daerah yang dilakukan pemda ini dapat berbentuk, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya. Hal tersebut harus sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat tiga aspek penilaian yang membuat Boyolali meraih skor 2124 ini. Aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat yang didasarkan pada lima kriteria inovasi daerah. Kriteria tersebut yakni pembaharuan, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat dan tidak membebani atau memberikan pembatasan pada masyarakat. Kemudian merupakan urusan pemda dan yang terakhir dapat direplikasi. Pelaksanaan IGA ini sendiri melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjaringan profil inovasi daerah pada bulan Agustus. Kemudian dilanjutkan verifikasi sebulan selanjutnya. Diteruskan dalam proses validasi pada Oktober-November melalui presentasi kepala daerah dan temuan lapangan.

2. Peternakan

Boyolali dikenal sebagai kota susu, karena merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Peternakan sapi perah umumnya berada di daerah selatan dan dataran tinggi yang berudara dingin, karena sapi perah yang dikembangkan saat ini berasal dari wilayah sub-stropis Australia dan Selandia Baru. Selain itu susu dapat di olah menjadi keju oleh pabrik keju asal Boyolali yaitu keju Indrakila, didaerah Kecamatan Ampel juga terdapat sentra industri Abon dan Dendeng.

Sapi asal negara Belanda yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sapi tersebut budidayakan di Indonesia, sejak tahun 1980 Pemerintah Indonesia menyalurkan kredit usaha pertenakan sapi perah (FH). Sejak itulah di Kabupaten Boyolali menjadi produksi susu : 120.000 liter/ hari. Kabupaten Boyolali merupakan penghasil susu untuk tingkat propinsi jawa Tengah kurang lebih 50 % berasal dari Kabupaten Boyolali.

3. Perikanan

Kampung Lele terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit. Kampung lele merupakan usaha kementrian perikanan Indonesia untuk memenuhi target sebagai penghasil perikanan terbesar. Pembudidayaan ikan lele di Kampung Lele dianggap berhasil memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan baik lokal (Boyolali, Solo, dan Yogyakarta) maupun nasional. Bahkan keberhasilan pembudidayaan ikan lele di kampung lele tidak hanya dikenal di skala nasional, melainkan hingga kawasan Asia Tenggara. Desa Tegalrejo dicanangkan menjadi Kampung Lele oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto pada Bulan Juni 2006, kemudian dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Selain sebagai perikanan, Desa Tegalrejo (kampung lele) juga menyediakan jasa wisata yakni berupa wisata melihat langsung proses pembibitan, pemberian makan, hingga memanen ikan lele (bisa juga merasakan memanen ikan lele secara langsung), mengunjungi tempat pembuatan abon, kripik dan rambak yang semuanya dari ikan Lele.

4. Industri mikro kecil menengah

Dukuh Tumang, Desa/ Kecamatan Cepogo merupakan sentra penghasil produk kerajinan tembaga dan kuningan yang sudah terkenal baik di tingkat lokal maupun regional atau mancanegara. Karena, komoditas itu merupakan unggulan dari Kabupaten Boyolali. Jenis yang dihasilkan sangat beragam antara lain, lampu hias, relief, bak mandi, kaligrafi, tempat buah, vas bunga, dan aksesoris lainnya. Produksi ini melalui eksportir sebagimana sudah diekspor ke beberap negara antara lain Belanda, Perancis, Korea, Amerika Serikat, dan Canada. Desa Cepogo merukan jalur wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB), sehingga sering dilewati atau dikunjungi oleh turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, para tamu dari dans atau instansi untuk studi banding, magang atau sekaligus. Selain itu, ada industri yang juga merupakan ikon Boyolali yaitu industri minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan yang berkualitas ekspor. Jenis atsiri yang dikembangkan di wilayah Boyolali, antara lain bunga kenangan, nilam, ilang-ilang, dan daun cengkeh. Desan Bendan Kecamatan Banyudono merupakan penghasil minyak atsiri kenangan, karena di daerah itu banyak ditanam pohohn kenangan, di mana dahulu masyarakat hanya mengenal bungan kenangan sebagai bungan tabur, akan tetapi setelah melalui proses penyulingan dapat dibuat sebagai minyak atsiri yang memiliki nilai produksi jauh lebih tinggi. Minyak atsiri nilam dan ilang-ilang diproduksi di Desa jelok, kecamatan Cepogo dan minyak daun cengkeh banyak diproduksi di Desa Musuk, Kecamatan Musuk. Sebagian besar minyak atsiri dijual melalui eksportir baik dari Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Malang untuk negara tujuan Perancis, Singapura, dan USA.

5. Pariwisata

Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona, sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit serta aktivitas Gunung Merapi yang terlihat dengan jelas aliran lahar dan asapnya. Jalur Solo-Boyolali-Cepogo-Selo-Borobudur (SSB) yang melintasi kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun negara asing dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintasi Kabupaten Boyolali. Kecamatan Selo dikenal sebagai daerah peristirahatan sementara bagi para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu yang mempunyai tempat penjualan cenderamata yang representatif. Kecamatan Cepogo dan Selo merupakan sentra penghasil sayuran hijau yang segar dan murah serta pusat kerajinan tembaga di Boyolali.

Selain panorama Gunung Merapi dan Merbabu, kabupaten Boyolali juga memiliki tempat wisata berupa mata air alami yang mengalir secara terus menerus dan sangat jernih yang dikelola dengan baik menjadi tempat wisata air, kolam renang, kolam pancing dan restoran seperti di Tlatar (sekitar 7 km arah utara kota Boyolali) dan Pengging di Kecamatan Banyudono (sekitar 10 km arah timur kota Boyolali). Kedua tempat wisata air ini memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kalau di Tlatar memiliki keunggulan di mana lokasinya masih sangat luas dan memiliki beberapa pilihan kolam renang berikut tempat mancing dan restoran terapung, maka di Penging memiliki keunggulan di mana dulunya merupakan tempat mandi keluarga Kasunanan Surakarta . Sehingga disekitar Pengging ini masih dapat ditemukan bangunan-bangunan bersejarah yang unik milik Kasunanan Surakarta. Juga terdapat makam salah seorang pujangga Keraton Surakarta yaitu Raden Ngabehi Yosodipuro. dan masih ada lagi waduk sidorejo (WKS) yang tak kalah menarik dengan Waduk Kedung Ombo (WKO) yang pasnya terletak Dusun Sidorjo, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan disini bisa menikmati pemandangan yang luar biasa.

6. Potensi Pertanian/ Pangan

Dengan potensi dan kondisi lahan yang subur maka Boyolali mempunyai banyak keunggulan baik komoditas pertanian dan produk pangan yang spesifik meliputi pertanian pangan, ternak sapi perah, sapi potong, jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah buahan dan ikan khususnya ikan lele dengan julukan kampung lele dan menjadi unggulan Nasional sebagai kawasan minapolitan.

Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu mencapai rata-rata sekitar 35,6 % dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,76 % .

Dengan besarnya potensi dan keunggulan sektor tersebut, maka kabupaten Boyolali telah menempatkan sektor pangan dan pertanian menjadi sektor unggulan dan komitmen ini telah dituangkan dalam rancangan RPJMD 2016 – 2021, khususnya pada misi ke 5 yaitu menjadikan Boyolali sebagai lumbung padi dan lumbung pangan nasional.



Gambar 1.2 Unggulan Kabupaten Boyolali

1.2.3 Aspek Strategis Kabupaten Boyolali

Aspek strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Aspek Geografi dan Demografis

   a. Aspek Geografi

      Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali)-Borobudur (Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Disamping itu, seiring dengan mulai perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Kertosono yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

b. Aspek Demografi

Pada tahun 2019 jumlah penduduk menjadi 930 531 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 459 044 jiwa dan perempuan sebanyak 471 487 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 949 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 0,43%. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan dibawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan daerah adalah PDRB, pada tahun 2016 sampai dengan 2018, PDRB atas dasar konstanta di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan dari 19 trilyun rupiah menjadi 22 trilyun rupiah. Kabupaten Boyolali memiliki PDRB yang cukup besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Boyolali dari Tahun 2019 terlihat fluktuatif dan masih dibawah 0.5% setiap bulannya. Secara umum faktor yang mempengaruhi inflasi salah satunya adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan kenaikan tersebut sangat berpengaruh terhadap sebagian besar harga komoditi barang dan jasa di pasaran. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk menunjang kelestarian dan kesinambungan pembangunan di segala bidang pada suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir (periode 2016-2018) naik 1,04 poin. Hal ini merupakan indikasi positip bahwa kualitas manusia di Boyolali yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang secara ekplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebanyak 117.000 atau sebesar 12,09%, tahun 2017 sebanyak 116.400 atau sebesar 11,96% dan tahun 2018 sebanyak 98.23 atau sebesar 10,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama klurun waktu 3 tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,05%. Penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam suatu daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam upaya kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga. Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, gambaran data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Boyolali. Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi grup kesenian, Pemerintah Kabupaten Boyolali menyediakan tempat sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru/murid.

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pelayanan di RSUD Boyolali juga telah memenuhi standar akreditasi 16 (enam belas) Pokja.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Panjang jalan, Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk, Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Dan indikator pembangunan urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, dan Bangunan ber-IMB.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten. Dalam rangka peningkatan perumahan layak huni bagi masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana guna pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan secara terus menerus.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pemahaman Kewaspadaan Nasional, Pemahaman Wawasan Politik, Bela Negara, Pemerintahan Umum, Pengawasan Orang Asing, Konflik Sosial, Deteksi Dini, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Pangan dan Kerukunan Umat Beragama.

6) Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

b. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Perkembangan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari indikator rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

3) Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

4) Pertanahan

Perkembangan data pertanahan dapat dilihat pada indikator Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan dan Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

5) Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, dan tersedianya ruang terbuka hijau. Terciptanya lingkungan bersih tersebut telah dibuktikan dengan adanya perolehan adipura 13 kali berturut-turut. Sedangkan upaya untuk peningkatan kepedulian dunia industri, Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi terhadap program yang diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah dilakukan melalui strategi pendampingan secara konseptual.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator rata–rata jumlah jiwa per keluarga dan cakupan peserta KB aktif.

9) Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

10) Komunikasi dan Informatika

Pengkajian dan penelitian bidang informasi, penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bisa memberikan informasi kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat.

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan perkoperasian Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara umum meningkat baik dari kondisi koperasi aktif, jumlah koperasi jumlah anggotanya maupun volume usahanya. Sehingga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

12) Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Nilai investasi Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan, meskipun penambahan jumlah investor setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Hal–hal yang mempengaruhi investasi adalah pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

14) Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terpublikasinya data-data di Kabupaten Boyolali dalam bentuk buku.

15) Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kegiatan bidang persandian yang telah dilaksanakan di lingkungan Setda Kabupaten Boyolali.

16) Kebudayaan

Beberapa indikator pengelolaan potensi budaya di Kabupaten Boyolali adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

17) Perpustakaan

Guna meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar di Kabupaten Boyolali, Pemerintah senantiasa menambah koleksi bahan pustaka, yang meliputi buku fiksi, non fiksi, majhalah dan referensi. Disamping penambahan koleksi tersebut, peningkatan koleksi buku elektronik atau dikenal dengan E-book juga terus ditambah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau membaca buku secara online. Pembenahan dan peningkatan fasilitas di perpustakaan daerah juga ditingkatkan sehingga kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pun semakin meningkat.

18) Kearsipan

Indikator pembangunan urusan kearsipan adalah Cakupan pengelolaan arsip secara baku, dan Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baik.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

indikator pembangunan urusan peternakan dan perikanan adalah Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, dan Produksi perikanan kelompok nelayan.

2) Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.

3) Pertanian

Indikator kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Boyolali adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Cakupan bina kelompok petani.

Kabupaten Boyolali merupakan penghasil daging sapi terbesar tingkat Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 13% sampai dengan 17%, dari data di atas kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir produksi daging mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya harga sapi dan persaingan dengan daging impor. Produksi susu Kabupaten Boyolali rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 50.184 ribu liter per tahun merupakan produsen susu terbesar tingkat Jawa Tengah, dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap produksi Jawa Tengah. Permasalahan yang masih dijumpai adalah rendahnya produktifitas ternak dan kualitas susu.

4) Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Boyolali sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui kegiatan penanaman/pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan pembangunan bangunan sipil teknis, konservasi tanah dan air (sumur resapan, *gully plug* dan dam penahan) baik secara sipil teknis, vegetatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Upaya pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi sebagai sumber energi alternatif di Kabupaten Boyolali, yang dapat dikembangkan antara lain pada potensi Sumber Energi Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Ratio Elektrifikasi.

6) Perdagangan

Kecenderungan ekspor bersih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

7) Perindustrian

Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga relatif kecil.

8) Transmigrasi

Penempatan transmigrasi selama beberapa tahun ini mengalami penurunan.

d. Fungsi Penunjang

1) Perencanaan

Keberhasilan dapat dilihat dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali

2) Keuangan

Administrasi Keuangan Kabupaten Boyolali telah mendapat Opini WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun kedelapan memperoleh WTP dari BPK. Opini WTP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Boyolali telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Hal ini merupakan wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada seluruh kementerian, lembaga negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang laporan keuangannya sudah diperiksa BPK dan mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah, inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier PNS melalui promosi terbuka dan *assesment center* pegawai.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan *road map*. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah

disusun disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2014-2019. Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

4) Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Perlunya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

e. Fungsi Lainnya

1) Kesekretariatan DPRD

Untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat, maka Kesekretariatan DPRD sangat berperan dalam terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.

2) Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak–hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat perlu adanya kebijakan.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan mudah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan sistem perijinan secara online, sehingga untuk mendapatkan perijinan dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah.

3) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap pelaksanaan pemerintahan baik secara keuangan maupun secara fisik. Penghapusan terhadap Perjalanan Dinas bagi Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan ke daerah menjadi terobosan baru guna menghilangkan beban pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Pelaporan Harta Kekayaan ASN maupun Pejabat Negara melalui Laporan LHKASN dan LHKPN telah terlaksana 100%. Hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara pelarangan terhadap segala bentuk penerimaan gratifikasi dan pembentukan Tim Saber pungli guna menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Gelar Pengawasan Daerah dilaksanakan satu tahun sekali, dimana dalam kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada Pegawai dan Perangkat Daerah yang berprestasi.

4) Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua Perangkat Daerah meliputi kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daerah.

4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Boyolali tingkat pendapatan masyarakat tercermin dari PDRB per kapita.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Boyolali, fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya:

1) Perhubungan

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik.

2) Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang mendukung pariwisata di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun selalu meningkat, diantaranya dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha pariwisata yaitu restoran, rumah makan dan hotel.

3) Jaringan Listrik

Untuk itu telah diupayakan agar setiap desa terdapat jaringan listrik yang dapat mensuplai kepada setiap rumah tangga, namun belum semua rumah tangga di setiap desa dapat teraliri listrik.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan rasio angka ketergantungan yang mempunyai makna penduduk usia kerja masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyususunan LKjIP

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Penilaian Kinerja

3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

4.2. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

A. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021.

C. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

D. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

E. Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

F. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

G. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah terwujudnya *"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"*. Makna pernyataan visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 dijabarkan berikut ini guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1) Pro investasi

Meneruskan peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi, Visi pro investasi diupayakan melalui: (i). Pengembangan sistem *"one stop service",* (ii). Membuka pusat informasi investasi, (iii). Penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta humanis, (iv). peningkatan sarana prasarana dan aparat pelaksana yang memadai. Indikator yang digunakan mengukur antara lain: (i). Bertambahnya nilai investasi, (ii). Jumlah Investor, dan (iii). Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan.

2) Maju

Mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Maju juga diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerja sama antar daerah. Indikator yang digunakan mengukur antara lain, (i). Prosentase jaringan jalan dan drainase dalam kondisi baik, (ii). Panjang pembangunan jalan baru (iii). Rasio jaringan irigasi (iv). Kecukupan air bersih, (v). Kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas dan (vi). Bertambahnya rasio panjang jalan per jumlah penduduk.

3) Sejahtera

direpresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan mapan. Ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata. Nyaman, berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan, tertib bermasyakat pendukung terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Mapan, adalah tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator kuantitatif dari kesejahteraan antara lain: (i). Tingkat pertumbuhan ekonomi, (ii). Tingkat pendapatan per kapita (iii) Penurunan tingkat pengangguran, (iv). Menurunnya jumlah penduduk miskin, (v). Tingkat Indeks Pembangunan Manusia, (vi). Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, (vii). Prestasi pemuda dan olah raga, (viii). Meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan dan menurunnya ketimpangan gender, (ix). Penurunan jumlah kriminalitas.

Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan upaya-upaya dengan menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut:

1) Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi

Boyolali pro Investasi ditandai dengan dimulainya konsep "*business friendly*" sebagai bentuk pemerintahan yang pro investasi dilakukan dengan menata iklim investasi yang kondusif, penataan regulasi, konsep "one stop service" dan membuka pusat informasi investasi "*information center*".

Tahapan berikutnya adalah mendorong konsep perusahaan yang ramah lingkungan *(green company)* selaras tuntutan globalisasi, dimana adanya perubahan sosial, transkulturasi dan perkembangan teknologi serta komunikasi mendorong manajemen perusahaan secara sadar meletakkan pertimbangan akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan *'stakeholders'* dalam setiap pengambilan keputusan bisnisnya.

Konsep perusahaan yang ramah lingkungan selaras dengan wujud nyata tanggung jawab dan upaya memberikan kontribusi positif kepada perusahaan itu sendiri, karyawan dan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. Konsep dasarnya terletak pada Strategi bisnis perusahaan *(green strategy)*, Proses bisnis yang aman, nyaman dan bersih *(green process)*, Pengembangan produk yang ramah lingkungan *(green product)* serta Pengembangan kompetensi dan perlindungan kepada sumber daya manusia *(green employee).*

2) Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan

Konsep infrastruktur yang telah ada akan dikembangkan menjadi pembangunan infratrukktur dasar, penunjang dan sosial guna menunjang ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas perekonomian, transportasi dan sarana publik.

Infrastruktur dasar terdiri dari air bersih/air minum, jaringan-irigasi (tanggul, bendungan, saluran air limbah, saluran air hujan), bendungan, embung, jalan dan jembatan, pasar, pembuangan sampah, pengolahan limbah, persampahan, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur Penunjang meliputi sarana publik, pertamanan dan landmark, kawasan, penerangan jalan umum, energi alternatif, telekomunikasi, sarana penunjang transportasi (*traffic managemen system*).

Adapun infrastruktur sosial meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur sosial penunjang program program pemerintah pusat, propinsi dan kepedulian masyarakat terkait pengasuhan dan pendampingan yatim/piatu, fakir/miskin, anak terlantar, janda/duda tua sebatang kara, tuna wisma, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Bagian ini termasuk didalamnya pengembangan pondok pesantren, panti asuhan/wreda, program pengembangan kesehatan pendidikan dan RS, rawat inap, sanggar budaya/baca masyarakat, taman pendidikan Al Qur'an (TPA), prasarana olah raga dan kegiatan kepemudaan, ketrampilan serta hiburan masyarakat.

3) Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera

Membangun Boyolali yang bersih dan berintegritas baik dalam tatakelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun dalam pengertian menumbuhkan budaya hidup bersih, pengelolaan tata ruang yang baik bagi kelestarian lingkungan hidup, dengan mempertahankan slogan "Boyolali Tersenyum", dalam arti tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat perlu terus digelorakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaannya tentunya diikuti dengan sikap integritas atau berintegritas, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pelayanan bagi dunia usaha dan investasi, dalam rangka menuju tata keloa pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan sistem yang bebas dari korupsi.

Harapan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat Boyolali, sehingga Boyolali selalu nyaman untuk masyarakat. Hal ini tentunya dibangun dengan mendorong terciptanya rasa aman, pemeliharaan kesehatan, adanya kesempatan pendidikan, kecukupan sandang, pangan, papan, serta adanya kesempatan kerja yang luas. Kesejahteraan ini berbasis keluarga dan lingkungan terkecil masyarakat. Boyolali sebagai bagian dari negara, tentunya turut berperan mengupayakan ketersediaan sarana dan sistem pemeliharaan fakir, miskin anak terlantar sebagaimana amanah konstitusi.

4) Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing

Jaminan kesehatan dan pendidikan kepada warga negara, adalah salah satu peran yang sedang dikembangkan pemerintah pusat melalui program Indonesia sehat dan Indonesia pintar. Salah satu arah program ini menuju masyarakat produktif, kreatif dan berdaya saing. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, pelatihan terus dilanjutkan dengan prinsip memberikan akses seluas-luasnya bagi setiap masyarakan, tanpa terkecuali.

5) Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional

Boyolali lumbung padi, Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, berdaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk menyejahterakan masyarakat yang berperadaban.

6) Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan

Mempertahankan tradisi Boyolali sebagai kota susu, penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas. Kesejahteraan petani susu, peternak sapi, perikanan darat termasuk sektor peternakan lainnya adalah yang yang utama. Hal inilah yang seharusnya menjadi pijakan pembangunan sektor ini. Aplikasi *good farming practices,* fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan, transparansi KUD terkait, penanggulangan gangguan reproduksi dan pelayanan kesehatan hewan, revitasilasi pusat pembibitan serta peningkatan personil dan kemampuan petugas.

7) Boyolali, lebih maju dan berteknologi

Pengembangan *City Brand* juga menjadi prioritas penerapan tehnologi melalui penciptaan indentitas, symbol, logo, atau merk yang melekat dengan Boyolali. Melalui pembangunan Brand (*brand building*) sesuai dengan potensi maupun *positioning* yang menjadi target daerah dengan harapan dikenal luas (*high awareness*), dalam persepsi yang baik, memiliki kesesuaian untuk tujuan-tujuan khusus (*specific purposes*), sebagai promosi tempat investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan (*event*s) yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan berteknologi adalah bagian dari penguatan dan reformasi pemerintahan daerah berikut birokrasinya. Salah satunya pemerintahan elektronik atau *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Model penyampaian *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G).

Visi dan misi di atas menjelaskan keterkaitan antar elemen yang menjadi panduan arah pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Boyolali : "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera", dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai pemandu arah kebijakan. Fokus ketujuh misi tersebut memberi petunjuk agenda utama arah pembangunan 2016-2021 yaitu:

Agenda *pertama,* pembangunan tata kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan akuntabel. Agenda *kedua*, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Agenda *ketiga,* pembangunan sosial budaya masyarakat yang maju dan sejahtera. Dalam rangka mencapai visi masyarakat maju dan lebih sejahtera, dalam 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Boyolali mencanangkan program unggulan pembangunan, yakni:

a. Boyolali Kabupaten Air, melalui program pembangunan embung untuk memujudkan Boyolali sebagai kabupaten yang mewariskan mata air kepada generasi yang akan datang;

b. Boyolali Kabupaten Cerdas *(Smart City)*, melalui upaya antara lain:

   1) Pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

   2) Pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;

   3) Pengembangan kewirausahaan, pengembangan usaha secara *online*;

   4) Pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan;

   5) Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat;

   6) Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan;

c. Boyolali Kabupaten Hijau, yaitu Kabupaten yang berketahanan menghadapi perubahan iklim dan antisipasi resiko bencana, serta pengembangan potensi ekonomi hijau, melalui upaya antara lain:

   1) Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan yaitu perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik termasuk pengembangan agrowisata dan agropolitan.

   2) Ruang terbuka hijau yang ideal, yang berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan dan pemeliharaan lahan taman, hutan kota, koridor hijau dan lain-lain;

   3) Konsumsi energi yang efisien yaitu pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan sejenisnya.

   4) Pengelolaan air yaitu penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas, termasuk air baku penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan air yang telah digunakan, serta penjagaan kualitas air yang tersimpan di dalam tanah;

   5) Pengelolaan limbah yaitu pengelolaan sampah yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan;

6) Bangunan hemat energi yaitu struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubahan untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan;

7) Sistem transportasi berkelanjutan yaitu transportasi yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;

8) Pelibatan aktif masyarakat sebagai "komunitas hijau" yaitu strategi pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi masyarakat dalam program-program Kabupaten Hijau.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) misi. Perumusan tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis isu strategis agar dapat menjawab permasalahan pembangunan saat ini dengan kondisi yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Sedangkan kondisi yang tercipta ketika tujuan ini tercapai disebut sebagai sasaran. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi.

a. Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah nilai investasi.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan meningkatkan nilai investasi yaitu:

a.1. Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif;

a.2. Meningkatnya nilai investasi;

b. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan meningkatkan daya saing perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan sebagai berikut :

b.1. Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan;

b.2. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (*green economy*);

Misi 2 : Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.

c. Tujuan 3 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah yaitu :

c.1. Terpenuhinya infrastruktur dasar;

c.2. Terpenuhinya infrastruktur penunjang;

c.3. Terpenuhinya infrastruktur sosial.

Misi 3 : Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.

d. Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN), responsif dan akuntabel.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel yaitu:

d.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;

d.2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;

e. Tujuan 5 : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial yaitu:

e.1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial;

Misi 4 : Boyolali sehat, produktif, berdaya saing.

f. Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah yaitu:

f.1. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat;

f.2. Meningkatnya derajat kesehatan;

f.3. Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk;

f.4. Meningkatnya daya saing industri; dan

f.5. Meningkatnya daya saing perdagangan.

Misi 5 : Boyolali Lumbung Padi dan Pangan Nasional.

g. Tujuan 7 : Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional.

Sasaran yang diwujudkan dari tujuan Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional yaitu:

g.1. Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional;

Misi 6 : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak.

h. Tujuan 8 : Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan dan perikanan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan dan perikanan yaitu:

h.1. Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak dan perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional.

Misi 7 : Boyolali Lebih maju dan berteknologi

i. Tujuan 9 : Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas *(Smart City).*

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas *(Smart City)* yaitu:

i.1. Meningkatnya layanan pemerintah, yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi;

i.2. Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali.

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen RPJMD merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Boyolali 2016-2021.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 disusun berdasar Rencana Strategis (RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dan Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Penyajian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dalam bentuk tabel dengan urutan sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani oleh Bupati Boyolali pada Bulan Januari 2019 dan telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi perjanjian kinerja tersebut telah diganti dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 selengkapnya terlampir (Lampiran III).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja pemerintah sekaligus dapat pula menunjukkan tingkat kinerja pemerintah. Bagian awal dari akuntabilitas kinerja adalah pengkuran kinerja yang merupakan dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi organisasi.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2019, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (D)

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator kinerja untuk mendukung 19 (sembilan belas) sasaran strategik. Berikut evaluasi dan analisis capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2019 tiap indikator kinerja sebagai berikut:

1. SASARAN 1 : Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	Nilai	82,10	82,10	100,05	82,18	100,01	82,19	100,01	82,19	82,24	100,06	A	DPMPTSP
Capaian				**100,05**		**100,01**		**100,01**			**100,06**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100,06% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 (satu) per indikator:

1) Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan.

a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan adanya penerapan aplikasi perizinan online, Aplikasi SMS Gateway, Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi, Aplikasi E Dokumen, aplikasi Touch Screen, Penerapan GIS Survey, Barcode serta adanya Aplikasi TV Informasi Layanan Perizinan sehingga dengan adanya tambahan aplikasi tersebut semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dampak dengan adanya aplikasi tersebut yaitu :

- Dengan adanya Aplikasi perizinan online akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan usaha, karena berkas pendaftaran dapat di download di website sekaligus bisa langsung melakukan pendaftaran secara online;
- Dengan adanya Aplikasi SMS Gateway maka para pemohon perizinan akan memperoleh informasi perizinan yg mereka daftarkan, jika SK ijin telah terbit maka akan ada informasi lewat SMS;

- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi akan dapat diperoleh potensi investasi yang ada di Kabupaten Boyolali;
- Dengan adanya Aplikasi E Dokumen maka semua dokumen perizinan DPMPTSP akan terdokumentasi dengan baik;
- Dengan adanya aplikasi *touch screen* / TV Informasi Layanan Perizinan yang ada di DPMPTSP maka akan memudahkan para pemohon perizinan yang ada di DPMPTSP untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perizinan;
- Dengan adanya GIS Survey (*Geografi Information System*) maka akan dapat diketahui titik –titik usaha yang dilakukan Cek Lokasi;
- Dengan adanya Barcode maka tidak akan terjadi pemalsuan SK Perijinan.

Dengan adanya tambahan aplikasi tersebut maka dapat meningkatkan mutu pelayanan DPMPTSP.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:
   - Menggunakan aplikasi perizinan online, Aplikasi SMS Gateway, Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi, Aplikasi E Dokumen, aplikasi Touch Screen/ TV Informasi Layanan Perizinan, Penerapan GIS Survey Dan Barcode sehingga dengan adanya tambahan aplikasi tersebut semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,02% dari anggaran sebesar Rp. 287.200.000,00 digunakan sebesar Rp. 281.405.006,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan Pengembangan aplikasi yaitu integrasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dengan OSS (Online Single Submision) lewat jembatan Mantra, Pengembangan website DPMPTSP dan SIPP rekomendasi, serta Pembelian belanja modal Server DPMPTSP, dan Sosialisasi perizinan lewat radio. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2. SASARAN 2 : Meningkatnya nilai investasi

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Nilai investasi	Rp. (Juta)	1.475.475	1.827.844	158,75	1.260.731	104,28	1.534.761	120,34	1.340.857,30	1.602.525,46	119,51	A	DPMPTSP
2. Jumlah investor	Investor	1.043	568	63,11	357	38,51	302	31,62	983	2.223	226,14	A	DPMPTSP
Capaian				**110,93**		**71,40**		**75,98**			**172,83**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 172,83% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 (dua) per indikator:

1) Nilai investasi
2) Jumlah investor

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas :

a. Keberhasilan capaian kedua indikator di atas dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor diatas berpengaruh terhadap faktor peningkatan nilai realisasi investasi.Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi diantaranya dengan menyelenggarakan pameran investasi, mengembangkan potensi unggulan daerah,melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

   - Menggunakan aplikasi perizinan online, Aplikasi SMS Gateway, Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi, Aplikasi E Dokumen, aplikasi Touch Screen/ TV Informasi Layanan Perizinan, Penerapan GIS Survey Dan Barcode;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 17,30% dari anggaran sebesar Rp. 141.596.250,00 digunakan sebesar Rp. 117.083.564,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:

   - Pengembangan potensi unggulan daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pengadaan Buku profil Investasi, Buku potensi Peluang Investasi merupakan media paling efektif untuk memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan potensi Daerah dan Produk unggulan kepada Investor/calon Investor dan konsumen/buyer sekaligus tempat dimana para produsen dan konsumen dapat langsung berinteraksi, berkompetensi dan berinovasi untuk mendapatkan ide-ide baru sesuai dengan Permintaan pasar, dan Pembuatan Buku merupakan sarana yang tepat untuk memperkenalkan, mendorong dan memajukan perekonomian Kabupaten Boyolali, sekaligus menjadi muara kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan peluang investasi dan produk unggulan Kabupaten Boyolali;
   - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Peningkatan kegiatan pemantauan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Memberikan bimbingan penerapan aplikasi dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Memberikan Informasi/ sosialisasi kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan perkembangannya (OSS) Versi 1.1;

- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan bentuk kegiatan adalah dengan:
  - ✓ Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya;
  - ✓ Pembinaan melalui:
    - Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
    - Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
    - Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah /hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
  - ✓ Pengawasan melalui:
    - Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
    - Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
    - Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal
- Penyelenggaraan pameran investasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Mengikuti kegiatan pameran investasi yaitu CJIBF (Central Java Investment Busines Forum) di Jakarta dan SIF (Solo Invesment Forum), diadakannya Pameran bermanfaat untuk:
  - ✓ Menjaring investor untuk masuk ke Kabupaten Boyolali;
  - ✓ Menjaring bisnis semakin berkembang;
  - ✓ Meningkatkan pangsa pasar di Dalam Negeri;
  - ✓ Meningkatkan eksistensi dan kemampuan UKM dalam menghadapi persaingan;
  - ✓ Kegiatan ekonomi dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja;
  - ✓ Mempromosikan Potensi dan Peluang Investasi juga produk unggulan Kabupaten Boyolali kepada para Investor dan pembeli local dan mancanegara.

  Sehingga kegiatan ini dapat untuk menambah jumlah investasi dan investor yang masuk ke Boyolali

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Sedangkan inovasi kinerja atau prestasi di bidang investasi yang telah dilakukan dibindang investasi adalah :

a. Penataan Kelembagaan PTSP pada BPMP2T dimulai dari Perda Nomor 16 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
b. Penetapan Tarif Rp.0,- atau “GRATIS” kecuali IMB;
c. Menata kembali kebijakan investasi;
d. Perda 3/2014 Penanaman Modal dan Perbup RUPM;
e. Perda 13/ 2018 tentang IMB;

f. Perda 6/2011 Tanggung Jawab Sosial dan Ling Perusahaan / CSR;

g. Instruksi Bupati untuk mengevaluasi peraturan yang menghambat Investasi (evaluasi RTRW, penyusunan RDTR dll);

h. Sinergitas dengan Badan Pertanahan, hub yang sinergis dengan BPN terkait informasi, layanan perijinan dan investasi;

i. Insentif Infrastruktur, daerah atau kawasan yang digunakan untuk investasi diberikan insentif berupa pembangunan/penyempurnaan infratruktur dasar yang memadai;

j. Peningkatan Kualitas Layanan PTSP Penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan yang Smart melalui inovasi:

- Pengembangan aplikasi perizinan yang meliputi peta potensi, toucscreen informasi, sms gateway, e doc, SIPP (Sistem Informasi Perizinan Online), GIS Survey, Barcode, Sistem informasi moni toring berbasis tracking system;
- SIPP berbasis Tracking System sebagai sarana monitoring perizinan secara online dan real time dari proses pendaftaran sampai dengan terbitnya produk perizinan yang dapat dimonitor oleh pemohon sampai dimana proses ijin yang diajukan melalui website DPMPTSP yaitu www.dpmptsp.boyolali.go.id melalui fitur cek status proses;
- Menyatukan seluruh prosedur perizinan dan berbagai rekomendasi teknis dan persyaratannya dari hulu sampai hilir melalui DPMPTSP dalam sebuah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang semakin representatif dengan mengakomodasikan kepentingan berkebutuhan khusus dan prespektif gender seperti toilet khusus, walker, kursi roda, ruang laktasi;
- Penerapan SOP yang lebih sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
- Penetapan Wilayah Bebas Korupsi;
- Peningkatan kapasitas SDM yang semakin efektif dan efisien melalui pengiriman diklat PTSP, pelatihan kantor sendiri (PKS), workshop serta evaluasi / revisi terhadap keputusan Kepala DPMPTSP no 900/ 324 tahun 2017 Tentang kode etik dan aturan perilaku DPMPTSP , SK Kepala DPMPTSP no 800/106 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (reward) dan Hukuman (punishment) bagi PNS dan non PNS pada DPMPTSP Kab Boyolali;
- Layanan aduan masyarakat yang lebih baik melalui E-Lapor dengan mengintegrasikan website DPMPTSP sehingga memudahkan penanganan pengaduan, Perbaikan standar dan prosedur pengaduan, Evaluasi terhadap sumber-sumber aduan dari pemohon, jenis keluhan dan penyelesaian aduan;
- Penyusunan SKM dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan SKM melalui teknologi aplikasi layar touch screen sehingga upaya membangun sistem yang adil, transparan dan akuntabel sehingga nilai SKM semakin meningkat sesuai baku mutu pelayanan (9 unsur SKM) dengan memperluas cakupan responden yang sudah selesai proses perizinannya maupun juga termasuk pemohon yang tidak selesai perizinannya.

k. Kabupaten Boyolali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memperoleh:

- Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Unit kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2019;
- Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik Tahun 2019;
- Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

3. SASARAN 3 : Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan.

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	m2	1.437.322	1.289.322	100	1.314.322	99,24	1.395.834	103,07	1.384.322	1.417.734	102,41	A	DLH
2 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	3,21	2,88	100	2,93	99,20	3,11	102,96	3,09	3,15	102,03	A	DLH
3 Sumur resapan dan sejenisnya	unit	9.240	1540	100	1.056	68,57	912	59,22	1.540	1.615	104,87	A	DLH
4 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	desa/ kel	12	2	100	2	100	2	100,00	2	3	150	A	DLH
Capaian				**100**		**91,75**		**91,31**			**114,83**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 114,83% (kategori sangat baik) terdiri dari 4 (empat) indikator kategori sangat baik (100%. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 (tiga) per indikator:

1) Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan.

2) Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan.

   Indikator ini merupakan perhitungan secara prosentase dari indikator tersebut nomer 1 (satu) diatas dengan mendasarkan pada luasan RTH perkotaan apabila dibanding dengan luasan RTH yang seharusnya tersedia secara ideal, jadi secara substansif masih sama dengan item tersebut nomor satu.

   Perlu disampaikan bahwa Boyolali telah menerima Piala Adipura 13 (tiga belas) kali berturut-turut.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Keberhasilan capaian kedua indikator ini disebabkan karena adanya penambahan ruang terbuka selain yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu adanya penambahan RTH public sebesar 21.900 m2 yang terdiri dari beberapa kegiatan/pekerjaan, antara lain Taman eks TK Al Hasbi, RTH Sawit, RTH Ngemplak, Taman Umbul Leses, taman pertigaan bandara Adisumarmo, Simpang Selo dan Simpang Pengging. Dan apabila diakumulasi dengan luas RTH tahun sebelumnya (1.395.834 m2), maka luas RTH Publik sampai dengan tahun 2019 ini adalah 1.417.734 m2.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain adalah:

   - Kesulitan mencari lahan milik pemkab yang memadai sebagai lokasi perluasan RTH untuk pembuatan taman/RTH;
   - Adanya pekerjaan fisik yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

   - Selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait terhadap status lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembuatan taman/ RTH, baik instansi tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa atau bila memungkinkan adanya pembelin lahan baru oleh pemkab untuk menambah luasan RTH;
   - Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar 15,87% dari anggaran sebesar Rp. 15.210.191.000,00 digunakan sebesar Rp. 12.796.631.995,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Survey lokasi calon pembangunan taman/RTH, Koordnasi dengan dinas/ instansi terkait untuk pelaksanaan pembangunan taman/ RTH, Penyusunan DED Kegiatan, Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Kegiatan, Pelaksanaan Pemeliharaan Taman di 4 (empat) lokasi taman (Rumah Dinas, Kantor Bupati, Pandan Alas dan Simpang Lima), Pemeliharaan Hewan di Lingkungan Hutan Kota dan Rumah Dinas, Taman eks TK Al Hasbi, RTH Sawit, RTH Ngemplak, Taman Umbul Leses, taman pertigaan bandara Adisumarmo, Simpang Selo dan Simpang Pengging, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

3) Sumur resapan dan sejenisnya.

   a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan:

      - Sumur resapan dan Biopori merupakan belanja modal dan belanja hibah, sehingga cakupan penerima bantuan sumur resapan dan biopori menjadi lebih luas dan lebih banyak barangnya;
      - Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat penerima bantuan, sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancer

Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan namun masih perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan penerima bantuan untuk lebih merawat bangunan sumur resapan/ bipori agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu dapat menyimpan air hujan ke dalam tanah serta menghasilkan pupuk organik.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga perencanaan kegiatan menjadi lebih baik serta dengan mengalokasi anggaran baik berupa belanja modal/ aset maupun belanja hibah barang yang dapat diakses oleh kelompok/ masyarakat.

Pembangunan sumur resapan dan pembuatan lubang resapan biopori ini bertujuan untuk meningkatkan volume resapan air ke dalam tanah, mengurangi laju limpasan permukaan yang seringkali menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas yang subur, memperpanjang/ memperlama siklus hidrologi, yang bisa berdampak meminimalisasi terjadinya luapan air/ banjir. Semakin banyak sumur resapan dan lubang bipori yang dibuat, semakin banyak pula air hujan yang meresap ke dalam tanah dan semakin baik pula pengelolaan daerah resapan air.

Sebagai ilustrasi, satu buah sumur resapan dengan kedalamam 5 meter lebar 1,5 meter dapat meresapkan air hujan sebesar 0,9675 m3 per hari dengan asumsi durasi hujan efektif 1,5 jam dan koefisien permeabilitas tanah 0,48/hari. Sehingga apabila dibuat 16 unit sumur resapan, maka volume air yang bisa diresapkan selama satu tahun dengan hari hujan (deras) 180 hari sebanyak: 0,9675 m3 x 16 x 180 = 2.786,4 m3.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,79% dari anggaran Rp. 253.500.000,00 digunakan sebesar Rp. 246.425.392,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH dengan kegiatan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, dan kegiatan Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konsevasi SDA dan LH. Dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah survey calon lokasi Penempatan Sumur Resapan, Penyusunan DED Pembangunan Sumur Resapan, Proses pengadaan barang dan jasa untuk pembuatan sumur resapan, Monitoring pembangunan sumur resapan dan untuk bantuan alat pembuat lubang resapan biopori dengan bentuk kegiatan antara lain Penentuan spek dan harga alat pembuat lubang resapan biopori, Proses pengadaan barang sebagai pelaksana pengadaan alat pembuat biopori, Pengadaan biopori, Distribusi peralatan pembuatan LBR, monitoring pasca distribusi peralatan pembuatan LBR.

   Kegiatan secara umum berjalan dengan baik, namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan sumur resapan dan Lubang Resapan Biopori yang telah dibuat sehingga diketahui kondisi terkini dan pemanfaatannya apakah masih terawatt dan apakah masih dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak sekedar bisa membuat saja, namun perlu juga diperhatikan aspek pemeliharaannya yang masih sering dilupakan.

4) Cakupan pengelolaan sampah mandiri

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah serta perubahan paradigma pengelolaan sampah yang semula sampah dipandang sebelah mata sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi barang yang dapat dimanfaatkan bahkan dapat bernilai ekonomis, terutama sampah non organik, selain itu adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) sub bidang Lingkungan Hidup yang dapat menambah jumlah bangunan bank sampahyang dibangun.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain adalah:

   - Volume sampah semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dan aktifitas manusia;
   - Keterbatasan kemampuan TPA, baik luasan, usia TPA yang semakin pendek maupun kapasitas sampah yang dapat diolah di TPA;
   - Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan :

   - Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri kepada masyarakat, sosialisasi pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya;
   - Menambah lahan untuk perluasan TPA yang ada seluas 3.112 m2, serta meningkatkan pengolahan sampah di TPA sehingga dapat memperpanjang umur TPA itu sendiri.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar 3,24% dari anggaran sebesar Rp. 1.224.521.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.184.811.754,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Persiapan Perencanaan Pembangunan Bank Sampah, Penyusunan DED Bangunan Bank Sampah, Survey lokasi dan penetapan lokasi pembangunan Bank Sampah, proses pengadaan Pembangunan Bank Sampah dan pelaksanaan pekerjaan fisik serta pengawasannya, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi, koordinasi dengan Satker terkait.

4. SASARAN 4 : Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy*)

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	B	DLH
2 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	%	20	0	0	3	30	14	116,67	15	15	100	B	DLH
Capaian				**50**		**65**		**108,33**			**100**	**B**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 (empat) per indikator:

1) Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait permasalahan lingkungan yang terjadi.

Secara umum berjalan lancar tidak ada permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target karena dukungan pihak terkait.

Tindak lanjut aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian/penanganan sengketa lingkungan yang terjadi, apabila belum dapat diselesaikan ditingkat yang lebih rendah secara bertingkat, dari lingkup lingkungan, desa dan kecamatan, sehingga permasalahan tidak semakin berkembang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak pihak yang bermasalah.

Data perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-2019 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Grafik perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 17,59% dari anggaran Rp. 75.000.000,00 digunakan Rp. 61.808.931,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH dan kegiatan Pengawasan pelaksanaan Kebijakan di bidang lingkungan hidup Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Memberikan pelayanan berupa fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan kepada masyarakat sesuai mekanisme/ tahapan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki dan Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kasus lingkungan yang telah ditangani sesuai hasil penyelesaian dan pengawasan ketaatan usaha dan/ kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam penanganan kasus yang terjadi sesuai dengan jenis aduan.

   Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik, namun tentu saja mungkin belum dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang merasa kalah. Oleh karena itu kedepan perlu benar-benar diupayakan dalam menangani permasalahan dapat member rasa keadilan dan kepuasan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, mengatasi masalah tanpa masalah baru.

2) Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan.

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berizin serta koordinasi dengan dinas/ instansi terkait, terutama instansi vertikal (DLHK Provinsi) sehingga dapat meniingkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.

   Hambatan/permasalahan yang ada yaitu masih banyak pelaku usaha/ kegiatan yag tidak memperhatikan kewajibannya yang sudah tertuang dalam dokumen lingkungan yang dimiliki, baik dokumen UKL/UPL atupun Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang mencakup didalamnya pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dan pemantauan LH.

   Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

   - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait dalam merumuskan kriteria usaha yang ramah lingkungan, sehingga ke depan dapat dilakukan penilaian secara tepat sesuai peraturan yang berlaku;
   - Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, pelaku usaha, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

   - Bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, maka para pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tri wulan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ke DLH sebagai bahan evaluasi pembinaan dan pengawasan Lingkungan Hidup;
   - Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 10,81% dari anggaran Rp. 65.000.000,00 digunakan Rp. 57.970.870,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH dan kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin, rapat koordinasi yang diikuti oleh pelaku usaha, dinas instansi terkait, termasuk DLHK Provinsi serta Laboratorium yang terakreditasi yang merupakan bagian sangat penting dalam membantu pelaku usaha/ kegiatan dalam melakukan uji kualitas lingkungan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5. SASARAN 5 : Terpenuhinya infrastruktur dasar

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75,62	71,24	100	73	101,26	73,06	100,14	73,84	74	100,22	A	DPUPR
2 Panjang pembangunan jalan baru	m	22.500	-	-	5.650	113,00	3.225	53,75	5.000	2.744	54,88	D	DPUPR
3 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	90,98	80,98	100	82,36	99,25	84,73	99,71	86,98	88,31	101,53	A	DPUPR
4 Drainase dalam kondisi baik	m	8.240	5.740	100	9.500	152,24	6.622	98,25	7.240	3.315	45,79	D	DPUPR
5 Prosentase ketersediannya air baku	%	10,75	3,28	100	6,88	143,99	6,27	100,00	7,76	6,70	86,29	B	DPUPR
6 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	%	92	79	100	84,66	103,24	94,00	111,90	87	89,90	103,33	A	DPUPR
7 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	14,29	12,97	100	13,76	103,60	15,19	111,77	13,90	14,50	104,33	A	DPUPR
8 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	81,73	71,82	100	74,77	101,63	75,28	100,00	76,98	77,90	101,19	A	DPUPR
Capaian				**100**		**114,78**		**96,94**			**87,20**	**B**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 87,20% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori sangat baik (62,50%), 1 (satu) indikator kategori baik (12,50%), dan 2 (dua) indikator kategori kurang (25%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 5 (lima) per indikator:

1) Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik

a. Keberhasilan capaian indikator ini indikator ini disebabkan karena dukungan dana dan komitmen pemerintah kabupaten boyolali dalam penyediaan sarana prasarana dasar dalam hal ini adalah infrastruktur jalan. Dukungan dana tersebut berasal dari sumber dana APBD, DAK, DID, DBHCHT maupun Bankeu Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.2 Panjang ruas jalan kabupaten sepanjang 678,35 Km 74% kondisi baik

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Jalan Kabupaten sebagian berada pada tanah labil sehingga dibutuhkan penanganan khusus seperti peningkatan jalan dengan konstruksi Rigid Pavement yang lebih banyak dana yang dibutuhkan.
- Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Boyolali cukup panjang sementara laju kerusakan jalan lebih cepat dibanding pelaksanaan pembangunan jalan baik peningkatan jalan maupun pemeliharaan jalan. Hal ini disebabkan jalan di Kabupaten Boyolali overload beban dan merupakan jalur Galian C yang dibawa ke Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Boyolali.
- Penambahan jalan baru sehingga menambah panjang jalan Kabupaten.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD lain dalam pencegahan terhadap overload beban barang;
- Untuk mengatasi kondisi tanah yang labil sebelum melakukan tindakan penanganan dilakukan kajian dulu terhadap tanah sehingga tepat dalam mengambil tindakan pembangunan jalan;
- Dalam mengatasi keterbatasan anggaran diupayakan sumber dana yang laian yaitu speryi dari APBN/DAK, Bankeu, dan sumber sumber dana lain dari pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah Pusat/Provinsi).

b. Efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti:

- Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan seperti pengawas lapangan, pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
- Mencermati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar diperoleh harga murah/wajar dengan Kualitas barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan/sesuai yang dikehendaki.

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,41% dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 151.218.414.000,00 digunakan sebesar Rp. 149.711.839.550,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program:

- Pembangunan Jalan dan Jembatan dilaksanakan dengan kegiatan:

  - Pembangunan jalan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Jalan Lingkungan RT 2 RW 1 Gagaksipat Kec. Ngemplak, Peningkatan Jalan Canden - Tanjungsari (DAK), Jalan Ketitang - Donohudan (DAK), Ruas Jalan Bangak - Simo (DAK), Ruas Jalan Mojosongo - Pasekan (Bankeu), Ruas Jalan Kacangan - Kedungrejo (Bankeu), Jalan Prof. Soeharso, Jalan Cepresan-Kemusu, Jalan Pisang Siswodipuran, Ruas Jalan Simo-Papringan, Jalan Walen - Batas Semarang, Jalan Simo-Manyaran, Jalan guwo - kalimati Ruas Karanggede-Juwangi (bankeu), Ruas Jalan Dali – Karanganyar, Ruas Jalan Musuk – Keposong, Jalan Temon-Kacangan (DID), Ruas Jalan Jrebeng-Repaking, Jalan Simo-Kalioso (DID), Jalan Demangan-Ngangkruk, Jalan Sambi-Tanjungsari, Jalan Sambi-Wonogiri (DID), Peningkatan Jalan Randu-Penggung (DID), Jalan Ampel-Selo (DBHCHT), Jalan Tompak-Cepogo (DBHCHT), Jalan Karangjati-Gebang (DID), Jalan Nogosari-Mangu (DID), Jalan Jrebeng-Cukilan (DID), Jalan Ngrancahkulon-Musuk (DID), Jln Sempulur – Tretes, Pembangunan Jalan Akses Hindrokilo (Lanjutan), URC untuk Tanggap Keadaan Jalan lingkungan, Ruas Jalan Kiringan-Tambakrejo, Ruas Jalan Bade-Batangan (DID), Jalan Kembang-Kaligentong (DID), Ruas Jalan Pelemrejo-Watugede, jalan Dragan – Lampar, Ruas Jalan Teras – Krasak, Peningkatan Ruas Jalan Ampel Selo (Lanjutan), Jalan Ngangkruk-Brongkos, Jalan Nogosari-Gondangrawe, dan Ruas Jalan Brimob-Tawangsari. Pembangunan Jalan Menuju Gedung Guru di Singkil, Jalan Susiloharjo-Doyo, Jalan Akses Masuk Komplek Perkantoran Alun-alun Utara, Pengaspalan jalan Driyan dan Ngestiharjo Kelurahan Siswodipuran, DED Peningkatan Jalan Ngenden – Ngampon, Jalan Simo – Papringan, Jalan Nogosari – Mangu, Jalan Karanggede – Juwangi, Jalan Kembang – Kaligentong, Jalan Temon – Kacangan, Jalan Randu – Penggung, Jalan Sambi – Tanjungsari, Jalan Ampel – Selo, serta DED Pembangunan jalan Cepogo-Jelok-Bantiumun;

  - Pembangunan jembatan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Jembatan Pusung Sidodadi, Jembatan Bandung Wonosegoro, jembatan penghubung Banyuanyar - Candi Gatak, Pembangunan Oprit dan Pengaman Jembatan Kridanggo, Pelebaran Jembatan Belik, Jembatan Jaten Wetan, Jembatan Dukuh Ds. Repaking Kec. Wonosegoro, Penggantian Jembatan Gunung, jembatan Jomboran, jembatan Republik, Kekurangan Pembayaran Pembangunan Jembatan Kridanggo.

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan:

  - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan Pemeliharaan Jalan Mrico-Bawang, Jalan Cepresan-Kemusu, Jalan Mojosongo-Logerit, Jalan Timur Pasar Cepogo, Jalan Nepen-Tempurejo, Ruas Jalan Peni-Pengging, jalur

Evakuasi jalan akses New Selo Kec. Selo, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan TPA Winong, Jalan simo-pentur, Jalan Gagan-Banyuanyar, Jalan Winong-Penggung, Jalan Karanggede – Boyoromo, Jalan Logerit – Tempel, Jalan Perkutut, DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jln Pule – Tlatar, Jalan Kiringan – Ngargosari, Jalan Merapi dan Cempoko, Jalan Kupo – Jeruk, Jalan Merbabu, Jalan Singkil – Pasekan, Jalan Ruas Jln Bangak – Simo, DED Pemeliharaan Jalan Sepet – Doplang, Jalan Mangu – Ngemplak, Rigid Pavement Depan SD Trosobo, Genengsari (Ruas Jalan Kalitlawah-Genengsari), Rigid Pavement Pandeyan (Ruas Jalan Ngemplak-Kliwonan), Survey Kondisi jalan Kabupaten, Pengadaan Aspal Dingin Untuk pemeliharaan Jalan, URC Jalan Lingkungan dan Jalan Kabupaten, Penanganan Tanah Longsor Jurang Mundu (Lanjutan), longsoran Tompak-Cepogo, longsoran Ampel-Selo, dan longsoran Kupo-Jeruk;

- Rehabilitasi pemeliharaan jembatan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengaman Jembatan Guwo, Jembatan Nggentungan, Jembatan Wangkis II, dan Jembatan Jipangan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Panjang pembangunan jalan baru

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena pada tahun 2019 hanya dapat direncanakan sepanjang 2.744 m jalan baru yang dibangun karena alokasi dana untuk pembangunan jalan baru yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi harga yang berlaku di pasaran.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terkait dengan pembebasan lahan/tanah, permintaan harga tanah tidak sesuai dengan asumsi harga pasar yang berlaku.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan pendekatan secara intensif baik secara kelembagaan maupun secara personal, dalam penetuan harga tanah menggunakan jasa pihak ketiga/Apraisal.

b. Efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti :

- Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.837.821.000,00 terealisasi Rp. 31.239.166.028,00 sehingga terdapat efisiensi 1,89%

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan:

- Pembangunan jalan dengan bentuk kegiatan melaksanakan Pengadaan Tanah Jalan dan Pembangunan jalan ringroad utara;

- pembangunan jembatan, dengan bentuk kegiatan melaksanakan pembangunan Jembatan Pusung Sidodadi, Pelebaran Jembatan Belik, Penggantian Jembatan Gunung, Pembangunan Jembatan Bandung Wonosegoro, Pelebaran Jembatan Jaten Wetan, Pelebaran Jembatan Dukuh Ds. Repaking Kec. Wonosegoro, Pembangunan jembatan penghubung Banyuanyar - Candi Gatak, Penggantian jembatan Jomboran, Penggantian jembatan Republik, Pembangunan Oprit dan Pengaman Jembatan Kridanggo, Kekurangan Pembayaran Pembangunan Jembatan Kridanggo.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

3) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik.

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena dukungan dana dan komitmen pemerintah kabupaten boyolali dalam penyediaan sarana prasarana dasar dalam hal ini adalah Saluran Irigasi untuk mengairi areal lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali. Dukungan dana tersebut berasal dari sumber dana APBD, DAK, DID, DBHCHT.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kondisi jaringan banyak yang telah berumur, jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Boyolali merupakan peninggalan belanda, pembangunan yang dilakukan khususnya pemeliharaan jaringan belum mampu merehabiliatasi seluruh jaringan yangg membutuhkan pemeliharaan, di satu sisi jaringan dapat diperbaiki disisi lain jaringan mengalamai kebocoran.
- Jaringan banyak yang sudah tua sehingga disana sini terjadi kebocoran, sehingga air tidak dapat sampai ke tujuan/area pertanian.
- Diperlukan banyak anggaran untuk mengatasi kondisi jaringan yang sudah tua.
- Lokasi Jaringan sulit dijangkau (terpencil) sehingga diperlukan biaya mobilisasi yang tinggi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah memprioritaskan jaringan yang betul betul telah rusak/rusak berat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (debit air memenuhi/cukup, memiliki area pertanian yang luas). Terkait dengan keterbatasan anggaran diupayakan mencari sumber dana lain yaitu mengajukan proposal yang bersumber dana dari Pusat (DAK dan Bantuan Keungan dari Provinsi) atau sumber sumber lain yang memungkinkan.

b. Efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti:

- Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan seperti pengawas lapangan, pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
- Mencermati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar diperoleh harga murah/wajar dengan Kualitas barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan/sesuai yang dikehendaki;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi 1,1% dari total anggaran sebesar Rp. 13.556.847.000,00 digunakan sebesar Rp. 13.406.984.600,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yang dijabarkan dalam kegiatan:

- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nepen Desa Nepen Kecamatan Teras (DAK Penugasan), DI. Andong Desa Andong Kecamatan Andong (DAK Penugasan), DI. Kedung Jambe Desa Manyaran Kecamatan Karanggede (DAK Penugasan), DI. Kauman Desa Kauman Kecamatan Kemusu (DAK Penugasan), DI. Ngudi Cukup Desa Teter Kecamatan Simo (DAK Penugasan), DI. Kedung Ringin Desa Walen Kecamatan Simo (DAK Penugasan), DI. Guwo II Desa Ngaglik Kecamatan Sambi (DAK Penugasan), DI. Kebatan Desa jenengan Kecamatan Sawit (DBHCHT), DI. Wolupule Desa Jurug Kecamatan Mojosongo (DAK Penugasan), DI. Siaji Desa Ngampon Kecamatan Ampel (DAK Penugasan), DI. Sisabuk Desa Ngampon Kecamatan Ampel (DAK Penugasan), DI. Sumber Langse Desa Kopen Kecamatan Teras (DBHCHT), DI. Gading Desa Jipangan kecamatan Banyudono (DBHCHT), DI. Jembluk Desa Talakbroto Kecamatan Simo (APBD), DI Laban Desa Cermo Kecamatan Sambi (DBHCHT), Rehabilitasi Bendung Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali (APBD), Mutih, Desa Tegalrejo, kec sawit (DBHCHT), D.I Siklakah, Desa NGampon, Kecamatan Ampel (DAK), D.I Sorotan, Desa Dukuh dan Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono (DBHCHT), D.I. Yagan Desa Candi Kecamatan Ampel (DAK Penugasan), D.I. Nyamplung Desa Ndlingo Kec Mojosongo (DAK Penugasan), D.I. Manggis Desa Doplang Kec Teras (DAK Penugasan), D.I. Kukusan Desa Cangkringan Kec Banyudono (DAK Penugasan), D.I. Rejoso II Desa Metuk Kec Mojosongo (DAK Penugasan), D.I. Jetak Desa Gombang Kec Sawit (DAK Penugasan), D.I. Penggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro, Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Laban, Bendung Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Jaringan Irigasi D.I. Yagan Desa Candi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nyamplung Desa Dlingo, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manggis Desa Doplang, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kukusan Desa Cangkringan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rejoso II Desa Metuk, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jetak Desa Gombang, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mutih Desa Tegalrejo, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krasak Desa Krasak Kec. Teras, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Siklakah, Desa Ngampon, Kecamatan Ampel, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sorotan,Desa Dukuh dan Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tempel, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kedung Pereng, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simaron, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kopyah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Dlimas, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kedung Asem, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kedung Pilang, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Brontok, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Rejoso I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kramat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sigereng, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sikuwung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simojo, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sumber Blimbing, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sumber Cepoko Sawit, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Butul, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sumber Gombang, Rehablitasi Jaringan D.I Miliran, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pandeyan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sumber Gombangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kedung Nongko, dan URC dan OP Infrastruktur SDA.
- Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air;

- Pemberdayaan Petani pemakai air, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi P3A/GP3A, PISP D.I. Nogosari, Desa Sempulur, Kecamatan Karanggede, dan PISP D.I. Magangan, Desa Sudimoro, Kecamatan Teras;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Drainase dalam kondisi baik.

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena kurangnya dukungan dana sehingga untuk pembangunan drainase hanya dapat dibangun sepanjang 3.315 m sampai dengan Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum tersedianya data base maupun masterplan kondisi drainase di Kabupaten Boyolali yang valid sehingga penentuan langkah per tahun anggaran masih sering mengandalkan berita atau rumor yang beredar di lapangan. Permasalahan pendanaan per tahun juga menjadi kendala untuk penanganan drainase di Kabupaten Boyolali.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dilaksanakan rapat yang dihadiri instansi/OPD terkait guna inventarisasi eksisting drainase atau dengan menganggarkan Penyusunan Data Base Kondisi Drainase skala Kabupaten.

b. Efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti :

- Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan seperti pengawas lapangan, pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
- Mencermati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar diperoleh harga murah/wajar dengan Kualitas barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai yang dikehendaki;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 0,53% dari total anggaran sebesar Rp. 3.325.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 3.307.417.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Drainase Jalan Kemuning, Pembangunan Drainase Jalan Randusari-Kopen, Pembangunan Drainase Jalan Logerit-Tempel, Pembangunan Drainase Jalan Randusari – Pengging, Pembangunan Trotoar Jalan Pisang, URC untuk Tanggap Keadaan Drainase dan Trotoar, Infrastruktur Drainase (Sidomulyo Kebonso Dawung kidul) Kelurahan Pulisen, Pembangunan Drainase Jalan Ngepos-Kebonbimo, Pembangunan Drainase Depan RSUD Simo (Ruas Jalan Bangak-Simo), Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Sekitar Ngangkruk-Pengging, Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Mojosongo Kec. Mojosongo, URC Drainase perkotaan, dan Pembangunan

Trotoar Jalan Kenanga. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

5) Prosentase ketersediannya air baku

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena kurangnya dukungan dana sehingga untuk pembangunan jaringan air bersih hanya dapat dilakukan sebesar 6,7% dari nilai target sebesar 7,76% pada Tahun Anggaran 2019.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Kondisi alam di Kabupaten Boyolali yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir yang bersifat pourus dan menyerap air sehingga kandungan air tanah jarang.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mencari alternatif baru terkait dengan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan.

b. Efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti mencermati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar diperoleh harga murah/wajar dengan Kualitas barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan/sesuai yang dikehendaki.

6) Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dukungan dana dan komitmen pemerintah kabupaten boyolali dalam penyediaan sarana prssarana dasar dalam hal ini adalah infrastruktur jalan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah dalam pembangunan embung terkendala dengan status tanah dan keberadaan sumber mata air tidak merata, terkadang daerah tertentu sulit mencari sumber mata air.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan diadakan MOU dengan pemilik tanah (kas Desa) dan mencari sumber mata air baru dengan teknologi (geolistrik dll).

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efesiensi Pengunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan, seperti pengawas lapangan, pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 2,18% dari total anggaran sebesar Rp. 6.085.135.000,00 digunakan sebesar Rp. 5.925.721.000,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pengadaan Pipa untuk bantuan pengembangan Jaringan Perpipaan, Pembangunan Tambahan Sumur dalam kapasitas 1,2 Liter/detik Desa Mojo Kec. Andong (DAK Penugasan), Desa Bade Kec. Klego (DAK Penugasan), Desa Wates Kec. Simo (DAK Penugasan), Desa

Sempu Kec Andong (DAK Penugasan), Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Desa Walen Kec. Simo (DAK Penugasan), Desa Talakbroto Kec Simo (DAK Penugasan), Desa Karanggatak Kec Klego (DAK Penugasan), Desa Kacangan Kec Andong (DAK Penugasan), Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Karanggede untuk desa Sranten (DAK Reguler), Wonosegoro untuk desa Karangjati (DAK Reguler), Wonosegoro untuk desa Ketoyan (DAK Reguler), Pedesaan di Desa Karanggatak Kec. Klego, Pedesaan di Desa Kacangan Kec. Andong, Pedesaan di Desa Mojo Kec. Andong, Pedesaan di Desa Sempu Kec. Andong, Pengadaan perpipaan untuk jaringan air minum Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo, Dukuh Wonosari Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, Pembangunan Sumur Uji Mulyorejo Kelurahan kemiri Kec. Mojosongo, Jomboran Kelurahan kemiri Kec. Mojosongo, URC untuk tanggap keadaan jaringan Perpipaan, dan air minum, Uji Geolistrik, DED SPAM di Desa Senden Kecamatan Selo, DED Peningkatan SPAM melalui penambahan Kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro, Desa Mudal Kecamatan Boyolali, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Tegalgiri Kecamatan Nogosari, Desa Winong Kecamatan Boyolali, Desa Urut Sewu Kecamatan Ampel, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Klari Kecamatan Karanggede, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Jeruk Kecamatan Selo, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Tlawong Kecamatan Sawit, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Sumber Agung Kecamatan Klego, (Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori hijau) di Desa Cepogo Kecamatan Cepogo. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dukungan dana dan komitmen pemerintah kabupaten boyolali dalam penyediaan sarana prssarana dasar dalam hal ini adalah infrastruktur jalan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan adalah Minim potensi sumber air dan posisi sumber air jauh dengan sasaran masyarakat perkotaan.

8) Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dukungan dana dan komitmen pemerintah kabupaten boyolali dalam penyediaan sarana prssarana dasar dalam hal ini adalah infrastruktur jalan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan adalah Minim potensi sumber air dan posisi sumber air jauh dengan sasaran masyarakat dan tempat tinggal calon pemanfaat masih tersebar dan elevasi tidak mendukung jaringan perpipaan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan Explorasi potensi sumber air baru/alternatif serta bila memungkinkan dengan pompa air.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Untuk efisiensi dan efektifitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan dilakukan berbagai upaya seperti :

   - Memaksimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pada masing-masing kegiatan, seperti pengawas lapangan, pengendali teknis paket pekerjaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 3,48% dari total anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.254.811.000,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan:

   - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Jaringan SPAM desa Catur Sambi dan Pembangunan Jaringan SPAM desa Kedungrejo Kemusu;
   - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.

   Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Sedangkan inovasi kinerja atau prestasi yang telah dilakukan di bidang pembangunan di sektor perairan yaitu:

a. Program 1 desa 1 embung;

b. Embung sejumlah 51 (Lima Puluh Satu) tersebar di 22 kecamatan.

Tabel 3.6 Daftar Embung yang tersebar di 22 Kecamatan

No	Nama Waduk/ Embung	Luas(Ha)	Volume (m^3)	Lokasi (Kecamatan)
1	2	3	4	5
1	Waduk Kedung Ombo	3.536	723.000.000	Kemusu
2	Waduk Cengklik	336	9.299.240	Sambi dan Ngemplak
3	Waduk Bade	80	2.844.400	Klego
4	Embung Drajitan	12.5	79.76	Musuk
5	Embung Mliwis	0,35	7.680	Cepogo
6	Embung Juwangi	0,125	180	Juwangi
7	Embung Kalangan	0,8	8.050	Klego
8	Embung Kendel	1	10.000	Kemusu
9	Embung Jagir (2013)	0,154	4.786,15	Musuk
10	Embung Jemowo (2014)	0,143	4.673,20	Musuk
11	Embung Lampar (2015)	0,146	4.391,10	Musuk
12	Embung Kembang Kuning (2015)	0,140	4.205,12	Cepogo
13	Embung Cepogo (2016)	0,253	7.594,12	Cepogo

No	Nama Waduk/ Embung	Luas(Ha)	Volume (m^3)	Lokasi (Kecamatan)
1	2	3	4	5
14	Embung Cepokosawit (2016)	0,163	4.227,00	Sawit
15	Embung Jenengan (2016)	0,167	4.236,00	Sawit
16	Embung Sempu (2016)	0,338	9.126,74	Andong
17	Embung Sangup (2016)	0,166	4.877,25	Musuk
18	Embung Lanjaran (2016)	0,304	8.154,00	Musuk
19	Embung Dragan (2016)	0,240	6.372,00	Musuk
20	Embung Cluntang (2016)	0,129	3.865,50	Musuk
21	Embung Sumur 2016)	0,220	4.974,54	Musuk
22	Embung Tawengan (2017)	0,190	5.104,00	Sambi
23	Embung Karanggatak (2017)	0,180	5.472,00	Klego
24	Embung Lanjaran II (2017)	0,200	6.006,00	Musuk
25	Embung Tegalrejo (2017)	0,230	6.918,00	Karanggede
26	Embung Wonosegoro (2017)	0,190	5.876,00	Wonosegoro
27	Embung Ngablak (2017)	0,152	4.400,00	Wonosegoro
28	Embung Jatisari(2017)	0,051	918,00	Sambi
29	Embung Cabean (2017)	0,048	871,00	Cepogo
30	Embung Kunti (2017)	0,042	1050,00	Andong
31	Embung Karangjati (2017)	0,055	990,00	Wonosegoro
32	Embung Tanjung (2017)	0,040	1230,00	Klego
33	Embung Kedungpilang(2017)	0,027	1100,00	Wonosegoro
34	Embung Melikan I(2018)	0,091	797,63	Cepogo
35	Embung Melikan II (2018)	0,285	13.619,40	Cepogo
36	Embung Melikan III (2018)	0,590	27.178,06	Cepogo
37	Embung Melikan IV (2018)	0,313	11.670,38	Cepogo
38	Embung Gendulan Desa Jemowo (2018)	0,301	4517,79	Musuk
39	Embung Potronayan (2018)	1,080	2.400,00	Nogosari
40	Embung Kendel (2018)	0,270	900,00	Kemusu
41	Embung Jatisari (2018)	0,270	1.125,00	Sambi
42	Embung Kalangan (2018)	0,073	216,00	Klego
43	Embung Kalinanas (2018)	0,096	400,00	Wonosegoro
44	Embung Karanganyar (2019)	0,250	7.500	Musuk
45	Embung Gilirejo (2019)	0,250	7.500	Wonosegoro
46	Embung Ngaren (2019)	0,250	7.500	Juwangi
47	EmbungJatilawang (2019)	0,250	7.500	Wonosegoro
48	Embung Watugajah (2019)	0,660	33.134	Cepogo
49	Embung Jerukan (2019)	0,250	7.500	Juwangi
50	Embung Selo (2019)	0,130	5.000	Selo
51	Embung Jatilawang (2019)	0,250	7.500	Wonosegoro

Jumlah waduk/ embung sampai dengan tahun 2018 sejumlah 43 (Empat puluh tiga) buah embung. Tahun 2019 ada penambahan pembangunan embung sebanyak 8 (Delapan) buah embung dengan total kapasitas yang dibangun sebesar 83.134m^3 dan total luas areal genangan 2,670 ha. Pembangunan 6 (enam) buah embung tersebut untuk pemenuhan air baku untuk Embung di desa Karanganyar Kecamatan Musuk, embung desa Ngaren Kecamatan Juwangi, embung desa Jatilawang Kecamatan Wonosegoro, embung Besalen desa Jelok Kecamatanb Cepogo, embung desa Samiran Kecamatan Selo,embung Watugajah desa jelok Kecamatan Cepogo Dan 2 (Dua) buah embung untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian yaitu embung Jerukan Kecamatan Juwangi dan embung Gilirejo Kecamatan Wonosegoro, sehingga total waduk/ embung sampai dengan tahun 2019 sejumlah 51 (lima puluh satu) buah embung.

Pembangunan embung akan terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan Boyolali air dan penyediaan air baku baik untuk pertanian maupun air bersih bagi masyarakat khususnya daerah Boyolali yang rawan air baku.



Gambar 3.3 Embung Giriroto Kabupaten Boyolali

6. SASARAN 6 : Terpenuhinya infrastruktur Penunjang

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	%	89,59	78,09	100	80,59	100	84,50	101,70	85,59	86,10	100,60	A	DPUPR
2 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	%	100	58	100	68	100	79	100,06	89,47	81	90,53	B	DPUPR
3 Penambahan titik lampu	Titik lampu	10.240	240	100	452	22,6	668	33,4	2.000	1358	67,90	C	DISHUB
4 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	225	81	162	15	42,86	46	131,43	35	15	42,86	D	DLH
5 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	B	DISHUB
6 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	%		100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	B	DISHUB

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,04	0,034	100	0,006	17,14	0,01	22,22	0,037	0,002	5,41	D	DISHUB
Capaian				**108,86**		**68,94**		**84,12**			**72,47**	**C**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 72,47% (kategori cukup) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (14,29%), 3 (tiga) indikator kategori baik (42,86%), 1 (satu) indikator kategori cukup (14,29%), dan 2 (dua) indikator kategori kurang (28,57%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 (enam) per indikator:

1) Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR.

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya kerjasama yang baik antara OPD terkait maupun dengan BKPRD Kabupaten serta didukung dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya pemanfaatan ruang sesuai RTR.

      Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten.

      Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah meminimalisir pelanggaran pemnafaatan ruanf dengan peningkatan sosialisasi rencana tata ruang dan peningkatan koordinasi antar OPD terkait maupun BKPRD Kabupaten dalam proses penyelnggaraan pantaan ruang baik perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian.

   b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan malekukan kegiatan yang benar-benar efektif mendukung capaian kinerja, dari anggaran Rp. 26.940.000,00 dapat terealisasi Rp. 26.096.825,00 sehingga dilakukan efisiensi sebesar 3,13%.

   c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Monitoring pemanfaatan ruang, Informasi kesesuaian tata ruang, dan Legalisasi gambar. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR.

   a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena kurangnya dukungan dana sehingga untuk Peta RDTR hanya dapat dilakukan sebesar 81% dari nilai target sebesar 89% pada Tahun Anggaran 2019:

      Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

      - Keterbatasan anggaran untuk perencanaan;
      - Ketersediaan, keakuratan dan integrasi data termasuk peta yang belum memadai;
      - Kemampuan SDM, ketersediaan Perangkat analisis;

- Beberapa data di daerah masih belum lengkap untuk mendukung proses perencanaan;
- Perlu proses berjenjang yang cukup panjang dalam penyusunan RDTR, di mana prosedurnya memerlukan persetujuan beberapa lembaga dengan didahului kegiatan asistensi dan supervisi dari lembaga-lembaga tersebut.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah desa/ keluharan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun dukungan dari pemerintah pusat;
- Pengembangan dan peningkatan kemampuan ASN/ SDM bidang pemetaan baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga perbaikan materi substansi dan peta tidak hanya tergantung pihak ketiga;
- Melakukan koordinasi secara intensif antara DPUPR Kabupaten Boyolali dengan badan Informasi Geospasial untuk mensinkronkan jadwal asistensi dan supervisi pengajuan persetujuan peta RDTR.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan malekukan kegiatan yang benar-benar efektif mendukung capaian kinerja, dari total anggaran Rp. 733.503.500,00 dapat terealisasi Rp. 400.488.300,00 atau efisiensi sebesar 4.50%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perencanaan tata Ruang dalam kegiatan:

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang dilaksanakan dengan melakukan pembayaran Biaya Operasional, revisi RDTR Kecamatan Boyolali, revisi RDTR Kecamatan Mojosongo, Identifikasi Fungsi Jalan RDTR, revisi peta RDTR Sawit dan RDTR Klego, dan revisi RDTR Sawit dan RDTR Klego;
- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, dengan melaksanakan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Penambahan titik lampu

a. Kegagalan capaian indilkator ini disebabkan karena keterbasan anggaran, sarana prasarana dan personil yang ada untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan penerangan jalan umum serta pemeliharaannya.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum adanya data mengenai jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang valid sehingga akan mengalami kesulitan mengenai penentuan titik lampu selanjutnya yang semula masih menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum menjadi urusan di Dinas Perhubungan mulai tahun 2017.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pendataan penerangan jalan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan anggaran yang tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari anggaran sebesar Rp. 5.964.321.000,00 digunakan sebesar Rp. 5.886.192.340,00 ada efisiensi anggaran hanya sebesar 1,31%;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum dengan kegiatan:

- Pembangunan penerangan jalan umum, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemasangan dan pengadaan lampu penerangan jalan umum wilayah Kabupaten Boyolali dengan anggaran;
- Pemeliharaaan/rehabiitasi penerangan jalan umum, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan dengan penyediaan komponen – komponen maupun pengadaan peralatan kerja penerangan jalan umum yang digunakan untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

4) Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan

a. Kegagalan capaian target indikator ini disebabkan pada awal perencanaan, mengalokasikan pendanaan dari APBN (DAK Bid LH), namun adanya keterbatasan menu di rincian usulan DAK, yang mana IPAL Biogas tidak termasuk dalam skala prioritas dari dana DAK, sehingga anggaran pembangunan IPAL Biogas hanya bersumber dari APBD Kab. Boyolali, yang berdampak pada berkurangnya jumlah biogas ternak yang dibangun pada tahun 2019. Jumlah unit biogas yang dibangun kurang sebanding dengan jumlah permohonan/proposal yang masuk.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perawatan unit IPAL Biogas;
- Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah yang dirasa masih cukup memberatkan.
- Kurangnya dukungan pendanaan dari pusat (DAK), sehingga umlah biogas yang dibangun tidak banyak dan sangat kurang dibanding proposal yang ada.

Upaya pemecahan masalah:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatn dan perawatan unit biogas serta persayaratan penerimaan barang hibah, sehingga kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan bisa mengerti dan memenuhi persyaratan yang dimaksud;
- Menambah kapasitas IPAL yang dibangun sehingga dapat digunakan secara komunal;
- Lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan IPAL Biogas sehingga masyarakat yang dirasa mampu, dapat membangun IPAL secara mandiri maupun swadaya serta menerapkan skala prioritas, utamanya yang berdampak terhadap DAS Bengawan Solo (Pepe, Gandul, Cemara).

Data perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2019 oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut



Gambar 3.4 Grafik perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2019

Pembangunan IPAL Biogas ini bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran akibat adanya usaha dan / kegiatan industry tahu dan ternak serta menyediakan energi baru alternatif yang terbarukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak dapat terbarukan.

Selain dapat menurunkan tingkat polusi akibat limbah ternak, pembangunan IPAL Biogas ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitarnya, karena Gas Bio yang dihasilkan dari instalasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga serta penerangan. Untuk 1 unit IPAL Biogas ternak dapat dimanfaatkan maksimal sebanyak 5 rumah tangga sesuai kapasitas dan jumlah ternaknya.

Sebagai ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut:

Untuk IPAL Biogas Sapi (estimasi kapasitas 12 m3, 10 ekor sapi) dapat dihasilkan 5 m3 kotoran sapi dan gas/ energi 5 m3/ (setara dengan 2,85 kg elpiji) hari yang dapat dimanfaatkan 5 KK/ rumah tangga

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan :

- Melaksanakan sosialisasi pembangunan IPAL Biogas dan pemanfaat gas bio;
- Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi penerima IPAL biogas dengan peserta penerima bantuan IPAL, masyarakat sekitarnya dan aparat desa. Bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar bantuan IPAL dapat dipelihara dan dimanfaatkan bersama dan karena bantuan IPAL Biogas ini sifatnya adalah percontohan, sehingga diharapkan dapat dicontoh dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri;
- Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,12% dari anggaran Rp. 405.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 396.410.716,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi. Dengan bentuk kegiatan berupa Survey calon lokasi penerima bantuan IPAL, Pembuatan SK Penetapan Lokasi Penerima Hibah IPAl Biogas, Penyusunan DED IPAL Biogas, Proses Pelelangan/Pengadaan IPAL, Pembangunan IPAL Biogas Ternak, Monitoring Pembangunan IPAL Biogas Ternak, Pemeriksaan Bangunan IPAL Biogas dan PHO Bangunan IPAL Biogas. Program dan kegiatan secara umum

telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik, namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan IPAL Biogas yang telah dibuat, meningkatkan kesadaran usaha/kegiatan untuk sedapat mungkin dapat secara mandiri membuat IPAL Biogas tersebut ke depannya. Melalui pembangunan IPAL Biogas, maka limbah yang berasal dari kotoran ternak (sapi) dan industri tahu dapat dikendalikan (tidak dibuang langsung ke media) dengan diolah melalui IPAL, parameter limbah dapat diturunkan/dinetralisir hingga 75-90%. Dengan demikian tingkat pencemaran lingkungan dapat diturunkan melalui keberadaan IPAL tersebut.

5) Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan

a. Keberhasilan capaian indilkator ini disebabkan karena ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia atau personil yang berkompeten untuk mendukung program dan kegiatan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah penyediaan personil yang mempunyai ketrampilan dan keahlian di bidang perlengkapan jalan baik itu rambu-rambu lalu lintas maupun *traffic light.*

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan anggaran yang tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari anggaran sebesar Rp. 1.359.365.000,00 digunakan sebesar Rp.1.336.834.584,00 ada efisiensi anggaran hanya sebesar 1,65%;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan:

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan dan pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyrat Lalu Lintas), pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta pengadaan komponen APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
- Pengadaan marka jalan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengecatan marka jalan di wilayah kabupaten Boyolali maupun pengadaan paku jalan;
- Pengadaan pagar pengaman jalan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemasangan pagar pengaman jalan/guardrill di wilayah Kabupaten Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor

a. Keberhasilan capaian indilkator ini disebabkan karena ketersediaan anggaran dan serta sumber daya manusia atau personil yang berkompeten untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah penyediaan sarana prasarana terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

b. Analisis efisiensi penggunanaan sumber daya adalah penggunanaan anggaran yang tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 245.022.180,00 ada efisiensi anggaran hanya sebesar 1,99%;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan/penyediaan penunjang pelaksanaan uji kendaraan bermotor seperti buku uji, plat uji, sticker tanda samping maupun PNPB bukti lulus uji baru. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

a. Kegagalan capaian indilkator ini disebabkan perbandingan pertambahan jumlah panjang jalan yang dikelola pemerintah daerah dengan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pembangunan jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali yang masih belum optimal.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah penyediaan akses jalabn sehingga volume panjang jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten boyolali dapat bertambah.

b. Meskipun tidak ada anggaran untuk mencapai indikator ini akan tetapi Dinas Perhubungan melakukan penyediaan akses jalan sehingga panjang jalan yang dikelola pemerintah daerah dapat bertambah;

c. Indikator ini dicapai dengan tanpa program, kegiatan dan anggaran akan tetapi Dinas Perhubungan melakukan penyediaan akses jalan sehingga panjang jalan yang dikelola pemerintah daerah diharapkan dapat bertambah. Bentuk kegiatan yang dilakukan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

7. SASARAN 7 : Terpenuhinya infrastruktur sosial

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat	8	10	100	-	0	17	11,11	9	7	122,22	A	DISPORAPAR
2 Bertambahnya Cabang Olahraga	Klub olahraga	6	1	100	31	3100	1	100	1	2	200	A	DISPORAPAR

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 Bertambahnya lapangan olahraga	Lapangan	18	2	100	9	450	3	100	3	3	100	B	DISPORAPAR
4 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	%	76	69	106,15	223	332,84	71	101,43	72,00	202,96	281,89	A	DINAS ARPUS
5 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	%	14,77	5,48	100	22,3	311,02	21,00	237,02	10,55	100,00	947,87	A	DINAS ARPUS
6 Cakupan layanan perpustakaan keliling	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	97,62	97,62	B	DINAS ARPUS
Capaian				**101,03**		**715,64**		**108,26**			**291,60**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 291,60% (kategori sangat baik) terdiri dari 4 (empat) indikator kategori sangat baik (66,67%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (33,33%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 7 (tujuh) per indikator:

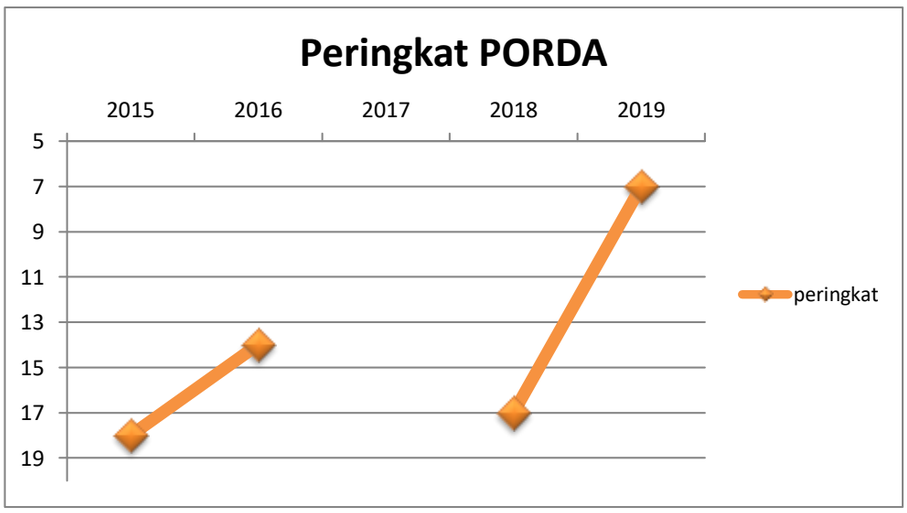
1) Peringkat PORDA tingkat Provinsi.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dikarenakan telah:

- Mengikutkan atlet-atlet untuk lebih kontinue berkompetisi di ajang olahraga lain yang lebih kompetitif dan berbobot;
- Melaksanaakan even olah raga secara mandiri untuk menambah kesempatan para atlet meningkatkan bakat dengan bertanding.

Pelaksanaan indikator ini masih sangat tergantung dengan pelaksanaan tingkat provinsi jawa tengah, seperti contoh terjadi pada tahun 2017 di mana Kompetsi Porda tidak diselenggarakan di Tingkat Provinsi

Berikut gradfik perkembangan prestasi PORDA Kabupaten Boyolali



Gambar 3.5 Grafik perkembangan prestasi PORDA Kabupaten Boyolali

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Penggunaan anggaran untuk pengiriman PORDA Tingkat provinsi dialihkan ke penggunaan anggaran untuk pembinaan atlet berbakat dan even olahraga lokal Tingkat Kabupaten;

- Bekerja sama dengan segenap insan olah raga untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi menjalin kekompakan, baik dari unsur atlet, pelatih, klub dan organisasi olahraga;
- Melibatkan pihak ketiga dalam pembinaan atlet-atlet olah raga.

2) Jumlah klub olahraga.

a. Keberhasilan capaian indikator bertambahnya jumlah klub olah raga ini disebabkan karena aktifnya pembinaan dan koordinasi dengan para atlet dan stakeholder penyelenggara olah raga pada Tahun 2019, dan klub yang bergabung pada tahun 2019 adalah klub dari cabang olah raga sepatu roda dan tarung drajad. Jumlah klub tersebut terjaring dalam 30 cabang olahraga (pengcab) yang menginduk di KONI. Sementara untuk klub-klub yang tergabung dalam NPC secara Nasional keluar dari organisasi induk KONI dan berdiri sendiri.

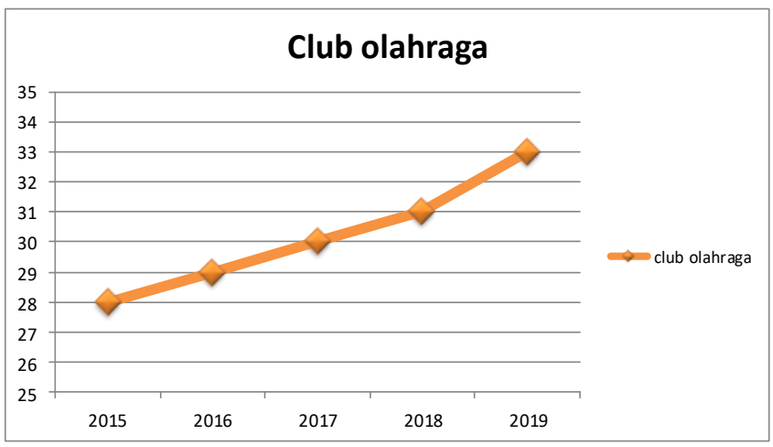
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Beberapa klub olah raga yang ada di boyolali masih ada yang belum mendaftar ke pengcab/orgaisasi olahraga masing-masing;
- Ada beberapa klub olah raga yang masih pasif dalam kegiatan keolahragaan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan atlet atlet olahraga sampai ke tingkat klub, teruma klub-klub yang ada di daerah luar kota;
- Diadakan pelatihan dan kompetisi/turnamen antar klub baik di tingkat lokal kecamatan maupun kabupaten untuk memacu atlet-atlet dalam klub mengembangkan potensinya;
- Memberikan penghargaan untuk atlet maupun pelatih yang berprestasi dan mampu berkompetisi di ajang yang lebih tinggi.

Berikut grafik penambahan jumlah klub olah raga di kabupaten boyolali dari tahun 2015-2019 :



Gambar 3.6 Penambahan jumlah klub olah raga di kabupaten boyolali dari tahun 2015-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan:

- Melibatkan seluruh sektor dalam keolahragaan untuk ikut aktif dalam pengembangan dan pembinaan olah raga;

- Berusaha menciptakan klub – klub yang mandiri dan terorganisir yang baik, dari segi kegiatan maupun keorganisasiannya.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,21% dari anggaran Rp. 790.000.000,00 digunakan Rp. 788.360.000,00;

b. Untuk melaksanakan 2 (dua) indikator di atas ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   - Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan 28 K Kabupaten Boyolali, Pengiriman Lomba Gerak Jalan 28 K Provinsi Jawa Tengah;
   - Penyelenggaraan kompetisi olahraga, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan menyelenggarakan PORDA Kabupaten Boyolali, Pengiriman Porda Tingkat provinsi;
   - Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan Olimpiade Olah Raga Difable;
   - Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Diklat Instruktur/ Pelatih Olah Raga.

   Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Bertambahnya lapangan olahraga.

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktu di Kabupaten Boyolali termasuk insfrastruktur sarana dan prasarana olah raga.

      Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dalam pelaksanaan indikator ini adalah :

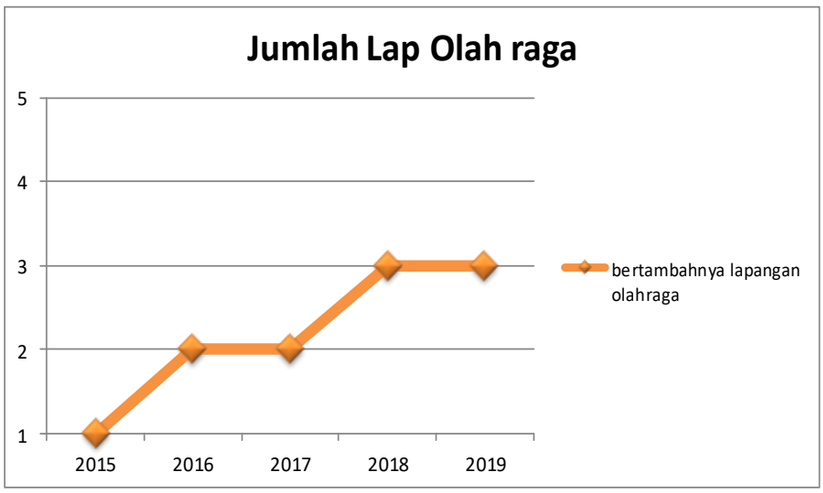
      - Pembangunan lapangan olah raga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan tahap finishingnya;
      - Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lapangan olah raga membutuhkan anggaran yang cukup besar;
      - Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana olah raga memerlukan lahan yang luas.

      Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

      - Pembangunan dilaksanakan dengan bertahap di setiap tahun anggaran;
      - Berusaha menambah sumber anggaran termasuk anggaran tingkat nasional maupun investor yang berinvestasi dalam bidang olah raga;

- Memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah baik pemerintah tingkat kabupaten maupun pemerintah desa.

Berikut grafik penambahan lapangan olah raga di Kabupaten Boyolali dari tahun 2015-2019:



Gambar 3.7 Grafik penambahan lapangan olah raga di Kabupaten Boyolali dari tahun 2015-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Memaksimalkan potensi daerah termasuk area milik pemerintah daerah untuk pengembangan sarana dan prasarana oleh raga;
- Menggalang seluruh stakeholder dalam bidang olah raga untuk berperan aktif dalam pengembangan sarana olah raga;
- Menggunakan anggaran Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,64% dari anggaran Rp. 16.125.000.000,00 digunakan Rp. 16.021.301.000,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga dan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembangunan sarana prasarana olah raga sirkuit gokart dan gelanggang atletik, lapangan sepak bola kebo giro, paras. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Cakupan ketersediaan buku perpustakaan

a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan karena adanya bantuan buku dari Badan Arpus Propinsi Jawa Tengah dan anggaran APBD II serta bantuan dari masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

- Melihat situasi dan kondisi yang ada di Perpustakaan Daerah saat ini yang antosias masyarakat untuk berkunjung di perpustakan daerah yang kebetulan lokasi berada satu lokasi kebanggaan masyarakat Boyolali yaitu patung kuda kencana yang menjadi salah satu tujuan wisata ditengah kota boyolali, namun

yang perlu diperhatikan untuk peningkatan jumlah pengunjung adalah lahan parkir pengunjung dan akses masuk keperpustakaan belum ada dan belum ramah untuk difabel dan anak-anak;

- Keterbatasan jumlah SDM yang mempengaruhi kualitas pelayanan, mengingat layanan perpustakaan umum sekarang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu layanan di dalam ruang dan layanan di luar ruang (Pembinaan Perpustakaan Desa dan Mobil Perpustakaan Keliling). Baru adanya 4 tenaga Pustakawan juga merupakan permasalahan tersendiri karena secara teknis perpustakaan perlu ditangani oleh SDM yang kompeten di bidangnya;
- Keterbatasan kemampuan SDM dan fasilitas di bidang Informasi Teknologi, dimana tuntutan untuk mengikuti era Perpustakaan Digital semakin mendesak sementara otomasi perpustakaan (OPAC dan Internet) yang sudah dirancang sejak enam tahun terakhir belum bisa terlaksana.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengusulkan tambahan anggaran APBD II untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan serta pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan utamanya untuk pengadaan buku pustaka.

Berikut grafik cakupan ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.8 Grafik cakupan ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan dari tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyediaan bahan pustaka perpustakan daerah dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain serta optimalisasi anggaran/dana yang tersedia;
- Menggunakan anggaran Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,99% dari anggaran Rp. 73.000.000,00 digunakan Rp. 72.350.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan:

- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengelolaan bantuan bahan pustaka dan masyarakat peduli literasi dan meninggatkan anggaran pengadaan buku serta memaksimalkan kunjungan ke 1 (satu) Boyolali perpustakaan digital Perpusda Kab. Boyolali;
- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan fasilitas yg ada di perpusda seperti kecepatan wifi dan kenyamanan pengunjung.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5) Cakupan pembinaan perpustakaan desa

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini karena adanya kerja keras petugas dan mulai tumbuh kesadaran dari pejabat/pengelola perpustakaan desa akan manfaat keberadaan perpustakaan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan target kinerja adalah adalah :

- Pembinaan Perpustakaan Desa masih bersifat monitoring dan terbatas pada desa-desa yang akan mengikuti lomba dan desa-desa yang mendapat bantuan fasilitas sarana prasarana perpustakaan dari provinsi/pusat;
- Pengembangan perpustakaan desa masih sulit, masyarakat masih lebih mementingkan kebutuhan ekonomi;
- Perpustakaan desa belum menjadi prioritas utama di Pemerintahan Desa.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan survey untuk menentukan desa-desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembinaan atau diusulkan untuk mendapatkan bantuan dengan memperhatikan cakupan wilayah untuk pemerataan. Selain itu pembinaan juga sudah merambah kedesa perintisan perpustakaan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melakukan koordinasi dengan para Camat dan Kepala Desa;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,82% untuk dari anggaran sebesar Rp. 161.636.000,00 digunakan sebesar Rp. 153.846.200,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan:

- Pengembangan Minat dan budaya baca, dengan bentuk kegiatan memaksimalkan bentor Remen Maos dan Pusling ke sekolah dan Desa;

- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dengan bentuk kegiatan yaitu Memaksimalkan bentor Remen Maos dan Pusling ke sekolah dan Desa, dan mengadakan lomba bercerita lomba berpuisi di Perpusda Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Cakupan layanan perpustakaan keliling

a. Kegagalan capaian target indikator ini disebabkan tahun 2019 baru mempunyai 1 unit mobil pusling dan 2 unit bentor perpustakaan. Sehingga belum mampu menjangkau semua sekolah yang menjadi target perpustakaan keliling.

Keberadaan SDM bidang perpustakaan masih terbatas sehingga petugas yang mengoperasionalkan Mobil Perpustakaan Keliling dan bentor masih terbatas sebagai sarana promosi keberadaan perpustakaan, belum berfungsi sebagai "perpustakaan berjalan". Keterbatasan SDM yang ada dan jangkauan cukup luas, meliputi 267 desa/kelurahan di 22 kecamatan, belum termasuk kunjungan kesekolah-sekolah, rumah ibadah dan pondok pesantren belum bisa berjalan secara optimal sesuai yang diinginkan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengusulkan penambahan anggaran untuk penambahan SDM bidang perpustakaan (pustakawan) dan driver bentor serta penambahan sarana mobil operasional.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan

- Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling dengan optimalisasi anggaran sarana dan prasarana dan dana yang tersedia;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3.37% untuk dari anggaran sebesar Rp. 50.700.000,00 digunakan sebesar Rp. 49.042.500,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memaksimalkan bentor Remen Maos dan Pusling ke sekolah dan Desa dan dengan stimulasi bantuan buku untuk perpustakaan desa. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Disamping itu Kabupaten Boyolali juga membangun Perpustakaan Otomasi : Pengolahan dan Layanan Perpustakaan Otomasi SLIM (System Library Informasi Managament) yaitu Layanan Sirkulasi, Penelusuran Informasi, Referensi, Perpustakaan Keliling, Internet, E-Library (i-Boyolali, Bookless, SmartLab), Konsultasi dan Bimbingan Perpustakaan, Audio Visual, dan Layanan Kerjasama Peminjaman Bahan Pustaka, serta tempat Outbond gratis. Perpustakaan remen maos memiliki fasilitas berupa Buku Tamu *Online*, *BI Corner*, Wifi Area, Online Katalog (OPAC), Ruang Diskusi/Pertemuan, dan Ruang Bermain Anak.



Gambar 3.9 Perpustakaan Boyolali

8. SASARAN 8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	BP3D
2 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	BP3D
3 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	SETDA
4 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	skor	65	56,46	94,10	61,24 (B)	102,07	66,45	110,75	65,00	67,18	103,35	A	SETDA
5 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	B	BP3D
6 Prosentase Peningkatan PAD	%	10,54	3,55	100	12,72	124,17	12,72	122,32	10,45	16,53	158,20	A	BKD
7 Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	WTP	100	B	BKD
8 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	level	3	1	100	3	150	3	150	3	3	100	B	INSPEKTORAT
9 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	level	3	1	50	3	150	3	150	3	3	100	B	INSPEKTORAT
10 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	temuan/ rekomendasi	25	29	103,33	20	131,03	19	132,14	27	11	159,26	A	INSPEKTORAT
Capaian				**94,74**		**115,73**		**116,52**			**112,08**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 112,08% (kategori sangat baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori sangat baik (30%), dan 7 (tujuh) indikator kategori baik (70%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 8 (delapan) per indikator:

1) Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- Adanya aplikasi perencanaan (e-planning) siBangun yang mempercepat dan mempermudah penyusunan dokumen RKPD;
- Kajian hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev BP3D Kabupaten Boyolali terhadap kegiatan pembangunan tahun berjalan (n) yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya (n+1);
- Review dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang menajamkan analisis awal yang sudah dibuat oleh BP3D Kabupaten Boyolali.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali yang mengacu pada panduan di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rancangan RKPD ini kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan APBD Kabupaten Boyolali baik Perubahan 2019 maupun Murni 2020

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Jadwal *Review* RKPD Kabupaten Boyolali di Bappeda Provinsi Jawa Tengah harus menunggu pengaturan waktu dari Provinsi. *Review* terhadap RKPD Kabupaten Boyolali (baik Murni 2020 maupun Perubahan 2019) dilaksanakan pada bulan Juli 2019, sedangkan Rancangan Akhir kedua RKPD tersebut sudah selesai pada bulan Juni 2019.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah waktu penyusunan RPKD dimajukan dan dipercepat. Mulai tahun 2020, jadwal Review RKPD dengan Bappeda Provinsi Jateng dapat diajukan atau diatur oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Membuat surat edaran ke seluruh perangkat daerah se Kabupaten Boyolali tentang perencanaan;
- Menggunakan aplikasi perencanaan (e-planning) siBangun;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 8,30% untuk dari anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 192.575.343,00.

c. Analisis program/kegiatan :

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan semua OPD, monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan, menyelenggarakan musrenbang

tingkat Kabupaten, mengikuti musrenbang tingkat wilayah dan Provinsi serta tingkat Nasional. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)

a. Keberhasilan capaianin dikator ini karena telah dilakukan asistensi dalam penyusunan evaluasi RKPD dan RPJM oleh Badan Perencanaan, Penilitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Boyolali. Faktor keberhasilan didukung dengan penggunaan beberapa aplikasi :

- E-Monev RKPD untuk pengumpulan data evaluasi RKPD
- E-Monev RPJMD untuk pengumpulan data evaluasi RPJMD
- E-Laporan untuk penyusunan laporan kegiatan setiap bulan.

Penyusunan dokumen laporan data hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan, Triwulanan, Akhir Tahunan Belanja Langsung, Buku Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Evaluasi RKPD), Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi, Aplikasi E-Monev dan E-Laporan. Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun perencanaan. Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada, dan merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam laporan/ evaluasi yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga target tujuan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik dapat tercapai. Kerjasama yang baik seluruh OPD untuk menyampaikan laporan melalui online ke dalam aplikasi. Komitmen dan dukungan personil perencanaan dan pelaporan (Kasubbag Renlap) OPD dan Kecamatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab. Dan kerja sama Tim internal BP3D sebagai pengampu pada kegiatan ini

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Penggunaan beberapa aplikasi untuk pengolahan data, penyajian data secara online, percepatan dari sisi waktu dan mempermudah dalam pengolahannya;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 15,73% untuk dari anggaran sebesar Rp. 205.013.000,00 digunakan sebesar Rp. 172.772.378,00.

c. Analisis program/kegiatan :

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan semua OPD, sosialisasi penggunaan aplikasi, asistensi dalam pengumpulan data dengan semua OPD. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKjIP).

a. Keberhasilan indikator ini dicapai dengan penyusunan dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD dan LKjIP dengan melakukan asistensi kepada OPD pengampu indikator dalam dokumen tersebut. Kegiatan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD serta LkjIP dilaksanakan dengan melibatkan semua OPD di Kabupaten Boyolali sehingga diperlukan koordinasi dengan semua pemangku kebijakan. Koordinasi, asistensi dan responsibilitas yang terjalin dengan baik dalam proses ini sehingga mampu menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dikompilasi menjadi satu menjadi Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKjIP)

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Kurangnya atensi dan resposibilitas dari beberapa OPD dalam menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tidak menaati ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan serta laporan yang disampaikan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban belum sepenuhnya memperhatikan kualitas dan akuntabitilas laporan;
- Penyusunan LKPJ/LPPD dan LKjIP bersamaan dengan penyusunan laporan kegiatan lain sehingga personil perencanaan dan pelaporan tidak fokus dalam pengerjaannya.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah adalah melakukan asistensi kepada konseptor OPD dan memanggil yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ/LPPD dan LKjIP.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pembuatan kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LKPJ/LPPD;
- Menggunakan aplikasi Aplikasi e-LKPJ dan e-LPPD, serta ESAKIP;
- Melaksanakan asistensi penyusunan LKPJ/LPPD dan LKjIP untuk memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil OPD yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ/LPPD dan LKjIP;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar:
  - ✓ LKPJ/LPPD Rp. 6.856.820,00 (2,58%) dari anggaran sebesar Rp. 226.811.750,00 digunakan sebesar Rp. 220.954.924,00;
  - ✓ LKJIP Rp. 11.008.892,00 (8,43%) dari anggaran sebesar Rp. 130.550.000,00 digunakan sebesar Rp. 119.541.108,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Perencanaan pembangunan daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
  - ✓ Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dokumen LKPJ, dan Fasilitasi dan Kompilasi data LKPJ dari Perangkat Daerah;

- ✓ Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati kepada Mendagri (LPPD), penyusunan dokumen LPPD, dan Fasilitasi dan Kompilasi data LPPD dari Perangkat Daerah;
- ✓ Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP), bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun dokumen LKjIP, Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan, Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi, dokumen Pengukuran Kinerja untuk tingkat Kabupaten, selain itu melaksanakan fasilitasi atas semua dokumen SAKIP untuk tingkat Perangkat Daerah.

- Program Kerjasama informasi dengan media massa dengan kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan penyebarlkuasan ILPPD.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dipenuhinya komponen penilaian dari evaluasi SAKIP, seperti dokumen Casecade Down IKU, Rencana Aksi, dan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi untuk tingkat Kabupaten dan untuk seluruh OPD telah diwajibkan untuk menyusunnya juga. Selain itu dengan penerapan Pemberian Tunjangan Pegawai yang mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk menyusun Perjanjian Kinerja Eselon sampai kepada tingkat Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu, sehingga dapat menambah nilai pada penilaian Evaluasi SAKIP. Kabupaten Boyolali dimulai tahun 2017 tepatnya setelah perubahan anggaran tahun 2017 telah menerapkan pemberian Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) selain berdasarkan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas serta dengan variabel statis (kehadiran) dan dinamis (kinerja), serta peran tertentu, semua honorarium pegawai sudah tidak ada masuk ke TPP (single salary), disamping itu efektif mulai tahun 2018 Kabupaten Boyolali sudah menggunakan aplikasi ESAKIP untuk pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Nilai SAKIP tahun ini adalah penilaian untuk tahun sebelumnya, berikut grafik nilai SAKIP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:



Gambar 3.10 Grafik nilai SAKIP dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah adanya mutasi pegawai yang sangat dinamis maka kemampuan personil yang menangani perencanaan di setiap Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah menguasi dengan adanya mutasi digantikan pegawai yang baru maka belum sepenuhnya memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan belum paham tentang apa itu indikator kinerja.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan klinik/ asistensi penyusunan dokumen – dokumen SAKIP kepada setiap Perangkat Daerah.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Menunjuk personil di setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan asistensi dalam penyusunan dokumen – dokumen SAKIP;
- Menggunakan aplikasi ESAKIP;
- Menggunakan fasilitas internet dalam hal ini memanfaatkan email resmi dari kabupaten Boyolali dan penggunaan media sosial untuk berkomunikasi agar lebih efisien;
- Membuat surat edaran penyusunan dokumen kinerja tahun 2019;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 8,43% dari anggaran sebesar Rp. 130.550.000,00 digunakan sebesar Rp. 119.541.108,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan, dokumen Rencana Aksi, dokumen Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali, serta melaksanakan asistensi/ klinik atas penyusunan dokumen-dokumen SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah, serta melakukan penyempurnaan E-SAKIP walaupun di Tahun 2018 masih belum selesai dan rencanannya dianggarkan untuk penyempurnaannya pada Tahun 2019. Selain itu program tersebut juga dianggarkan untuk penyempurnaan aplikasi TPP. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5) Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan.

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena beberapa faktor yaitu :

- Koordinasi yang baik dengan semua OPD dalam penyusunan data/informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang saling bersinergi dalam perumusan perencanaan pembangunan;
- Kerjasama dengan pihak ketiga, lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta dalam penyusunan kajian teknis untuk bahan perencanaan pembangunan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Perolehan data yang sangat sulit dari OPD terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan, sehingga data yang relevan, akuntabel dan uptodate sangat minim diperoleh;
- Data Analisis dari BPS tidak bisa menyajikan untuk analisis Indeks Pembangunan Manusia pada tahun berkenaan, sedangkan angka IPM sudah keluar pada akhir triwulan pertama tahun berkenaan, data Analisi IPM yang tersaji adalah data analisi tahun n -1, hal tersebut disebkan karena BPS belum bisa memakai angka IPM tahun berkenan yang belum resmi publish meskipun sudah keluar;
- Ada beberapa OPD yang belum sepenuhnya memiliki perencanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisiensi dari sisi penganggaran.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Koordinasi dengan OPD terkait dalam perolehan data lebih diintensifkan;
- Koordinasi dengan BPS baik BPS Kabupaten maupun BPS Provinsi Jawa Tengah lebih diintensifkan;
- Penerapan konsistensi perencanaan program dan kegiatan sejak tahap perencanaan menengah (Renstra Perangkat Daerah) hingga perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah) serta Desk evaluasi Pra RKA yang terjadwal dengan baik dan penekanan kepada perencanaan yang lebih efektif dengan mengacu pada prinsip money follows program.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Menyusun tim teknis penyusun dokumen masing-masing kegiatan di BP3D.
- Menyelenggarakan rapat teknis berkaitan dengan penyusunan dokumen masing-masing kegiatan.
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7,13% dari anggaran sebesar Rp. 1.976.967.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.835.961.504,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan dokumen perencanaan OPD RKPD, Renja, RKA, DPA, CalK;
- Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:
  - ✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kab. Boyolali, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu One Map One Data dan Penyusunan Kawasan Wisata Religi;
  - ✓ Penyusunan Profil Daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Boyolali semesteran I dan 2, dimanadata Profil daerah merupakan data yang terbagi 3 kelompok urusan yaitu Urusan Umum, Wajib dan Pilihan;

- ✓ Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Aplikasi SIPD Online sebagai Aplikasi pendamping dari Aplikasi SIPD Kemendagri, agar data data yang sudah masuk tidak hilang dan tersimpan manakala aplikasi SIPD kemendari mengalami trouble atau proses maintenance, bekerja sama dengan aplikasi SIPD Online;
- ✓ Pengelolaan dan Pengembangan WEB, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dan fasilitasi dengan Semua bidang pada BP3D Kabupaten Boyolali, dan koordinasi dengan Bangda Provinsi dan Bappeda Provinsi terkait dengan laporan pelaksanaan anggaran yang anggarannya bersumber dari DAK, Bankeu, DBHCHT dan TP.

- Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dan fasilitasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dalam rangka penyusunan buku analisis Indeks Pembangunan manusia pada tahun n-1;
- Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kab. Boyolali, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di tingkat Provinsi dan Pusat;
  - ✓ Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga (FEDEP) Kab. Boyolali, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Profil Investasi, Pengembangan Klaster FEDEP Kab. Boyolali dan Terlaksanya Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah.
- Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan koordinasi infrastruktur yang terpadu untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekonomi, sosial dan lingkungan (10 proposal permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dan provinsi);
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boyolali murni 2020 dan Perubahan 2019;
  - ✓ Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Masterplan dan FS Pembangunan Fly Over dan Penyusunan Masterplan Taman Kraton Nusantara.
- Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi tim BPSPAM Kabupaten Boyolali dalam program Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan serta penyusunan RAD AMPL;

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan:
  - ✓ Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Study Pengembangan Kawasan wisata Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. dan Kajian / dokumen program pelaksanaan water city di kabupaten Boyolali;
  - ✓ Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen laporan pelatihan PSETK, Dokumen Laporan Kinerja Komir Kab. Boyolali, Dokumen evaluasi dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi kelembagaan pengelola irigasi dan tersedianya TPM;
  - ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dan sinergitas pembangunan ekonomi daerah dan forum pengembangan ekonomi wilayah Subosukawonosraten.
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Capaian indikator SDGs pada program kegiatan di masing-masing OPD, melalui 17 Goals/Tujuan sesuai dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jateng dan RPJMD Kabupaten Boyolali sesuai dengan target indikatornya;
  - ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi TKPKD dalam upaya percepatan program penanggulangan kemiskinan, GAKY, Pencegahan Stunting
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan kegiatan Koordinasi Pembangunan Daerah rawan Bencana, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Kecamatan Ngemplak dan Nogosari;
- Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi perencanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan kawasan pedesaan;
  - ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan Aksi HAM, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Melaporkan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ranham, dan Kopsurgah secara rutin dan tertib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Prosentase Peningkatan PAD.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

- Meningkatnya kesadaran wajib pajak;
- Bertambahnya objek pajak baru ;
- Lebih mengintensipkan pemungutan/penagihan kepada wajib pajak.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- Alamat wajib pajak diluar wilayah kabupaten boyolali sehinga sulit untuk dihubungi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah lebih mengintensifkan dan mengektensifikasi penerimaan pajak.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melaksanakan kegiatan dengan aplikasi SIMDA Pendapatan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 8,3% dari anggaran Rp. 4.150.422.000,00 digunakan sebesar Rp. 3.803.082.627,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan Intensifikasi dan exstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Pemeliharaan data PBB dan BPHTB, Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, dan Pengendalian operasional pendapatan daerah, serta program Pengendalian kerugian daerah dengan kegiatan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan TPTGR. Dan program Program pengendalian kerugian daerah dengan kegiatan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan TPTGR. Dengan bentuk kegiatan melaksanakan penyusunan surat dalam bentuk Produk dari Sistem Informasi Pajak daerah (SIPAD) – Pengantinya menjadi Simda Pendapatan yaitu:

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Opini laporan keuangan daerah.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

- Penyerahan laporan keuangan ke BPK RI perwakilan Jawa Tengah tepat waktu;
- Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah dan Peraturan menteri dalam negeri no 64 tahun 2013 tentang penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual (sesuai peraturan perundang-undangan);
- Agenda pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD dari proses sampai evaluasi gubernur tepat waktu;
- Laporan keuangan khususnya asset dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah disusun;
- Laporan pertanggungjawaban keuangan ke Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri sesuai jadwal yang sudah ditentukan (tepat waktu).

Ini adalah kedelapan kalinya Boyolali memperoleh WTP secara berturut-turut.

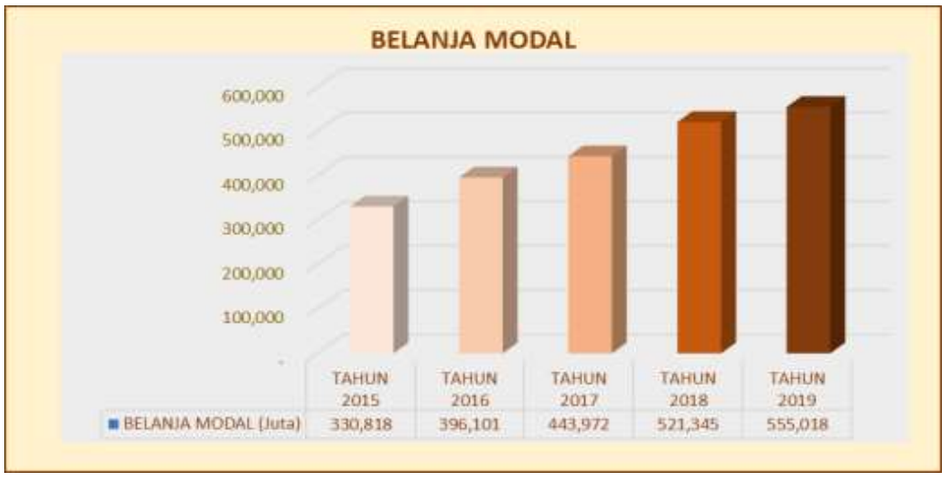
Boyolali melalui Badan Keuangan Daerah juga telah membangun postur keuangan daerah yang sehat, perbandingan atara Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai pada tahun 2019 yaitu. Berikut tabel perbandingan Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai pada tahun 2019:

Tabel 3.10 Perbandingan Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai pada tahun 2019

No	Keterangan	Anggaran Tahun 2019
Pendapatan Umum Daerah		
1	PAD	364.528.449.000
2	DBH	43.166.440.000
3	DAU	1.045.669.922.000
A	**Jumlah**	**1.453.364.811.000**
Belanja Pegawai ASN		
1	Gaji Tunjangan ASN	606.816.911.000
2	Tamsil	292.742.217.000
3	Tamsil Guru	211.935.341.000
B	**Jumlah**	**1.111.494.469.000**
	KKD (A-B)	**341.870.342.000**
	Komposisi	**57:43**

Sumber BKD Kab. Boyolali Tahun 2019

Trend Belanja Modal yang semakin meningkat dari tahun 2015 :



Gambar 3.11 Grafik Trend Belanja Modal 2015-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melaksanakan kegiatan dengan aplikasi SIMDA Aset dan SIMDA Keuangan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 10,61% dari anggaran Rp. 6.321.408.700,00 digunakan sebesar Rp. 5.650.151.898,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatanan dan pengembangan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Penyusunan analisis standar belanja, Penyusunan standar satuan harga, Penyusunan Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Penyusunan sitem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan daerah KDH tentang penjabaran APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Sosialisasi paket regulasin tentang pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan managemen aset/barang daerah, Peningkatan managemen investasi daerah, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak daerah, Intensifikasi dan eksentifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Koordinasi dan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah, Perencanaan & Pengelolaan Administrasi barang milik daerah, Penatausahaan barang milik daerah, Pemanfaatan barang milik daerah, Pengamanan dan pemeliharaan Aset daerah, Penghapusan dan pemindah Tanganan Aset daerah, Penyusunan surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah,Pengendalian pengeluaran keuangan daerah, Penyelenggaraan rapat koordinasi Bendahara pengeluaran, Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah, Pengelolaan Kas Daerah, Fasilitas, penyusunan dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD, Peningkatan pengelolaan Dana bantuan Daerah, Pemeliharaan data PBB dan BPHTB, Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, Pengembangan Pengelolaan Gaji, Bintek peraturan perundang-undangan.

Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam bentuk Produk Simda Keuangan yaitu:

- Simda Keuangan yaitu :
  - RKA Sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu dikompilasikan menjadi Ranperda APBD;
  - Anggaran Kas sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu sebagai dasar penerbitan SPD;
  - Ranperda APBD Sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Bahan Pembahasan dengan DPRD;
  - Raperbup Penjabaran APBD Sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Bahan Pembahasan dengan DPRD;
  - Perda APBD sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
  - Perbup Penjabaran APBD sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan penjabaran dari Perda APBD
  - DPA sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu rincian dari Anggaran SKPD;
  - SPD sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Dasar Penyediaan Dana untuk masing-masing kegiatan;
  - SPP sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Surat Permintaan Pembayaran;
  - SPM sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Surat Perintah Membayar;
  - Buku Kas Pengeluaran sumbernya SKPD ;
  - Laporan SPJ sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Laporan Pertanggungjawaban;
  - Buku Pajak sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Laporan Pajak;
  - SP2D sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Surat Perintah Pencairan Dana;

- Bukti Penerimaan sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Bukti Terima Pendapatan;
- STS sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu Bukti Setor dari Bendahara Penerimaan ke kas daerah;
- Buku Kas Penerimaan sumbernya SKPD;
- SPJ Pendapatan sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan pendapatan;
- Kartu Kendali Penyediaan Dana sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu ketersediaan dana;
- Buku Besar sumbernya SKPD ;
- LRA sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan realisasi anggaran;
- Neraca sumbernya SKPD;
- LO sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan laporan operasional;
- LPE sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan perubahan ekuitas;
- LP SAL sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- LAK sumbernya SKPD fungsi dan kegunaan yaitu laporan arus kas.

- Simda Aset yaitu :
  - Laporan Mutasi Barang;
  - Penghapusan BMD;
  - Laporan Kartu Inventaris Barang (Kid A sd F);
  - Laporan Kartu Inventaris Ruangan;
  - Rekaputulasi Kartu Inventaris Barang (Kid Asd F);
  - Rekap Buku Inventaris;
  - Labelisasi BMD;
  - Laporan Penyusutan BMD.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang menginformasikan adanya penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang merupakan pengganti PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan ketentuan diatas, pemerintah daerah dituntut meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah terutama dalam peningkatan sumber daya manusia agar pengelolaan barang milik daerah berjalan secara optimal.

Adapun sistem aplikasi yang digunakan adalah Simda BMD yaitu sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat menghasilkan informasi secara relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Salah satu aplikasi yang telah dikembangkan adalah Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA - BMD) yang dapat digunakan

sebagai pengolah data pengelolaan aset pemerintah daerah. Sebagai pelengkap pengembangan Program Aplikasi Komputer SIMDA- BMD.

Data yang diproses melalui SIMDA- BMD adalah Perencanaan, Pengadaan, Inventrisasi, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, sedangkan Laporan yang dihasilkan dari aplikasi tersebut adalah Perencanaan dan Pengadaan, Penatausahaan, Laporan KIB – KIR – BI – Label, Laporan Manajemen, Gabungan Pemda, Penggunaan, Penghapusan, Pemanfaatan, dan Laporan Neraca Barang Milik Daerah serta Laporan Penyusutan Barang.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

8) Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali.

a. Keberhasilan capaian indikator ini diperoleh karena :

- Adanya dasar hukum yang mendasari yaitu :
  - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - ✓ Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- Adanya peraturan pelaksanaannya yaitu :
  - ✓ Keputusan Inspektur Kabupaten Boyolali Nomor 800/514.b/11 Tahun 2016 tentang Juknis SPIP Kabupaten Boyolali;
  - ✓ Keputusan Inspektur Kabupaten Boyolali Nomor 800/465.b/11 Tahu 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Berkelanjutan SPIP Kabupaten Boyolali.
- Adanya kelembagaan SPIP yang memadai yaitu Satgas SPIP Tingkat Kabupaten dan Tingkat OPD;
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan Daerah (Bupati) sampai pada jajaran dan staf;
- Adanya pentahapan yang jelas.
  - ✓ Tahap Persiapan;
  - ✓ Tahap pelaksanaan berdasarkan kondisi dan rencana perbaikan pengendalian Intern;
  - ✓ Tahap pelaporan.
- Adanya pemantauan berkelanjutan;
- Berkonsultasi secara intensif ke BPKP Perwakilan Perwakilan Jawa Tengah.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Memberdayakan Sumber Daya Manusia terutama Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali untuk mendapingi penyusunan RTP OPD beserta bukti dukungnya untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 27,16% dari anggaran Rp. 12.950.000,00 digunakan sebesar Rp. 9.432.930,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Sistim dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan kegiatan Penerapan SPIP dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan pendampingan SPIP ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

9) Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali.

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan:

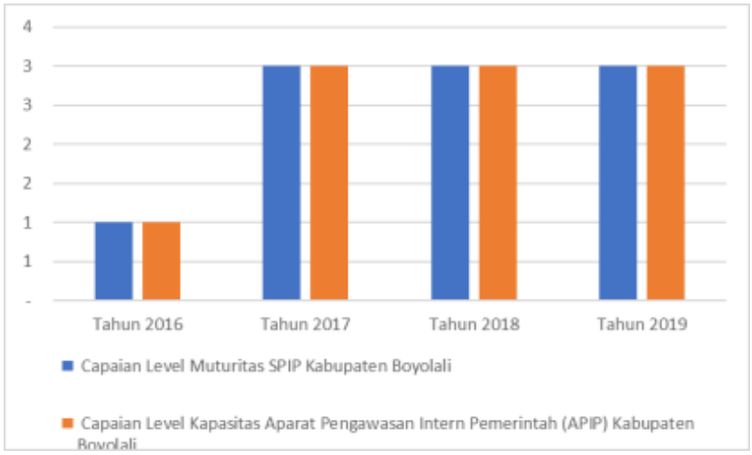
- Adanya pendampingan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
- Konsultasi ke BPKP Provinsi Jawa Tengah apabila terdapat kendala atau permasalahan;
- Mengadakan pertemuan/diskusi dengan Kabupaten/Kota lain yang dihadiri oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah;
- Pelaksanaann tugas pengawasan (secara administrasi) telah mengacu pada peraturan yaitu Permenpan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kendali Mutu APIP;
- Adanya Rencana Aksi dan Tindak lanjut rencana Aksi.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan:

- Melaksanakan semua aktivitas yang dibiayai dari kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan cermat dan yang berhubungan langsung dengan pencapaian indikator kinerja;
- Pengiriman peserta untuk melakukan koordinasi ke BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada personil yang benar-benar membidangi/ menangani langsung Kapabilitas APIP;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 12,10% dari anggaran sebesar Rp. 30.250.000,00 digunakan sebesar Rp. 26.588.530,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, bentuk kegiatan yang dilakukan dengan menyusun dokumen yang belum tersedia, mengumpulkan dokumen pendukung dan mengimplemtasikan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang diamanatkan dalam quistionare Kapabilitas APIP. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Berikut grafik Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali dan Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016-2019:



Gambar 3.12 Grafik Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali dan Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016-2019

10) Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI.

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan:

- Kesungguhan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan administrasi keuangan sehingga penyusunan Laporan Keuaangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan baik;
- Inspektorat Daerah melaksanakan reviu LKPD kepada Organisasi Perangkat Daerah sebelum diperiksa oleh Perwakilan BPK Jawa Tengah;
- Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Audit oleh BPK baik tahun yang bersangkutan maupun tahun - tahun sebelumnya;
- Adanya Rencana Aksi dan Tindak lanjut rencana Aksi.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan:

- Melakukan reviu LKPD kepada OPD dengan tim yang terdiri tiga sampai dengan empat personil, Inspektur Daerah dan tim Reviu LKPD mendapatkan pembekalan dari Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 20,99% dari anggaran sebesar Rp. 17.250.000,00 digunakan sebesar Rp. 13.630.082,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Sistim dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Reviu Dokumen LKPD secara sampel pada OPD Kabupaten Boyolali. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Inovasi atau Prestasi Kinerja di bidang pengawasan:

1. LHKPN

   Keterbukaan harta kekayaan pejabat publik, merupakan bentuk *early warning system* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keterbukaan ini diwujudkan dalam:

   a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

   b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

   c. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (SiharkaBoy).

2. Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK.

   Monitoring dan evaluasi atas progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), diwujudkan dalam:

   a. Aplikasi MCP Korsupgah KPK;

   b. Aplikasi MCP Pemkab Boyolali dengan sasaran seluruh OPD dan Desa se Kabupaten Boyolali.

3. e-Whistleblowing System (e-WBS)

   Aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

4. Auditor sebagai Agen Perubahan

5. Auditor sebagai Pendamping Desa

6. E-Audit/ Pemeriksaan Berbasis IT.

Capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019:

a. Patuh tepat waktu 100% : LHKPN Eksekutif dengan jumlah wajib lapor 222 PN, selesai lapor 100% pada tanggal 7 Januari 2020 TERCEPAT NASIONAL.

b. Patuh tepat waktu 100% : LHKPN Legislatif dengan jumlah wajib lapor 45 PN, selesai lapor 100% per 4 Januari 2019 TERCEPAT NASIONAL;

c. Satu satunya Pemerintah Kabupaten yang wajib dan patuh dalam melaporkan LHKASN untuk wajib lapor Non LHKPN 5 tahun berturut turut;

d. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019 (Nomor 1 Nasional dengan Skor 97 dari Skor maksimal 100);

e. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019;

f. Piagam Penghargaan dari BPKP atas Prestasinya dalam Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3;

g. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Terbaik II untuk Kategori Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur pada Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;

h. Menghentikan Gratifikasi, terkait penerimaan fee bank bagi bendahara SKPD dari bank pemberi pinjaman pegawai;

i. Maturitas SPIP Nilai 3,02 dengan Kategori "Terdefinisi"

j. Efisiensi cross cutting program yang tidak sesuai dengan RPJMD melalui refocusing sebesar 64,35%, atau dari 2.028 kegiatan menjadi 723 kegiatan di semua OPD.

k. Efisiensi anggaran senilai Rp 32,463 Milyar dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 25,7 Milyar dari efisiensi belanja pegawai
- Rp 1,034 Milyar dari Perjalanan dinas dalam daerah
- Rp 2,006 Milyar dari kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kecamatan
- Rp 3,091 Milyar dari Program administrasi perkantoran OPD non Kecamatan
- Rp 632 Juta dari Upah pungut pemungutan pajak

Efisiensi tersebut digunakan untuk peningkatan capaian kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga harapan berupa RTLH, Infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan air bersih serta kewirausahaan masyarakat tingkat kecamatan.

l. *Non Cash transaction* (NCT) pada semua transaksi APBD sejak tahun 2015 dan sekarang dikembangkan sampai ke tingkat desa (APBDes).

m. Penerapan dan pengembangan Siskeudes dan Siswaskeudes.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	dokuman	25	NA	NA	5	100	5	100	5	5	100	B	SETDA
2 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	dokuman	58	33	1100	1	2,86	30	600,00	5	11	220	A	SETDA
3 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	skor	70	62,04	113	63,26	109,07	85,30	139,84	64	65,01	101,58	A	SETDA
4 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	%	83	80,16	100	80,47	99,35	80	98,16	82	80	97,56	B	BKP2D
5 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	%	100	99,80	100	99,8	99,80	98	98,00	100	99,80	99,80	B	BKP2D
6 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	%	80	85	125	68,97	98,53	87,50	121,53	74	122,2	165,14	A	SETDA
7 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	dokuman	371	218	382	153	231,82	68	109,68	62	86	138,71	A	SETDA

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	skor	80	78,17	100,22	78,8	99,75	80,25	101,26	79,50	81,97	103,11	A	SETDA
9 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	%	90	100	100	90	100	90	100	90	90	100	B	SETDA
10 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	182	100	91,05	91,05	95,11	95,11	100	90,99	90,99	B	DISPENDUK CAPIL
11 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	%	100	25	100	47	104,44	79	105,33	100	81	81	B	DISPENDUK CAPIL
12 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	100	100	100	77	77	100	100	100	100	100	B	DISKOMINFO
13 Kualitas layanan e-procurement	skor	81	86,61	109,63	83,28	104,75	83,13	104,24	80	83,87	104,84	A	SETDA
14 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Media	43	6	100	6	100	7	100	7	7	100	B	DISKOMINFO, BAGIAN UMUM SETDA
15 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	dokuman	42	7	100	7	100	7	100	7	7	100	B	DISKOMINFO
16 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	%	85	50	100	40	80	67,00	111,67	75	89	118,67	A	BP3D
17 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	84,91	84,91	B	DINAS ARPUS
18 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	%	60	40	114,29	41,4	103,5	45	100	50	68,25	136,49	A	DINAS ARPUS
19 Prosentase sanggahan lelang	%	4	1,88	168,44	1,73	169,07	1,62	168,81	4,80	2,33	151,46	A	SETDA
20 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	%	100	100	111,11	88	88	100,00	100	100	100	100	B	SEKRETARIAT DPRD
21 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	80	41	100	48	100	55	100,00	62	62	100	B	DPUPR
Capaian				**163,04**		**102,81**		**131,12**			**114,01**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 114,01% (kategori sangat baik) terdiri dari 9 (sembilan) indikator kategori sangat baik (42,86%), dan 12 (dua belas) indikator kategroi baik (57,14%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 9 (sembilan) per indikator:

1) Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dukungan dari masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi obyek pemekaran kecamatan.

      Kabupaten Boyolali akan melakukan pemekaran kecamatan terhadap 3 Kecamatan yang dirasa memiliki jumlah desa banyak, penduduk besar dan luas wilayah yang besar di Boyolali, oleh sebab itu pemerintah melalui asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Boyolali melaksanakan sosialisasi rencana pemekaran kecamatan di 3 Kecamatan dan telah dilakukan kajian teknis yaitu di

Kecamatan Musuk, Ampel dan Wonosegoro dengan melibatkan Kemusu sebagian. Setelah dilakukan proses sosialisasi kepada masyarakat maka langkah selanjutnya adalah penyusunan Kajian Akademis dan Naskah Akademis yang dilakukan oleh civitas akademi dari UGM dan penyusuna Ranperda Pemekaran pembentukan Kecamatan Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro. Langkah selanjutnya adalah pengajuan semua persyaratan pemekaran kecamatan ke Provinsi dan Kemendagri yang akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan oleh tim dari Provinsi dan Kemendagri.Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Tim Provinsi dan Tim Pusat Batas Wilayah Kabupaten lain (Klaten, Grobogan, Semarang) yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolalil ditindaklanjuti berkaitan dengan batas wilayah kecamatan yang akan dimekarkan.,sampai tahun 2019 untuk pemekaran kecamatan telah selesaio, selanjutnya kecamatan hasil pemekaran diusulkan perubahan kode dan data data wilayah ke Kemendagri.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi Rp. 815.900,00 atau 8,78% dari anggaran Rp. 9.290.000,00 digunakan Rp. 8.474.100,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penataan Daerah Otonomi Baru dan kegiatan Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah dan menindaklanjuti dari pemekaran tersebut telah dilakukuan Tracking batas wilayah keseluruhan antara kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten yang selanjutnya untuk diusulkan perubahan Permendagri, batas wilayah Kabupaten Boyolall dan Klaten telah dilakukan juga Tracking batas wilayah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan dalam rangka konsistensi permasalahan pilar batas wilayah ,juga pemecahan perapatan pilar batas Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemekaran dan Sosialisasi bertujuan untuk mendorong aspirasi/ persetujuan dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemekaran karena pemekaran kecamatan harus ada usulan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk terkait pembentukan kecamatan.

   Untuk Kajian teknis pemekaran kecamatan dilakukan oleh civitas akademi dari UGM. Setelah kajian teknis disusun dalam bentuk buku maka langkah selanjutnya adalah penyusunan Naskah Akademis pemekaran kecamatan. Langkah selanjutnya adalah pengajuan semua persyaratan pemekaran kecamatan ke Provinsi dan Kemendagri yang akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan oleh tim dari Provinsi dan Kemendagri.Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Tim Provinsi dan Tim Pusat terhadap Batas Wilayah Kabupaten lain (Klaten, Grobogan, Semarang) yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali ada beberapa hal perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan batas wilayah kecamatan yang akan dimekarkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya pembentukan tiga (3) kecamatan di Kabupaten Boyolali yaitu Kecamatan Wonosamodro,Kecamatan Gladagsarai,Kecamatan Tamansari telah terbentuk. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan

a. Keberhasilan capaian target kinerja ini disebabkan karena telah dilakukan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan Bagian Organisasi, serta dilakukan faslitasi dengan Bagian Hukum dan dengan Biro Organisasi serta Biro Hukum di Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya indikator ini kurang relevan, karena penyusunan kebijakan tidak bisa ditarget dikarenakan kebijakan itu bisa dari paraturan dari pusat atau sesuai kebutuhan.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melibatkan personil dari perangkat daerah;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 31,68% dari total anggaran sebesar Rp. 25.250.000,00 digunakan sebesar Rp. 17.251.547,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penataan Daerah Otonomi Baru dan kegiatan Fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur Organisasi, Peraturan Bupati tentang Perubahan Unit Pelaksana Teknis, serta Penyusunan Peraturan Bupati tentang Uraian Kerja Perangkat Daerah. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan telah telah dilakukan evaluasi atas dokumen Road Map Reformasi Birokrasi, dan telah dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan refomasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Bagian Organisasi belum maksimal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi karena selain keterbatasan anggaran, juga masih minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi. Terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dan tantangan, diantaranya :

- Minimnya komitmen dan kepemimpinan politik;
- Terjadinya politisasi birokrasi;
- Penentangan (resistensi) dari dalam Birokrasi itu sendiri;
- Minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Solusi atas kendala dan tantangan dalam upaya reformasi birokrasi bisa mengacu pada kendala dan tantangan yang diungkapkan sebelumnya. Caranya adalah mengeliminasi semua kendala tersebut dan mencegah kembali hal-hal tersebut dalam birokrasi kita. Komitmen politik dari pimpinan sebenarnya sudah ada dan ini harus tetap dijaga bahkan harus lebih kuat lagi karena ini menjadi prasyarat utama. Hal ini merupakan strategi utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen politik ini perlu dirumuskan dalam formulasi kebijakan dan yang terpenting adalah implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Strategi lain yang perlu diperhatikan dalam strategi reformasi birokrasi adalah adanya lembaga yang bertanggungjawab untuk membuat dan mengawal kebijakan

reformasi birokrasi ini. Strategi berikutnya adalah menentukan fokus dan prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan target pencapaiannya.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melakukan koordinasi dan melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 92,62% dari anggaran sebesar Rp. 25.010.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.838.000,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menyusun dokumen evaluasi atas dokumen Reformasi Birokrasi. Bagian Organisasi belum maksimal dalam kegiatan Reformasi Birokrasi, sehingga pelaksanannya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi.

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena adanya beberapa jabatan di OPD yang ditempati oleh PNS dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, karena kebutuhan organisasi.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Alternatif Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah usulan untuk pindah jabatan, usulan tenaga P3K, usulan tenaga CPNS.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Menggunakan rumus IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) yang telah disusun BKN;
- Menggunakan data SAPK BKN (Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian) yang dibuat BKN;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 62,71% dari anggaran sebesar Rp. 1.794.923.200,00 digunakan sebesar Rp. 669.359.584,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan:

- Seleksi penerimaan CPNS, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendaftaran CPNS, Verifikasi berkas CPNS, Seleksi kompetensi dasar, Seleksi kompetensi bidang, Pemberkasan CPNS, dan Penetapan NIP;
- Penempatan PNS, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan Pengarahan PNS, Penerbitan SK mutasi PNS, dan Pelantikan PNS yang promosi jabatan;

- Penyusunan intrumen analis jabatan PNS, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Seleksi terbuka jabatan PNS dan Menyusun analisis jabatan dan beban kerja PNS untuk jabatan yang diadakan seleksi;

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

5) Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena faktor utama adalah tingkat kedisiplinan ASN yang masih kurang, setiap tahun terdapat kasus pelanggaran disiplin kepegawaian, baik berdasarkan data kinerja, sidak dilapangan maupun laporan dari pihak lain.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus ini dikarenakan masih adanya kekurangan kesadaran ASN terhadap aturan kepegawaian dan tingkat pengawasan intern di OPD masih kurang;

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kegagalan capaian target kinerja ini adalah dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian dan menindak secara tegas pelanggaran disiplin ASN.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah dengan:

- Untuk menekan terjadinya pelanggaran disiplin kepegawaian maka dilakukan sosialisasi peraturan kepegawaian dan workshop penanganan masalah kepegawaian, disamping itu waktu yang diperlukan dalam penyelesaian kasus/pelanggaran disiplin PNS tergantung dari bobot pelanggaran, diperlukan pencermatan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku dan penangan dalam memutuskan kasus dengan kehati-hatian agar dibelakang hari tidak menimbulkan permasalahan hukum;
- Menyempurnakan mesin absen pegawai untuk meminimalisir pegawai yang sering bolos jam kerja;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 7,53% dari anggaran sebesar Rp. 1.593.050.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.473.154.704,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan bentuk kegiatan yaitu Permohonan ijin perceraian, Penerbitan surat keterangan perceraian, Klarifikasi kasus ke daerah, Pemeriksaan ASN yang bermasalah dengan mengundang/ke daerah, dan Konsultasi ke BKN;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, dengan bentuk kegiatan yaitu pengadaan mesin absensi, Perekaman retina dan sidik jari dan merekap absensi PNS se Kabupaten Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Selain indikator tersebur di atas Kabupaten Boyolali melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah juga mendapatkan:

a. Piagam Penghargaan Bupati Boyolali sebagai OPD yang patuh melaporkan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2019;

b. Piagam Penghargaan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah sebagai Kabupaten/ Kota Terupdate 10 dalam Membangun pusat inovasi kepemimpinan melalui eproper (inovasi center) 2017 – 2019.

6) Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda

a. Keberhasilan capaian capaian indikator ini disebabkan usulan yang diajukan oleh Perangkat Daerah maupun usulan yang menjadi inisiatif DPRD dengan berjalannya waktu mengalami perubahan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang selesai dibahas dan diundangkan pada Tahun 2019.

Adapun jumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Propemperda:

- Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 170/39 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan ini, yang diusulkan adalah 17 (tujuh belas) RANPERDA dengan 10 (sepuluh) RANPERDA merupakan Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif Legislatif, dan 7 (tujuh) RANPERDA adalah Kumulatif Terbuka (RANPERDA yang dapat diajukan tanpa harus melalui proses Prolegda), yakni:
  - ✓ Sistem Kesehatan Daerah dengan Inisiator dari Dinas Kesehatan (Eksekutif);
  - ✓ Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Inisiator dari Dinas Ketahanan Pangan (Eksekutif);
  - ✓ Pengelolaan Limbah Air Domestik dengan Inisiator dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Eksekutif);
  - ✓ Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Inisiator dari Komisi I DPRD Kab. Boyolali (Legislatif);
  - ✓ Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Inisiator dari Komisi II DPRD Kab. Boyolali (Legislatif);
  - ✓ Penyelenggaraan Jalan dengan Inisiator dari Komisi III DPRD Kab. Boyolali (Legislatif);
  - ✓ Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Boyolali dengan Inisiator dari Komisi IV DPRD Kab. Boyolali (Legislatif);
  - ✓ Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome dengan Inisiator dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Boyolali (Legislatif);
  - ✓ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan Inisiator dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eksekutif);
  - ✓ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Boyolali dengan Inisiator dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Eksekutif).

RANPERDA Kumulatif Terbuka:

- ✓ Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Akibat Putusan Mahkamah Agung dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Perintah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Penataan Kecamatan dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Penataan Desa dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);

- Dengan perkembangan dinamika terhadap regulasi daerah usulan propemperda mengalami perubahan sebagaimana diusulkan berdasarkan:

  - ✓ Surat Keputusan DPRD NOMOR 170/41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DPRD Nomor 170/39 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan ini, dilakukan perubahan usulan RANPERDA dengan Menyisipkan 2 (dua) nomor setelah nomor 3, yakni nomor 3a dan 3b, dengan Judul dan Inisiator:
    - Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Inisiator dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eksekutif);
    - Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan Inisiator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Eksekutif).

    Dengan Perubahan tersebut jumlah RANPERDA yang diusulkan menjadi 19 (sembilan belas) RANPERDA dengan 12 (sepuluh) RANPERDA merupakan Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif Legislatif, dan 7 (tujuh) RANPERDA adalah Kumulatif Terbuka.
  - ✓ Surat Keputusan DPRD NOMOR 170/18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan DPRD Nomor 170/39 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan ini, dilakukan perubahan usulan RANPERDA yakni:
    - Mengubah Judul RANPERDA nomor 8, semula Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome menjadi Penanggulangan Tuberkolosis dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;

- Usulan RANPERDA nomor 10 dengan Judul Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Boyolali dihapus;
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 10 yakni nomor 11 dengan Judul Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah dengan Inisiator dari dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eksekutif);
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 11 yakni nomor 12 dengan Judul Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali dengan Inisiator dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Boyolali (Eksekutif);
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 12 yakni nomor 13 dengan Judul Penyelenggaraan Kearsipan dengan Inisiator dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Eksekutif).

Dengan Perubahan tersebut jumlah RANPERDA yang diusulkan menjadi 21 (dua puluh satu) RANPERDA dengan 14 (empat belas) RANPERDA merupakan Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif Legislatif, dan 7 (tujuh) RANPERDA adalah Kumulatif Terbuka.

✓ Surat Keputusan DPRD NOMOR 170/43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan DPRD Nomor 170/39 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan ini, dilakukan perubahan usulan RANPERDA yakni:

- Usulan RANPERDA nomor 9 dengan Judul Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dihapus;
- Usulan RANPERDA nomor 13 dengan Judul Penyelenggaraan Kearsipan dihapus;
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 13 yakni nomor 14 dengan Judul Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali dengan Inisiator dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Boyolali (Eksekutif);
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 14 yakni nomor 15 dengan Judul Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan Inisiator dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Boyolali (Eksekutif);
- Menambahkan 1 (satu) nomor RANPERDA setelah nomor 15 yakni nomor 16 dengan Judul Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali dengan Inisiator dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Boyolali (Eksekutif).

Dengan Perubahan tersebut jumlah RANPERDA yang diusulkan menjadi 22 (dua puluh dua) RANPERDA dengan 15 (lima belas) RANPERDA merupakan Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif Legislatif, dan 7 (tujuh) RANPERDA adalah Kumulatif Terbuka.

Pada akhir tahun 2019, khusus RANPERDA Kumulatif Terbuka hanya mengusulkan 3 RANPERDA yaitu:

- ✓ Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 dengan Inisiator dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka).

4 (empat) RANPERDA Kumulatif Terbuka yaitu:

- ✓ Akibat Putusan Mahkamah Agung dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Perintah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Penataan Kecamatan dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka);
- ✓ Penataan Desa dengan Inisiator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (RANPERDA Kumulatif Terbuka).

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran tidak ada yang diusulkan. Sehingga jumlah akhir RANPERDA yang diusulkan DPRD tahun 2019 adalah 18 (delapan belas) RANPERDA dengan rincian 15 (lima belas) RANPERDA merupakan Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif Legislatif, dan 3 (tiga) RANPERDA adalah Kumulatif Terbuka. Pada Akhir Tahun 2019 Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah, dengan rincian 18 (delapan belas) Peraturan Daerah merupakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2019, dan 4 (empat) Peraturan Daerah merupakan Peraturan Daerah yang masuk pada Masa Sidang sebelum Tahun 2019 dan baru ditetapkan pada Tahun 2019 karena harus melalui evaluasi dari Kementerian terkait atau disebut Peraturan Daerah Luncuran. Sehingga bila diprosentasekan kinerja penyusunan Produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan Proledga pada Tahun 2019 dapat kami sampaikan 22 : 18 x 100% = 122,2 %

Dalam pencapaian target terpenuhinya prosentase terhadap produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda pada umumnya menghadapi kendala/permasalahan pada komunikasi dan koordinasi yang harus dibangun oleh tim pembahasan rancangan peraturan hukum produk daerah baik rancangan yang berasal dari inisiatif DPRD maupun rancangan yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Melakukan inventarisasi terhadap usulan ranperda yang akan diusulkan untuk pembahasan pada Tahun N+1 berserta dinamika perubahannya sehingga diperoleh informasi dan masukan sebagai argumentasi terhadap pencapaian kinerja produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan Program Legislasi Daerah (prolegda);
- Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala agar Perangkat Daerah dapat segera menyusun kebutuhan terhadap regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung tercapainya kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, baik dalam bentuk kebutuhan akan regulasi yang harus diubah karena adanya perintah dari Peraturan perundang-undangan di atasnya untuk dilakukan penyesuaian, ataupun kebutuhan akan regulasi baru karena regulasi yang belum tersedia di daerah maupun regulasi yang baru untuk mencabut dan menggantikan regulasi yang sudah ada namun bertentangan/sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan

- Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi SDM sudah terpenuhi karena dalam fasilitasi pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan produk daerah telah dilakukan pembagian peran dan tugas khususnya dibagian hukum setda Kabupaten Boyolali, yang setiap pembahasannya melibatkan peran serta Perangkat Daerah terkait;
- Dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi dilakukan dalam hal proses pembahasan yang setiap saat menggunakan sarana elektronik berupa LCD dan perangkat Laptop, adapun penggunaan sarana dan prasaran tersebut dikandung maksud agar dalam setiap pembahasan dapat mengurangi penggunaan dan penyediaan barang habis pakai seperti alat tulis, kertas dan lain-lain;
- Dari sisi anggaran, dengan telah ditetapkan ketentuan bahwa segala yang menjadi tugas pokok dan fungsi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari kinerja PNS yang tidak lagi membebani APBD untuk rekening honor dan diganti dengan memberikan TPP sebagai penghargaan atas beban kerja yang dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali sedikit banyak dapat melakukan efisiensi dan penekanan pada Belanja Pegawai dalam bentuk honor Tim penyusun dan pembahas Rancangan Peraturan Daerah pada Program dan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 25,37% dari anggaran sebesar Rp. 126.750.000,00 digunakan sebesar Rp. 94.593.677,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan melaksanakan antara lain:

- ✓ Rapat koordinasi tahunan dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda) yang akan diusulkan sebagai inisiatif Pemerintah Daerah yang masukan dan substansi isinya berasal dari Perangkat Daerah;
- ✓ Menyusun inventarisasi usulan Propemperda untuk disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersama-sama dengan Bapemperda sebagai bahan untuk diterbitkannya Propempenda Kabupaten Boyolali pada Tahun N +1;
- ✓ Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dengan memberikan fasilitasi untuk pembahasan internal Tim Eksekutif sebelum rancangan disampaikan kepada DPRD;
- ✓ Merumuskan, menyusun dan menyampaikan usulan Propemperda dari Eksekutif yang diajukan secara resmi oleh Bupati Kabupaten Boyolali kepada DPRD Kabupaten Boyolali;
- ✓ Menyiapkan tim fasilitasi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali dalam setiap tahapan pembahasan/sidang selama tahun berjalan (umumnya satu tahun dilakukan 3 kali Masa Sidang Pembahasan);
- ✓ Melakukan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun antar Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka memperkaya wacana dan materi bahan pembahasan bersama dengan DPRD dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan denganmelaksanakan antara lain:
  - ✓ Mengikuti Rapat koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Boyolali terkait usulan rancangan perda yang diusulkan dan akan dibahas pada Tahun N+1;
  - ✓ Mengikuti Rapat koordinasi dengan Bamus DPRD untuk penentuan jadwal paripurna dan/atau pembahasan terkait dengan rancangan Perda yang diusulkan;
  - ✓ Menyusun bahan masukan Bupati kepada DPRD dalam sidang Paripurna terkait dengan Penjelasan Bupati terhadap Ranperda usulan Pemerintah Daerah yang akan dibahas pada Masa Sidang I, II dan III Tahun bersangkutan;
  - ✓ Menyusun bahan masukan Bupati kepada DPRD dalam rapat Pansus terkait dengan Pendapat Bupati terhadap Ranperda usulan/inisiatif DPRD yang akan dibahas pada Masa Sidang I, II dan III Tahun bersangkutan;
  - ✓ Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa/pengusul Rancangan Perda dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
  - ✓ Memberikan fasilitasi dan pembahasan internal dengan Perangkat Daerah sebelum, pada saat pembahasan dan setelah masa pembahasan ranperda berakhir;
  - ✓ Mengikut seluruh prosedur dan proses pembahasan ranperda bersama-sama dengan Pansus DPRD dan Perangkat Daerah terkait.
  - ✓ Mengawal fasilitasi pembahasan ranperda untuk mendapatkan evaluasi dari Biro Hukum atau dari Perangkat Daerah di Provinsi sampai dengan memperoleh Nomor Registrasi;

- ✓ Melaksanakan proses persetujuan, penetapan, dan pengundangan ranperda menjadi Perda Kabupaten Boyolali;
- ✓ Melakukan proses administrasi pencatatan, penandatanganan, penomoran, pendistribusian Perda Kabupaten Boyolali;
- ✓ Melakukan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun antar Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka memperkaya wacana dan materi bahan pembahasan bersama dengan DPRD dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi

a. Keberhasilan ini disebabkan dari Perangkat Daerah Pengampu Urusan sudah melakukan penyusunan kebijakan dengan difasilitasi oleh Bagian di Sekeratriat Daerah yang mengampu urusan dari Perangkat Daerah.

Sebenarnya indikator ini tidak relevan, karena indikator jumlah kebijakan teknis tidak bisa di target realisasinya, dikarenakan bisa saja kebijakan teknis itu kejadiannya insidentil tidak bias diprediksi.

Berikut adalah rumusan kebijakan teknis (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) di bidang pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi yang disusun pada Tahun 2019:

- Peraturan Daerah:

Tabel 3.12 Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019

NO	NOMOR	TENTANG
1	1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2	2 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
3	3 Tahun 2019	Sistem Kesehatan Daerah
4	4 Tahun 2019	Ketahanan Pangan Dan Gizi
5	5 Tahun 2019	Pengelolaan Air Limbah Domestik
6	6 Tahun 2019	Perlindungan Penyandang Disabilitas
7	7 Tahun 2019	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8	8 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031
9	9 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali
10	10 Tahun 2019	Penyelenggaraan Jalan
11	11 Tahun 2019	Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
12	12 Tahun 2019	Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Boyolali
13	13 Tahun 2019	Penanggulangan Tuberkulosis Dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
14	14 Tahun 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018
15	15 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
16	16 Tahun 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
17	17 Tahun 2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

NO	NOMOR	TENTANG
18	18 Tahun 2019	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
19	19 Tahun 2019	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
20	20 Tahun 2019	Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali
21	21 Tahun 2019	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolli Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali
22	22 Tahun 2019	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolli Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah

Sumber : Bagian Hukum Tahun 2019

- Peraturan Bupati:

Tabel 3.13 Daftar Peraturan Bupati Boyolali Tahun 2019

NO	NOMOR	TENTANG
1	1 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
2	2 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kabutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
3	3 Tahun 2019	Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali 2019
4	4 Tahun 2019	Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Trasportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali 2019
5	5 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
6	6 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali
7	7 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
8	8 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
9	9 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
10	10 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
11	11 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
12	12 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali
13	13 Tahun 2019	Pedoman Pendidikan Kepramukaan Bagi Peserta Didik Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
14	14 Tahun 2019	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Boyolali
15	15 Tahun 2019	Tata Cara Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana Sarana, Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
16	16 Tahun 2019	Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
17	17 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
18	18 Tahun 2019	Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
19	19 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

NO	NOMOR	TENTANG
20	20 Tahun 2019	Pedoman Program Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
21	21 Tahun 2019	Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
22	22 Tahun 2019	Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	23 Tahun 2019	Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
24	24 Tahun 2019	Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Daerah
25	25 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabuaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
26	26 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
27	27 Tahun 2019	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
28	28 Tahun 2019	Pengelolaan Aset Desa
29	29 Tahun 2019	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabuaten Boyolali Tahun 2019
30	30 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali
31	31 Tahun 2019	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018
32	32 Tahun 2019	Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
33	33 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Btahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali
34	34 Tahun 2019	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
35	35 Tahun 2019	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
36	36 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
37	37 Tahun 2019	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
38	38 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
39	40 Tahun 2019	Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
40	41 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pengelokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
41	42 Tahun 2019	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Boyolali
42	43 Tahun 2019	Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Di Kabupaten Boyolali
43	45 Tahun 2019	Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali
44	46 Tahun 2019	Perubhan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
45	47 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
46	48 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
47	49 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa
48	50 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
49	51 Tahun 2019	Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Kabupaten Boyolali

NO	NOMOR	TENTANG
50	53 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
51	54 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
52	56 Tahun 2019	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
53	57 Tahun 2019	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Boyolali
54	58 Tahun 2019	Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020
55	59 Tahun 2019	Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
56	60 Tahun 2019	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
57	64 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
58	65 Tahun 2019	Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
59	66 Tahun 2019	Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
60	67 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
61	68 Tahun 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
62	74 Tahun 2019	Tata Cara Pembagian Dan Pentetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
63	75 Tahun 2019	Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2020
64	76 Tahun 2019	Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Boyolali

Sumber : Bagian Hukum Tahun 2019

Realisasi ini baru Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, belum termasuk Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran atau kebijakan lain.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Bidang Pemerintahan : dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 37,33% dari anggaran sebesar Rp. 302.797.500,00 digunakan sebesar Rp. 189.770.164,00;
- Bindang Perekonomian : dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 14,56% dari anggaran sebesar Rp. 743.003.000,00 digunakan sebesar Rp. 634.807.738,00;
- Bindang Pembangunan : dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 45,99% dari anggaran sebesar Rp. 339.505.000,00 digunakan sebesar Rp. 183.337.579,00.

- Bidang Kesejahteraan Rakyat : dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 11,41% dari anggaran sebesar Rp. 1.011.680.000,00 digunakan sebesar Rp. 896.294.610,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

a) Bidang Pemerintahan:

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan:
  - ✓ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, dan bentuk kegiatan Rapat koordinasi dan fasilitasi capaian kinerja OPD di bawah koordinasi Bagian Tata Pemerintahan, dan Rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - ✓ Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, dan bentuk kegiatan adalah Fasilitasi penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah, dan bentuk kegiatan Rapat koordinasi permasalahan pertanahan;
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah, dengan kegiatan Rapat Koordinasi unsur Muspida, dan bentuk kegiatan Rapat Koordinasi Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah);
- Program Penataan Daerah Otonomi baru, dengan kegiatan Fasilitasi penyiapan data dab informasi pendukung proses pemekaran daerah, dengan bentuk kegiatan Sosialisasi pemekaran penataan kecamatan kelurahan kepada masyarakat;
- Program Pendidikan Politik Mayarakat, dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan, bentuk kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan, dengan kegiatan Pelayanan Adminstrasi dan Publik kecamatan /Kelurahan, bentuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Administrasi Kelurahan;
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan, bentuk kegiatan Penyelenggaraan Rakor POK.

b) Bidang Perekonomian:

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, serta bentuk kegiatannya adalah Mengikuti pameran investasi hasil produksi UMKM agar dikenal masyarakat luas;
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:

- ✓ Kajian kebijakan penanaman modal, dengan bentuk kegiatannya adalah Penyusunan Naskah Akademik Ranperda penyertaan modal PT BKK Jateng, Penyusunan Kajian investasi Pemda tentang Penyertaan modal ke PT BKK Jaten, dan Penyusunan Kajian investasi Pemda tentang Penyertaan modal ke PT. BPR Bank Boyolali;
- ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dan pembinaan BUMD untuk meningkatkan kinerja BUMD.

- Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta bentuk kegiatannya adalah Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dan Monitoring kegiatan penambangan di Wilayah Kabupaten Boyolali;
- Program pengembangan wilayah transmigrasi, dengan kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, dengan bentuk kegiatan yaitu Sosialisasi/mencari calon transmigrasi, dan Pendampingan/mengantarkan calon transmigran sampai di Transito Semarang ke Wilayah transmigran tujuan;
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan:
  - ✓ Perumusan kebijakan pembangunan Bina Ekonomi Daerah, dengan bentuk kegiatannya adalah Koordinasi dan pembinaan BUMD, dan Pembinaan dan pengembangan UMKM;
  - ✓ Pengembangan Lingkungan sosial pertanian, dengan bentuk kegiatannya adalah Koordinasi dan Pelaporan penggunaan DBH CHT ke Pemerintah Provinsi, Pameran Produk unggulan UMKM, Pelatihan/pengembangan kualitas SDM UMKM, dan Pelatihan dan pengembangan bagi pelaku Wira usaha, serta Mengadakan studi banding pengelolaan DBH CHT;
- Program Pengembangan data/informasi, dengan kegiatan Penyusunan dan anlisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi, denga bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi, pemantauan dan pelaporan laju inflasi daerah (perkembangan harga barang kebutuhan pokok masyarakat), dan Mengadakan studi banding TPID, pengendalian stabilitas pangan.

c) Bidang Pembangunan:

- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan:
  - ✓ Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah /Perangkat Kelurahan, bentuk kegiatan Rakor POK (Pengendalian Operasional Kegiatan) 4 kali dalam satu tahun;
  - ✓ Pengendalian manajemen pelaksanaan pembangunan daerah, bentuk kegiatannya Pengendalian dan monev, Menyelenggarakan Rakor Jasa Konstruksi, dan Input TEPRA (Tim Evaluasi Pengendalian Realisasi Anggaran).
- Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan betuk kegiatan Pensertifikatan tanah, Penyelesaian Konflik pertanahan, dan Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional;

d) Bidang Kesejahteraan Rakyat:

- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi bidang sosial dan keagamaan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah memfasilitasi petugas TPHD/TKHD, Memfasilitasi peringatan hari besar keagamaan (Agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha), Kegiatan bidang Sosial;
  - ✓ Koordinasi bidang Bina Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah mengkoordinasikan dan memonitoring kegiatan UKS dan organisasi perempuan;
  - ✓ Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

8) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilaksanakan pembinaan pelayana pubik ke unit-unit pelayanan di Kabupaten Boyolali, dan unit pelayanan sudah bisa melengkapi indikator-indikator dalam dokumen survey kepuasan masyarakat (SKM), sehingga Nilai SKM dari unit-unit pelayanan meningkat dari tahun lalu, dan otomatis Nilai SKM Kabupaten Boyolali Tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Selain itu aplikasi LAPORSP4N dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah Republik Indonesia juga sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja ini, dikarenakan masyarakat yang merasa mengalami ketidakpuasan dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik akan dengan sangat mudah melaporkannya melalui aplikasi android lapor, web, sms, ataupun tweeter. Berikut grafik Nilai SKM tahun 2016–2019:



Gambar 3.13 Grafik Nilai SKM tahun 2016 – 2019

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Melibatkan personil dari unit pelayanan untuk menyusun dokumen SKM;
- Melakukan pembinaan ke unit pelayanan;

- Menyusun dan menyebarkan stiker LAPORSP4N;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 64,88% dari anggaran sebesar Rp. 139.950.000,00 digunakan sebesar Rp. 49.145.117,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Pelayanan Publik dan kegiatan :

- Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pembinaan kepada unit – unit pelayanan pelayanan publik, menyusun dokumen SKM Kabupaten dan fasilitasi unit pelayanan dalam penyusunan dokumen SKM unit pelayanan; pada program ini juga dilaksanakan pembinaan ketatalaksanaan perangkat daerah yang pada tahun 2019 hanya beberapa perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dikarenakan keterbatasan anggaran dan waktu;
- Penyusunan Standar Pelayanan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen standar pelayanan unit pelayanan publik kepada unit pelayanan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

9) Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari OPD baik berupa kegiatan pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak ketiga maupun dengan instansi vertikal. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembahasan dan penjajagan kerjasama baik itu terealisasi dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ataupun sampai akhir tahun 2019 masih terbatas pada pembahasan dan penjajagan mendalam draft ataupun konsep nota kesepahaman.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari OPD baik berupa kegiatan pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak ketiga maupun dengan instansi vertical;
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan tim TKKSD melalui intensitas rapat koordinasi;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi Rp. 6.577.047,00 atau 3,45% dari anggaran Rp. . 61.525.000,00 digunakan Rp. 59.403.844,00

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Kerjasama pembangunan dan kegiatan:

- Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga, dengan bentuk kegiatan Fasilitasi MOU, Nota Kesepakatan kerjasama yaitu Fasilitasi MOU dan Nota Kesepakatan kerjasama, diantaranya:
  - ✓ Fasilitasi Kerjasama antara PT Abror Karunia Perdhana dengan Bupati Boyolali terkait pengelolaan sampah TPA Winong.

- ✓ Fasilitasi Kesepakatan bersama antara Pemkab Grobogan dengan Pemkab Boyolali
- ✓ Fasilitasi kerjasama antara pemkab Boyolali dengan Yayasan Haji Rumah Sakit Islam Kabupaten Klaten
- ✓ Fasilitasi kerjasama antara Pemkab Boyolali dengan PT. Pertamina
- ✓ Fasilitasi kerjasama antara Pemkab Boyolali dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (buku KAD), dengan bentuk kegiatan yaitu Penyusunan buku laporan kerjasama daerah.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

10) Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena ada satu indikator tidak mencapai target yaitu pada indikator cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk, yang di target 75% terealisasi 65.22%.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah penduduk yang sudah usia lanjut tidak mengajukan permohonan akte kelahiran.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan pelayanan dengan cara jemput bola dengan mobil keliling pelayanan adminduk.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan, yaitu :

- Melaksanakan pelayanan jemput bola dengan mobil keliling pelayanan adminduk;
- Melakukan pelayanan akte kelahiran dengan sistem on line dengan menggunkan aplikasi SAPI adminduk (sistem pelayanan identitas kependudukan);
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan adminduk;
- Untuk menunjang pelaksanaan pencapaian indicator tersebut di biayai dengan anggaran kegiatan yang saling berkaitan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya pada program Penataan administrasi kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.099.709.000,00, yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 3.846.186.000,00 dan yang bersumber dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.253.523.000,00, yang teralisasi sebesar Rp. 5.762.841.143,00 (94,47%) dengan efisiensi sebesar 5,53%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penataan administrasi Kependuduan, dengan kegiatan yang saling berkaitan antara lain : Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan, Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan, Monitoring,evaluasi dan pelaporan, Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil,

Pelayanan Administrasi Kependudukan, Penanganan pengaduan pelayanan adminduk, Penyediaan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.

Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan :

- Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk;
- Melaksanakan pelayanan Dokumen kependudukan di 19 kecamatan maupun di kantor dinas;
- Melaksanakan pelayanan jemput bola dengan mobil keliling;
- Melaksnakan Perjanjian Kerja Sama dengan instansi lain (PKS).

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

11) Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena pemekaran wilayah (Kecamatan), yang sarana dan prasarananya belum maksimal. Khusus untuk Kecamatan Mojosongo dikarenakan ruang pelayanan kurang luas.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Keping KTP yang jumlahnya sedikit dan menunggu pengiriman dari pusat;
- Jaringan untuk aplikasi SIAK di kecamatan baru belum terpasang;
- Peralatan untuk merekam dan pencetakan KTP-el belum terdistribusi ke Kecamatan yang baru.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Menerbitkan Surat keterangan pengganti KTP-el;
- Koordinasi dengan Dirjen Adminduk keterkaitan dengan ketersedian Keping KTP-el;
- Pemasangan jaringan di wilayah kecamatan baru, pelayanan adminduk Kecamatan baru dilakukan (menginduk) pada Kecamatan lama.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan,

- Menerbitkan Surat keterangan pengganti KTP-el;
- Untuk menunjang pelaksanaan pencapaian indikator tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.630.950.000,00,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.463.136.991,00 atau 89,72% dengan efisiensi sebesar 10,28%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pemasangan dan setting alat Cetak di 9 Kecamatan;
- Pencetakan KTP-EL;
- Pemasangan Jaringan di wilayah Kecamatan baru.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Di bidang kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Boyolali pada Tahun 2019 menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai “Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik” dengan kategori “BAIK”.

12) Terlaksananya fasilitasi layanan persandian

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya kegiatan pelatihan di bidang persandian.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

- Kurangnya SDM yang memadai di bidang persandian
- Kurangnya pelatihan di bidang persandian

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

- Perlu adanya penambahan SDM yang menguasai tentang layanan persandian
- Perlu adanya pelatihan di bidang persandian;
- Membuka formasi CPNS untuk sandiman.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 23,6% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 122.400.000,00 anggaran yang digunakan sebesar Rp. 93.516.500,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Intensifikasi Retribusi Menara Telekomunikasi, serta dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan monitoring menara telekomunikasi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

13) Kualitas layanan e-procurement

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena komitmen petugas pelayanan di unit kerja pelayanan LPSE dan unit kerja pelayanan pengadaan barang/jasa yang tinggi dalam menjalankan pelayanan kepada penyedia dan satker, adanya standar operasional pelayanan yang diterapkan dengan baik di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Boyolali. Indikator ini pada tahun 2019.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

- Standar pelayanan yang kurang sederhana;
- Jumlah petugas pelayanan yang sangat terbatas;
- Banyak kuesioner yang diedarkan ke penyedia dan satker yang tidak diisi dengan benar;
- Kemampuan petugas pelayanan yang masih sangat kurang kompeten;

- Belum adanya kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap proses pengadaan barang/jasa di tiap Satuan Kerja, sehingga tidak dapat dipantau perkembangan/progres peningkatan pengadaan barang/jasa.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

- Melakukan revisi dan evaluasi terhadap standar pelayanan dengan dilakukan penyederhanaan waktu dan prosedur;
- Pengusulan ke Dinas Kepegawaian, Pendidkan dan Pelatihan Daerah Kab. Boyolali untuk penambahan personil untuk pelayanan pengadaan barang/jasa;
- Pengisian kuesioner survey kepuasan masyarakat diisi di lokasi dan langsung dikembalikan;
- Mengirimkan petugas pelayanan dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa dan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara elektronik);
- Untuk tahun 2020 diupayakan adanya monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian kontrak.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Penilaian kualitas layanan e-procurement melibatkan penyedia barang/jasa dan Perangkat Daerah yang mempunyai paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kab. Boyolali;
- Penyusunan standar pelayanan yang sederhana yang memadai pelayanan pengadaan barang/jasa dan LPSE;
- Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan pengadaan barang/jasa dan LPSE;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,49% (Rp. 13.741.528,00) dari anggaran sebesar Rp. 394.235.000,00 digunakan sebesar Rp. 380.493.472,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan kegiatan Fasilitasi Pelayanan LPSE. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kab. Boyolali, Pengadaan bandwith internet dan pengadaan sarana prasarana kantor sebagai pendukung pelayanan, penyebarluasan kuesioner survey kepuasan masyarakat kepada penyedia barang/jasa dan seluruh perangkat daerah. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

14) Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya kerjasama antara wartawan dan tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kurangnya peralatan media liputan yang memadai;
- Kurangnya media yang lebih luas dalam distribusi berita dan informasi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

- Menggunakan peralatan media liputan yang sudah ada;
- Mendistribusi informasi dan berita dalam beberapa media sosial seperti Web Site dan Twitter.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan :

- Pembuatan pemberitaan melalui PPID;
- Pengumpulan berita dan informasi terkait kegiatan Bupati;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 0,05% dari anggaran sebesar Rp. 345.750.000,00 di gunakan sebesar Rp. 345.562.275,00.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dengan kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan berita dan mendistribusikan berita serta informasi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

15) Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan.

a. Keberhasilan dalam capaian indikator ini disebabkan karena adanya kerjasama antara BPS dengan Bidang Statistikdan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pengumpulan data di tiap kecamatan lambat sehingga dalam capaianya terlambat namun tercapai.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan dalam penyusunan data statistik.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 0,9% Dari anggaran sebesar Rp. 128.090.000,00 digunakan sebesar Rp. 126.985.208,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan Kegiatan :

- Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, dengan melaksanakan Penyusunan buku KDA dan BDA;
- Penyusunan dan pengumpulan data PDRB, dengan melaksanakan Penyusunan quesioner SKPR;

- Pengolahan, updating dan analisis data PDRB, dengan melaksanakan Penyusunan naskah questioner;
- Penyusunan dan Analisis data/ Informasi Perencanaan pembangunan Ekonomi (NTP), dengan melaksanakan Penyusunan buku NTP;
- Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (IE), dengan melaksanakan Penyusunan buku IE.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

16) Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya dukungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta tingginya tingkat partisipasi pelajar dan masyarakat umum dalam mengikuti lomba kreativitas dan inovasi. Penjaringan Krenova tingkat Kabupaten tahun 2019 menghasilkan 9 inovasi baru yang diikutsertakan dalam lomba krenova di tingkat Provinsi dan tingkat Subosukowaonosraten. Dari 9 inovasi tersebut yang diterapkan di masyarakat sebanyak 8 inovasi.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah: masih kurangnya kegiatan sosialisasi sampai ke semua lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan lomba kreativitas dan inovasi

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah meningkatkan koordinasi dengan kecamatan agar lebih aktif dalam mensosialisasikan lomba kreativitas dan onovasi.

b. Analisis efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
   - Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan indikator kerja dapat dilakukan dikegiatan Penjaringan Krenova dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam kedua kegiatan tersebut dapat menemukan potensi-potensi inovasi yang sebelumnya tidak dikenal masyarakat umum dan selanjutnya dengan menyelenggarakan lomba krenova di tingkat kabupaten, tingkat Subosukawonosraten maupun tingkat provinsi dapat diperkenalkan ke masyarakat luas inovasi-inovasi baru yang bermanfaat;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,51% dari anggaran sebesar Rp. 491.032.000,00 digunakan sebesar Rp. 483.613.400,00.

c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan :

   Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah. Dengan kegiatan:
   - Penjaringan Krenova, Kegiatan Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali adalah kegiatan di bidang Kelitbangan untuk melakukan penjaringan sekaligus menampung temuan kreatif dan inovatif dari masyarakat di semua bidang yang bermanfaat bagi kehidupan dan mempermudah pekerjaan. Manfaat dari kegiatan ini memotivasi masyarakat/ pelajar untuk berkreasi dan berinovasi serta hasilnya dapat diketahui dan digunakan oleh masyarakat;

- Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan, adalah kegiatan fasilitasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kelitbangan. Fasilitasi yang dilakukan meliputi penyediaan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik di Kabupaten Boyolali maupun di luar daerah. Manffatnya kegiatan dibidang litbang bisa sinergi dan sesuai dengan yang diharapkan;
- Kajian Penelitian dan Pengembangan, adalah kegiatan di Bidang Kelitbangan untuk melakukan penyusunan Aplikasi Kelitbangan dalam melakukan pelayanan Rekomendasi Teknis Penelitian secara online (berbasis web) bagi para peneliti yang mengadakan penelitian di Kabupaten Boyolali. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mewujudkan pelayanan rekomendasi penelitian yang mudah, murah, dan cepat; sebagai sarana untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penelitian yang dilaksanakan di Boyolali; serta penyediaan database penelitian di Kabupaten Boyolali;
- Penguatan Sistem Inovasi Daerah, adalah kegiatan di bidang kelitbangan untuk melakukan pembentukan Tim Koordinasi SIDa, menyusun Perbup Penguatan SIDa dan menyusun Dokumen Roadmap SIDa. Manfaatnya untuk membangkitkan Kreatifitas dan inovasi sumber daya lokal sehingga produk – produk daerah dapat bersaing dengan daerah lain karena mengingat persaingan global yang semakin ketat dan siklus yang semakin pendek akibat kemajuan teknologi dan informasi.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Selain pencapaian indikator di atas Kabupaten Boyolali melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mendapatkan:

a. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Kabupaten sangat Inovati (indeks : 5660) Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019;
b. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Juara III Kategori Sumber Daya Manusia Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

17) Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

a. Kegagalan capaian indikator prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dikarenakan belum semua OPD mengirimkan arsip nya untuk diolah Dinas Kearsipan dan perpustakaan kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Pengelolaan kearsipan di satuan kerja belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain karena petugas pengelola kearsipan di Satuan Kerja masih sering dibebani tugas-tugas lain.Selain itu sering dilakukan pergantian petugas sehingga petugas yang baru belum begitu memahami pengelolaan arsip secara baik dan benar;
- Kurangnya sarana tata kearsipan di Satuan Kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar;
- Kurangnya kepedulian pimpinan terhadap pengelolaan arsip di satuan kerjanya.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Menyelenggarakan manajemen kearsipan yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku di setiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali, melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pembinaan Kearsipan secara rutin, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Badan Arpus Provinsi dan ANRI.
- Menghimbau kepada SKPD mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana tata kearsipan di setiap Satuan Kerja.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah dengan melaksanakan:

- Bimbingan teknik Kearsipan yang diikuti sebanyak 50 orang dari OPD se-Kabupaten Boyolali;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,85% untuk dari anggaran sebesar Rp. 128.281.500,00 digunakan sebesar Rp. 123.345.050,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dan kegiatan:

- Pembangunan data base informasi kearsipan, dengan bentuk kegiatan Mengadakan Diklat Kearsipan dilanjutkan dengan kunjungan lapan ke dinas kearsipan yg lebih maju;
- Kajian sistem informasi kearsipan, dengan bentuk kegiatan Pembinaan kearsipan ke SKPD dan Kecamatan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

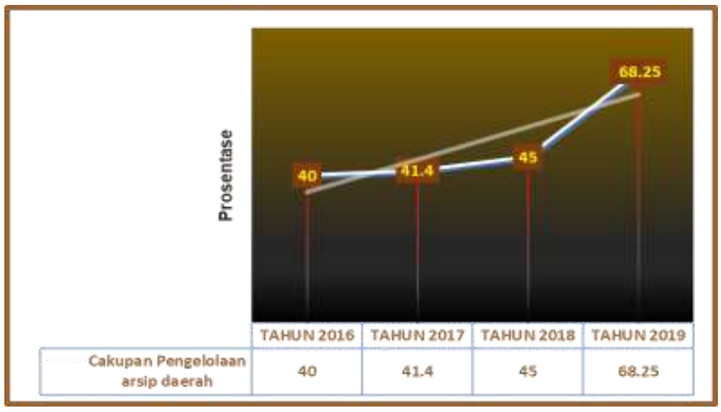
18) Cakupan Pengelolaan arsip daerah

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena terselenggaranya 1 (satu) kegiatan dalam bentuk pembinaan dan monitoring secara rutin dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan sasaran desa, kecamatan, UPT dan OPD se-Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Personal kearsipan disatuan kerja belum dapat berfungsisecara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena petugas pengelola kearsipan disatuan kerja masih sering dibebani tugas-tugas lain. Selain itu sering dilakukan pergantian petugas sehingga petugas yang baru belum begitu memahami pengelolaan arsip secara baik dan benar. Kurangnya sarana tata kearsipan disatuan kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar; Kurangnya kepedulian pimpinan terhadap pengelolaan arsip disatuan kerjanya.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah menyelenggarakan menejemen kearsipan yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku disetiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali, melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Pembinaan Kearsipan secara rutin, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Badan Arpus Provinsi dan ANRI, menghimbau kepada kepala SKPD mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana tata kearsipan di setiap Satuan Kerja.melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD secara rutin.

Berikut grafik cakupan pengelolaan arsip daerah dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.14 Grafik cakupan pengelolaan arsip daerah dari tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Mengadakan monitoring dan pembinaan secara rutin dengan sasaran desa, kecamatan, UPT dan OPD se-Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh SDM yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,39% untuk dari anggaran sebesar Rp. 205.750.000 digunakan sebesar Rp. 192.799.555,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dengan kegiatan Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah;
- Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan monitoring ke arsipan ke SKPD dan Kecamatan;
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan :
  - ✓ Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan mendatangi sumber arsip;
  - ✓ Sosialisasi penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan mengadakan sosialisasi kearsipan bagi pranata kearsipan di semua OPD dan kecamatan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

19) Prosentase sanggahan lelang

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena komitmen pelayanan di unit kerja pengadaan barang/jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga menghasilkan penyedia barang/jasa yang handal dan adanya kebijakan dari Bupati Boyolali yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam

Keputusan Bupati Boyolali Nomor 050/044 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boyolali.

Berikut grafik capaian kinerja Indikator Prosentase sanggahan Lelang dari tahun 2016 dan 2019 adalah :



Gambar 3.15 Grafik Prosentase sanggahan Lelang dari tahun 2016 dan 2019

Grafik Jumlah Paket Pekerjaan yang dilelangkan di Bagian Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kab. Boyoloali dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah :



Gambar 3.16 Jumlah Paket Pekerjaan yang dilelangkan di Bagian Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kuantitas aparatur pemerintah yang bersertifikat pengadaan barang/jasa yang ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Boyolali sebagai anggota Pokja Pemilihan masih sangat kurang, dimana pada perhitungan beban kerja untuk personil pengelola pengadaan barang/jasa yang harus ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Boyolali minimal berjumlah 12 orang (sesuai Korsupgah KPK Tahun 2019) dan sekarang hanya terdapat 5 orang personil;

- Belum seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan yang ada belum menguasai sistem *E-Procurement* yang telah ada dan management kontrak;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan Perangkat Daerah masih ada yuang tidak sesuai dengan pekerjaan (persyaratan kualifikasi dan teknis);
- Penyedia jasa/barang masih kurang memahami ketentuan dan persyaratan pelelangan, sehingga banyak penawaran yang gugur.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Mengusulkan ke Dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Boyolali untuk penambahan personil sebagai anggota Pokja Pemilihan;
- Pengiriman Pejabat Pembuat Komitmen dan Personil yang terlbat dalam proses pengadaan barang/jasa yang ada agar diikutkan dalam Bimtek/Workshop/Sosialisasi/Pelatihan tentang pengadaan barang/jasa, manajemen kontrak dan penyusunan KAK untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam pengadaan barang/jasa;
- Dilakukan rapat koordinasi teknis terkait pengadaan barang/jasa baik Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa agar memperhatikan ketentuan dalam proses pengadaan barang/jasa.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Penyusunan standar pelayanan tentang evaluasi pelelangan yang sederhana yang memadai Pokja ULP;
- Pembuatan kebijakan tahapan evaluasi dan klarifikasi pelelangan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sebagai pedoman bagi Pokja ULP;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 12,07% (Rp. 22.076.582,00) dari anggaran sebesar Rp. 182.974.600,00 digunakan sebesar Rp. 160.898.018,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kab. Boyolali, pengiriman Bimtek dan Workshop pengadaan barang/jasa, pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi penyedia. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

20) Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan

a. Keberhasilan capaian Fungsi Legislatif dalam pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD adalah:

- Dari sisi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah :
  - ✓ Menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati;
  - ✓ Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda;

- ✓ Mengajukan usulan Rancangan Perda
- ✓ Semakin meningkatnya kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- ✓ Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas kedewanan;
- ✓ Meningkatnya Optimalisasi Pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan;
- ✓ Untuk menjamin agar anggota DPRD adalah kader-kader yang memiliki kompetensi yang memadai perlu dibangun sistem pengembangan SDM.

Dilaksanakan dengan cara :

- ✓ Menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati;
- ✓ Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda;
- ✓ Mengajukan usulan Rancangan Perda.

Namun begitu pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda dalam pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD masih dirasa kurang optimal, dikarenakan:

- ✓ Faktor Budaya kedisiplinan dan motivasi yang belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan;
- ✓ Banyaknya agenda kegiatan dimasing-masing partai sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas;
- ✓ Para Anggota DPRD ini merupakan Jabatan Politis sehingga kompetensi para Anggota Dewan bervariasi yang disebabkan oleh sistem rekruitmen yang sepenuhnya berkaitan dengan Partai Politik dimana mereka berasal;
- ✓ Kurangnya Koordinasi dalam pelaksanaannya dalam membahas permasalahan yang dihadapi setiap rapat-rapat dalam pembahasan setiap ada rapat yang diselenggarakan.

- Dari sisi Fungsi Anggaran salah satunya dikarenakan semakin menguatnya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD bersama TAPD sejak diproses penyusunan Rancangan KUA-PPAS maupun pembahasan Rancangan KUA-PPAS dimaksud. Terhadap Rencangan KUA-PPAS sebelum ditetapkan dilakukan rapat harmonisasi antara DPRD dengan TAPD dan seluruh anggotanya serta dengan mengundang seluruh kepala Perangkat Daerah.

  Dalam rapat harmonisasi ini seluruh kebijakan penganggaran beserta besarnya dikemukakan oleh TAPD dan DPRD, sehingga seluruh yang hadir dalam rapat tersebut bisa mengetahui skema penganggaran dan kebijakan penempatan / skala prioritas pengalokasian anggaran di Pemerintah Kabupaten Boyolali

  Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersam terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

  - ✓ Mebahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencan kerja Pemerintah Daerah;
  - ✓ Membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - ✓ Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
  - ✓ Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dalam rapat harmonisasi ini seluruh kebijakan penganggaran beserta besarnya dikemukakan oleh TAPD dan DPRD, sehingga seluruh yang hadir dalam rapat tersebut bisa mengetahui skema penganggaran dan kebijakan penempatan / skala prioritas pengalokasian anggaran di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- ✓ Mebahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencan kerja Pemerintah Daerah;
- ✓ Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- ✓ Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
- ✓ Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- Dari sisi Fungsi Pengawasan dikarenakan semakin kuatnya koordinasi dan efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh DPRD dan Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi serta Perangkat Daerah yang tugas fungsinya terkait dengan penegakan Perda. Namun begitu masih kurang optimal dikarenakan perkembangan perubahan regulasi di tingkat pusat yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan kemampuan merespon perubahan tersebut, sehingga sering terjasi keterlambatan menindaklanjuti beberapa amanat ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

  Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup secara khusus dilaksanakan oleh salah satu Alat Kelengkapan DPRD yakni Badan Pembentuk Perda (Bapemperda) melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Perbup, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

  - ✓ Pelaksanaan Perda dan Perbup;
  - ✓ Pelaksanaan Peraturan Undang-undang lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

  Fungsi Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

  - ✓ Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - ✓ Kegiatan kunjungan kerja;
  - ✓ Rapat dengar pendapat umum; dan
  - ✓ Pengaduan masyarakat

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Peningkatan pelayanan dalam memfasilitasi Kegiatan Dewan;
- Pengelolaan Sumber Dana yang berprinsip efisien;
- Perencanaan Kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan keputusan Tata tertib dewan;
- Peningkatan koordinasi lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan;
- Memperkuat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan antara lain Diklat, Bintek, Seminar, Lokal Karya;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,84% dari anggaran sebesar Rp. 24.887.593.653,00 digunakan sebesar Rp. 24.678.240.182,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-rapat Paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pembentukan Perda. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan ALKAP DRPD, terselenggaranya rapat-rapat paripurna, tertampungnya aspirasi masyarakat, tingkat keberhasilan kegiatan komisi dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah, meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan terlaksananya pembentukan Perda. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

21) Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dari dinas/instansi yang berwenang;
- Adanya kesepakatan dari para pihak yang dapat menghasilkan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan;
- Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dalam menyelesaikan pelaksanaan urusan pertanahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat;
- Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai acuan dalam penanganan permasalahan pertanahan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dan tidak bersedia menempuh jalur hukum;
- Kurang optimalnya kerjasama antar instansi yang terkait;
- Masih banyak pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penatagunaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kurang dipahaminya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok permasalahan yang dihadapi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Melaksanakan fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta berkoordinasi dengan BPN agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian masalah sengketa tanah;
- Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi terkait baik pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi maupun dukungan dari pemerintah pusat;
- Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan pertanahan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan malekukan kegiatan yang benar-benar efektif mendukung capaian kinerja, dari total anggaran Rp. 136.820.000,00 dapat terealisasi Rp. 133.200.375,00 atau efisiensi sebesar 2,65%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program pengembangan sistem informasi pertanahan dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

10. SASARAN 10 : Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	100	28,55	100	42,86	100	57,14	100	71,43	83,00	116,20	A	KANKESBANG POL
2 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	%	90	76	105	83	100	85	100	87,00	87,00	100,00	B	SATPOL PP
3 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	%	95	85	100	90	100	90	100	90,00	100,00	111,11	A	SATPOL PP
4 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	%	100	76	97,44	93,9	100	96,34	100	97,56	100,00	102,50	A	SATPOL PP
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	82	30	100	78	100	80	100	80,00	84,00	105,00	A	KANKESBANG POL
6 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	100	42	100	30,23	100	65,12	100	76,74	79,00	102,94	A	KANKESBANG POL
7 Indeks Resiko Bencana	%	80	130	100	130	91,67	137	75,45	100	130,76	69,24	C	BPBD
8 Cakupan kebakaran yang tertangani	%	80	100	153,85	68	100	71	100	74,00	100,00	135,14	A	SATPOL PP
9 Cakupan penanganan PMKS	%	39,77	35,70	119,92	78,12	245,89	77,67	230,00	35,77	89,7	250,77	A	DINSOS
10 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	Perusahaan	70	36	100	72	102,86	65	92,86	70	67	95,71	B	DISKOPNAKER
11 Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	37,20	40,5	110,96	52,85	144,01	47,94	129,22	37,20	51,89	139,49	A	DISKOPNAKER
12 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	orang	1.440	240	100	240	100	896	373,33	240	1.092	455	A	DISKOPNAKER
13 Rasio rumah layak huni	%	89	-	-	81,34	95,69	84,19	97,89	87,00	87,174	100,20	A	DPKP
14 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	2,75	-	-	7,40	1345,45	10,70	972,73	1,65	39,77	2.410,30	A	DPKP
15 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	%	100	21	100	21	100	42	100	63	63	100	B	DP2KBP3A
16 Cakupan Peserta KB.	%	80	75	100	75	100	71,22	92,49	77	77	100	B	DP2KBP3A
17 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	%	1,20	0,93	100	2	100	1,01	143,89	1,60	1,03	135,63	A	DP2KBP3A

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif.	%	100	20,48	100	28,92	100	40,96	100	56,63	57	100,66	A	DP2KBP3A
19 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	%	21	7	100	10	100	14	100	16	16	100	B	DP2KBP3A
20 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	%	100	15	100	26	100	42	100	57	63	110,53	A	DP2KBP3A
21 Desa layak anak	desa	159	19	100	22	100	26	104	28	67	239,29	A	DP2KBP3A
Capaian				**104,59**		**167,88**		**162,47**			**246,65**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 246,65% (kategori sangat baik) terdiri dari 15 (lima belas) indikator kategori sangat baik (71,43%), 5 (lima) indikator kategori baik (23,81%), dan 1 (satu) indikator kategori cukup (4,76). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 10 (sepuluh) per indikator:

1) Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pendekatan kedua belah pihak dan fasilitasi dari fihak-fihak terkait.

   b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

      - Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
      - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 15,30% dari anggaran sebesar Rp. 28.750.000,00 digunakan sebesar Rp. 24.352.000,00.

   c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

      - Pengendalian keamanan lingkungan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melekasanakan Rapat Cipta Kondisi, Sosialisasi Ketahanan Ekonomi dan Publikasi Pengendalian keamanan Lingkungan;
      - Monitoring evaluasi dan pelaporan orang asing. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring keberadaan orang asing.

      Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilaksanakan pembinaan, pelatihan, meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan Instansi terkait (Kodim 0274 Boyolali);

      Hambatan yang dialami adalah minimhya anggaran untuk meningkatkan kapasitas anggota linmas, sedangkan solusi yang dihadapi adalah meningkatkan sinergi dengan Camat, Kepala Desa dan Institusi terkait lainnya.

b. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya adalah dengan :

- Perencanaan dan pelaksanaan dalam penugasan yang tepat sasaran sehingga terjadi efesiensi dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran;
- Menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan malekukan kegiatan yang benar-benar efektif mendukung capaian kinerja, dari total anggaran Rp. 1.194.900.000,00 dapat terealisasi Rp. 1.183.238.347,00 atau efisiensi sebesar 1,08%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pembentukan Linmas Inti Kabupaten, Pembinaan Satlinmas Desa, dan melaksanakan Kegiatan PAM Hari Raya, serta Pengiriman Satlinmas untuk Diklat. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilakukan pembinaan, pelatihan, meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan Instansi terkait (Bagian Hukum, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali);

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait, sehingga bisa bersinergi;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,33% dari anggaran sebesar Rp. 682.085.000,00 digunakan sebesar Rp. 666.229.524,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan kegiatan Pengendalian Kemamanan Lingkungan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan Patroli Wilayah, kegiatan PAM Terpadu (Hari Raya dan Tahun Baru), kegiatan PAM Car Free Day, dan kegiatan Terpadu Antar Instansi, serta kegiatan PAM Acara Insindental. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan telah dilaksanakan pembinaan, dan meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait (BKP2D, BPMPTSP, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah);

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait, sehingga bisa bersinergi;

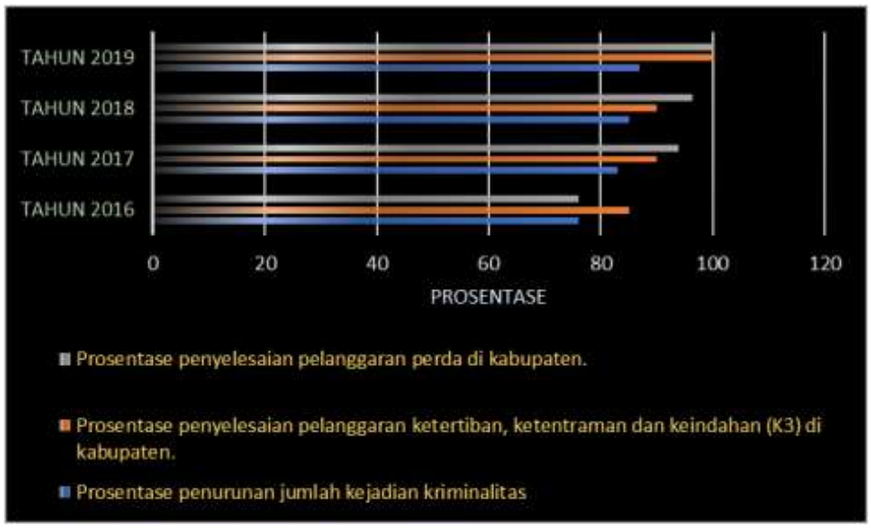
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,71% dari anggaran sebesar Rp. 173.600.000,00 digunakan sebesar Rp.170.645.250,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan

- Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan Operasi Tipiring, kegiatan Operasi Cukai Tembakau, dan Operasi PKL dan Reklame;
- Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Kegiatan Penyuluhan Berkembangnya Praktik Prostitusi Ke tempat tempat seperti (Karaoke, Panti pijat dll).

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Berikut grafik Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupate, dan penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Gambar 3.17 Grafik Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupate, dan penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat serta dengan diadakannya simulasi tentang pemilu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Memberikan pembekalan pendidikan politik yang memadai;
- Mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi UU Pemilu dan kesadaran berpolitik kepada masyarakat;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 12,18% dari anggaran sebesar Rp. 239.096.000,00 digunakan sebesar Rp. 209.967.500,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan :

- Penyuluhan Kepada masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi penyuluhan pendidikan politik dengan penyuluhan kepada masyarakat;
- Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, bentuk kegiatannya adalah Bintek penyusunan LPJ Banpol, rapat verifikasi banpol;
- Koordinasi forum-forum diskusi politik, bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi pendidikan politik dengan forum diskusi
- Pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi Pemilu, Pengamanan Pilkades, Monitoring Pileg dan Pilpres, Monitoring Pilkades, Rapat Desk Pemilu.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA

a. Keberhasilan/ capaian indikator ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan sosialisasi kepada siswa SLTA.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Mengadakan kegiatan penyuluhan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,99% dari anggaran sebesar Rp. 806.065.000,00 digunakan sebesar Rp. 757.725.251,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :

- ✓ Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi antar umat beragama;
- ✓ Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang wawasan kebangsaan;
- ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, bentuk kegiatannya adalah Pembentukan Paskibraka, Peringatan HUT kemerdekaan RI, dan Lomba Pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- ✓ Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat;
- ✓ Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi dan diskusi dengan pelaku seni;

- ✓ Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi antar Etnis serta Orang Asing, bentuk kegiatannya adalah silaturahmi antar etnis yang ada di Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Indeks Resiko Bencana

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini bukan diakibatkan menurunnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan resiko bencana tetapi semata-mata karena perbedaan metode penghitungan IRBI, yang mulai tahun 2018 mengggunakan pendekatan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah.

Pengkajian resiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Metodologi untuk menterjemahkan berbagai indeks tersebut ke dalam peta dan kajian dapat menghasilkan tingkat resiko dan peta resiko untuk setiap bahaya bencana yang ada pada suatu daerah. Kajian dan peta resiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Menurunnya Indeks Resiko bencana Indonesia (IRBI) bisa berarti berkurangnyabahaya, kerentanan dan meningkatnya kapasitas masyarakat yang menjadi indikator keberhasilan Pengurangan Resiko bencana (PRB), dan begitu juga sebaliknya.

IRBI yang didapat BPBD kabupaten Boyolali adalah mengacu IRBI yang dikeluarkan oleh BNPB, tahun 2018 memakai dasar Indek Ketahanan Daerah (IKD) dari BNPB dengan 7 (tujuh) Prioritas, yang dirinci dengan 71 Indikator.

Tahun 2018 dan 2019 BPBD Kabupaten Boyolali dengan 7 (tujuh) Prioritas tersebut diatas juga dijadikan Indikator pendukung Indikator Kinerja Utama dengan capaiannya sebagai berikut:

- Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan.

  Target skor 25 dengan realisasi skor = 26, capaian 104% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena didukung dengan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana.

- Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu.

  Target skor 11 dengan realisasi skor = 13 capaian 118% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena partisipasi aktif dari partisipan kebencanaan, dan pembuatan peta rawan bencana.

- Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

  Target skor 36 dengan realisasi skor = 40, capaian 111% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan salah satunya karena inovasi baru Sikabi di BPBD sehingga dapat mendukung peningkatan sistim informasi Kebencanaan, serta kerjasama dengan pihak lain/Kab/kota untuk pembelajaran.

- Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

  Target skor 13 dengan Realisasi skor = 18, capaian 138% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan salah satunya karena FPRB telah dibentuk dengan didukung terbentuknya komunitas-komunitas sungai di beberapa Desa/Kecamatan, Kesadaran masyarakat akan perlunya tempat evakuasi apabila ada bencana, masyarakat menyadari pentingnya papan penunjuk arah dan peringatan bahaya apabila terjadi bencana.

- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

  Target skor 27 dengan realisasi skor = 30, capaian 111% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan kerjasama yang baik antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

- Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

  Target score 62 dengan Realisasi Score = 56, capaian 90% Tingkat keberhasilan adalah Baik. kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena belum semua masyarakat faham akan pentingnya penanggulangan bencana.

- Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana.

  Target skor 11 dengan realisasi skor = 14, capaian 127% tingkat keberhasilan adalah Amat Baik. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena didukung oleh kerjasama yang baik antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta adanya inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana.

Dari 7 Indikator diatas ada sejumlah indikator yang secara keseluruhan ada 284 indikator, yang semua indikator tersebut dengan menggunakan penghitungan dari aplikasi yang disediakan oleh BNPB, akhirnya kita dapatkan Indek Ketahanan Daerah (IKD) dengan score sebesar 130,76, dan angaka inilah yang kemudian kita konversi menjadi IRBI nya Kabupaten Boyolali tahun 2019.

Sehingga dengan demikian penurunan capaian IRBI atau tidak tercapainya target tahun 2019 ini dari target 100 hanya dapat terealisasi 69,24 atau dengan score 130,76 bukan diakibatkan menurunnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan resiko bencana tetapi semata-mata karena perbedaan metode penghitungan IRBI, yang mulai tahun 2019 ini dengan mengggunakan pendekatan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah.

Angka capaian 69,24 ini sesuai dengan hasil perhitungan aplikasi di atas setara dengan score 130,76 dengan nilai capaian sedang.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Belum semua SDM wilayah pembentukan Desa tangguh bencana bisa berpartisipasi aktif dan belum mendukung secara optimal, serta dokumen yang disusun belum optimal diterapkan;
- Kurangnya FGD sehingga data dan Informasi;
- Keterbatasan sarpras belum semua peserta bintek dan pelatihan bisa mempraktekkan;
- Pengadaan sarpras belum dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Belum semua logistik yang di berikan kepada korban bencana sesuai dengan kebutuhan;
- Informasi kebencanaan belum menyeluruh kepada masyarakat

- Sistim informasi kebencanaan yang terintegrasi kabupaten Boyolali (Sikabi) belum sepenuhnya aplikatif terhadap masyarakat, disebabkab masyarakat terdampak bencana lebih memilih informasi manual seperti HP, telpon, dan WA;
- Belum semua masyarakat faham akanpentingnya Penanggulangan Bencana;
- Kurangnya kapasitas masyarakat terhadap Penanggulanagn bencana;
- Kurang optimalnya fasilitasi FPRB dalam Penanggulangan Bencana;
- Belum adanya dokumen kajian risiko bencana dan mitigasi bencana;
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pelaku kepentingan;
- Belum semua masyarakat faham akan pentingnya Penanggulangan Bencana;
- Belum semua masyarakat di wilayah rawan bencana mengikuti simulasi / gladi penanggulangan bencana;
- Belum sepenuhnya renkon digladikan;
- Belum semua TRC dapat mempraktekkan / mengoperasikan sarapras kebencanaan;
- Belum semua klaster kaebencanaan digladikan;
- Kurangnya fasilitasi kegiatan CSR dalam sistim pemulihan pasca bencana;
- Cakupan kegiatan kerusakan dan kerugian belum maksimal.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Jemput bola mendatangi tempat tinggal masyarakat terlibat;
- Mengadakan kegiatan lagi dengan cara menaikkan anggaran untuk pembuatan peta rawan bencana di wilayah lain;
- Kerjasama dengan pihak lain/Kab/kota untuk pembelajaran;
- Pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam Pengadaan sarpras;
- Peningkatan jenis dan macam serta jumlah dlm pengadaan logistik;
- Peningkatan Pemasangan Spanduk dan patok jalur evakuasi, sejenisnya;
- Sosialisasi aplikasi sikabi;
- Memberi pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana;
- Hibah kegiatan kepada FPRB;
- Glady Penanggulangan Bencana;
- Penyusunan dokumen kajian risiko bencana;
- Melaksanakan kegiatan Rakor yang berkesinambungan;
- Melaksanakan gladi untuk renkon;
- Melaksanakan Gladi untuk klaster kebencanaan yang belum digladikan;
- Koordinasi dengan BPBD Prov/Kab/Kota untuk praktek penggunaan sarpras;
- Mengadakan kegiatan / koordinasi tentang Pengembangan *cooperate Sicial responcibility*;
- Mengadakan kegiatan Kerusakan dan kerugian.

Berikut grafik Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 s.d Tahun 2019:



Gambar 3.18 Grafik Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 - 2019

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Penyusunan kebijakan/peraturan di desa/kelurahan tentang penanggulangan bencana/Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
- Pelatihan untuk pemerintah desa, tim relawan, dan warga desa;
- Pelibatan/partisipasi warga desa;
- Peningkatan Pemasangan Spanduk dan patok jalur evakuasi, sejenisnya;
- Sosialisasi aplikasi sikabi;
- Penyusunan dokumen kajian risiko bencana;
- Melaksanakan gladi untuk renkon dan untuk klaster kebencanaan yang belum digladikan;
- Memberdayakan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan TRC dalam Penanggulangan Bencana;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 30,14% dari anggaran sebesar Rp. 1.546.793.750,00 digunakan sebesar Rp. 1.080.534.171,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan bencana dengan kegiatan:

- Pengembangan desa tangguh bencana, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pemenuhan 20 (dua puluh) indikator yang diamanatkan dalam Kerangak Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi DESTANA (sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan tangguh Bencana) yaitu:
  - ✓ Kebijakan/peraturan di desa/kelurahan tentang penanggulangan bencana/Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
  - ✓ Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana aksi komunitas, dan rencana kontijensi;

- ✓ Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB);
- ✓ Relawan penanggulangan bencana;
- ✓ Kerjasama antar pelaku dan wilayah;
- ✓ Dana tanggap darurat;
- ✓ Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
- ✓ Pelatihan untuk pemerintah desa;
- ✓ Pelatihan untuk tim relawan;
- ✓ Pelatihan untuk warga desa;
- ✓ Pelibatan/partisipasi warga desa;
- ✓ Pelibatan perempuan dalam tim relawan;
- ✓ Peta dan analisa risiko;
- ✓ Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian;
- ✓ Sistem peringatan dini;
- ✓ Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik);
- ✓ Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat;
- ✓ Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan;
- ✓ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
- ✓ Perlindungan aset produktif utama masyarakat.

- Pembuatan Peta Rawan bencana dalam bentuk kegiatan yaitru pembuatan peta rawan bencana kecamatan Ngemplak dan Nogosari menjadi dokumen peta rawan bencana. Peta Rawan Bencana berkaitan dengan cakupan wilayah, dampak , sektor yang terpengaruh dengan kwalitas ancaman bencana intusitas belum optimal diketahui.
- Bintek Pengembangan Sistim Informasi Bencana Boyolali (Sikabi) dilaksanakan dengan pengenalan sistim kebencanaan yang terintegrasi, sbg alat memantau kebencanaan di Kabupaten Boyolali melalui HP yang terdaftar di Sikabi;
- Pengadaan Sarpras Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Pengadaan Logistik Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengadaan kebutuhan Dasar berupa bahan pokok yang disalurkan kepada koran bencana;
- Pemasangan rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pembuatan dan pemasangan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
- Pengadaan panflet, boklet/kalender dll dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho di titik rawan bencana dan jalur masuk daerah rawan bencana;
- Sosialisasi Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Penyuluhan dan sosialisasi kebencanaan terhadap Disabilitas, anak Sekolah, dan Masyarakat;

- Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Konggres FPRB;
- Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana dengan apel siaga, simulasi, dan pembentukan klaster bencana;
- Rakor Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dilaksanakan rakor Workshop FPRB dan rakor menghadapi bencana kekeringan, longsor, dan banjir;
- Kegiatan Rakornas Kebencanaan tidak dibiayai dengan APBD merupakan kegiatan rutin BNPB dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku kepentingan yang ada hubungannya dengan kebencanaan;
- Penyusunan Rencana Kontijensi membuat dokumen perencanaan skenario bila terjadi banjir di wilayah kabupatem Boyolali;
- Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan dilaksanakan selama 2 hari, satu hari untuk teori dan 1 hari praktek lapangan;
- Glady Penanggulangan Bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan simulasi penanggulangan bencana yang di ikuti oleh OPD terkait kebencanaan, FPRB, Relawan, TNI/Polri, Tokoh Agama/Masyarakat, Organisasi kebencanaan, dan masyarakat rawan bencana, Penyandang Disabilitas yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang;
- Jambore Penanggulangan Bencana selama 2 hari diikuti oleh TNI, Polri, OPD, Relawan, PMI, Anak Sekolah, Disabilitas, dan Organisasi hubungannya dengan bencana;
- Pelatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dilaksanakan Selama dua hari satu hari teori;
- Kegiatan penanganan siaga darurat bencana dan monitoring kebencanaan tidak dibiayai oleh APBD;
- Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penyusunan laporan usulan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB;
- Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana;
- Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan peningkatan kemampuan pendampingan dalam apabila terjadi bencana
- Pengembangan cooperate Sicial responcibility (perusahaan kepedulian sosial) pasca bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan workshop.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum dan berhasil mencapai target kinerja.

8) Cakupan kebakaran yang tertangani.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena ketersediaan jumlah personil yang memadahi dan ketersediaan Sarana prasarana (mobil damkar) yang memadahi, serta adanya kerjasama dengan Pemadam Kebakaran Daerah lainnya jika kebakaran cukup besar.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Keterbatasan jumlah WKM;
- Luas wilayah jangkaun terkait waktu tanggap.

Alternative solusi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pemadam kebakaran daerah lain jika klasifikasi kebakaran cukub besar.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Perencanaan dan pelaksanaan dalam penugasan yang tepat sasaran;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dari seluruh program dengan efesiensi sebesar 8,10% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.411.750.000,00 di gunakan sebesar Rp. 1.297.518.372,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan

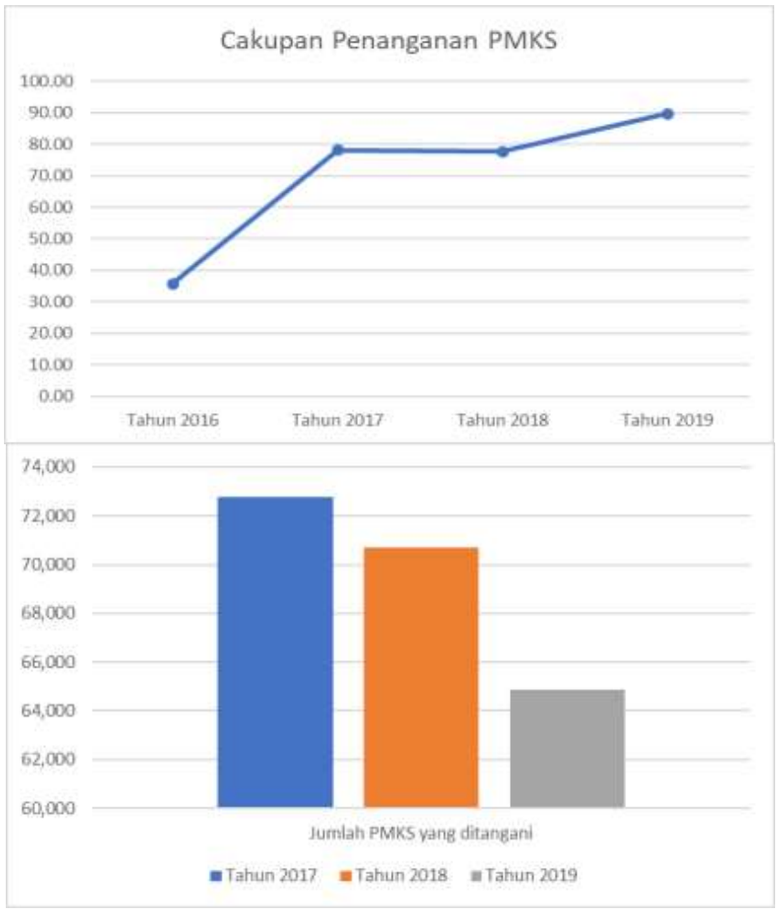
- Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pengadaan Giat Pedidikan dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran;
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pengadaan Tali Temali;
- Peningkatan Pelayanan Penganggulangan Bahaya Kebakaran, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran dan giat lain yang sesuai (Menangkap Ular, Sarang Tawon dll).

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

9) Cakupan penanganan PMKS

a. Keberhasilan capaian target kinerja karena telah dilakukan penanganan terhadap PMKS melalui pembinaan, penyuluhan sosial, pelatihan dan pemberian bantuan sosial kepada PMKS seperti, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin dan PMKS yang lainnya serta penanganan korban bencana. Pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai target hingga capaian melebihi 100% karena didukung oleh adanya Dana dari APBD II, APBD I dan program dari Kementerian Sosial RI khususnya PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Adapun jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sebanyak 64,852 jiwa dari total jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sebanyak 72.336 jiwa. Dengan demikian realisasi didapatkan 89,7% atau capaian kinerja mencapai 250,1%.

Berikut grafik cakupan penanganan PMKS dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.19 Grafik cakupan penanganan PMKS dari tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Penanganan terhadap PMKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan pihak lain yaitu PSKS, pendamping PKH, TKSK, Tagana dan masyarakat peduli sosial. Selain itu Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof Suharso Surakarta dan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten Jawa Tengah;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dari seluruh program dengan efesiensi sebesar 7,28% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.060.598.650,00 di gunakan sebesar Rp. 4.378.623.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpncil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pelatihan ketrampilan bagi PMKS, Pendataan PMKS, dan kegiatan Operasional dan Monitoring Program Keluarga Harapan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pemberian bansos kepada terhadap KRSE (Keluarga Rawan Sosial Ekonomi) dan KUBE fakir miskin, serta pendampingan terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia;

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan:
  - ✓ Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana dengan bentuk kegiatan berupa Razia terhadap PGOT di wilayah Kabupaten Boyolali selanjutnya hasil razia di bina, ada yang dikembalikan kepada keluarga dan ada yang dikirim ke RSJ dengan melihat kasusnya;
  - ✓ Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan kegiatan berupa pegelolaan makam TMP Ratna Negara;
  - ✓ Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan bentuk kegiatan penanganan terhadap korban bencana melalui pemberian bantuan logistik seperti beras, makanan instan dan selimut;
  - ✓ Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan kegiatan monitoring kepada KPM di 22 kecamatan;
  - ✓ Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksaaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenangan dengan bentuk kegiatan berupa pendampingan pemberian bansos BPNT dari kemensos;
  - ✓ Kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana dan prasarana rumah singgah berupa pengadaan bahan kebutuhan dan peralatan untuk menangani pasien di rumah singgah.
- Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar dengan bentuk kegiatan berupa pembangunan Pagar (Rumah singgah atau rumah penampungan sementara), serta pemberian bantuan social bagi anak-anak terlantar;
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma. Bentuk kegiatannya adalah pambinaan serta pemberian batuan sosial barang berupa alat bantu bagi difabel;
- Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo dengan bentuk kegiatan pembinaan serta pemberian batuan sosial barang berupa alat bantu bagi difabel dan sembako;
- Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan kegiatan:
  - ✓ Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dengan bentuk kegiatan berupa pembinaan kepada pengurus panti dan pemberian bantuan sosial sarpras panti berupa peralatan rumah tangga dan kebutuhan panti (peralatan kantor) sesuai proposal yang diajukan seperti meja, kursi, almari, Kasur busa, rak pring, peralatan makan dan minum, printer, mesin cuci;
  - ✓ Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo dengan bentuk kegiatan pelatihan tata boga (memasak) kepada anak-anak panti dengan perwakilan 1 panti 2 anak.
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, dan kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial. Kegiatan-kegiatan ini berupa

penyuluhan sosial terhadap PSKS meliputi Karang Taruna, PSM, Dunia usaha, dan tokoh masyarakat peduli sosial dengan tujuan meningkatkan pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

10) Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena perusahaan masih keliru menghitung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 560/68 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.790.000,00.

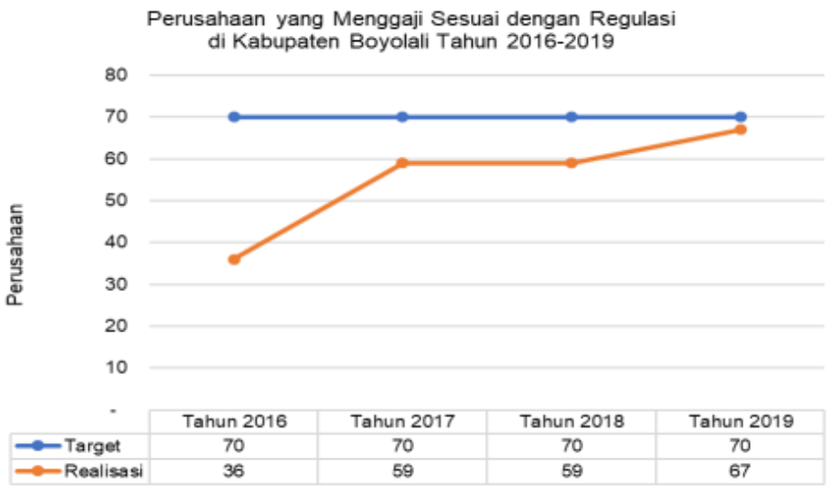
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Kurang pahamnya cara perhitungan UMK;
- Keterbatasan kemampuan perusahaan dalam membayar pekerjanya sesuai UMK.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Pemberian penjelasan dan pembinaan kepada perusahaan yang keliru dalam melakukan penghitungan UMK. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan secara langsung maupun melalui surat teguran;
- Pemberian surat teguran kepada perusahaan yang tidak mampu membayar pekerjanya sesuai UMK.

Berikut Grafik Perusahaan yang Menggaji Sesuai dengan Regulasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Gambar 3.20 Grafik Perusahaan yang Menggaji Sesuai dengan Regulasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,56% dari anggaran sebesar Rp. 205.664.000,00 digunakan sebesar Rp. 200.407.725,00;

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Kegiatan Pembinaan sarana hubungan industrial, Kesejahteraan Pekerja, Pengupahan dan Usulan UMK dan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan bentuk Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan membentuk Dewan Pengupahan, selanjutnya melakukan Rapat Dewan Pengupahan untuk menentukan besarnya UMK, melakukan monitoring dan pemantauan pembayaran UMK ke perusahaan, melakukan pembinaan dan pemberian surat teguran kepada perusahaan yang belum membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan UMK. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

11) Tingkat penyerapan tenaga kerja

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena terjalinnya kerjasama yang baik antara perusahaan dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali serta keberadaan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengantar Kerja pada Diskopnaker sehingga pencari kerja yang telah ditempatkan dapat terlaporkan ke Pemerintah.

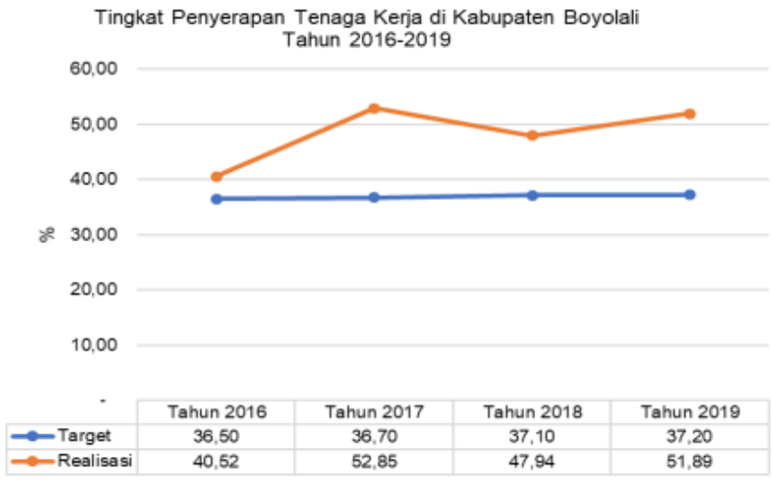
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Belum semua perusahaan melaporkan penempatan tenaga kerjanya;
- Belum semua pencari kerja terdaftar melalui AK 1 (Kartu Kuning / Kartu Tanda Pencari Kerja);
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Diskopnaker untuk melakukan pendataan penyerapan tenaga kerja.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Perlunya penyusunan regulasi tentang pelaporan penempatan tenaga kerja di perusahaan;
- Sosialisasi ke masyarakat agar para pencari kerja mau mendaftarkan dirinya melalui AK1 sehingga dapat terdata dan ditempatkan sesuai dengan keahlian pencari kerja;
- Menambah personil yang melakukan pendataan ketenagakerjaan.

Berikut Grafik Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Grafik 3.21 Grafik Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,83 km % dari anggaran sebesar Rp. 212.075.000,00 digunakan sebesar Rp. 208.188.283,00

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:
  - Penyusunan informasi bursa tenagakerja dengan bentuk kegiatan yaitu dengan melaksanakan pendataan pencari kerja yang terdaftar dan penyusunan buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK);
  - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan monitoring penempatan tenaga kerja ke perusahaan.
- Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan *Job Canvassing* (pencarian lowongan) ke perusahaan dan monev penempatan ke perusahaan.

12) Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena:

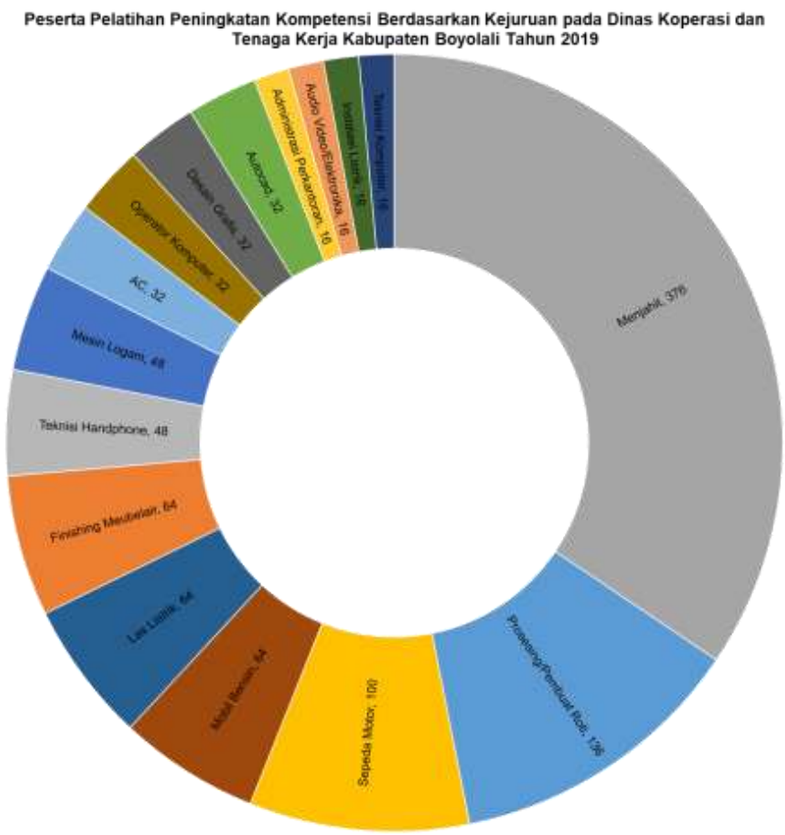
- Terdapatnya dukungan Pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali sehingga dapat terselenggara peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan;
- Tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) Boyolali yang didukung dengan instruktur ahli serta peralatan pendukung pelatihan yang memadai, termasuk diantaranya *Mobile Training Unit* (MTU) yang memungkinkan pelatihan kerja dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat;

- Terdapatnya kerjasama anatara Diskopnaker Kabupaten Boyolali dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pada tahun 2019 terdapat program baru dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) pada program pelatihan melalui BLK yaitu *Skill For Future*, merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan memberikan peningkatan kemampuan bagi SDM yang sudah memiliki keahlian atau usaha sebelumnya, dimana terdapat kesulitan dalam memperoleh animo dari masyarakat. Adapun jumlah peserta pelatihan yaitu *Skill For Future* sebesar 48 orang, dari total 1.092 tenaga kerja yang meningkat kompetensinya.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melaksanakan sosialisasi tentang program baru *Skill For Future* sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing kejuruan.

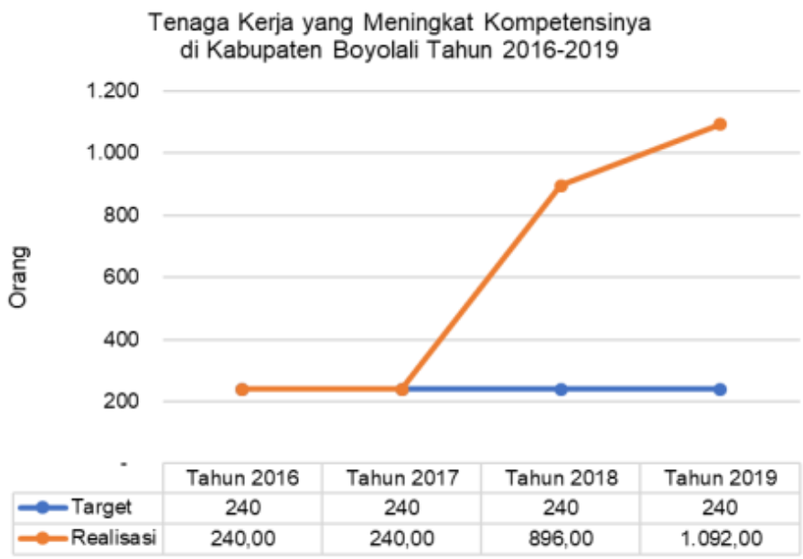
Berikut Grafik Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan Kejuruan pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019:



Gambar 3.22 Grafik Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan Kejuruan pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Berdasarkan grafik 3, pelatihan menjahit merupakan jurusan yang paling diminati diikuti pelatihan prosesing/pembuat roti dan sepeda motor setelah mengikuti berbagai pelatihan, maka diharapkan peserta pelatihan dapat disalurkan ke pabrik dan bidang usaha sesuai keahliannya atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri.

Berikut Grafik Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Gambar 3.23 Grafik Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,24% dari anggaran sebesar Rp. 6.484.138.000,00 digunakan sebesar Rp. 6.079.217.844,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembelian peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan pelatihan di BLK diantaranya:
  - Peralatan kejuruan menjahit sebanyak 1 (satu) paket;
  - Peralatan kejuruan tata niaga sebanyak 1 (satu) paket;
  - Peralatan kejuruan bangunan sebanyak 1 (satu) paket;
  - Peralatan kejuruan logam sebanyak 1 (satu) paket;
  - Peralatan kejuruan las sebanyak 1 (satu) paket.
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembangunan gedung workshop otomotif sebanyak 1 (satu) unit;
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan melalui Mobile Training Unit sebanyak 10 (sepuluh) paket bagi 160 orang dengan perincian:
  - Pelatihan kejuruan prosesing sebanyak 4 (empat) paket bagi 64 orang;

- Pelatihan kejuruan finishing meubelair sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
- Pelatihan kejuruan menjahit sebanyak 3 (tiga) paket bagi 48 orang;
- Pelatihan kejuruan sepeda motor sebanyak 1 (satu) paket bagi 16 orang.

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan renovasi gedung pelatihan dan kantor BLK.
- Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kerjasama dengan LPKS dan perusahaan (PT Cahaya Global Apparel di Cepogo dan PT Cartini Lingerie Indonesia di Teras) dengan wujud kegiatan pemagangan dan penempatan peserta magang di bidang menjahit sebanyak 20 orang.
- Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan kompetensi pengelola LPKS sejumlah 25 unit LPKS.
- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (APBN) dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan berupa 54 paket pelatihan bagi 864 orang dan pelatihan Skill For Future bagi 48 orang dengan perincian:
  - Pelatihan kejuruan prosesing/pembuat roti sebanyak 4 (empat) paket bagi 64 orang;
  - Pelatihan kejuruan sepeda motor sebanyak 5 (lima) paket bagi 80 orang;
  - Pelatihan kejuruan menjahit sebanyak 18 (delapan belas) paket bagi 288 orang;
  - Pelatihan kejuruan autocad sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan las listrik sebanyak 4 (empat) paket bagi 64 orang;
  - Pelatihan kejuruan mobil bensin sebanyak 4 (empat) paket bagi 64 orang;
  - Pelatihan kejuruan finishing kayu sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan desain grafis sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan operator komputer sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan teknisi komputer sebanyak 1 (satu) paket bagi 16 orang;
  - Pelatihan kejuruan instalasi listrik sebanyak 1 (satu) paket bagi 16 orang;
  - Pelatihan kejuruan AC sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan audio video/elektronika sebanyak 1 (satu) paket bagi 16 orang;
  - Pelatihan kejuruan teknisi handphone sebanyak 2 (dua) paket bagi 32 orang;
  - Pelatihan kejuruan administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu) paket bagi 16 orang;

Serta pelatihan *Skill For Future* bagi 48 orang dengan perincian:

- Pelatihan kejuruan menjahit sebanyak 8 orang dan menjahit bordir sebanyak 8 orang;
- Pelatihan kejuruan prosesing/pembuat roti sebanyak 8 orang;
- Pelatihan kejuruan teknisi handphone sebanyak 16 orang;
- Pelatihan kejuruan sepeda motor sebanyak 4 orang

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

13) Rasio rumah layak huni

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya sinergitas kegiatan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun tingkat desa, sehingga bisa mewujudkan upaya pengurangan Rumah Tidak layak Huni yang masih cukup banyak di Kabupaten Boyolali. Target capaian kinerja berdasarkan target jumlah RTLH yang dibangun sesuai target RPJMD Bab VIII, dimana target dalam RPJMD Bab VIII penanganan RTLH di tahun 2019 sebanyak 1.844 unit, seperti tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Uraian	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019
Terwujudnya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	300	782
	Unit	10	780
Terwujudnya bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1000	832
	Unit	534	577
Jumlah		**1844**	**2971**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

- Sumber data yang akurat terkait jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah secara keseluruhan belum ada, kalaupun ada hanya bersumber dari data PBDT BPS Boyolali dalam angka;
- Ketersediaan dana APBD untuk melakukan penanganan RTLH masih sangat terbatas, khususnya dana APBD Kabupaten Boyolali malah cenderung menurun,sedangkan jumlah RTLH masih sangat banyak yaitu di awal tahun 2019 masih ada sebanyak 43.203 unit dan jumlah rumah seluruh Kabupaten Boyolali sebanyak 313.673 unit. Sehingga Prosentase RTLH di akhir 2019 adalah sebesar 12,83 % atau jumlah layak huni sebesar 87,17 %.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Pendataan ulang seluruh rumah di Kabupaten Boyolali sekaligus pendataan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang sudah selesai pada tahun 2019 ini dan tahun 2020 akan dilaksanakan sinkronisasi data RTLH.
- Mencoba mencari sumber – sumber pendanaan yang bisa membantu pembangunan rumah tidak layak huni dari berbagai pihak, misal dana APBN,Provinsi, APBD Kabupaten, Pihak swasta dll.

Berikut grafik perkembangan rasio rumah layak huni dari tahun 2017-2019:



Gambar 3.24 Grafik perkembangan rasio rumah layak huni dari tahun 2017-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang ada hanya bisa dilakukan di belanja operasional Program Pengembangan Perumahan untuk kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dari pagu semula Rp. 664.053.500,00 digunakan Rp. 656.415.433,00, sedangkan untuk Bansos RTLH terealisasi 832 unit dengan anggaran sebesar Rp. 8.320.000.000,00 dari rencana semula 833 unit dengan anggaran Rp. 8.338.000.000,00. Ada 1 unit yang batal diberikan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pembangunan RTLH di Tahun Anggaran 2019 selain dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten, dilaksanakan juga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 782 unit dengan anggaran Rp.7.820.000.000;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Perumahan Dan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Bagi masyarakat Kurang mampu dengan memberikan Bantuan Stimulan Berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali, Rp 17.500.000,00 untuk peningkatan kualitas dan Rp. 35.000.000,00 untuk Pembangunan Baru yang bersumber dana dari APBN, serta pendampingan sejak mulai pembuatan proposal sampai pelaksanaan pembangunan dan rumah selesai dibangun. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

14) Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya sinergitas dari semua pihak baik oleh pemerintahan desa,pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dan dimana semua berperan dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

Namun demikian walaupun target kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas akan tetapi masih ada hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sulitnya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan perilaku/ pola hidup sehat. Sehingga hal ini berdampak pada keberlanjutan kawasan permukiman yang sudah dibebaskan dari kekumuhan;

- Ketersediaan dana APBD Kabupaten Boyolali untuk melakukan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh masih sangat terbatas, sedangkan luasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 seluas 48.62 ha. Di tahun 2017 baru ditangani 7.4 ha, di tahun 2018 tertangani 3.3 ha, tahun 2019 tertangani 29,07. jadi luasan kumuh yang tertangani sampai tahun 2019 seluas 39,77 ha sehingga masih ada 8,85 ha yang belum tertangani.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari kekumuhan;
- Mencoba mencari sumber – sumber pendanaan yang bisa membantu pembangunan rumah tidak layak huni dari berbagai pihak, misal dana APBN,Provinsi, APBD Kabupaten, Pihak swasta dan melalui dana desa dll.

Berikut grafik penanganan lingkungan pemukiman kumuh dari tahun 2017-2019:



Gambar 3.25 Grafik penanganan lingkungan pemukiman kumuh dari tahun 2017-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Mencari sumber – sumber pendanaan yang bisa membantu pembangunan rumah tidak layak huni dari berbagai pihak;
- Menggunakan anggaran yang tersedia sangat terbatas yaitu Rp. 681.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.882.600,00 atau 0,46%;
- Disamping anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali, juga dana dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Perumahan dan kegiatan Pendampingan Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pendampingan Program KOTAKU dari Pemerintah Pusat. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Disamping indikator tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan inovasi yaitu dalam hal pelayanan publik yaitu pemberian rekomendasi siteplan dilakukan secara *online* lewat aplikasi *e-Omahkoe* yang telah di launcing oleh Bapak Bupati Boyolali pada tanggal 19 Desember 2019.

15) Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dilaksanakannya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap kelompok tribina.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melaksanakan kerjasama dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan aparat desa agar kelompok Tribina semakin aktif;
- Menggunakan alat produksi sesuai ketrampilan kader;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 13,43% dari anggaran sebesar Rp. 620.720.000,00 digunakan sebesar Rp. 537.348.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Lomba BKL, BKB, serta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

16) Cakupan Peserta KB.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- Semakin gencarnya sosialisasi tentang program-program KB, pentingnya mengikuti KB, dan juga pengetahuan tentang alokon-alokon yang aman, baik, dan dapat digunakan oleh masyarakat;
- Kesadaran dari masyarakat dan kesadaran dari Kader KB akan pentingnya program KB;
- Meningkatnya partisipasi warga dalam Safari KB yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Bidan Desa, dan Kader KB. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah partisipasi warga masyarakat cukup banyak sehingga beberapa kali pernah menolak karena kondisi kesehatannya secara medis tidak memenuhi syarat untuk dilayani

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Kesalahan dalam Pencatatan dan Pelaporan (R/R) sehingga terjadi double pencatatan. Hal ini dikarenakan ketika peserta KB tersebut ganti cara, hanya dilakukan pencatatan baru tetapi tidak mencabut atau menghapus catatan peserta KB yang lama;
- Kesalahan dalam Pencatatan dan Pelaporan (R/R) sehingga terjadi double pencatatan. Hal ini dikarenakan ketika peserta KB tersebut ganti cara, hanya dilakukan pencatatan baru tetapi tidak mencabut atau menghapus catatan peserta KB yang lama;

- Kesalahan tersebut berakibat pada pembengkakan Drop Out (DO) yang ada di Kabupaten Boyolali dan mengurangi Additional User (AU)/ Tambahan PA yang ada di Kabupaten Boyolali;
- Dalam hal pelayanan, kurangnya pelatihan kepada para pelayan medis (bidan, dll) dalam penyediaan jasa layanan, sehingga hal tersebut sedikit menghambat jalnnya pelayanan KB yang dilakukan di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Alternatif solusi dari kendala tersebut :

- Pelatihan kembali untuk merefresh dalam Pencatatan dan Pelaporan (R/R) bagi pengelola R/R tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam hal double pencatatan dan pelaporan bagi peserta KB;
- Peningkatan pengawasan terhadap kinerja R/R oleh PKB Kabupaten Boyolali untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam hal pencatatan;
- Mengadakan peningkatan pelatihan untuk para pelayan medis dalam penyediaan jasa layanan bagi peserta KB;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Dengan keterbatasan jumlah Penyuluh KB sebanyak 34 orang yang dibagi kedalam 22 wilayah Kecamatan (masing-masing Kecamatan hanya mendapatkan 2 orang PKB bahkan ada yang hanya 1 (satu) orang per Kecamatan), dapat melakukan pelayanan dengan baik kepada peserta KB di Kecamatan masing-masing;
- Memanfaatkan Kader KB tingkat Desa (PPKBD dan Sub-PPKBD) untuk membantu pengelolaan Program KKBPK di tingkat kecamatan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,63% dari total anggaran sebesar Rp. 1.428.500.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.348.109.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan Pelayanan KIE, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Publikasi melalui media masa;
- Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB, dengan kegiatan:
  - ✓ Koordinasi Pengelolaan Program, dengan bentuk kegiatan Kerjasama dengan OPD lain & Mitra Kerja (RSU, Puskesmas, Klinik Swasta);
  - ✓ Koordinasi Pengendalian Penduduk, dengan bentuk kegiatan Koordinasi Khusus Program Pengendalian Penduduk dengan OPD dan Mitra Terkait.
  - ✓ Fasilitasi Kualisi Penduduk Pembangunan serta Fasedu, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Fasepdu dan tokoh agama dalam program KKBPK.
- Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan kegiatan:
  - ✓ Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB, bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembantu Pembina KB Desa PPKBD, membantu PLKB dalam melaksanakan Advokasi & KIE kepada PUS untuk mengikuti Program KB;

- ✓ Peningkatan Kapasitas Kader dan Kelompok Masyarakat Peduli KB, bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan SDM Kader KB.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

17) Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dikarenakan semakin gencarnya mensosialisasikan mengenai dampak dari Pernikahan Usia Dini di kalangan masyarakat.

Prosentase PUS yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Boyolali sebesar 1,03%. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 mengindikasikan adanya keberhasilan meskipun angka prosentasenya naik sebesar 0,02% dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses pendataan dan pengentryan KK Baru, sehingga pada dasarnya pernikahan usia dini di Kabupaten Boyolali tahun 2019 berhasil untuk ditekan dengan angka yang sangat kecil. Selain itu, hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pelaksanaan program mengingat selama tahun 2019 ini sudah menjalankan banyak kegiatan dalam rangka menyuarakan penekanan terhadap angka PUS dibawah 20 tahun dan menekan angka pernikahan dini. Kegiatan tersebut juga melibatkan pihak kegita seperti KUA, Fapsedu, Puskesmas, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa tempat sehingga cenderung untuk menikah ataupun menikahkan anaknya ketika usianya di bawah 20 tahun tetapi sudah lulus sekolah. Hal ini biasanya untuk mengurangi angka ketergantungan terhadap orang tuanya. Daerah- daerah tersebut antara lain daerah pegunungan dan daerah utara, seperti Selo, Cepogo, Ampel, Klego, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi dengan prosentase angka lebih sari 1%;
- Faktor ekonomi masyarakat di beberapa tempat yang masih rendah, sehingga cenderung untuk tidak bisa membiayai pendidikan yang maksimal bagi anaknya. Hal tersebut mengakibatkan anak menjadi harus bertanggungjawab untuk mencari pekerjaan dan mencari uang untuk keluarganya. Sehingga mereka biasanya menikah setelah mencari pekerjaan.

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Melanjutkan kegiatan sosialisasi berkala kepada masyarakat umum tentang Pernikahan Usia Dini yang selama ini sudah berlangsung;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan terhadap pernikahan dibawah usia 20 tahun;
- Mendorong masyarakat untuk dapat memaksimalkan pendidikan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat mengurangi kecenderungan orang tua dan anak untuk menikah;
- Mengadakan kuliah umum di universitas yang ada di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu materinya yaitu tentang pernikahan usia dini;
- Melakukan siaran di Radio yang ada di daerah Boyolali tentang materi pernikahan usia dini secara berkala.

18) Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya:

- Seminar HIV/AIDS
- Sosialisasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah (SMP/SMA)
- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di Kelompok PIK Remaja.
- Lomba Duta GENRE Tingkat Kabupaten

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terbentur jam sekolah sehingga sulit untuk bisa tercapai sesuai dengan harapan, pembinaan diluar jam kerja (malam/hari libur), dan pengurus sebagian merantau/menikah.

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah regenerasi pengurus:

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
   - Pelayanan KIE luar ruang untuk masyarakat melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen) Keluarga Berencana penting untuk ditingkatkan dan optimalisasi PKB dan PLKB untuk memtivasi masyarakat tentang PUP;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,60% dari total anggaran sebesar Rp. 35.265.000,00 digunakan sebesar Rp. 35.054.000,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan kegiatan Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Sosialisasi Pro PN, serta melaksanakan Lomba PIK remaja. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

19) Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pembinaan posdaya kepada kelompok bersama dengan Pembinaan UPPKS.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dikarenakan tidak ada program/kegiatan khusus untuk Posdaya sehingga pembinaan dilaksanakan bersamaan dengan kelompok UPPKS;

c. Untuk melaksanakan indikator ini tidak ada program/kegiatan khusus untuk Posdaya sehingga pembinaan dilaksanakan bersamaan dengan kelompok UPPKS dengan melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

20) Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena peran masyarakat semakin meningkat, karena pemberdayaan masyarakat merupakan unsur yang utama untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

   Untuk mengetahui peran pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta masyarakat) dalam mencegah kematian ibu dan bayi maka dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi dari target RPJMD tahun 2019 sebesar 57% tercapai 63% sehingga realisasi sebesar 110% (12 Kecamatan). Dari hasil Evaluasi dapat diketahui sejauh mana peren masyarakat dalam upaya mencegah kematian Ibu dan Bayi baik dari sisi kelembagaan maupun peran masyarakat

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

   - Menyediakan tempat – tempat khusus untuk KISB;
   - Meningkatkan sosialisasi KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi) serta menggerakkan masyarakat melalui peningkatan pemahaman budaya hidup sehat;
   - Koordinasi dengan OPD teknis (Dinas Kesehatan) dalam rangka meningkatkan SDM pelayanan kesehatan didaerah;
   - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi program lintas OPD dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi sangat mendukung kelancaran evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi;
   - Menggunakan anggaran secara keseluruhan untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target dengan sebesar Rp. 7.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 7.000.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarus utaamaan Gender dan Anak, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Evaluasi Kecamatan sayang ibu dan bayi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

21) Desa layak anak.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena komitmen para pimpinan wilayah di Kecamatan dengan melakukan Deklarasi Kecamatan dan Desa layak anak.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

   - Deklarasi komitmen dan pemberian buku petunjuk teknis tentang pengembangan desa layak anak serta penguatan indicator desa layak anak yang berkolaborasi dengan desa yang bersangkutan (anggaran dana desa);
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 16,26% dari total anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00 digunakan sebesar Rp. 18.005.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pengembangan Desa Layak Anak, dan Fasilitasi P2TP2. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 kategori Pratama.

11. SASARAN 11 : Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	UMKM	170	20	100	30	100	30	100	30	30	100	B	DISKOPNAKER
2 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	koperasi	295	50	111,11	50	100	50	100	50	46	92	B	DISKOPNAKER
3 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	%	54	45	102,27	64	130,61	97	179,63	54	80	148,15	A	DISKOPNAKER
4 Kelompok binaan PKK	kelompok	287	287	100	90	31,36	287	100	287	290	101,05	A	DISPERMASDES
5 Jumlah LSM	lembaga	267	267	100	267	100	267	100	267	267	100	B	DISPERMASDES
6 Jumlah PKK aktif	kelompok	287	287	100	287	100	287	100	287	290	101,05	A	DISPERMASDES
7 Posyandu aktif	unit	1.539	1209	100	1809	141,88	1341	100	1.407	1.407	100	B	DISPERMASDES
8 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	%	100	17	100	100	296,67	50,56	100	67,42	67,42	100	B	DISPERMASDES
9 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	lembaga	241	141	100	161	100	181	100	201	192	95,52	B	DISPERMASDES
Capaian				**101,49**		**122,28**		**108,85**			**104,20**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 9 (sembilan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 104,20% (kategori sangat baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori sangat baik (33,33%), dan 6 (enam) indikator kategori baik (66,67%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 11 (sebelas) per indikator:

1) UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena:

- Terdapat berbagai macam pelatihan yang diberikan kepada UMKM guna peningkatan kemampuan sesuai bidang usahanya;

- Pembinaan kepada UMKM baik dari segi produksi, permodalan, maupun kemampuan manajerial;
- Kemitraan antara UMKM dengan pasar modern dan usaha dagang lainnya;
- Mengikutsertakan UMKM dalam pelatihan pemasaran baik secara online maupun offline serta mengikutkan dalam ajang promosi.

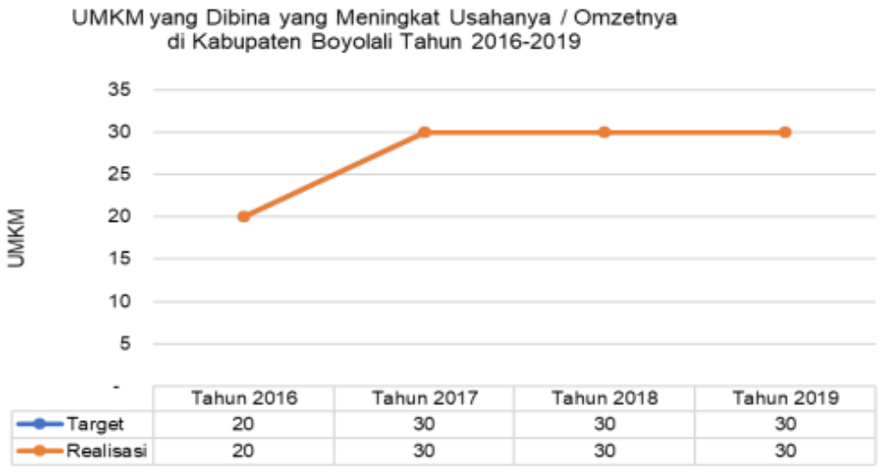
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Masih rendahnya kesadaran UMKM melakukan legalitas terhadap usahanya, dimana hal tersebut menjadi salah satu syarat kemitraan antara Buyer dengan UMKM;
- Belum meratanya kesempatan pelatihan usaha dikarenakan beragamnya jenis usaha UMKM.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Sosisalisasi dan motivasi kepada UMKM mengenai pentingnya legalitas hukum usahanya;
- Melakukan pemetaan dan penyusunan database UMKM sehingga dapat memudahkan dalam hal pembinaan dan pelatihan usaha;
- Menjadi fasilitator dalam menjalin kemitraan antara Buyer dan UMKM.

Berikut Grafik UMKM yang Dibina yang Meningkat Usahanya/Omzetnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Gambar 3.26 Grafik UMKM yang Dibina yang Meningkat Usahanya/Omzetnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,53% dari anggaran sebesar Rp. 475.950.000,00 digunakan sebesar Rp. 468.656.940,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan dua kegiatan yaitu:

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Gebyar UKM dan mengikutsertakan produk UMKM pada berbagai ajang promosi;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM;

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan pemasaran online bekerjasama dengan Gapura Digital Surakarta serta pelatihan packaging produk UMKM;
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan handycraft dan tata boga.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya.

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena belum semua koperasi dilakukan penilaian kesehatan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

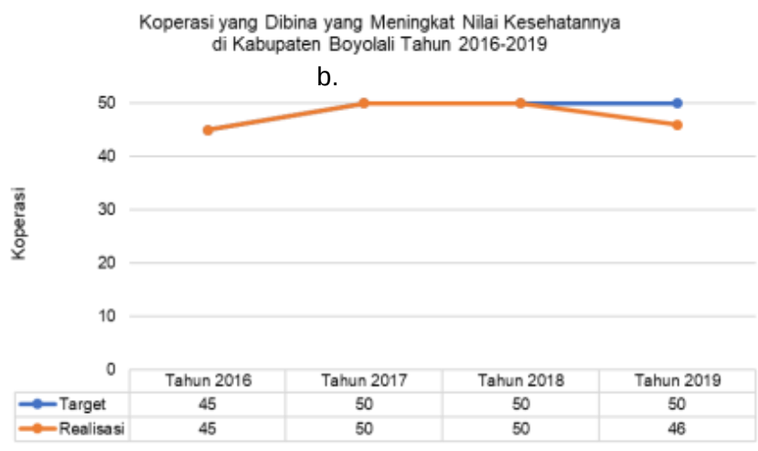
- Kurangnya SDM yang bersertifikat dalam penilaian kesehatan koperasi;
- Masih kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Melakukan penilaian kesehatan koperasi melalui lembaga swasta;
- Pembinaan kesehatan koperasi.

Berikut Grafik Koperasi yang Dibina yang Meningkat Nilai Kesehatannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:

b.



Gambar 3.27 Koperasi yang Dibina yang Meningkat Nilai Kesehatannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,75% dari anggaran Rp. 116.700.000,00 digunakan sebesar Rp. 115.829.430,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penilaian kesehatan koperasi; melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian penghargaan bagi koperasi berprestasi; melakukan pelatihan pengawas koperasi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

3) Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dikarenakan:

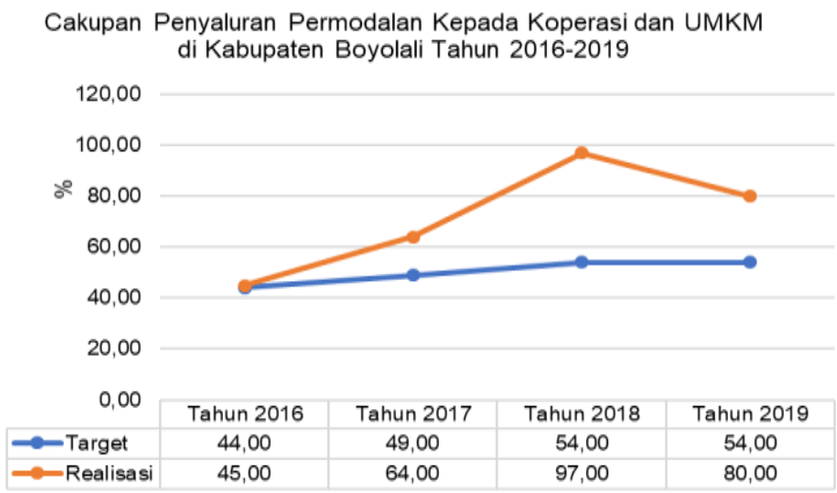
- Terjalinnya kerjasama antara lembaga penyedia permodalan dengan Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali. Beberapa lembaga yang menyalurkan permodalan pada koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 diantaranya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Telkom Witel Solo, dan PD BPR Bank Boyolali;
- Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit baru di tahun 2019 sebanyak 56 Koperasi dan UMKM, dengan perincian: 3 koperasi (dari LPDB), dan 53 UMKM (35 kredit UMKM dari PT Telkom Witel Solo, 18 kredit UMKM dari PD BPR Bank Boyolali). Realisasi 80% dari cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM diperoleh dari realisasi Koperasi dan UMKM yang berhasil mengakses kredit yaitu sejumlah 56, dibagi dengan jumlah proposal yang masuk yaitu sebanyak 70 proposal.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adala terdapat koperasi dan UMKM yang kreditnya macet, hal ini disebabkan karena keberadaan koperasi/UMKM yang sudah tidak aktif, kepengurusan koperasi yang sudah tidak jalan karena banyak pengurus yang sudah meninggal, maupun uang pinjaman yang diselewengkan pengurus.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Pemberitahuan dan melakukan penagihan kepada koperasi dan UMKM yang memiliki kredit macet;
- Pembinaan kepada koperasi yang masih aktif dan UMKM yang produksinya masih berjalan.

Berikut Grafik Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Grafik 3.28 Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,61% dari anggaran Rp. 44.700.000,00 digunakan sebesar Rp. 42.190.149,00

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan kegiatan:

- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dukungan informasi tentang penyediaan permodalan bagi 40 UMKM;
- Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan melaksanakan sosialisasi kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan mengakses penyediaan permodalan dari lembaga penyedia permodalan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Selain pencapaian indikator tersebut di atas Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2019 mendapatkan:

a. Penghargaan Natamukti Award dari *International Council for Small Business* (ICSB), 7 Oktober 2019 Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Boyolali karena mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Boyolali;

b. Penghargaan dari *International Council for Small Business* (ICSB), 7 November 2019, kepada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, kategori *Policy Maker* (Pembuat Kebijakan) yang mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Boyolali;

c. Memperoleh Sertifikat ISO 2001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dari NQA (*National Quality Assurance*).

Juga telah membangun Gedung Workshop Otomotif di BLK Boyolali



Gambar 3.29 Gedung Workshop Otomotif di BLK Boyolali

4) Kelompok binaan PKK.

a. Keberhasilan capaian target kinerja ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara Dispermasdes Kab. Boyolali dengan TP PKK Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang cepat.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- TP PKK Kabupaten Boyolali dan TP PKK Kecamatan serta PKK Desa dalam menyampaikan perkembangan aktivitas kegiatan belum maksimal;
- TP PKK Kabupaten dan Kecamatan serta Desa belum maksimal dalam penguasaan tugas materi PKK.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Melaksanakan pembinaan kepada TP PKK Kabuapten setiap rakor;
- Mengadakan pelatihan TP PKK untuk meningkatkan materi pengetahuan PKK;
- Koordinasi yang sudah berjalan antara Dispermasdes dengan TP PKK Kabupaten tetap dilanjutkan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melakukan pembinaan TP PKK Kabupaten dengan tujuan agar dalam penyusunan jadwal desa binaan PKK dapat tercapai selama 1 tahun sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Penyusunan pedoman sesuai alokasi dana untuk kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Kelurahan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar pengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,10% dari anggaran sebesar Rp. 307.486.704,00 digunakan sebesar Rp. 304.089.203,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PKK Kabupaten Desa/Kelurahan. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan ke desa melalui kunjungan langsung, lomba-lomba tertib administrasi PKK Desa dan Rakor dan Raker TP PKK Kabupaten dengan Tingkat Kecamatan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5) Jumlah LSM.

a. Keberhasilan capaian target indikator ini disebabkan karena telah dilakukan koordinasi anatara Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa dalam melakukan kegiatan untuk memantau lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam kegiatan partisipasi pembangunan desa.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

- Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan aktivitas belum optimal dalam pelaporan kegiatan;
- Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat pemahaman tentang beban tugas masih kurang.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah diberikan menyampaikan pehaman tentang tugas dan tanggungjawab sebagai petugas pendataan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Diselenggarakannya kegiatan Pelatihan Leader Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tugas dan tanggungjawab sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat apa yang seharusnya dilakukan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran efisiensi sebesar 2,71% dari anggaran sebesar Rp. 39.827.000,00 digunakan sebesar Rp. 38.747.550,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan aktivitas masyarakat dilatih untuk menjadi KPMD. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Jumlah PKK aktif

a. Keberhasilan capaian target indikator ini disebabkan karena adanya pembinaan dari Dispermasdes ke TP PKK Kabupaten ke TP Kecamatan dan Desa. Dispermasdes dan TP PKK Kabupaten melakukan kunjungan ke desa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan berupa SK. Jumlah PKK aktif mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah aktivitas kepengurusan PKK desa belum rutin menyampaikan laporan ke TP PKK Kabupaten. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Dispermasdes dan TP PKK melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK melibatkan semua pokja yang ada TP PKK Kabupaten;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,10% dari anggaran Rp. 307.486.704,00 digunakan sebesar Rp. 304.089.203,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK Kabupaten/Desa dengan bentuk kegiatan Pembinaan melalui kunjungan ke PKK Desa baik administrasi PKK maupun tugas daripada pengurus Pokja PKK Desa. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Posyandu aktif

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pendataan profil, pembinaan, dan pelatihan posyandu di masing-masing desa untuk meningkatkan motivasi pengurus posyandu.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum semua desa melaporkan aktivitas kegiatan posyandu ke Dispermasdes Kabupaten Boyolali.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

- Koordinasi dengan OPD terkait baik di Tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
- Monitoring untuk mendorong motivasi pengurus posyandu agar dapat meningkatkan kinerja.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pencapaian target posyandu aktif diantaranya memberikan penjelasan kepada pengurus posyandu;
- Pembinaan dan pelatihan pengurus posyandu oleh TP PKK Kabupaten;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0% dari anggaran Rp. 3.755.450,00 digunakan sebesar Rp. 3.755.450,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Dengan bentuk kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dan Pembinaan oleh Pokja TP PKK Kabupaten dan diadakan Lomba Kader Posyandu dan Monitoring dan fasilitasi bantuan Posyandu. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

8) Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) yang aktif

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya dukungan beberapa indikator dari berbagai bidang untuk meningkatkan sumber daya manusia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya atas kelangsungan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum terdata dan aktivitas kegiatan di desa kurang menonjol sehingga masyarakat belum mengetahui keberadaan LPMD tersebut.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Mendata kegiatan yang mendorong ke arah peningkatan kapasitas pengurus LPMD;
- Menadata pengurus LPMD yang sudah mengikuti pelatihan
- Menentukan jadwal pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas dari berbagai indikator pendukung.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan :

- Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif dilakukan dari berbagai indikator yang diselenggarakan di Dispermasdes sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan diantaranya efisiensi sebesar 2,80% dari total anggaran sebesar Rp. 387.313.704,00 digunakan sebesar Rp. 376.455.353,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring, Fasilitasi bantuan sarana dan Pembentukan kelembagaan BP Spams.

- Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PKK/Desa/Kelurahan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan ke desa melalui kunjungan langsung, lomba-lomba tertib administrasi PKK Desa, penyelanggaran Rakor dan Raker TP PKK Kabupaten dengan Tingkat Kecamatan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

9) Jumlah lembaga yang meningkat kemampuan pengelolaan sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat

a. Kegagalan capaian target indikator ini disebabkan tidak sesuainya pembangunan sarana prasarana dengan pembentukan kelembagaan pengelolaan BP SPAM. Hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya bantuan sarpras terkait air bersih. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan pada kelompok BP SPAMS yang ada, dan apabila memungkinkan dibuat kelompok pengelola baru.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melakukan rapat koordinasi dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pamsimas;
- Sebelum melakukan pembinaan, Tim Koordinasi BP SPAMS terlebih dahulu melakukan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah srategi dalam mencapai target sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan;
- Pembinaan kelompok pengelola sarana air bersih dilakukan oleh Tim Koordinasi BP SPAMS Kabupaten
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 15,95% dari anggaran Rp.40.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 33.618.600,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. Kegiatan yang dilakukan pembinaan kepada kelompok melalui pengurus pengelola sarana air bersih di masing-masing desa, selain itu pembinaan pembukuan/administrasi kelompok pengelola sarana air bersih. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Selain indikator tersebut di atas Kabupaten Boyolali juga berprestasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu memperoleh Piagam Pengharagaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Pertama dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 se Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

12. SASARAN 12 : Meningkatnya derajat kesehatan

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA	< ⊢ ⊃ <	TARGET	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	PERANGKAT

			KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	DAERAH PENGAMPU
1		2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penurunan Angka Kematian Bayi	per 1000 kh	8,40	8,2	104,65	9,4	90,70	8,81	96,35	8,40	8,89	94,17	B	DINKES
2	Kasus Kematian Ibu	kasus	19	16	123,81	16	123,81	15,00	125,00	20,00	13,00	135,00	A	DINKES
3	Penurunan Angka Kematian Balita	per 1000	10	8,7	126,27	11	103,51	9,97	110,98	11,00	10,43	105,18	A	DINKES
4	Cakupan kunjungan bayi	%	95	92	115	99,4	121,22	93,73	110,27	87,00	99,96	114,90	A	DINKES
5	Cakupan pelayanan anak balita	%	95	80	100	85,9	93,37	93,30	100,32	94,00	99,96	106,34	A	DINKES
6	Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	97,70	97,70	B	DINKES
7	Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	90	100	100	100	125	100	117,65	90,00	95,00	105,56	A	DINKES
8	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	40	60	156,66	38,6	100	42,98	110,49	39,20	43,14	110,05	A	DINKES
9	Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	90	80	88,89	97	105,43	93,00	98,94	96,00	86,00	89,58	B	DINKES
10	Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	%	45	53,99	269,95	30	120	35	100,00	40,00	42,00	105,00	A	DINKES
11	Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	%	45	13,9	69,50	35	140	35	100,00	40,00	48,00	120,00	A	DINKES
12	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	per 100.000	47,50	50	100	10	179,80	12,70	174,08	48,50	43,17	110,99	A	DINKES
13	Angka kematian DBD (CFR)	% dari jumlah penderita	1,60	2	94,74	1	144,44	1,50	116,67	1,70	0,23	186,47	A	DINKES
14	Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	%	50	70,4	1408,00	100	1000	100,00	500,00	30,00	77,00	256,67	A	DINKES
15	Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	%	> 85	86	100	98,6	100	95,77	136,81	> 75	84,27	112,36	A	DINKES
16	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	%	50	10,8	108	21	105	41,19	137,30	40,00	50,00	125,00	A	DINKES
17	Cakupan Desa UCI	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	B	DINKES
18	Puskesmas Terakreditasi	puskesmas	29	7	100	3	150	6	150,00	6,00	10,00	166,67	A	DINKES
19	Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	%	15	15	100	25,44	169,60	45,41	302,73	15,00	25,00	166,67	A	DINKES
20	Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	%	1,50	1,3	86,67	0,94	62,67	0,97	64,67	1,50	0,91	60,67	C	DINKES
21	Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	%	90	100	100	100	111,11	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11	A	DINKES
22	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	B	DINKES
23	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	B	DINKES
24	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	%	20,69	0	0	6,89	100	11,54	111,48	13,79	13,79	100	B	DINKES
25	Rasio dokter	%	17	14,7	97,35	26,35	173,36	24,07	154,29	16,00	15,60	97,50	B	DINKES
26	Rasio dokter gigi	%	5,90	3,94	101,03	4,2	93,33	3,51	73,13	5,10	5,20	101,96	A	DINKES
27	Rasio perawat	%	100,30	87,15	100	79,02	87,12	93,76	101,47	95,30	86,80	91,08	B	DINKES
28	Rasio bidan	%	58,40	56,5	100	49,26	86,88	57,00	100,00	57,20	53,60	93,71	B	DINKES
29	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	100	NA	-	20	100	38,46	96,15	60,00	100,00	166,67	A	DINKES
30	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	desa	120	69	100	92	139,39	94,00	117,50	93,00	107,00	115,05	A	DINKES
31	Proporsi Rumah tangga sehat	%	75	81,9	100	79,9	112,54	83,30	115,69	73,00	85,40	116,99	A	DINKES

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1		2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Cakupan Desa STBM	desa	267	3	60	46	115,00	97,00	129,33	160,00	102,00	63,75	C	DINKES
33	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	%	100	104,02	106,93	90,08	91,90	97,21	98,01	99,46	92,15	92,65	B	RSUD PANDAN ARANG
34	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	%	88,33	88,21	129,51	71,45	99,83	75,12	101,14	79,23	79,92	100,87	A	RSUD SIMO
35	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	%	100	59,58	110,33	58,14	92,29	60,43	87,58	81	74,60	92,10	B	RSUD WARAS WIRIS
	Capaian				**147,18**		**138,21**		**127,12**			**114,64**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 114,64% (kategori sangat baik) terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kategori sangat baik (60%), 12 (dua belas) indikator kategori baik (34,29%), dan 2 (dua) indikator kategori cukup (5,71%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 12 (dua belas) per indikator:

1) Penurunan Angka Kematian Bayi

Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan berat badan rendah (BBLR) yaitu 43 kasus, asfiksia 19 kasus, sepsis 5 kasus, kelainan bawaan 8 kasus, pneumonia 1 kasus dan penyebab lain-lain 45 kasus. Target kinerja pada indikator ini per 1000 kelahiran hidup sebesar 8,4 realisasi 8,82 dan capaian 95. Tingginya kematian bayi ini tertinggi disebabkan karena bayi lahir dengan BBLR. Penyebab kematian tertinggi adalah BBLR, dikarenakan kelahiran preterm < 36 mg sebanyak 38 kasus,> 36 mg 5 kasus, dilihat dari kadar HB ibu hamil anemi berat 1, anemi ringan 16 dan normal 26 ibu hamil.

Hambatan dalam pelaksanaan masih adanya keterlambatan deteksi dini ibu risiko tinggi sehingga terjadi keterlambatan penanganan (intervensi yang dilakukan tidak mempengaruhi karena sudah terlambat dalam deteksi), masih belum optimalnya rumah sakit ponek, serta sosialisasi jampersal belum maksimal.

Solusi untuk tahun mendatang dilakukan audit internal rumah sakit ponek serta percepatan persalinan di faskes apabila mengalami kasus pre eklampsi, dan dilakukan sosialisasi eradikasi di tingkat paling bawah.

2) Kasus Kematian Ibu.

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilakukan penguatan data base dengan pemanfaatan tehnologi informasi terintegrasi dan penguatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan.

Penyebab Kematian Ibu dari tahun ke tahun masih didominasi oleh Preeklampsi/Eklampsi (Hipertensi dalam kehamilan). Di tahun 2018 terdapat 15 kasus kematian ibu dari target 20 kasus dengan penyebabnya PER/PEB 5 kasus,emboli air ketuban 2 kasus,perdarahan 2 kasus, syok septik, cardiac arrest, dispnu, emboli paru, dekomp, CHF, masing-masing 1 kasus.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

a. Deteksi dini terhadap kasus yang ada belum maksimal, mengakibatkan keterlambatan penanganan;

b. Keterbatasan Puskesmas yang mampu PONED dan RS yang mampu PONEK, sehingga rujukan belum bisa langsung ke PONEK karena jauhnya jarak tempuh ke RS PONEK;

c. Sarana dan Prasarana belum memadai;

d. SDM belum optimal;

e. Pelayanan Yankes Primer dan Rujukan lintas batas belum MOU.

Solusi yang dilakukan:

a. Penguatan data base dengan pemanfaatan tehnologi informasi terintegrasi (Lapor ibu hamil, Bank Data Gizi KIA, SMS Bunda);

b. Penguatan pelayanan kesehatan primer;

c. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

d. Penguatan Sistim Rujukan;

e. Penguatan Program KIA;

f. Penguatan Bidan Desa dan Bikor;

g. Penguatan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan.

3) Cakupan kunjungan bayi

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan minat ibu untuk melakukan pemantauan bayi secara rutin baik di Posyandu maupun di puskesmas semakin tinggi, dan tata laksana standar pemberian pelayanan sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya oleh tenaga kesehatan semakin baik.

Analisis untuk 3 (tiga) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Penguatan Data Base dengan pemanfaatan tehnologi informasi terintegrasi (Lapor ibu hamil, Bank Data Gizi KIA, SMS Bunda);
- Penguatan pelayanan kesehatan primer;
- Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Penguatan Sistim Rujukan;
- Penguatan Program KIA;
- Penguatan Bidan Desa dan Bikor;
- Penguatan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- Memberikan Pelayanan Jaminan Persalinan kepada masyarakat kurang mampu dengan program Jampersal;
- Menggunakan dari total anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, yaitu dalam Kegiatan Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dengan anggaran Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi Rp. 113.854.000,00 terjadi efisiensi 12,42%, serta pada kegiatan Peningkatan pelayanan Persalinan (Jampersal) dengan anggaran Rp. 2.721.000.000,00 terealisasi Rp. 2.033.555.710,00 atau efisiensi 25,26%.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dengan kegiatan:

- ✓ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dengan bentuk kegiatan yaitu Pengembangan Aplikasi Satiti, Monitoring dan Evaluasi KN-KF, Pengkajian AMP dan Desiminasi Kajian AMP, AMP Sosial, serta Persiapan, Pembentukan dan Pengembangan Kelas Ibu Balita Tahun 2019.
- ✓ Peningkatan Pelayanan Persalinan (Jampersal) dengan bentuk kegiatan berupa sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran di 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Selo, Kecamatan Simo, Kecamatan Musuk, dan Kec Boyolali, Dukungan management, Rujukan, Perawatan ibu hamil, bersalin dan BBL.

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan:
  - ✓ Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan rincian kegiatan Upaya Kesehatan Ibu baik Pelayanan antenatal/ ANC, dan Pelayanan ibu nifas, dengan berbagai bentuk kegiatan mulai pendataan sasaran ibu hamil, kelas ibu hamil, pelaksanaan UKBM, pemberian makanan tambahan ibu hamil;
  - ✓ Untuk Pelayanan kesehatan bayi neonatus dan bayi, dengan bentuk kegiatan pelayanan neonatus sampai dengan tahapan pelacakan kematian apabila terjadi kematian bayi;
  - ✓ Pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap Balita usia 0 -59 bulan berupa Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada 2 kali setahun, Pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun ada yang belum berhasil mencapai target kinerja.

4) Penurunan Angka Kematian Balita.

Keberhasilan capaian target inidkator kinerja ini disebabkan karena kualitas gizi saat hamil dan deteksi dini terhadap penyakit anak balita harus sedini mungkin sehingga mendapat penanganan yang cepat dan tepat.

5) Cakupan pelayanan anak balita

Keberhasilan capaian target kinerja indikatort ini karena didukung oleh pelayanan kesehatan kepada anak balita sudah sesuai standart dimana setiap anak balita (12-59 bulan) mendapatkan pemantauan pertumbuhan minimal 8x dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2x dan pemberian vitamin A 2X dalam 1 tahun.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:
   - Melakukan koordinasi dengan pemegang program UKS dan KRR melalui pertemuan terpadu dan monev pemegang program di Puskesmas sehingga dalam pelaksanaan koordinasi lebih efisien waktu;

- Menggunakan seluruh anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target dari anggaran Rp. 15.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 14.696.200,00 sehingga terdapat efesiensi sebesar 2,03%.

b. Untuk mencapai kedua indikator di atas ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan Balita, anak sekolah dan remaja, dengan bentuk kegiatan pertemuan koordinasi program untuk penguatan program di Puskesmas untuk mengetahui bilamana ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di 25 Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan rincian kegiatan Pelayanan kesehatan anak balita dan prasekolah dengan berbagai bentuk kegiatan antara lain mulai pendataan balita, pemantauan kesehatan balita, pelacakan balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan, dan pembinaan untuk posyandu balita.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia.

a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan pencapaian pelayanan terkendala ketercukupan sediaan reagen untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol yang ada dipuskesmas.

Hambatan untuk lansia risiko tinggi yang tidak bisa datang ke posyandu lansia, harus dikunjungi kerumah, sehingga kekurangan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kunjungan (petugas laborat melayani di puskesmas).

Solusi untuk tahun mendatang dianggarkan reagen sesuai dengan target yang direncanakan dan jika dimungkinkan penambahan tenaga analis laboratorium untuk upaya kesehatan masyarakat.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melakukan koordinasi dengan pemegang program lansia di Puskesmas melalui pertemuan terpadu dan monev petugas lansia;
- Menggunakan seluruh anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target dari anggaran Rp. 10.000.000,00 dengan terealisasi Rp. 9.272.750,00 terjadin efisiensi 7,27%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan bentuk kegiatan melalui pertemuan terpadu dan monev petugas lansia yang didanai dari APBD Kabupaten Boyolali. Program di tingkat Puskesmas dilaksanakan dengan anggaran bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan, dengan bentuk kegiatan berupa posyandu lansia. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena tersedianya PMT pemulihan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang anggarannya tersebar di 25 Puskesmas dan distibusi MP-ASI dari APBN untuk balita kurang gizi, sehingga balita yang terdeteksi gizi buruk hampir semua mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum semua petugas gizi RS maupun Puskesmas Perawatan mendapatkan pelatihan tata laksana gizi buruk dan belum semua kader terpapar PMBA serta Pemantauan Pertumbuhan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengusulkan adanya pelatihan tata laksana gizi buruk bagi petugas gizi RS dan Puskesmas Perawatan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melakukan integrasi dalam pelaksanaan dalam mencapai beberapa indikator yang bertautan langsung dengan program gizi;
- Dalam rangka pelaporan telah menggunakan system aplikasi EPPGBM dari kementrian Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang dapat digunakan untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat memberikan feedback secara langsung status gizi sasaran tersebut;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan realisasi Rp. 55.185.000,00 efisiensi anggaran 8,03%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, guna penguatan dan pemantauan rutin gizi, dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang tersebar di 25 Puskesmas yang terintegrasi untuk mencapai beberapa indikator yang bertautan langsung dengan Gizi. Bentuk kegiatan antara lain berupa PMT Pemulihan balita kurus dan PMT Penyuluhan. Kegiatan lain juga melakukan pelacakan kasus gizi buruk, surveilans gizi di Puskesmas dan serta melalui dana BOK Puskesmas, sosialisasi cara Pemberian Makanan yang baik untuk Bayi dan Anak pada kader posyandu (PMBA) dan Dana APBN berupa bantuan MP ASI untuk balita kurus. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

8) Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

a. Keberhasilan pada capaian Indikator ini disebabkan kebijakan dari Provinsi dan Kabupaten yang menambah kuota kartu masyarakat miskin diluar PBI APBN untuk menjadi peserta PBI APBD, dengan penambahan anggaran.

Jumlah peserta KIS masyarakat miskin Kabupaten Boyolali sebanyak 374.093 dengan rincian peserta KIS/ PBI APBN sebanyak 378.856 dan KIS Provinsi / PBI APBD I sebanyak 27.609 dan Jamkesda Kabupaten/ PBI APBD II sebanyak 47.312 dibandingkan dengan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Boyolali adalah sebesar 1.051.867. Pada tahun 2019 KK miskin Kabupaten yang mendapat Kartu KIS sebanyak 453.777 sehingga mengalami kenaikan jumlah Penerima Iuran.

Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah belum adanya kebijakan untuk validasi data penduduk miskin, NIK belum terbaca di Disdukcapil sehingga menghambat proses pengalihan peserta Jamkesda untuk didaftarkan menjadi peserta PBI APBD sehingga terjadi kepesertaan ganda.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Disdukcapil, agar validasi data masyarakat miskin dan melakukan koordinasi dengan Masyaraka terkait kepeserta Jamkesda menjadi peserta PBI APBD tidak menjadi ganda. Begitu juga pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat, tetapi masiah ada masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum menerima, upaya-upaya yang dilakukan pendistribusian kartu melalui TKSK dan UPT Puskesmas wilayah setempat.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Bekerja sama dengan dinas Sosial untuk validasi data melalui tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga tidak ada penganggaran untuk validasi;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,18% dari anggaran Rp. 14.666.629.000,00 digunakan sebesar Rp. 14.640.806.709,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan Penyediaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan bentuk kegiatan berupa pembayaran premi Kesehatan bagi masyarakat miskin non PBI, serta pembayaran klaim untuk masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat namun memerlukan perawatan/pengobatan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

9) Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

a. Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan adanya proses pengadaan yang gagal dimana banyak penyedia yang tidak dapat menyediakan obat yang dibutuhkan. Meskipun tidak bisa mencapai target tapi semua kebutuhan obat puskesmas terpenuhi karena ada buffer, droping dari provinsi dan obat non Fornas.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target adalah adanya proses pengadaan yang gagal dimana adanya penyedia yang tidak dapat menyediakan obat yang dibutuhkan.

Upaya –upaya yang dilakukan adalah proses pengadaan dilaksanakan di awal tahun sehingga jika terjadi kegagalan pengadaan bisa dilaksanakan di pertengahan tahun atau perubahan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Proses pengadaan obat secara elektronik maupun melalui lelang;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,58% dari anggaran Rp. 6.230.097.000,00 digunakan sebesar Rp. 6.193.989.261,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan obat secara elektronik maupun melalui lelang untuk memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di 25 Puskesmas, serta bahan media habis pakai termasuk di Labkesda, sehingga kebutuhan obat tercukupi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

10) Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian.

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan beberapa faktor:

- Kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena adanya penjadwalan monitoring dan evaluasi apotek yang dilakukan awal tahun dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan;
- Adanya kerjasama dengan lintas sektor (Balai Besar POM di Semarang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah);
- Adapun indikator monev apotek terdiri dari 36 indikator yang dikelompokkan dalam indicator pemenuhan SDM, regulasi, sarana prasarana apotek, pengadaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, penanganan obat recall dan obat kadaluarsa serta pengelolaan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor). Apotek yang belum memenuhi syarat sesuai indicator dimaksud, diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan agar memenuhi syarat. Dari hasil monev, hamper semua apotek belum memenuhi syarat keseluruhan indicator (36) indicator), namun dengan diberikan waktu selama 14 hari, apotek dapat melengkapi persyaratan sehingga keseluran indicator dapat terpenuhi.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Menyusul jadwal pembinaan,
- Adanya kerjasama dengan lintas sektor (Balai Besar POM di Semarang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah);
- Pembinaan dan pengawasan yang rutin ke Puskesmas, Klinik, Apotek dan Rumah Sakit;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,05% dari anggaran Rp 11.557.000,00 digunakan sebesar Rp. 11.501.117,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan bidang Kefarmasian, serta bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan sarana apotik dan pelayanan kefarmasian di apotik, agar sesuai dengan standar. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

11) Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman.

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena adanya penjadwalan monitoring dan evaluasi industry rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan awal tahun dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, serta Adanya kerjasama dengan lintas sektor (Balai Besar POM di Semarang).

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Memberikan penyuluhan / pembinaan secara berkelompok sebelum dilaksanakan visitasi pemberian ijin;
- Dilakukan monitoring pemenuhan indicator CPMB (Cara Produksi Makanan yang Baik) yaitu terkait sarpras, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan pengemas, perilaku penjamah makanan, ketersedian air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, dokumentasi produksi (pencatatan mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan distribusi), pengelolaan produk makanan kadaluarsa serta pelabela;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,05% dari anggaran Rp. 8.891.000,00 digunakan sebesar Rp. 8.851.100,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan bagi Produsen Makanan minuman rumah tangga, dan pemantauan produk makanan dan minuman dalam penggunaan BTP. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

12) Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk.

13) Angka kematian DBD (CFR).

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Keberhasilan capaian kedua indikator ini dikarenakan karena meningkatnya kemampuan SDM dalam mendiagnosa dan tatalaksana kasus DBD. Meningkatnya jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten Boyolali serta Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera ke Fasyankes juga ikut serta menunjang keberhasilan indikator ini.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Mengadakan pertemuan terpadu dan monev pemegang program untuk seluruh puskesmas, sehingga lebih efisien waktu;

- Untuk pelaporan sudah mulai dirintis menggunakan system aplikasi E DBD (pelaporan daerah ke pusat);
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,85% dari anggaran Rp. 33.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 32.388.675,00.

c. Untuk mencapai kedua indikator di atas ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertemuan koordinasi dengan pemegang program di puskesmas dan rumah sakit, serta klinik;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan bentuk kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tular vektor dan zoonotik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan forum komunikasi masyarakat desa/ kelurahan, penyelidikan epidemiologi faktor risiko penyakit tular vektor dan zoonotic di masyarakat dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya untuk deteksi dini faktor-faktor risiko penyakit tular vektor dan zoonotik, yang merupakan target RPJMD.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

14) Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil.

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan:

- Adanya kerjasama dengan LSM yang bergerak dibidang HIV AIDS seperti: SPEKHAM, KPA dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS);
- Adanya Tim di 20 Puskesmas, Klinik serta 3 Rumah Sakit Pemerintah yang berkolaborasi dengan Tim Dinkes untuk melaksanakan *skrining* pada kelompok risiko HIV AIDS;
- Adanya dukungan anggaran dari *Global Fund* untuk mobile VCT serta kegiatan pelatihan VCT bagi Puskesmas dan klinik;
- Reagen sudah dicukupi dari Kementerian Kesehatan.

Berikut tabel test HIV pada tahun 2019:

Tabel 3.18 Daftar test HIV pada tahun 2019

No	Indikator Output	Target (orang)	Capaian		Kinerja (%)
			Jumlah orang	Prosentase	
1	LSL dites HIV	539	903	167,53	167,53
2	Waria dites HIV	131	48	35	35
3	Bumil dites HIV	11.404	12.081	105,93	105,93
4	Pasien TB dites HIV	944	1500	158,89	158,89
5	Wanita Pekerja Seks	0	217	217	217
6	WBP	0	165	165	165
7	Populasi UMUM	1.592	1.343	84,35	84,35
8	Pasangan ODHA	6.539	611	9,34	9,34
	Jumlah	**21.149**	**16.868**	**79,75**	**265**

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melakukan kerjasama dengan LSM yang bergerak dibidang HIV AIDS seperti: SPEKHAM, KPA dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Dukungan anggaran dari Global Fund untuk mobile VCT serta kegiatan pelatihan VCT bagi Puskesmas serta klinik, dan reagen untuk pemeriksaan sudah dicukupi dari Kementrian Kesehatan sehingga menghemat anggaran dari daerah;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar sebesar 0.86% dari anggaran Rp. 50.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 49.567.575,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung, dengan bentuk kegiatan Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV meliputi Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dan Pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke layanan pengobatan Anti Retroviral (ARV);
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan rincian kegiatan yaitu deteksi dini penyakit HIV/AIDS, TB, dan Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

15) Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan untuk diagnose dan penatalaksanaan TBC;
- Meningkatnya kemampuan petugas untuk memberikan edukasi dan konseling yang baik kepada pasien dan keluarga;
- Ketersediaan obat-obat yang cukup;
- Adanya peran serta dari LSM yang mendampingi;
- Adanya kader TBC yang membantu mendampingi pasien yang sedang pengobatan;
- Adanya bimbingan dari RSUD Muwardi untuk penatalaksanaan pasien TBC Resisten Obat sebelum diserahkan ke Puskesmas.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan

- Melakukan inisiasi program TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh) Kabupaten Boyolali, sehingga lebih menggema penemuan penderita TBC untuk pengobatan sampai sembuh (dalam kurun waktu pengobatan selama 6 bulan minum obat TBC secara terus menerus tanpa putus);
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan SITT (system Informasi Tubercolosis) yang mengakumulasi pelaporan dari Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas, sehingga monitoring menjadi lebih efisien;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan efisiensi sebesar 0,86% dari anggaran Rp. 50.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 49.567.575,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan bentuk kegiatan pertemuan koordinasi dengan pemegang program di puskesmas dan rumah sakit;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan bentuk kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi penyakit menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan forum komunikasi masyarakat desa/ kelurahan, pemantauan pengobatan dan pemeriksaan penunjang, serta faktor risiko penyakit menular, Surveilans penyakit menular di masyarakat dilakukan oleh Puskesmas dan jejaringannya untuk deteksi dini faktor-faktor risiko penyakit menular yang merupakan target SPM.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

16) Persentase desa/kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM.

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini karena beberapa faktor yaitu:

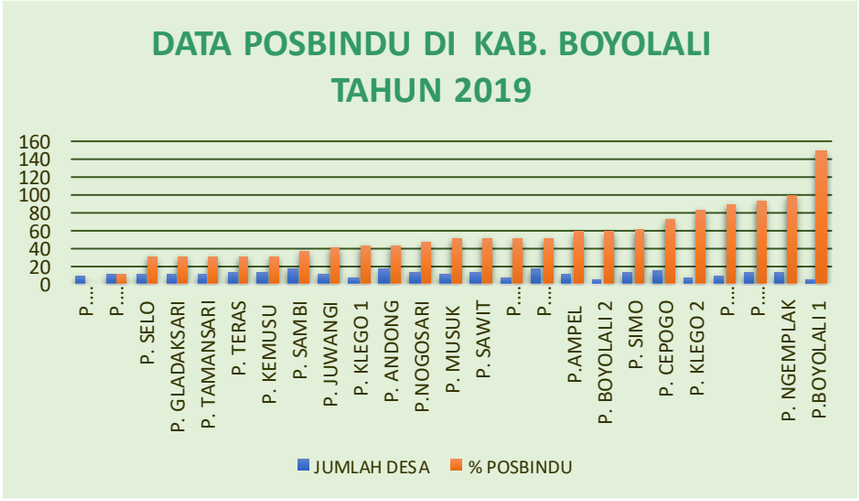
- Adanya komitmen dari Petugas pengelola PTM Puskesmas untuk membentuk Posbindu;
- Adanya dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Desa;
- Adanya dukungan dana dari anggaran BOK;
- Adanya dukungan anggaran dari DAK.

Tabel 3.19 Jumlah Posbindu 2019

NO	PUSKESMAS	JUMLAH POSBINDU	POSBINDU PTM**	
			JUMLAH	%
1	3	4	5	6
1	SELO	10	3	30,0
2	AMPEL	10	6	60,0
3	GLADAKSARI	10	3	30,0
4	CEPOGO	15	11	73,3
5	MUSUK	10	5	50,0

NO	PUSKESMAS	JUMLAH POSBINDU	POSBINDU PTM**	
			JUMLAH	%
1	3	4	5	6
6	TAMANSARI	10	3	30,0
7	BOYOLALI 1	4	6	150,0
8	BOYOLALI 2	5	3	60,0
9	MOJOSONGO	13	12	92,3
10	TERAS	13	4	30,8
11	SAWIT	12	6	50,0
12	BANYUDONO 1	9	8	88,9
13	BANYUDONO 2	6	3	50,0
14	SAMBI	16	6	37,5
15	NGEMPLAK	12	12	100,0
16	NOGOSARI	13	6	46,2
17	SIMO	13	8	61,5
18	KARANGGEDE	16	8	50,0
19	KLEGO 1	7	3	42,9
20	KLEGO 2	6	5	83,3
21	ANDONG	16	7	43,8
22	KEMUSU	13	4	30,8
23	WONOSEGORO	8	0	0,0
24	WONOSAMUDRO	10	1	10,0
25	JUWANGI	10	4	40,0
JUMLAH (KAB/KOTA)		**267**	**137**	**51,31**

Berikut grafik Data Posbindu di Kabupaten Boyolali:



Gambar 3.30 Grafik Data Posbindu di Kabupaten Boyolali

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melaksanakan koordinasi dengan pemegang program PTM melalui pertemuan terpadu dan monev pemegang program untuk seluruh puskesmas, sehingga lebih efisien waktu;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,06% dari anggaran Rp. 80.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 78.350.827,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Jiwa, dengan bentuk kegiatan pertemuan koordinasi dengan pemegang program di puskesmas;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan bentuk kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan forum komunikasi masyarakat desa/ kelurahan, Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di pos bindu PTM, Surveilans penyakit tidak menular di masyarakat dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya untuk deteksi dini faktor-faktor risiko penyakit tidak menular, penyakit metabolik seperti Hipertensi, Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus dan penyakit tidak menular lainnya yang merupakan target SPM.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

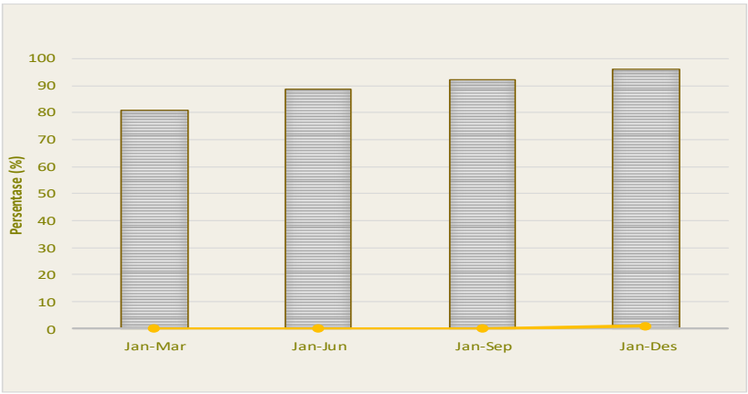
17) Cakupan Desa UCI.

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai salah satu cara pencegahan penyakit, terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- Adanya sistem pemantauan dan evaluasi sehingga jika ditemukan anak yang belum diimunisasi sesuai jadwal dapat segera diketahui dan segera dilakukan sweeping oleh bidan desa;
- Sosialisasi dan menjalin kerja sama yang baik baik dengan tokoh masyarakat maupun kader kesehatan.

Target kinerja Cakupan Desa UCI (Universal Child Imunization) sebesar 100%, dengan definisi Desa/kel yang seluruh bayinya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang meliputi imunisasi HB0, BCG, Pentabio 3x, Polio 4x, dan Campak).

Berikut Grafik Pemantauan Desa Menuju UCI (Komulatif Triwulanan) Tahun 2019:



Gambar 3.31 Grafik Pemantauan Desa Menuju UCI (Komulatif Triwulanan) Tahun 2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melaksanakan koordinasi dengan pemegang program Imunisasi dan mengefektifkan kader kesehatan dan Posyandu di desa oleh pemegang program puskesmas, sehingga program tepat sasaran;
- Penggunaan teknologi informasi yang berkembang, dengan pelaporan melalui soft file;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,2% dari anggaran Rp. 75.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 74.846.400,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan Peningkatan Imunisasi dan Vaksinasi, dengan bentuk kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pemegang program di Puskesmas, serta melakukan monitoring pelaksanaan imunisasi, dan melakukan advokasi bilamana terjadi penolakan imunisasi;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas dengan rincian kegiatan adalah dengan malaksanakan Imunisasi dasar, imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, imunisasi lanjutan, dan pelaksanaan imunisasi dengan melakukan Validasi data hasil cakupan imunisasi, Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Advokasi / sosialisasi / lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi, Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan safety box), KIE Media KIE sederhana, pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

18) Puskesmas Terakreditasi.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan komitmen yang tinggi dari Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung dengan pembimbingan dari Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian reakreditasi di 10 Puskesmas (Puskesmas Ampel, Simo, Andong, Selo, Nogosari, Banyudono II, Klego I, Karanggede, Klego II, dan Cepogo). Dari 10 Puskesmas tersebut status akreditasi Utama 6 Puskesmas (Puskesmas Simo, Andong, Selo, Nogosari, Karanggerde dan Cepogo), sedangkan yang 4 Puskesmas status akreditasi Madya (Ampel, Banyudono II, Klego I, dan Klego II), sebagian besar status akreditasinya meningkat kecuali untuk Puskesmas Banyudono II dan Klego II.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

   - Terdapat kesulitan memahami instrumen akreditasi yang jumlahnya 716 jenis elemen penilaian;
   - Tata graha yang memerlukan rehabilitasi dengan anggaran yang besar;
   - Penilaian akreditasi terbatas oleh tim dari Pusat.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah membangun komitmen tim pendamping Dinas Kesehatan dan semua karyawan Puskesmas tehadap kegiatan akreditasi Puskesmas dan melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penilaian secara periodik, serta mengarahkan pembangunan Puskesmas atau rehabilitasi dengan standar tata graha yang ditetapkan dalam akreditasi dan berpedoman pada Permenkes 75 Tahun 2014.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

   - Penerapan akreditasi dilaksanakan oleh semua unsur yang terkait dengan akreditasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
   - Efesiensi anggaran dilakukan dengan melakukan pembimbingan yang dilakukan oleh Tim PCB sehingga tidak perlu mengeluarkan honor pendamping akreditasi karena dilakukan oleh ASN Boyolali, sehingga diperoleh efisiensi dari anggaran (APBN) sebesar 27,77%, dengan anggaran Rp 1.706.200.000,00 dengan realisasi Rp 1.232.329.848,00, sedangkan akreditasi labkesda menggunakan anggaran Rp. 205.828.565,00 dari jumlah anggaran tersedia Rp. 322.200.000,00 sehingga terdapat efisiensi 38,04%

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Akreditasi Puskesmas difokuskan untuk melaksanakan akreditasi di Puskesmas yang telah dilakukan pendampingan sebelumnya, sehingga Puskesmas dapat lebih dipersiapkan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

19) Cakupan Rawat Jalan (puskesmas).

Cakupan kunjungan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama baik milik pemerintah maupun swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi Puskesmas, klinik, praktek bersama dan perseorangan. Sedangkan cakupan total kunjungan rawat jalan dihitung berdasarkan jumlah seluruh kunjungan baik lama maupun baru di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan rawat jalan di Kabupaten Boyolali selama tahun 2019 tercatat sebanyak 273.636 kunjungan baru, sedangkan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali sejumlah 1.026.034 jiwa, sehingga dapat dikatakan cakupan visite rate sebesar 26,67% dan target sebesar 15%. Sedangkan cakupan kunjungan total yang terdiri dari kunjungan lama dan kunjungan baru sejumlah 968.184 atau sebesar 94,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah kunjungan di sarana pelayanan kesehatan sebesar 1,97%. Kenaikan ini diharapkan karena kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dan yang lebih diharapkan adalah kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan bukan merupakan kunjungan sakit namun kunjungan sehat, sejalan dengan perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Selain itu juga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dengan adanya akreditasi Puskesmas. Jika dicermati lebih lanjut kunjungan rawat jalan dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin dimana kunjungan perempuan sejumlah 59,26% sedangkan kunjungan laki-laki sejumlah 40,74 %.

20) Cakupan Rawat Inap (puskesmas).

Cakupan kunjungan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan total kunjungan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah seluruh kunjungan baik kunjungan lama maupun baru di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan baru rawat inap sejumlah 11.177 jiwa atau sebesar 1,09% dan target sebesar 1,5%. Sedangkan kunjungan total rawat inap baik kunjungan baru dan kunjungan lama sejumlah 33.346 jiwa atau sebesar 3,25%. Tahun 2018 total kunjungan rawat inap sebanyak 2,95% sehingga terjdi kenaikan kunjungan rawat inap sebesar 0,3%, sehingga bisa disimpulkan terjadi kenaikan yang sangat bermakna hal ini disebabkan dengan terakreditasinya Puskesmas masyarakat semakin percaya terhadap layanan kesehatan dan merasa nyaman, keselamatan lebih terjamin. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin didapatkan angka kunjungan pasien perempuan sejumlah 61,31% sedangkan pasien laki-laki sejumlah 38,69%.

Kedua indikator di atas (Cakupan Rawat Jalan dan Cakupan Rawat Inap) merupakan gambaran mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Boyolali secara umum yang menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama ketika mengalami kesakitan, sehingga indikator ini hanya merupakan penyampaian data bukan suatu prestasi kinerja dari Dinas Kesehatan yang bisa dibilang berhasil atau gagal, tidak ada penggunaan sumber daya dan program kegiatan.

21) Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dengan bantuan dari jejaring 119, ketepatan informasi dari pelapor, kerjasama dengan lintas sektor dan tim jaga PSC 119 selama 24 jam. Dimana jumlah aduan yang masuk sebanyak 141 yang terdiri telepon sebanyak 84 meliputi permintaan layanan pasien di rumah, layanan antar pasien rujuk ke RS, ataupun rujukan antar RS yang bisa ditangani bersama dengan jejaring. Selain hal tersebut aduan kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 36, bisa ditangani baik secara langsung di TKP ataupun kirim ke RS untuk penanganan lebih lanjut, bencana 0, rujukan ke rumah sakit sebanyak 65, untuk kegiatan P3K 105 kali di lakukan bekerja sama dengan jejaring 119 Boyolali.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Dilaksanakan dengan system online untuk mencatat aduan/permohonan/telpon masuk kegawatdaruratan medik ke PSC 119, kondisi ketersediaan ruangan/tempat tidur, dokter jaga, ambulance dari 10 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta;
- Penggunaan teknologi informasi dalam penerimaan laporan aduan, serta pemantauan laporan dari rumah sakit semakin efisien dalam pelaporannya;
- Melibatkan tenaga non PNS yang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 shift yang didukung dengan penyediaan jaringan komunikasi dan informasi;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,34% dari anggaran Rp. 258.755.000,00 digunakan sebesar Rp. 255.300.104,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Peningkatan sistem penanggulangangawat darurat terpadu difokuskan untuk menurunkan dampak kegawat daruratan medik dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

22) Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat).

a. Keberhasilan program ini karena adanya dukungan dana BOK di 25 Puskesmas yang telah semuanya 100% melaksanakan Pelayanan Kesehatan UKM. Indikator ini dilaksanakan oleh puskesmas, dalam melaksanakan kegiatan Promotif dan preventif.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Puskesmas banyak melibatkan kader kesehatan yang telah dibentuk, sehingga akan langsung menyentuh pada masyarakat;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 24,8% dari anggaran Rp. 19.411.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 14.597.344.658,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang diberikan kepada Puskesmas, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas yaitu untuk kegiatan promotif dan preventif secara terintegrasi, yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan yaitu Upaya Kesehatan Ibu, Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi, Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah, Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Imunisasi, Upaya Kesehatan Usia Reproduksi, Upaya Kesehatan Lanjut Usia, Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Pengendalian vector, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Surveilans dan Respon KLB dan Upaya Kesehatan Jiwa. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

23) Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan).

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena komitmen yang tinggi dari Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang menerapkan PPK BLUD untuk Puskesmas. Indikator ini dilaksanakan oleh Puskesmas definisi operasional Puskesmas yang telah melaksanakan SPM sesuai standar Puskesmas yang telah menjalankan PPK BLUD. Cakupan sebesar 100%, atau 25 Puskesmas telah melaksanakan.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Pelaksanaan SPM untuk perorangan (UKP) merupakan kegiatan rutin pelaksanaan pelayanan Puskesmas kesehatan di Puskesmas, dengan sumber anggaran dari kapitasi JKN dan tarif hasil pelayanan, penganggarannya dilakukan dengan sistem PPK BLUD (in out) kebutuhan puskesmas yang berkaitan dengan keselamatan pasien dapat segera tercukupi tanpa proses yang panjang;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,22% dari anggaran Rp. 47.026.071.000,00 (setelah ditambah silpa 2018) dan realisasi belanja Rp. 44.572.955.930,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD. Bentuk kegiatan ini berupa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta seluruh operasionalnya. Anggaran merupakan target hasil pendapatan dari tariff Puskesmas dan kapitasi Jaminan Kesehatan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

24) Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes.

a. Keberhasilan indikator ini karena adanya tersedianya dukungan dana DAK serta telad disediakannya Tanah dari Pemerintah daerah.

Indikator Puskesmas memenuhi standar Permenkes No 75 tahun 2014. Yaitu pemenuhan Gedung Puskesmas sesuai Permenkes. pada tahun 2019 dengan Pembangunan 1 Puskesmas dapat terealisasi. atau capaian kinerja sebesar 100 % sehingga indikator ini dapat tercapai. Yang telah memenuhi standart permenkes adalah Puskesmas Ampel, Andong, Ngemplak dan Wonosegoro.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Dilakukan proses lelang pembangunan puskesmas dilakukan dengan lelang, dan untuk yang dapat dilaksanakan dengan melalui e katalog dilakukan lelang e katalog;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5.58% dari total anggaran Rp. 4.751.408.000,00 realisasi Rp. 4.486.126.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kegiatan pembangunan Puskesmas, dengan bentuk kegiatan melakukan pembangunan Gedung baru Puskesmas Wonosegoro, untuk gedung yang lama kita serahkan kembali ke BKD. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

25) Rasio dokter

Indikator jumlah dokter yang ada diwilayah Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 sebanyak 164 dibanding dengan jumlah penduduk pada saat ini 1.051.867 (data dukcapill) dikalikan 100.000, maka dari target 16 dapat tercapai / terealisasi sebesar 15,6 dalam prosentase capaian sebesar 97.4%.

26) Rasio dokter gigi

Pada indikator jumlah dokter Gigi yang ada diwilayah Kabupaten Boyolali Sejumlah 55 dibanding dengan jumlah penduduk pada saat ini 1.051.867 dikalikan 100.000 maka dari target 5,1 dapat tercapai, terealisasi sebesar 5.2 dalam prosentase kira-kira sebesar 102.5%.

27) Rasio perawat

Pada indikator jumlah Perawat yang ada diwilayah Kabupaten Boyolali Sejumlah 913 orang dibanding dengan jumlah penduduk 1.051.867 dikalikan 100.000 maka dari target 95.3 tidak dapat tercapai, terealisasi sebesar 86.8, dalam prosentase sebesar 91,1%.

28) Rasio bidan

Indikator jumlah Bidan yang ada diwilayah Kabupaten Boyolali Sejumlah 564 dibanding dengan jumlah penduduk pada saat ini 1.051.867 dikalikan 100.000 maka dari target 57,2 dapat tercapai / terealisasi sebesar 53,6 dalam prosentase sebesar 93,7%.

Untuk keempat indikator di atas (Rasio Dokter, Dokter Gigi, Rasio Bidan, Rasio Perawat) merupakan laporan data tanpa penggunaan anggaran, data adalah sebagai gambaran kondisi keberadaan tenaga tenaga kesehatan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Jadi bukan merupakan suatu prestasi kinerja dari Dinas Kesehatan yang bisa dibilang berhasil ataupun gagal, tidak ada penggunaan sumber daya dan program kegiatan.

29) Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena semua Puskesmas telah memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia untuk melaksanakan sistem informasi Puskesmas secara online.

Pada awal tahun perencanaan RPJMD diltargetkan pada tahun 2018 sebanyak 40% (atau sebanyak 12 Puskesmas) dari seluruh Puskesmas sebanyak 29 Puskesmas telah melaksanakan simpus yang terintegrasi online dengan sistem informasi (sipedu) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Realisasi yang tercapai pada tahun 2019 sebanyak 25 Puskesmas yang ada dikabupaten Boyolali dapat melaksanakan simpus yang terintegrasi antara P-Care (milik BPJS), dan SIPEDU (milik dinas Kesehatan).

Kendala yang dihadapi yaitu bahwa pemanfaatan data belum optimal, sehingga masih terdapat data yang dikirim secara manual dengan menggunakan kertas, dan tenaga kerja yang menguasai software sangat terbatas.

Solusi yang diambil dengan melakukan koordinasi dengan pemanfaat data agar data dapat digunakan secara efektif.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sehingga tugas dan tanggung jawab semakin jelas;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 11,58% dari anggaran Rp. 134.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 118.477.350,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan dengan kegiatan pengembangan data dan Informasi kesehatan, dengan bentuk kegiatan untuk pendampingan aplikasi secara terpadu, dan upgrade sistem aplikasi, serta pembuatan buku profil kesehatan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

30) Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena adanya penguatan koordinasi lintas program, lintas sektor dan Puskesmas untuk pembinaan desa siaga aktif mandiri.

Indikator proprosi rumah tangga sehat merupakan indikator yg menunjang keberhasilan pada strata desa siaga aktif mandiri, proporsi rumah tangga sehat minimal 40%. Sedangkan pencapaian cakupan rumah tangga sehat tahun 2019 ini sebesar 77,3 %. Hal ini sudah mencapai target.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Adanya dana BOK di Puskesmas mendukung tercapainya cakupan desa siaga aktif mandiri. Dana BOK ini banyak dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk pendataan factor resiko atau Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dan pertemuan-pertemuan untuk pembinaan desa siaga aktif mandiri;
- Keberadaan bidan desa, petugas promosi kesehatan, kepala puskesmas, camat, kepala desa, peran Forum Kesehatan Desa dan peran kader kesehatan sangat berpengaruh juga terhadap dukungan desa siaga aktif mandiri;
- Pendanaan dari desa berupa Dana Desa juga ikut mendukung kegiatan-kegiatan demi tercapainya desa siaga aktif mandiri;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,65% dari anggaran Rp. 231.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 229.507.115,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pemberdayaan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Institusi, dengan bentuk kegiatan untuk lomba desa Siaga Aktif Mandiri;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan bentuk dan rincian kegiatan oleh Puskesmas untuk pendataan factor resiko atau Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dan pertemuan-pertemuan untuk pembinaan desa siaga aktif mandiri.

Selain itu program pemberdayaan masyarakat seperti keaktifan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) minimal 3 UKBM dan adanya program surveillance yang dilakukan di masyarakat menjadi tolak ukur desa siaga mandiri. Di akhir tahun 2018 dilaksanakan kegiatan evaluasi desa siaga aktif mandiri berupa Lomba Desa Siaga Aktif Mandiri yang diikuti oleh 26 desa yang ada di 26 Puskesmas. Dari 26 desa tersebut terpilih 6 desa sebagai juara dengan kategori desa siaga aktif mandiri yaitu:

- Desa Metuk Kecamatan Mojosongo;
- Desa Suroteleng Kecamatan Selo;
- Desa Jemowo Kecamatan Musuk;
- Desa Manyaran Kecamatan Karanggede;
- Catur Kecamatan Sambi;
- Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel.

Dari 6 Nominasi yang terpilih Desa Metuk Kecamatan Mojosongo sebagai Pemenang Lomba Desa Siaga Aktif dan mewakili Kabupaten boyolali untuk maju Lomba PHBS tingkat Propinsi. Dan pada tahun 2020 Desa metuk kecamatan Mojosongo Maju masuk Nominasi maju Lomba PHBS tingkat Nasional.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

31) Proporsi Rumah tangga sehat.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena karena dilaksanakannya koordinasi lintas program dan puskesmas, dengan melakukan promosi kesehatan bagi masyarakat dalam event tertentu.

Tahun 2019, terdapat 257,089 (89,8 %) rumah tangga yang dipantau PHBS nya dari 301,403 rumah tangga yang tercatat di Kabupaten Boyolali. Dari jumlah rumah tangga yang dipantau tersebut, terdapat 219,513rumah tangga yang memenuhi syarat PHBS atau (85,4%) strata utama dan paripurna. Hal ini tentunya juga didukung dengan adanya beberapa program yang saling terintegerasi untuk mendukung pencapaian proporsi rumah tangga sehat seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Kabupaten Boyolali berstatus *Open Defecation Free* (ODF), Program Sahabat Ibu Sehati (SATITI), Program Jamkesda dan JKN-KIS dan adanya beberapa dasar hokum terkait PHBS di Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pendataan tidak tepat waktu sehingga menyebabkan pelaporan dari Puskesmas ke Dinas tidak tepat waktu juga. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Peningkatan koordinasi dan singkronisasi program kegiatan antara Dinas dan Puskesmas.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Indikator ini terutama dilaksanakan dengan anggaran APBN, melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang anggarannya tersebar di 25 Puskesmas. Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mendorong dan mengkoordinasikan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan pendataan PHBS di Desa oleh petugas kesehatan di Puskesmas;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,42% dari anggaran Rp. 100.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 99.576.450,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dengan bentuk kegiatan yaitu melakukan pendataan.dan pemantauan rumah tangga sehat setiap bulan melalui pelaporan bulanan puskesmas;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan bentuk dan rincian kegiatan oleh Puskesmas untuk pendataan factor resiko atau Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

32) Cakupan Desa STBM.

a. Kegagalan dari pencapaian cakupan desa STBM, dikarenakan beberapa faktor:

- Peran serta masyarakat dalam 5 pilar stbm belum merata di setiap desa;
- Kapasitas kader kesehatan lingkungan yang belum merata;

- Tenaga sanitarian yang mempunyai kapasitas yang sama;
- Peran serta perangkat desa yang belum merata;
- Belum tersedianya fasilitas yang merata di setiap desa (TPS, Bank Sampah).

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Keterbatasan anggaran yang tersedia;
- Penerapan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga belum menjadi budaya di masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja:

- Peningkatan upaya sosialisasi dan pemicuan;
- Upaya komitmen ditingkat desa / RT / RT;
- Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat;
- Dukungan stakeholder.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melaksanakan sosialisasi, pemicuan, pendampingan dan penguatan komitmen di tingkat Kabupaten untuk pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam STBM;
- Melaksanakan pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,13% dari anggaran Rp. 265.000.000 digunakan sebesar Rp. 264.652.884,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengembangan Desa STBM, dengan bentuk kegiatan antara lain sosialisasi, pemicuan, pendampingan dan penguatan komitmen di tingkat Kabupaten untuk pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam STBM;
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali dengan rincian kegiatan Orientasi natural leader, STBM, dan kader kesehatan lingkungan, Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

Selain itu inovasi kinerja atau prestasi di bidang kesehatan adalah telah diterapkannya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 199 Pertama di Boyolali, di replikasi secara nasional oleh kementrian kesehatan.



Gambar 3.32 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 199

33) Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena jumlah kunjungan rawat inap menurun dari tahun sebelumnya.

- Capaian dari BOR 79,02% dari target 83,07 realisasi 65,64 sehingga realisasinya lebih kecil dari target yang ditetapkan walaupun masih dalam standar normal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 60-85%. BOR tidak tercapai dikarenakan semakin berkembangnya RS swasta di wilayah Boyolali dan sekitarnya;
- Capaian dari LOS 122,38% dari target 4,20 hari realiasi 3,26 hari sehingga target dapat dicapai. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Sedangkan menurut Rano Indradi Sudra (2008) nilai ideal untuk AvLos adalah 3-12 hari. LOS dapat mencapai target karena adanya pelatihan internal/eksternal untuk meningkatkan kemampuan petugas sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien;
- Capaian dari TOI 110,76% dari target 1,58 hari realiasi 1,75 hari sehingga realisasi TOI melebihi target yang ditetapkan faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah adanya program JKN dengan BPJS Kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang dimana RS sebagai PPK II hanya menerima rujukan dari PPK I kecuali *Emergency* menyebabkan pasien yang rawat inap menjadi lebih selektif. Hal ini menyebabkan pasien rawat inap yang dilayani oleh rumah sakit menjadi lebih selektif sehingga interval penggunaan tempat tidur menjadi lebih panjang;
- Capaian dari BTO adalah 112,41%, dari target 63,88 kali dapat terealisasi 71,81 kali. melebihi angka standart angka ideal yaitu satu TT rata-rata dipakai 40-50 kali (DepKes RI) dalam periode satu tahun. Keberhasilan capaian target kinerja ini dikarenakan telah dilakukan peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi / PPI serta menindaklanjuti data yang ada, mendokumentasikan, mengevaluasi dan mensosialisasikan hasil monev secara berkelanjutan;

- Capaian dari NDR adalah 87,40% dari target 1,27% realisasi 1,43% angka ini menunjukkan bahwa angka kematian yang dirawat setelah 48 jam mengalami peningkatan jumlah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan RS Pandan Arang mengalami penurunan. Penyebab kegagalan pencapaian target kinerja ini adalah kurangnya kemampuan SDM dalam menangani kasus *emergency* dan pelayanan intensif;
- Capaian GDR adalah 61,93% dari target 2,18% terealisasi 3,01% sehingga indikator ini belum dapat tercapai menunjukkan bahwa angka kematian meningkat, hasil ini menunjukkan salah satu indikator mutu RS menurun, dikarenakan kurangnya kemampuan SDM dalam menangani kasus *emergency* dan pelayanan intensif dengan diklat khusus yang berkelanjutan baik internal maupun eksternal.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Jumlah kunjungan dan hari perawatan pasien rawat inap cenderung turun dari tahun sebelumnya;
- Jumlah tempat tidur berkurang karena ada pembangunan;
- Fasilitas sarana dan prasarana RS swasta semakin meningkat;
- RS Swasta juga melayani pasien dengan penjaminan BPJS;
- Di tahun 2019, yang menduduki peringkat atas 10 besar penyakit rawat inap adalah penyakit *congestive heart failure* dengan rata-rata lama dirawat 4-5 hari, *dyspepsia* dengan rata-rata lama dirawat 3-4 hari, dan *thypoid fever* yang rata-rata lama dirawatnya 3-4 hari;
- Jumlah kunjungan pasien rawat inap di tahun 2019, 69% adalah pasien dengan penjamin BPJS dan PBI. Untuk itu rumah sakit menerapkan kendali biaya dan kendali mutu yang bertujuan untuk mengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu dengan cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan;
- Masih banyaknya rujukan yang sudah terlambat sampai ke IGD sehingga petugas harus dibekali ketrampilan yang memadai (ATLS, ACLS, PPGD, dll).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- ✓ Mengevaluasi kinerja pelayanan secara periodik;
- ✓ Memantau pelaksanaan SIMRS, informasi ketersediaan TT pada program intranet yang membutuhkan kedisiplinan dari semua pihak terkait;
- ✓ Mengupayakan update informasi kepada publik tentang kegiatan-kegiatan RS lewat media cetak, web, dll;
- ✓ Program peningkatan mutu RS dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan;
- ✓ Pelaksanaan pelatihan internal/eksternal untuk meningkatkan kemampuan petugas sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien;
- ✓ Meningkatkan kepatuhan terhadap pencegahan infeksi oleh PPI dan penggunaan antibiotik yang efektif oleh PPRA untuk mengurangi infeksi nosokomial;
- ✓ Peralatan harus dikalibrasi dan memiliki SOP penggunaan untuk ketepatan dan efektifitas alat;

- ✓ Mengoptimalkan Tim PPI dalam mengelola program pengendalian infeksi di rumah sakit utamanya pada Ruang IGD, Instalasi Rawat Inap, IBS;
- ✓ Membiasakan bagi semua karyawan untuk melakukan pelaksanaan cuci tangan;
- ✓ Program peningkatan mutu RS dimonitor dan dievaluasi secara kontinyu, termasuk evaluasi penggunaan TT tiap ruangan;
- ✓ Perbaikan display TT untuk lebih mengetahui kondisi TT masing-masing ruangan;
- ✓ Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi / PPI serta menindaklanjuti data yang ada, mendokumentasikan, mengevaluasi dan mensosialisasikan hasil monev secara berkelanjutan;
- ✓ Program peningkatan mutu RS dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan;
- ✓ Meningkatkan profesionalisme dalam penanganan pasien dengan kasus – kasus emergency di IGD terutama pasien KLL (CKB/ Cidera kepala berat, fraktur multiple), pasien jantung coroner (AMI, STEMI, dll) dan bayi dengan BBLR;
- ✓ Diklat teknis dilakukan secara berkelanjutan;
- ✓ Mengotimalkan Ruang intensif (ICU, HCU, NICU, dll) disesuaikan dengan standart yang ada;
- ✓ Mempertahankan kinerja yang selama ini sudah dilaksanakan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu RS secara kontinyu, meningkatkan ketrampilan dalam penanganan pasien dengan kasus-kasus emergency di IGD terutama pasien KLL (CKB/ Cidera kepala berat, fraktur multiple), pasien jantung coroner (AMI, STEMI, dll), ruang intensif (ICU, HCU, NICU, dll) dioptimalkan dan disesuaikan sesuai standar, sehingga diharapkan dapat menekan dan menurunkan angka kematian.

Disamping itu RSU Pandan Arang juga terdapat inovasi kinerja atau prestasi yaitu Rumah Sakit Triangle Sistem (Integrasi Tatakelola SIM RS, Mutu dan Remunerasi).

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Upaya untuk mendukung pelayanan kesehatan rumah sakit menggunakan aplikasi online yang berbasis desktop yaitu SIM RS, Laboratory Information System, dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan klaim pasien BPJS Kesehatan;
- Mempertahankan potensi yang ada serta meningkatkan kemampuan SDM dalam menangani kasus emergency dan pelayanan intensif dengan diklat khusus yang berkelanjutan baik intern maupun ektern serta penyegaran melalui audit kasus (contoh : audit maternal perinatal) dan menjalin kerjasama dengan dinas terkait (DKK, RS Sekitar PPK I , dll) dalam merujuk pasien emergency sebelum 48 jam;
- Tidak kalah penting adalah sarana prasarana penunjangnya harus sesuai standart, baik secara kwalitas yaitu siap pakai, canggih, terkalibrasi secara rutin pemeliharaan terprogram dengan baik maupun secara kwantitas yaitu jumlah dan jenisnya;
- Menggunakan aplikasi yaitu e-Resep, dan e- RM, SIMRS;

- Menggunakan anggaran dari total anggaran yang ada di rumah sakit sebesar Rp. 115.187.434.000,00 dapat terealisasi Rp. 104.944.255.901,00 Sehingga terdapat efesiensi sebesar 8,89%.

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program dan kegiatan:

- Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD, dengan kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Belanja Langusng BLUD (Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) yaitu belanja bahan obat-obatan, belanja bahan laboratorium, belanja bahan radiologi, belanja modal alat-alat kedokteran, dan lain-lain;
- Program Pengadaan, peningkatan srana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan jalan khusus. Serta Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pengadaan alat kedokteran umum dan alat kedokteran Keleurga Berencana, Alat Kedokteran Bedah, Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam dan Alat Kedokteran Gawat Darurat;

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Selain capaian kinerja tersebut di atas Kabupaten Boyolali melalui Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”.

34) Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

- Target indikator kinerja tingkat hunian tempat tidur pasien atau (*Bed Occupancy Rate* / *BOR*) sebesar 71% terealisasi 53,22 % atau capaian kinerja sebesar 74,96%. Realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target karena keterbatasan SDM Dokter Spesialis. Pelayanan Dokter Spesialis Anak dan Obsgyn baru dimulai bulan III 2018;
- *Length Of Stay (LOS)* atau rata-rata lama pasien dirawat dengan target sebesar 4,53 hari terealisasi sebesar 3,15 hari atau capaian kinerja sebesar 143,81%, sehingga indikator ini dapat tercapai dikarenakan lama perawatan lebih pendek dari waktu yang ditargetkan;
- Tenggang perputaran tempat tidur atau *Turn Over Interval (TOI)* dengan target sebesar 1,88 hari terealisasi 2,77 hari atau capaian kinerja sebesar 67,87%. sehingga indikator ini belum dapat tercapai dikarenakan jumlah tempat tidur yang dipakai belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Pencapain kinerja sudah memenuhi target;

- Frekuensi pemakaian tempat tidur atau *Bed Turn Over (BTO)* dengan target sebesar sebesar 45,7 kali terealisasi 60,94 kali atau capaian kinerja sebesar 74,99 %. sehingga indikator ini tidak belum tercapai dikarenakan jumlah pasien yang meningkat dengan tingkat hunian juga meningkat dan penggunaan tempat tidur pasien sudah memenuhi target. Pencapaian yang lebih dari angka standar yang ditetapkan departemen kesehatan sebesar 40 – 50 kali disebabkan kurangnya tempat tidur pasien yang bisa dipergunakan sehingga frekuensi pemakaian tiap tempat tidur pasien menjadi tinggi;
- Angka kematian murni atau *Net Death Rate (NDR)* dengan target 0,2400% terealisasi 0,530% atau capaian kinerja sebesar 45,69%. sehingga indikator ini tidak dapat tercapai dikarenakan umumnya pasien terlambat dibawa ke rumah sakit dan sudah dalam kondisi yang buruk. Selain itu, untuk kasus-kasus tertentu pasien tidak bisa dilayani dengan maksimal karena minimnya sarana dan prasarana kesehatan (belum tersedia sarana ICU/Intensive Unit Care yang memadai);
- Angka kematian umum atau *Gross Death Rate (GDR)* dengan target 0,8000% terealisasi 1,34% atau capaian kinerja sebesar 59,70%. Besarnya angka kematian umum karena dampak angka NDR yang tinggi, meskipun demikian masih dibawah angka yang ditolerir sebesar 4,5%.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Keterbatasan SDM;
- Dokter Spesialis Anak dan Obsgyn adalah Dokter WKDS (bukan dokter tetap);
- Jumlah tempat tidur yang dipakai belum berfungsi sesuai yang diharapkan;
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
- Kurangnya tempat tidur pasien yang bisa dipergunakan sehingga frekuensi pemakaian tiap tempat tidur pasien menjadi tinggi;
- umumnya pasien terlambat dibawa ke rumah sakit dan sudah dalam kondisi yang buruk;
- Untuk kasus-kasus tertentu pasien tidak bisa dilayani dengan maksimal karena minimnya sarana dan prasarana kesehatan.
- Lebih banyak karena pasien dengan kasus penyakit saraf (stroke) dimana RSUD Simo belum memiliki DPJP spesialis saraf;
- HCU hanya memiliki 2 bed;
- Belum tersedia ICU dan pemeriksaan penunjang CT Scan;

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Pengajuan Dokter Spesialis;
- Peningkatan SDM dengan pelatihan;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- Peningkatan pelayanan HCU;
- Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk program Wajib Kerja Dokter Spesialis sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pasien;
- Adanya poli geriatri sehingga mempermudah pelayanan pasien lansia;
- Menggunakan aplikasi SITERI LAPAR sehingga mempermudah pelayanan pendaftaran Poliklinik;
- Menggunakan anggaran dari total anggaran yang ada di rumah sakit sebesar Rp. 15.441.047.000,00 dapat terealisasi Rp. 12.792.141.410,00 Sehingga terdapat efesiensi sebesar 17,15%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD dan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan (RSUD Simo), dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pengadaan sarana prasarana, Peningkatan SDM (diklat), dan Pengajuan Dokter Spesialis (BLUD/WKDS), serta melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Simo. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

35) Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena :

- Target indikator kinerja BOR pada tahun 2019 73%, dapat direalisasi 58,43%. Nilai BOR RSUD Waras Wiris dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan:
  - ✓ Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan;
  - ✓ Penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I (rumah sakit), PPK I (rumah sakit) semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS;
  - ✓ Kunjungan pasien RSUD Waras Wiris di Andong sudah sudah semakin meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi efisiensi hari perawatan sangat dioptimalkan.
- Target LOS RSUD Waras Wiris pada Tahun 2019 sebesar 5,5 hari sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar 4,2 hari. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Kunci keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien. Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;

- Target TOI pada tahun 2019 RSUD Waras Wiris sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar 2,6 hari. Angka realisasi tinggi namun idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari yang mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan. Nilai TOI masih memenuhi standar depkes RI;
- Target BTO pada tahun 2019 adalah 47 kali sedangkan realisasi pada tahun 2019 adalah 51 kali. Ideal BTO 40-50 kali, sehingga sudah diatas standart depkes RI. Kunjungan pasien RSUD Waras Wiris di Andong sudah semakin meningkat akan tetapi penambahan tempat tidur baru akan dilakukan pada Juni 2020;
- Target NDR pada tahun adalah 0,7% realisasinya sebesar 2,11%, realiasai lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan, karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, kegagalan pencapaian target salah satunya dikarenakan penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I (rumah sakit), PPK I (rumah sakit) semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS;
- Target GDR pada tahun 2019 adalah 2% realisasinya sebesar 4,09%. Angka realiasai lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan, karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, kegagalan pencapaian target salah satunya dikarenakan penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I (rumah sakit), PPK I (rumah sakit) semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Pelayanan kesehatan belum yang belum lengkap baik karena keterbatasan sarana prasarana maupun SDM;
- Kualitas SDM masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan kompetensi melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan;
- Penerapan BPJS pasien dirawat secara berjenjang sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang sudah tidak memungkinkan dirawat di PPK I (rumah sakit), PPK I (rumah sakit) semakin dituntut untuk dapat merawat pasien dan membatasi rujukan ke RS;
- Pembayaran klaim BPJS tidak tepat waktu sehingga berpengaruh terhadap kondisi keuangan rumah sakit.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan SDM dokter WKDS ke Kementerian Kesehatan maupun SDM lainnya di BKP2D Kabupaten Boyolali dan perencanaan rekruitmen tenaga BLUD;
- Mengirimkan pelatihan / diklat bagi SDM secara berkala sesuai dengan prioritas kebutuhan baik dari BKP2D maupun dari RSUD Waras Wiris;

- Meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik pasien umum datang dan mendapatakan pelayanan kesehatan di RSUD Waras Wiris;
- Memaksimalkan dana APBD guna belanja modal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

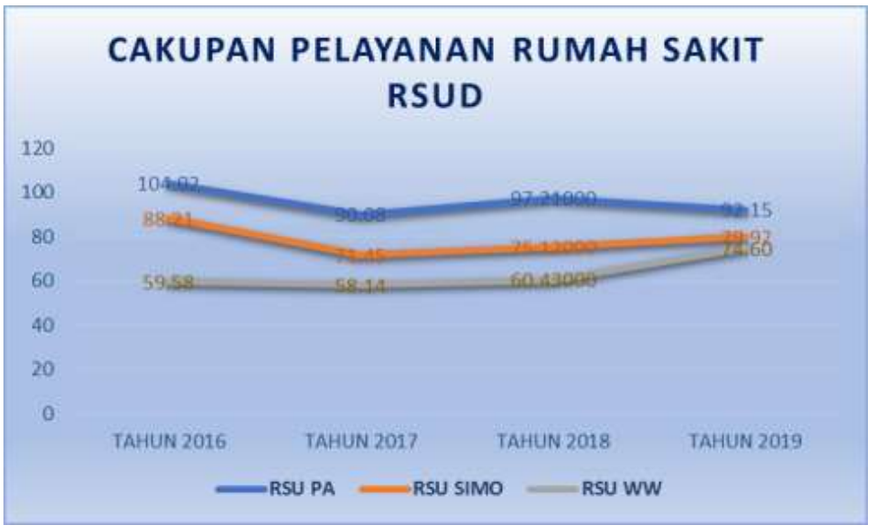
- Penggunaan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Waras Wiris seperti mengganti alat-alat yang sudah tidak bisa dipakai (rusak berat), menambah alat-alat baru yang belum dimiliki oleh RSUD Waras Wiris, pengadaan obat-obat yang berkualitas sesuai dengan formularium, pembangunan gedung rawat inap baru, pengadaan tanah untuk pengembangan rumah sakit, serta kegiatan-kegiatan lain guna peningkatan kualitas pelayanan;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 28.476.072.000,00 digunakan sebesar Rp. 25.724.649.910,00 sehingga terdapat efesiensi sebesar 9,66%.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan kegiatan:
  - ✓ Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit seperti pengadaan alat-alat kesehatan, dll;
  - ✓ Pembangunan rumah sakit dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembangunan rumah sakit yang saat ini masih belum lengkap.
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemenuhan biaya-biaya operasional rumah sakit serta penyusunan standar kesehatan dengan melaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit. Sehingga pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh tim akreditasi nasioal (KARS);
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan bentuk kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan yang belum lengkap/belum ada guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan Pemeliharaan biaya operasional pemeliharaan yaitu dengan bentuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Berikut grafik Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang, Simo, dan Waras Wiris dari Tahun 2016-2019:



Gambar 3.33 Grafik Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang, Simo, dan Waras Wiris dari Tahun 2016-2019

13. SASARAN 13 : Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk

Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 APK PAUD	%	82	71,80	100,84	74,41	99,21	75,22	95,46	79,87	75,60	94,65	B	DISDIKBUD
2 APK SD	%	102,50	99,53	100,03	99,65	100,15	99,76	99,96	101,00	101,60	100,59	A	DISDIKBUD
3 APK SMP	%	100,20	94,35	99,53	95,06	100,06	96,45	99,64	97,60	100,80	103,28	A	DISDIKBUD
4 APM SD	%	87,50	86,00	99,94	87,92	102,11	90,33	104,73	86,50	91,83	106,16	A	DISDIKBUD
5 APM SMP	%	75,50	68,10	97,29	69,96	99,73	74,54	105,73	71,50	75,75	105,94	A	DISDIKBUD
6 Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,03	100	0,01	166,67	0,01	166,67	0,03	0,03	100,00	B	DISDIKBUD
7 Angka Putus Sekolah SMP	%	0,15	0,09	165,38	0,02	192	0,01	196,00	0,20	0,09	155,00	A	DISDIKBUD
8 Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	99,50	98,16	99,65	98,64	99,89	99,75	100,76	99,15	99,59	100,44	A	DISDIKBUD
9 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	%	95	93,36	99,21	95,87	101,83	91,82	97,47	94,22	93,69	99,44	B	DISDIKBUD
10 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	%	98,70	96,66	99,44	94,8	97,23	85,32	87,24	98,10	88,90	90,62	B	DISDIKBUD
11 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	62,50	57,02	106,18	51,4	95,01	55,61	100,89	56,14	55,30	98,50	B	DISDIKBUD
12 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	75	75,90	130,97	67,26	100,43	72,02	106,76	67,95	73,10	107,58	A	DISDIKBUD
13 Rasio Siswa terhadap Guru SD	orang	20	12,25	94,23	12,68	85,97	14,25	86,36	18,25	13,73	75,23	B	DISDIKBUD
14 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	orang	20	13,83	98,79	16,11	102,29	16,50	94,29	19,25	16,91	87,84	B	DISDIKBUD
15 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0,15	0,32	100	0,32	100	0,32	93,33	0,26	0,11	157,69	A	DISDIKBUD
16 Presentase SD Berakreditasi minimal B	%	95	92,79	104,85	94,78	105,31	87,79	96,21	92,50	98,30	106,27	A	DISDIKBUD
17 Presentase SMP berakreditasi minimal B	%	85	83,56	105,31	93,62	117,03	82,11	101,06	82,50	94,80	114,91	A	DISDIKBUD
Capaian				**105,98**		**109,70**		**107,80**			**106,13**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 106,13% (kategori sangat baik) terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kategori sangat baik (58,82%), dan 7 (tujuh) indikator kategori baik (41,18%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 13 (tiga belas) per indikator:

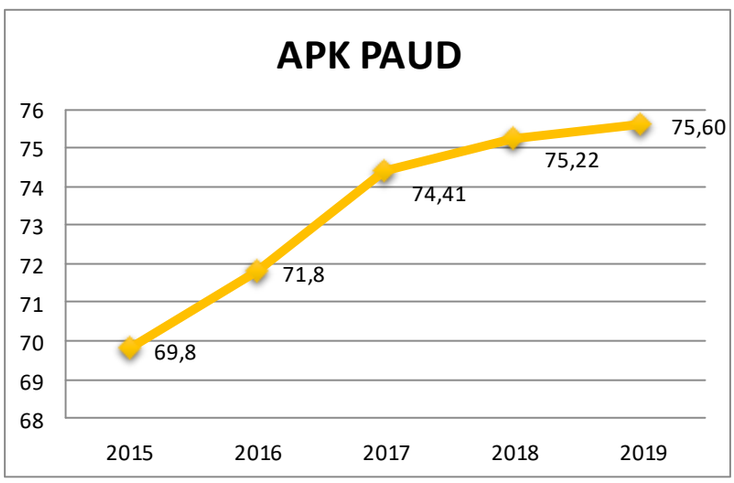
1) APK PAUD

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan adalah masih kurangnya akses anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin (khususnya) serta pemahaman orang tuanya yang masih rendah akan pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Penyelenggaraan PAUD dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, kurangnya sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini terlebih pada masyarakat pedesaan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya akses anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin (khususnya) serta pemahaman orang tuanya yang masih rendah akan pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Penyelenggaraan PAUD dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, kurangnya sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini terlebih pada masyarakat pedesaan.

Sedangkan solusi yang dilakukan antara lain melalui peningkatan hubungan silaturahmi dan kerja sama antara lembaga PAUD dengan orang tua anak didik, terutama dalam hal perencanaan program agar tujuan dari program bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua murid dalam pelaksanaan program-program lembaga.

Berikut grafik Perkembangan APK PAUD Tahun 2015 sd 2019



Gambar 3.34 Grafik Perkembangan APK PAUD dari tahun 2015-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Mendorong pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendirian lembaga PAUD, memperkuat pelayanan PAUD di daerah-daerah pegunungan, perbatasan dan pelosok, dengan demikian, akan tercipta pemerataan pendidikan usia dini;
- Sumber daya manusia yang sama, realisasi kinerja terjadi sama dibanding tahun lalu;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7,68% dari anggaran sebesar Rp. 1.250.900.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.154.855.690,00.

c. Untuk mempercepat pencapaian indikator ini ada program yang dilaksanakan yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Pembangunan gedung sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Pembangunan Gedung PAUD;
- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Pengadaan Buku Pembelajaran untuk guru dan siswa
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD - KB/TPA/Satuan PAUD Sejenis;
- Pengadaan mebeluer sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Pengadaan meubelair yang memenuhi syarat bagi PAUD;
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Perbaikan ruang/bangunan PAUD;
- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Pelaksanaan Gebyar PAUD dan Lomba Gugus PAUD;
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Operasional Penyelenggaraan TK Negeri (BOP PAUD) dan Pembinaan PAUD;
- Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan bentuk kegiatan yang dilaksaksanakan yaitu Publikasi dan sosialisasi Pendidikan;
- Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja, namun secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan

2) APK SD

Keberhasilan capaian indikator ini karena adanya optimalisasi kegiatan yang mempunyai output perluasan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Boyolali.

3) APK SMP

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini karena telah dilaksanakan pemberian lebih banyak lagi subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan optimalisasi SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP Reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya.

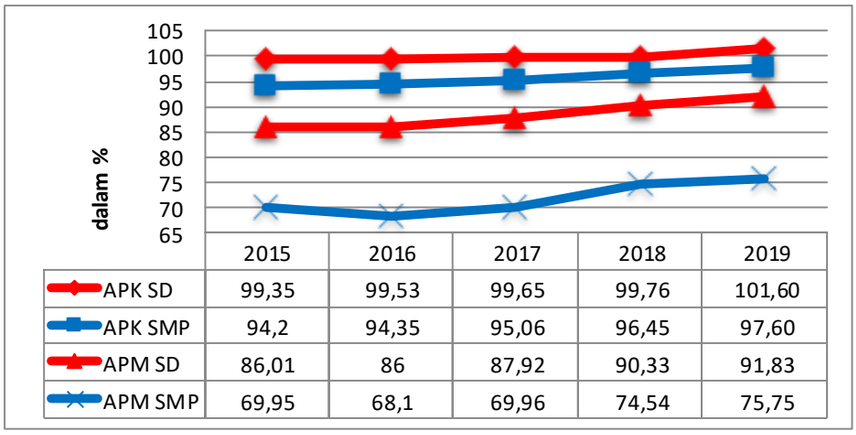
4) APM SD

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini karena telah dilaksanakannya perluasan akses, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan serta Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan dasar dari APBD Kabupaten Boyolali.

5) APM SMP

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah diupayakan subsidi pembiayaan atau dana operasional sekolah bagi anak kurang mampu (untuk seragam, transportasi dan lainnya) dan mengupayakan jumlah ketersediaan sekolah.

Berikut Perkembangan APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP Tahun 2015 sd 2019:



	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD	99,35	99,53	99,65	99,76	101,60
APK SMP	94,2	94,35	95,06	96,45	97,60
APM SD	86,01	86	87,92	90,33	91,83
APM SMP	69,95	68,1	69,96	74,54	75,75

Gambar 3.35 Grafik Perkembangan APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP Tahun 2015 sd 2019

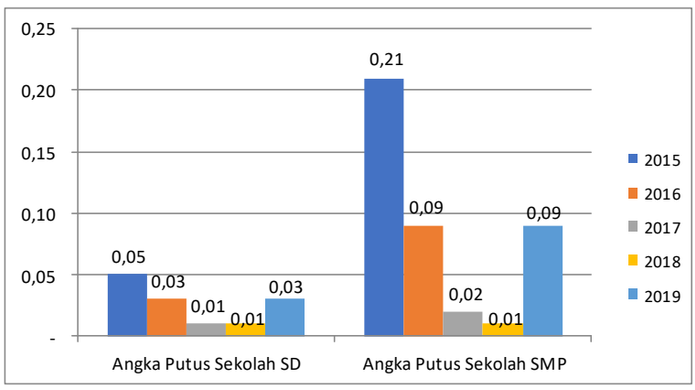
6) Angka Putus Sekolah SD

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini karena telah dilaksanakannya pemberian beasiswa untuk siswa miskin, mendekatkan akses kepada anak di daerah pedesaan dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

7) Angka Putus Sekolah SMP

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini karena diidukung dengan adanya pemberian beasiswa untuk siswa miskin, mendekatkan akses kepada anak di daerah pedesaan dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Berikut perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP Tahun 2015 sd 2019 :

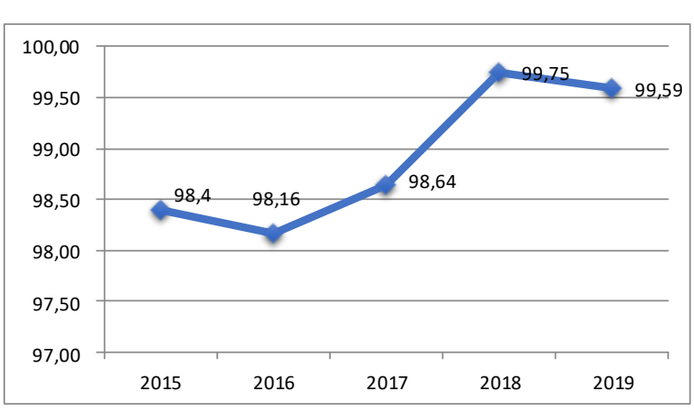


Gambar 3.36 Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP dari Tahun 2015-2019

8) Angka Melanjutkan SD ke SMP

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan karena adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS untuk mewujudkan sekolah/pendidikan dengan biaya murah, dan adanya subsidi pembiayaan atau dana operasional sekolah bagi anak kurang mampu (untuk seragam, transportasi dan lainnya) dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan dasar dari APBD Kabupaten Boyolali.

Berikut grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP Tahun 2015 sd 2019:



Gambar 3.37 Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP dari Tahun 2015-2019

9) Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik

Kegagalan capaian target indikator kinejra ini dikarenakan kurangnya dukungan anggaran dari APBD kabupaten Boyolali dan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, sub bidang pendidikan SD untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 126 ruang kelas dan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya sebanyak 4 ruang.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, di mana anggaran yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh ruang kelas yang rusak.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah kinerja mengupayakan pemeliharaan bangunan yang rusak ringan dilakukan mandiri oleh sekolah dengan menggunakan dana yang dikelola sekolah, sedangkan ruang kelas rusak sedang/berat menjadikan prioritas di tingkat dinas.

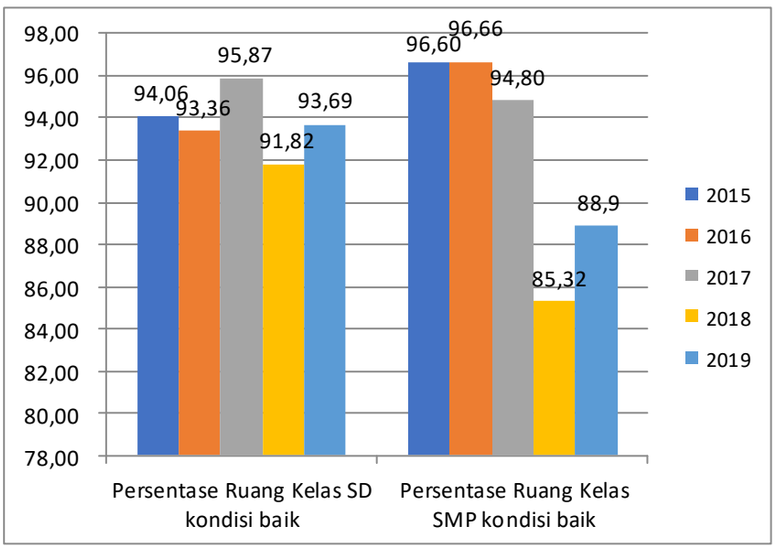
10) Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik

Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena adanya kurangnya anggaran dari dari APBD kabupaten Boyolali dan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang pendidikan SMP, untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 37 ruang kelas dan pembangunan 1 ruang kelas baru.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, dimana anggaran yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh ruang kelas yang rusak.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengupayakan pemeliharaan bangunan yang rusak ringan dilakukan mandiri oleh sekolah dengan menggunakan dana yang dikelola sekolah, sedangkan ruang kelas rusak sedang/berat menjadikan prioritas di tingkat dinas.

Berikut grafik perkembangan Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi Baik Tahun 2015 sd 2019 :



Gambar 3.38 Grafik perkembangan Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi Baik tahun 2015-2019

Analisis untuk 9 (sembilan) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,44% dari total seluruh anggaran sebesar Rp. 54.405.335.000,00 digunakan sebesar Rp. 53.079.188.942,00;

b. Untuk mempercepat pencapaian indikator ini APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP, Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SMP, Angka Melanjutkan SD ke SMP, Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik dan Persentasse Ruang Kelas SMP kondisi baik ada program yang dilaksanakan yaitu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan sebagaimana berikut:

- Pembangunan gedung sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan gedunga sekolah;
- Penambahan ruang kelas sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan sarana air bersih dan sanitary serta jamban sekolah;
- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadan buku-buku Koleksi Perpustakaan SD & SMP;
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (komputer, Alat Lab. IPA, Seni Budaya dan PJOK);
- Pengadaan mebeluer sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengadaan meubelair sekolah;
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD dan SMP (ruang kelas dan jamban);
- Pelatihan kompetensi siswa berprestasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan dan Pembelajaran Siswa Berprestasi melalui wisata edukasi;
- Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD, Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SMP dan Fasilitasi SNP;
- Penyelenggaraan Paket A Setara SD, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kelompok Belajar Paket A Setara SD;
- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kelompok Belajar Paket B Setara SMP;
- Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu lomba-lomba dan pembinaan bagi siswa berprestasi untuk mengikuti perlombaan di tingkat selanjutnya;
- Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian beasiswa retrieval untuk siswa rentan dan putus sekolah;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemantauan dan pengendalian kegiatan Pendidikan Dasar;
- Peningkatan Manajemen Operasional Sekolah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Pengelolaan BOS;
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler), dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS regular/APBN).

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun ada yang belum berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

11) Persentase guru SD bersertifikat pendidik

Kegagalan capain target indikator kinerja ini dikarenakan berkurangnya jumlah guru bersertifikasi yang masuk usia pensiun.

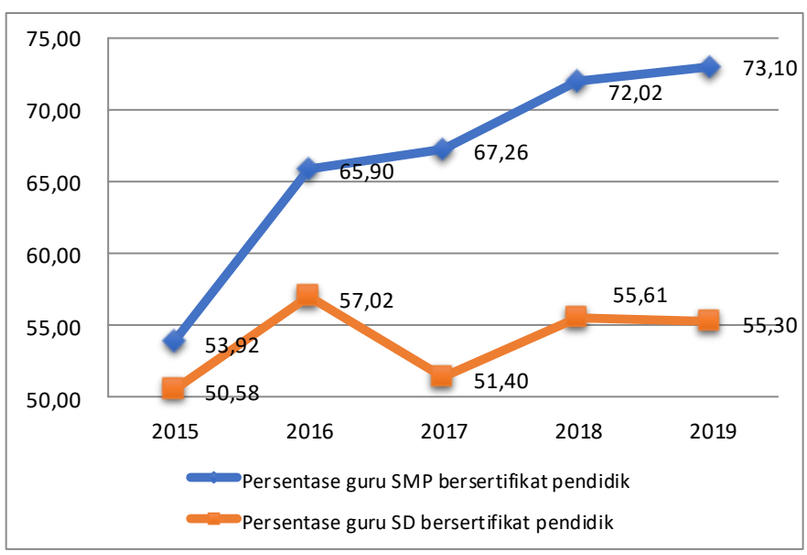
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah jumlah guru yang bersertifikat semakin berkurang dikarenakan masuk usia pensiun.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan kualitas pra sertifikasi guru melalui diklat dan bintek sebelum mengikuti program PLPG melalui pembekalan materi-materi sertifikasi guru.

12) Persentase guru SMP bersertifikat pendidik

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini karena kondisi kesiapan dan optimalnya guru dalam mengikuti proses pra sertifikasi dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dengan hasil akhir bertambahnya guru SMP bersertifikasi pada tahun 2019.

Berikut grafik Perkembangan Persentase GURU SD dan GURU SMP Bersertifikat Pendidik Tahun 2015 sd 2019 :



Gambar 3.39 Grafik Perkembangan Persentase GURU SD dan GURU SMP Bersertifikat Pendidik tahun 2015-2019

13) Rasio Siswa terhadap Guru SD

Kegagalan capain target indikator kinerja ini dikarenakan jumlah guru yang berkurang karena pensiun dan meninggal dunia serta sampai saat ini tidak adanya penambahan guru PNS.

14) Rasio Siswa terhadap Guru SMP

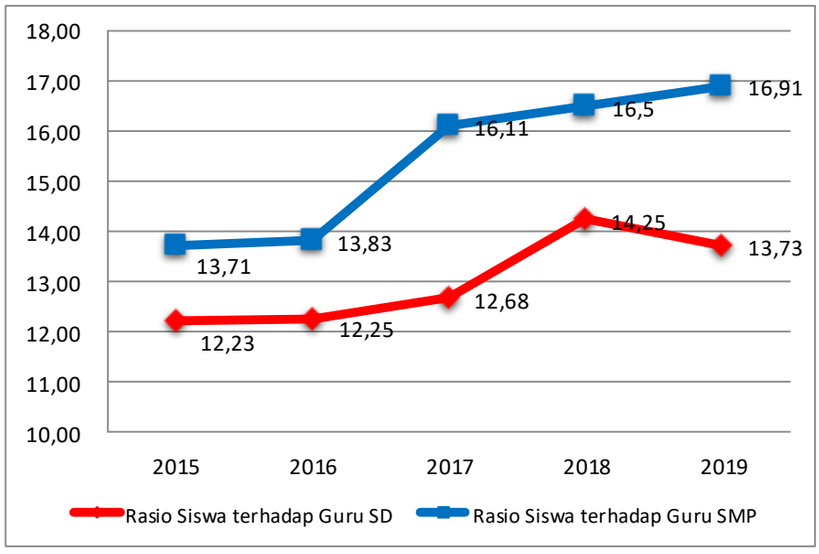
Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena jumlah guru di sekolah negeri berkurang sebagai akibat tidak adanya penambahan/pengangkatan guru PNS dan adanya guru pensiun serta meninggal dunia.

Hambatan dan solusi 2 (dua) indikator di atas:

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Rasio Murid dengan Guru adalah tidak adanya penambahan guru khususnya khususnya PNS dikarenakan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (guru wiyata bhakti dan guru mengampu di beberapa sekolah).

Berikut grafik Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru SD dan SMP Tahun 2015 sd 2019:



Gambar 3.40 Grafik Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru SD dan SMP tahun 2015-2019

Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan sumber daya adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-banar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,60% dari anggaran sebesar Rp. 2.890.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 2.844.038.150,00;

b. Untuk mempercepat pencapaian indikator ini ada program yang dilaksanakan yaitu program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan-kegiatan adalah :

   - Pelaksanaan Sertifikasi pendidik bentuk kegiatannya adalah pengelolaan sertifikasi pendidikdengan cara memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memperoleh sertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG);

- Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk kegiatannya adalah Rekruitmen calon kepala sekolah dan pengawas;
- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi/berdedikasi;
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk kegiatannya adalah Pengelolaan PAK dan PKG (PAUD, SD, SMP), dan Pemberian honorarium/kesra PTK Non PNS.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupuan ada yang belum memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

15) Presentase Buta Aksara > 15 tahun

a. Keberhasilan capaian target kinerja disebabkan telah dijalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta;

b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan sumber daya adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-banar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 32,17% dari anggaran sebesar Rp. 976.807.000,00 digunakan sebesar Rp. 662.596.500,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan-kegiatan adalah :

- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan pendidikan kursus dan Lembagaan PNF;
- Pengembangan pendidikan keaksaraan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan pendidikan keaksaraan melalui pengadaan sarana/prasarana PNF;
- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup dan melaksanakan Fasilitasi Kelompok Belajar Paket C Setara SMA;
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi sedang/berat bangunan /Ruang Kelas/ Ruang Penunjang SKB; pengadaan buku koleksi perpustakaan SKB dan pengadaan sarana-prasarana perkantoran SKB;
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyebaran informasi dan sosialisasi pendidikan non formal;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PNF;

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

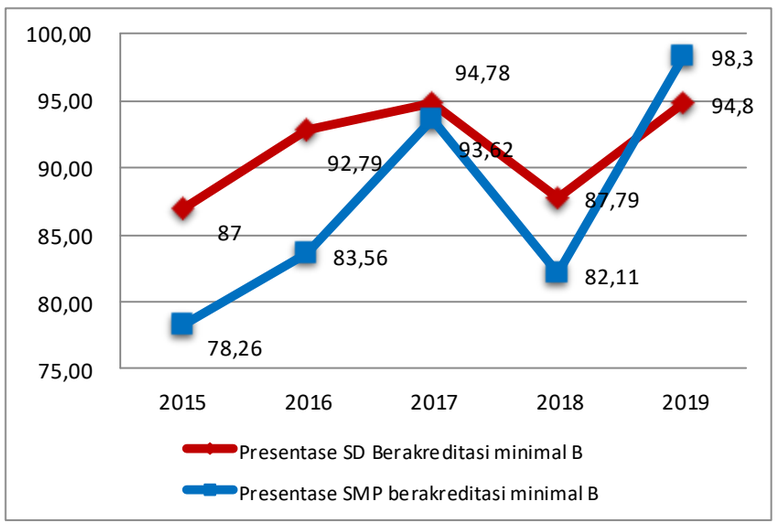
16) Presentase SD Berakreditasi minimal B

17) Presentase SMP berakreditasi minimal B

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas :

a. Keberhasilan capaian target kinerja ini karena adanya kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga dari sekolah. Juga mulai tumbuhnya kesadaran, bahwa akreditasi bukan hanya sekadar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Lebih dari itu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk akuntabilitas publik.

Perkembangan Persentase SD dan SMP Berakreditasi Minimal B Tahun 2015 sd 2019:



Gambar 3.41 Perkembangan Persentase SD dan SMP Berakreditasi Minimal B

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan sumber daya adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-banar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7,95% dari anggaran sebesar Rp. 1.865.280.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.716.955.486,00;

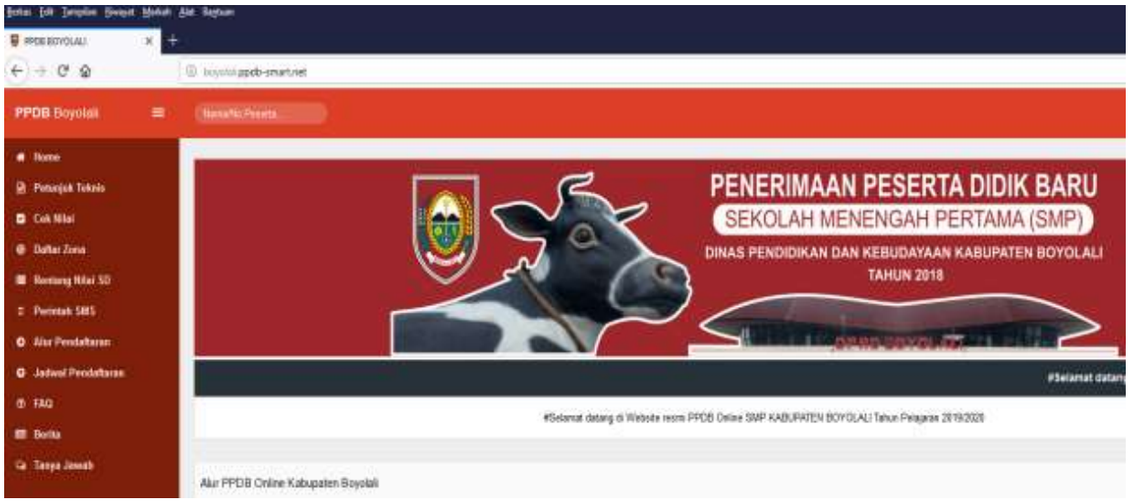
c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang Pendidikan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan evaluasi hasil pendidikan SD, SMP dan PNF (UN/US/ UNPK) dan akreditasi sekolah. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan dapat memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

Selain kinerja tersebut di atas terdapat inovasi kinerja atau prestasi di bidang pendidikan yaitu :

a. Kali kedua di Kabupaten Boyolali pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru/ PPDB Online SMP dengan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan transparan berbasis web pada http://boyolali.ppdb-smart.net/;

b. Pemberian penghargaan berupa *smartphone* kepada siswa berprestasi sebanyak 55 siswa yang memiliki prestasi akademis Ujian Nasional dengan hasil nilai 100 bagi siswa SMP.

Sistem penerimaan siswa baru/ PPDB Online SMP pada http://boyolali.ppdb-smart.net/



Gambar 3.42 Gambar sistem penerimaan siswa baru/ PPDB Online SMP pada http://boyolali.ppdb-smart.net/

14. SASARAN 14 : Meningkatnya daya saing industri

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM	430	300	111,11	395	114,49	395	107,92	386,00	400	103,63	A	DISDAGPERIN
2 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	kawasan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDAGPERIN
3 Pertumbuhan industri	unit	9.573	9064	100	9.214	100,66	9.237	99,90	9.338	9600	102,81	A	DISDAGPERIN
Capaian				**105,56**		**107,57**		**69,28**			**103,22**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 103,22% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 14 (empat belas) per indikator:

1) IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya.

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena adanya intensitas pelatihan maupun sosialisasi terhadap IKM se-Kabupaten Boyolali baik IKM kerajinan, IKM makanan minuman, IKM logam, dan IKM tembakau, sehingga meningkatkan kemampuan maupun pemahaman dari IKM tersebut untuk lebih berhasil dalam usahanya.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain adanya IKM yang rendah kompetensinya,kompetensi IKM dari luar daerah berinovasi,dan kekurangan capaian anggaran.Adapun alternatif/solusi pemecahan masalah dilakukan upaya pembekalan yang intensif pembinaan kepada IKM

b. Efesieni penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang IKM;
- Menggunakan aplikasi/ sistem yang sesuai dengan kebutuhan;
- Efisiensi terhadap anggaran dilaksanakan dengan melakukan aktifitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp. 129.884.783,00 (5,30%) dari anggaran sebesar Rp. 2.449.580.000,00 terserap sebesar Rp. 2.319.695.217,00. Terjadi efisiensi pada belanja barang dan jasa, perjalanan dinas dan alat tulis kantor.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster, serta dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan dan fasilitasi kemasan produk IKM, pelatihan IKM logam, pelatihan IKM aneka kerajinan, penyusunan data industri dan pembangunan gedung workshop IKM;
- Program Peningkatan kemampuan tehnologi industri, dengan kegiatan Pembinaan kemampuan tehnologi industri, melalui bentuk kegiatan Sosialisasi mutu tembakau, sosialisasi standar verifikasi legalitas kayu, monev IKM, pelatihan IKM makanan, pelatihan AMT;
- Program Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi, dengan kegiatan Pengembangan sistem inovasi tehnologi industri, melalui bentuk kegiatan Pelatihan desain dan proses batik, pelatihan IKM sablon.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Pembentukan kawasan peruntukkan industri

Indikator ini pada tahun 2019 tidak memasang target. Sehingga tidak ada analisis apapun, namun demikian pada tahun 2019 ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali ada program kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program penyiapan sumber daya sarana dan prasarana daerah dengan kegiatan Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi akan tetapi kegiatan tersebut hanya untuk Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka menyusun NA Ranperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).

3) Pertumbuhan industri

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena adanya sudah tersusunnya data industri besar, menengah dan kecil di Kabupaten Boyolali yang akan di pergunakan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian keberdaan industri-industri di Kabupaten Boyolali.

Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam percapaian target kinerja ini antara lain, perkembangan/ munculnya pengusaha kecil/ mikro, meningkatnya skala usaha dari mikro ke industri kecil yang tersebar di kecamatan/ wilayah yang belum terdata dengan pelaksanaan pendataan memerlukan waktu yang cukup lama, adapun alternatif/ solusi pemecahan masalah adalah harus melibatkan relawan dan berkolaborasi penggunaan tenaga penyedia jasa/ pihak ketiga agar validilitas dan keakuratan data industri tepat dan riil.

Berikut grafik pertumbuhan industri dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.43 Grafik pertumbuhan industri dari tahun 2016-2019

b. Efesieni penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Efisiensi terhadap anggaran dilaksanakan dengan melakukan aktifitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp. 1406760,00 (1,64%) dari anggaran sebesar Rp. 85.925.000,00 terserap sebesar Rp. 84.518.240,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan penyusunan data dokumen industri yang ada di Kabupaten Boyolali. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

15. SASARAN 15 : Meningkatnya daya saing perdagangan

Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	unit	95	70	100	163	217,33	218	272,50	85,00	175,00	205,88	A	DISDAGPERIN

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	%	100	17	102	33,33	100,00	70	140	66,67	67,00	100,50	A	DISDAGPERIN
3 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	pelaku usaha	25.200	4.429	105,45	856	20,38	794	18,90	4.200,00	4.179,00	99,50	B	DISDAGPERIN
4 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Rp. (000)	30.686.010	5.219.768	104,62	5.889.175	116,86	7.111.897,82	139,74	5.139.335	9.405.173,01	183,00	A	DISDAGPERIN
5 Nilai ekspor barang (USD)	US $	884.249	242.684	186,68	9.629	7,05	(274.079,82)	-191,23	150.491	370.193,74	245,99	A	DISDAGPERIN
6 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	%	4,50	12,70	95,85	12,94	95,85	13,52	98,33	14,00	12,84	91,71	B	DISDAGPERIN
Capaian				**115,77**		**92,91**		**79,71**			**154,43**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 154,43% (kategori sangat baik) terdiri dari 4 (empat) indikator kategori sangat baik (66,67%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (33,33%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 15 (lima belas) per indikator:

1) Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).

   a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk.

      Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pedagang untuk lebih maju,perlu waktu proses jual beli tanah,dan proses DED/pelelangan secara elektronik. Alternatif solusi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala yaitu melakukan sosialisasi kepada pedagang secara intensif melaksanakan operasional harga tanah dan melakukan pencermatan terhadap DED maupun proses lelang.

   b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

      - Dengan SDM terbatas maka dilakukan menggunakan pihak ketiga/rekanan penyedia barang dan jasa serta melibatkan tenaga ahli konsultan pengawas;
      - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,68% dari seluruh anggaran yang digunakan untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp. 54.631.048.000,00 digunakan sebesar Rp. 54.258.972.620,00.

   c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembangunan pasar, pengadaan tanah dan pensertifikatan tanah pasar (IMB). Adapun wujudnya yaitu:

- Rehab/ pemeliharaan Pasar Wonosegoro, Sunggingan, Boyolali, Karanggede, pasar sayur Cepogo, pasar hewan karanggede dan pasar hewan Sunggingan pasar Klego dan pasar Drajidan sebanyak 4 unit;
- Pembangunan/relokasi pasar Kebon Agung tahap III berupa akses jalan masuk, pagar, taman, paving 4 unit;
- Pembangunan/relokasi pasar Cepogo tahap II berupa 1 los dan 18 kios, untuk tahap III 9 kios;
- Pembangunan/relokasi pasar Pengging tahap III berupa tambatan kambing, akses jalan, paving drainase/ saluran, los pande, TPS sampah, kantor dan tahap IV berupa 2 los, 1 tambatan kambing;
- Pembangunan/ relokasi pasar Hewan Sunggingan di jelok tahap III berupa penataan lahan, tambatan hewan besar dan tambatan hewan kecil sejumlah 4 unit;
- Pembangunan/ relokasi pasar Hewan purworejo di jeron tahap III berupa 1 tambatan hewan besar, drainase/ talud/ irigasi sejumlah 3 unit;
- Pembangunan akses jalan masuk pasar kacangan 2 unit;
- Pembangunan pasar Ngancar tahap II berupa pavingisasi, pagar, TPS sampah 3 unit;
- Revitalisasi pasar Pundung berupa 1 los besar dan 12 kios;
- Revitalisasi pasar Bangak berupa 12 unit kios;
- Pembangunan/ relokasi pasar Kacangan tahap III berupa 34 unit kios;
- Revitalisasi pasar Repaking berupa 1 los,2 kios jumlah 3 unit;
- Revitalisasi pasar Kunti berupa 1 unit los;
- Pembangunan pasar Nogosari dan Ampel dari dana pendamping Tugas pembantuan berupa 2 Los dan 5 Kios;
- Pembangunan/ relokasi pasar Kebo Agung tahap IV berupa los dan akses jalan 2 unit;
- Pembangunan/ relokasi pasar Ampel tahap II berupa penataan lahan 1 unit, 35 kios;
- Pembangunan/ relokasi pasar Cepogo tahap III berupa 9 unit kios;
- Pembangunan pasar Tambak tahap II berupa 1 unit los;
- Pembangunan/ relokasi Pasar penggung tahap IV berupa 1 Los dan tambatan kambing 2 unit;
- Pembangunan kios dan MCK di Kebun Raya Indro kilo 2 unit;
- Pengadaan tanah, pembayaran uang tunggu, FS dan pensertifikatan (IMB).

Total jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten boyolali sebanyak 44 pasar dalam tahun 2019 terjadi kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Desa Penggung tentang tukar guling/ ruisslag Penggung yang dimohonkan menjadi pasar desa sehingga asset pasar milik Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadi 44 pasar yang dibina/ dikendalikan oleh 6 UPT pasar. Seiring perkembangan yang ada pasang surut akibat adanya persaingan usaha dan kedekatan jarak dengan pasar retail modern berdampak ada 4 pasar yang tdak dapat beroperasi lagi dan mangkrak yaitu : pasar walen, pasar sonorejo, pasar putat dan pasar teras yang diprediksi sulit untuk di revitalisasi.

Sehingga factual pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 44 pasar dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah pasar kategori baik sebanyak 33 pasar antara lain:

  Pasar Umum Boyolali, Pasar Randu Asri Ngebong, Pasar Umum Cepogo, Pasar Umum Sidodadi, Pasar Umum Repelita, Pasar Umum Selo, Pasar Hewan Purworejo, Pasar Hewan Sunggingan, Pasar Umum Kacangan, Pasar Umum Batangan, Pasar Umum Ngegot, Pasar Umum Karanggede, Pasar Umum Klego, Pasar Umum Kebonagung, Pasar Umum Pengging, Pasar Umum Ngancar, Pasar Umum Sambi, Pasar Umum Trantang, Pasar Umum Sunggingan, Pasar Umum Drajitan, Pasar Kayu Singkil, Pasar Umum Wonosegoro, Pasar Umum Keongawi, Pasar Umum Mongkrong, Pasar Umum Kunti, Pasar Umum Bangak, Pasar Umum Repaking, Pasar Umum Pundung, Pasar Umum Tambak, Pasar Umum Mojosongo, Pasar Umum Ampel, Pasar Sayur Cepogo, Pasar Umum Nogosari.

- Jumlah pasar tradisional kondisi sedang sebanyak 6 pasar antara lain:

  Pasar Hewan Karangjati, Pasar Hewan Karanggede, Pasar Hewan Ampel, Pasar Umum Kemusu, Pasar Umum Simo, Pasar Umum Juwangi.

- Jumlah pasar tradisional kondisi tidak baik sebanyak 5 pasar antara lain:

  Pasar umum Putat, Pasar Umum Sonorejo, Pasar Umum Teras, Pasar Umum Walen, Pasar Umum Ketitang.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata.

   a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya peningkatan pedagang pasar, PKL dan asongan dalam melakukan aktifitas usahanya dalam lokasi maupun waktu aktivitas para PKL dan asongan, serta dilakukannya pembinaan kepada pedagang pasar,pedagang kaki lima dan asongan pada 20 lokasi pasar dan tempat khusus lainnya yaitu;Kebon Raya Indrokilo,Taman tiga menara,alun-alun kidul dan utara.

      Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pedagang pasar untuk menempati kios, SIDT, SDDS sesuai peruntukan,tidak tertibnya PKL dan asongan dalam bertransaksi dan sering berpindahnya dalam jual beli mengakibatkan kesemrawutan dan ketidak nyamanan lingkungan.adapun alternatif solusi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala yaitu melakukan intensifikasi pembinaan kepada pedagang pasar, pedagang kaki lima dan asongan serta menegakkan kepatuhan terhadap pedagang yang tidak disiplin dengan menerapkan pada lokasi yang telah ditentukan

   b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilaksanakan dengan :

      - Menyusun jadwal pembinaan penataan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang pasar;
      - Memberdayakan paguyuban pedagang pasar maupun paguyuban pedagang kakilima;

- Melakukan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.111.365,00 atau 21,24% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 104.105.000,00 terserap Rp. 81.993.635,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan serta bentuk kegiatannya adalah melakukan pembinaan kepada pedagang pasar,pedagang kaki lima dan asongan pada 20 lokasi pasar dan tempat khusus lainnya yaitu;Kebon Raya Indrokilo,Taman tiga menara,alun-alun kidul dan utara. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen.

a. Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha/ konsumen maupun produsen tera/ tera ulang dalam melaksanakan kegiatan pengecekan alat ukur timbangan, meskipun dari sisi pelaku usaha/ konsumen dan produsen belum memenuhi target RPJMD namun dari sisi kuantitas jumlah UTTP mengalami kenaikan yaitu jumlah UTTP yang ditera dan bertanda syah sebesar 46.952 UTTP dari potensi sebesar 22.865 UTTP yang tersebar di 22 kecamatan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/konsumen dalam memenuhi ketepatan alat ukur maupun alat timbang lain yang berstandar.sebagian besar pasar –pasar,toko maupun kios di Boyolali, adapun alternatif solusi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala yaitu dengan melakukan jemput bola pelaksanaan tera/tera ulang atas UTTP yang dimiliki para pelaku usaha agar memenuhi standar kwalitas(kaloborasi).

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Menggunakan aplikasi/surat/atau alat/mesin yang standart tera;
- Melakukan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 381.295.187,00 atau 19,50% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 1.954.979.000,00 terserap Rp. 1.573.683.813,00, karena belum direalisasikannya belanja modal;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah, dengan betuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memfasilitasi pelaku usaha/ konsumen terealisasi 40.179 pelaku usaha/ konsumen, dan melakukan tera terhadap UTTP sebanyak 46.952 UTTP. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

4) Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali.

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pemantauan dan inspeksi langsung ke pasar-pasar se-kabupaten boyolali secara rutin dan berkelanjutan terhadap pedagang maupun petugas pada UPT.

Hambatan/ permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya nilai tunggakan konpensasi yang harusnya di bayar oleh pedagang sekitarnya penegakan penagihan kepada pedagang hewan dan kurangnya kesadaran pedagang dalam memenuhi peraturan. Adapun alternatif solusi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala yaitu melakukan monotoring dan pengawasan penarikan/penagihan retribusi kepada pedagang melalui jajaran UPT-UPT pasar di seluruh Boyolali juga terobosan pemberlakuan sistem pembayaran retribusi secara E-retribusi (Non Tunai).

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Dengan SDM terbatas maka dilakukan menggunakan pihak ketiga atau melibatkan karyawan dipasar;
- Menggunakan aplikasi/surat/atau alat/karcis/tiket manual;
- Melakukan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 15.374.645,00 atau 4,91% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 313.423.200,00 terserap Rp. 298.048.555,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan kegiatan:

- Pengelolaan pendapatan retribusi pasar milik Pemda, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan malakukan pemantaun dan inspeksi ke lokasi pasar-pasar secara berkelanjutan;
- Pendataan potensi pasar milik pemda, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan update dan pencocokan data antara yang tercatat dalam administrasi dengan kondisi yang ada dilapangan.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5) Nilai ekspor barang (USD).

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan adanya pelaksanaan pencarian data dengan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan eksportir dan juga melalui tagihan surat dan media sosial lain untuk memperoleh data ekspor impor dari perusahaan.

Hambatan/ permasalahan yang di hadapi adalah belum semua perusahaan menengah/ besar yang bersedia menyampaikan laporan realisasi ekspor impornya, rendahnya semangat industri yang ada dalam mengembangkan diri dan tidak rutin dalam memberikan laporan. Adapun alternatif solusi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala yaitu dengan melakukan negoisasi jemput bola kepada perusahaan menengah/ besar dan singkronisasi dengan koordinator perusahaan Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

Berikut grafik ekspor bersih perdagangan dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.44 Grafik ekspor bersih perdagangan dari tahun 2016-2019

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pelatihan/ sosialisasi kemasan/ branding;
- Mengirimkan IKM / pengusaha ke event-event Dekranasda, JEC Jogya Expo Center), dan JCC (Jakarta Convetion Center);
- Melakukan sosialisasi kemudahan penyederhanaan prosedur ekspor impor kepada wirausaha baru/ calon eksportir;
- Melakukan aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dan berpengaruh terhadap capaian target sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.174.734,00 atau 15,66% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 263.000.000,00 terserap Rp. 221.825.266,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan dan pengembangan ekpor dengan kegiatan:

- Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasioanl, bilateral, regional, dan internasional, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan/ sosialisasi kemasan/ branding;
- promosi perdagangan internasional, dengan Mengirimkan IKM / pengusaha ke event-event Dekranasda, JEC Jogya Expo Center), dan JCC (Jakarta Convetion Center);
- Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekpor dan impor, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi kemudahan penyederhanaan prosedur ekspor impor kepada wirausaha baru/ calon eksportir.

Melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan IKM potensi Ekspor dan pengiriman peserta dari IKM Boyolali yang mampu berkompetensi dengan pesaing lain,pada ajang Dekranasda,Expo dan pameran lain yang GO internasional serta pemantauan kepada industri menengah/Besar terkait transaksi ekspor impor oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Boyolali, dari laporan hasil ekspor perusahaan dapat terealisasi sebesar 384.570.40 U$D

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

6) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan faktor eksternal diluar kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena menyangkut tingkat daya beli masyarakat terhadap barang/ produk yang beedar utamanya perdagangan besar. Komponen untuk pengukuran nilai dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun2019 ini presentatif/ratio kontribusi faktor perdagangan belum maksimal.

Hambatan/ permasalahan yang dihadapi adalah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi peredaran barang/ produk yang tidak berdasarkan pada kebutuhan namun lebih pada prestise didukung lembaga keuangan yang memeudahkan dalam pendanaan. Adapun alternatif solusi pemecahan masalah dilakukan dengan upaya mengingatkan kepada masyarakat melalui pembinaan, sosialisasi maupun melalui panflet atau media sosial yang lain.

Berikut grafik kontribusi perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2019:



Gambar 3.45 Grafik kontribusi perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2019

b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan realisasi capaian kinerja dilakukan secara kolektif dan kolegial dari seluruh organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Vertikal Badan Pusat Statistik dengan koordinator adalah Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali, tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator ini.

c. Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator ini namun Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mencapai indikator ini secara kolektif dan kolegial dari seluruh organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Vertikal Badan Pusat Statistik dengan koordinator adalah Dinas Kominfo Kabupaten Boyolali:

Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

Selain pencapaian indikator tersebut di atas Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan:

a. Juara Harapan lomba Perajin Kriya dalam rangka Deskranada Award di Jakarta tingkat Nasional;

b. Piagam pengharagaan Naturaline aneka lilin dekoratif multiguna sebagai juara I Produk IKM terbaik Jawa tengah;

c. Juara Harapan III, PT. Primayudha, Ampel kategori perusahaan menengah keatas tingkat propinsi pada tahun 2019;

d. Juara Harapan III PT Nuanza Porselin, Ampel, kategori perusahaan menengah ke bawah tingkat propinsi.

16. SASARAN 16 : Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional

Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	ton	298.751	300.123	105,47	275.073	95,73	295.736	101,93	292.987	293.695	100,24	A	DISPERTAN
Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:													DISPERTAN
2 - Jagung	ton	138.456	180.439,98	133,61	124.904	92,03	149.976	109,95	137.082	139.506	101,77	A	DISPERTAN
3 - Kedelai	ton	6.898	4.803,72	71,40	5.587	82,62	3.488	51,33	6.829	5.608	82,12	B	DISPERTAN
Produksi tanaman hortikultura utama													DISPERTAN
4 - Pepaya	kuintal	126.121	358.570	298,81	401.812	331,53	214.441	175,18	123.636	280.286	226,70	A	DISPERTAN
5 - Cabe	kuintal	115.611	509.662	463,33	314.060	282,68	259.973	231,68	113.333	634.528	559,88	A	DISPERTAN
6 - Bawang Merah	kuintal	31.530	216.869	677,72	107.970	356,34	75.061	245,27	30.909	183.493	593,66	A	DISPERTAN
7 - Jahe	kuintal	10.773	10.567,50	103,10	52.010	502,37	25.113	240,15	10.561	23.782,00	225,19	A	DISPERTAN
8 - Kencur	kuintal	17.342	22.319	135,27	18.065	108,40	18.115	107,62	17.000	26.606	156,51	A	DISPERTAN
Jumlah produksi tanaman perkebunan:													DISPERTAN
9 - Cengkeh	ton	382,88	411,97	137,32	0	0	583,44	176,40	347,29	547,70	157,71	A	DISPERTAN
10 - Kopi	ton	153,15	247,17	205,98	247,57	196,48	368,65	278,65	138,92	370,62	266,79	A	DISPERTAN
11 - Kelapa	ton	5.572,25	5.726,23	131,16	3.279,38	71,54	2.781,71	57,79	5.054,19	2.851,73	56,42	C	DISPERTAN
12 - Tembakau	ton	5.234,03	4.102,18	100,03	3.867	89,80	4.718,42	104,36	4.747,42	7.404,51	155,97	A	DISPERTAN
13 - Tebu	ton	36.246,40	213.315,93	750,85	20.690,64	69,39	20.380,17	65,09	32.876,55	17.157,00	52,19	D	DISPERTAN
14 - Lada	ton	24,25	18,89	95,50	19,79	99,20	12,80	61,10	21,99	12,90	58,66	C	DISPERTAN
15 - Atsiri	Kuintal	59,99	61,65	131,17	103,01	208,73	62,60	120,80	54,41	57,38	105,46	A	DISPERTAN
16 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	26,97	17,6	100	19,47	100,05	21,35	100,00	23,22	23,22	100	B	DKP
17 Presentase peningkatan Cadangan Pangan	%	100	113,64	123,86	149,67	162,68	174,81	184,01	97	160	164,95	A	DKP
18 Skor Pola Pangan Harapan	skor	92	86,5	98,30	86,8	97,53	86,90	97,09	90	90,10	100,11	A	DKP
Capaian				**214,60**		**163,73**		**139,36**			**181,35**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 181,35% (kategori sangat baik) terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kategori sangat baik (72,22%), 2 (dua) indikator kategori baik (11,11%), 2 (dua) indikator kategori cukup (11,11%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (5,56%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 16 (enam belas) per indikator:

1) Produksi pangan utama (Ton) : Padi

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan terjadinya peningkatan produktivitas padi sawah dan padi ladang. Pada tahun 2019, dari target produksi tanaman padi sebesar 292.987 ton Gabah Kering Giling (GKG), tercapai 293.695 ton GKG atau sebesar 100,24%. Dibandingkan tahun 2018, terdapat penurunan produksi padi sebesar 2.041 ton GKG.

Dilihat dari luasan panen, pada tahun 2019 luasan panen padi sawah seluas 49.388 ha dengan produktivitas padi sawah sebesar 58,02 kuintal/ha dan luas panen padi gogo seluas 2.5572 ha dengan poduktivitas padi ladang sebesar 34,97 kuintal/ha. Pada tahun 2018, luasan panen padi sawah seluas 50.300 ha dengan produktivitas sebesar 53,24 kuintal/ha dan luas panen padi ladang seluas 2.639 ha dengan produktivitas sebesar 28,22 kuintal/ha. Pada tahun 2019, terjadi penurunan luas panen padi sawah dan ladang, namun terdapat peningkatan produktivitasnya sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan produksi padi pada tahun 2019.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Musim kemarau yang panjang menyebabkan curah hujan turun sehingga ketersediaan air untuk menanam padi tidak mencukupi, mengakibatkan mundurnya masa tanam padi dan petani beralih komoditas ke komoditas tanaman pangan lainnya khususnya tanaman jagung.
- Sebagian lokasi padi ladang yang biasanya ditanami padi pada bulan September hingga Oktober, mundur tanam hingga bulan Desember, menyebabkan *cary over* ke tahun 2019. C*ary over* di tahun 2019 juga terjadi pada padi sawah.
- Terdapat serangan OPT padi antara lain hama tikus, wereng dan penyakit Blast.
- Panjangnya musim kemarau mengakibatkan terjadi bencana kekeringan pada komoditas padi seluas 1.162 ha.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Bantuan benih padi yang bersumber dana dari APBN;
- Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) guna mendukung penyediaan pupuk kompos;
- Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa *cultivator, rice transplanter, seedling tray, hand sprayer*;
- Pembangunan sumber irigasi antara lain embung, irigasi tanah dalam, irigasi tanah dangkal dan jaringan irigasi antara lain dam parit, jaringan irigasi tersier, dan *long storage*;
- Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3);
- Pengendalian serangan OPT menggunakan agensia hayati, pengendalian secara fisik mekanik maupun kimiawi, penanaman serempak. Pemerintah memberikan bantuan pestisida guna membantu gerakan pengendalian OPT, selain itu petani secara swadaya juga mengendalikan OPT menggunakan agensia hayati;
- Penguatan kelembagaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);

- Pengendalian alih fungsi lahan;
- Bantuan sosial premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- Demplot padi pada beberapa kelompok tani.

Berikut Grafik Produksi Padi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019:



Gambar 3.46 Grafik Produksi Padi di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
   - Pembuatan demplot pertanaman padi pada 14 kelompok tani yang ada di Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Sawit, Nogosari, Wonosegoro, Ngemplak, Klego, Kemusu;
   - Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi;
   - Menggunakan Kartu Tani pada 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali untuk fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,52% dari seluruh anggaran yang digunakan untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp. 2.134.450.000,00 digunakan sebesar Rp. 2.102.091.445,00;

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan:
     - ✓ Kegiatan Pengelolaan Air untuk Irigasi Pertanian (APBN-TP). Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 1 unit, dilaksanakan di Kecamatan Wonosegoro, pengembangan embung pertanian sebanyak 1 unit di Kecamatan Banyudono;
     - ✓ Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani pada 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali.

- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan:
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengadaan alsintan dan pembangunan sumber irigasi serta jaringan irigasi. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum digunakan untuk pengadaan alsintan dan pembangunan jaringan irigasi tersier. Sedangkan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untu pengeolaan sumber air. Pembangunan Sumur Dalam 1 unit di Kecamatan Ngemplak, Alsintan yang diberikan antara lain cultivator sebanyak 14 unit di Kecamatan Mojosongo, Teras, Ampel, Nogosari, Cepogo, Musuk, Selo, rice transplanter sebanyak 2 unit Kecamatan Andong dan Klego dan Seedling Tray sebanyak 4.125 buah Kecamatan Andong, Banyudono, Boyolali, Klego, Ngemplak. Pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 2.000 meter (Kecamatan Banyudono, Sawit). Pengelolaan sumber air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi diantaranya pembangunan irigasi tanah dalam sebanyak 2 unit (Kecamatan Andong dan Sambi), pembangunan embung sebanyak 2 unit (Kecamatan Klego dan Wonosegoro), pembangunan dam parit sebanyak 2 unit (Kecamatan Nogosari dan Ampel), pembangunan irigasi tanah dangkal sebanyak 10 unit (Kecamatan Nogosari, Klego, Ngemplak, Andong, Sambi, Karanggede) , Pembangunan jalan produksi mendukung hortikultura 1 Km (Kecamatan Cepogo) dan Pembangunan BPP 2 Unit (Andong dan Selo);
  - ✓ Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi dan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Boyolali;
  - ✓ Kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pembelian pestisida baik jenis rodentisida, fungisida, maupun insektisida guna melaksanakan pengendalian OPT utamanya komoditas padi pada wilayah endemis seluas 1.500 ha;
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan GP3A melalui fasilitasi legalisasi badan hukum GP3A, failitasi pembentukan/revitalisasi GP3A, serta *demonstration area* System Rice Intensification (SRI) pada di DI Nogosari (1 GP3A Ngudi Luhur Desa Mojosari Kec. Karanggede);
  - ✓ Kegiatan Pengendalian/Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi pembuatan dokumen keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan verifikasi PBB LP2B.
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan sosial premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada lahan seluas 4.000 ha;

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan demplot pertanaman padi pada 14 kelompok tani yang ada di Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Sawit, Nogosari, Wonosegoro, Ngemplak, Klego, Kemusu.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:

2) Jagung

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena turunnya angka intensitas curah hujan sehingga sebagian petani beralih komoditas dari tanaman padi ke tanaman jagung. Selain tambahan luasan dari komoditas padi, terdapat petani kedelai yang beralih ke tanaman jagung.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kemarau panjang mengakibatkan gagal panen.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Irigasi yang cukup;
- Intensifikasi lahan pertanian berbasis jagung;
- Perluasan lahan pertanaman jagung baik bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.

Berikut grafik Produktivitas jagung Kabupaten Boyolali dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.47 Grafik Produktivitas jagung Kabupaten Boyolali dari tahun 2016-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Memberikan pemberian benih jagung sebanyak 6.300 kg untuk 420 ha pertanaman jagung Kecamatan Andong, Woonosegoro, Juwangi, dan Kemusu;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,47% dari seluruh anggaran yang digunakan untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp. 307.750.000,00 digunakan sebesar Rp. 300.145.261,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan pemberian benih jagung sebanyak 6.300 kg untuk 420 ha (kebutuhan benih jagung sebanyak 15 kg/ha) pertanaman jagung Kecamatan Andong, Woonosegoro, Juwangi, dan Kemusu.

   Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

3) Kedelai

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena karena intensitas curah hujan yang rendah sehingga terjadi kekeringan hingga puso pada pertanaman kedelai, selain itu mundurnya musim hujan mengakibatkan sebagian petani kedelai beralih ke tanaman jagung.

   Dilihat dari segi luas panen, pada tahun 2018 luasan panen kedelai seluas 32.660 ha dengan produktivitas sebesar 13,11 kuintal/ha, sedangkan pada tahun 2019 luasan panen menjadi 695 ha dengan produktivitas sebesar 10,12 kuintal/ha. Penurunan luasan panen dan angka produktivitas kedelai di tahun 2019 secara simultan menyebakan capaian produksi kedelai yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi target produksi kedelai pada tahun 2019.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

   - Minimnya minat petani untuk menanam kedelai secara swadaya, petani umumnya hanya menanam kedelai bila ada antuan dari Pemerintah;
   - Rendahnya intensitas curah hujan mengakibatkan pertanaman kedelai mengalami kekeringan. Musim kemarau yang berkepanjangan berpengaruh terhadap turunnya produksi, hingga tanaman tidak berproduksi / puso;
   - Sebagian petani kedelai beralih komodits ke tanaman jagung;
   - Adanya *cary over* pertanaman kedelai (tanaman kedelai ditanam bulan Desember 2019) seluas 453 ha.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

   - Mendorong minat petani menanam kedelai secara swadaya;
   - Pemberian bantuan alsinta;
   - Budidaya sampai pasca panen.

Berikut Grafik Produksi Kedelai di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019:



Gambar 3.48 Grafik Produksi Kedelai di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Pemberian bantuan alsinta;
- Budidaya sampai pasca panen;
- Dari segi anggaran tidak ada efesiensi karena adanya keterlambatan dalam penyediaan benih dari pusat.

c. Untuk mencapai indikator ini sebenarnya ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (APBN-TP) pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, akan tetapi tidak terambil karena keterlambatan dalam penyediaan benih dari pusat. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

Produksi tanaman hortikultura utama

4) Pepaya

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena masih tingginya animo petani untuk menanam tanaman pepaya, peningkatan produksi pepaya yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan karena musim yang mendukung sehingga panen melimpah.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Terdapat serangan hama dan penyakit pada tanaman pepaya sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, tanaman pepaya mati, tidak produktif, maupun kegagalan masak pada buah. Penyakit yang banyak menyerang adalah busuk buah dan busuk pangkal batang sedangkan hama yang banyak menyerang adalah kutu putih. Banyaknya serangan hama dan penyakit mengakibatkan produksi pepaya menurun;
- Sebagian peremajaan mengalami kekeringan karena kekurangan air untuk penyiraman.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan :

- Pengendalian hama dan penyakit tanaman pepaya baik menggunakan pestisida maupun sanitasi kebun;

- Guna peremajaan tanaman pepaya yang mati, Pemerintah memberikan bantuan bibit Pepaya Calina sebanyak 30.000 batang.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Pemberian bantuan bibit Pepaya Calina sebanyak 30.000 batang;
- Pemberian sarana prasarana pemasaran berupa 1 (satu) buah kendaraan roda tiga untuk petani pepaya di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo;
- Memberikan fasilitasi pertemuan petani dengan pelaku usaha pemasaran pepaya dari eksportir buah dari Semarang dan pedagang lokal;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,83% dari anggaran sebesar Rp. 1.052.475.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.033.188.040,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan :
  - ✓ Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian sarana prasarana pemasaran berupa 1 (satu) buah kendaraan roda tiga untuk petani pepaya di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo serta fasilitasi pertemuan petani dengan pelaku usaha pemasaran pepaya dari eksportir buah dari Semarang dan pedagang lokal. Dengan pengenalan kepada pelaku pasar, maka dapat menambah jejaring pemasaran dari petani langsung ke pasar. Hal ini dapat mengurangi mata rantai penjualan pepaya, sehingga keuntungan petani pepaya dapat lebih meningkat;
  - ✓ Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan bantuan prasarana alat pengolahan hasil produksi pertanian 1 paket dan pelatihan pengolahan pasca panen.
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan bantuan bibit pepaya Calina sebanyak 30.000 batang serta 45.000 kg pupuk organik, yang kemudian didistribusikan ke petani pepaya di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo dan Boyolali.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

5) Cabe

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena banyaknya petani yang antusias untuk menanam tanaman cabe karena kebutuhan pasar yang terus meningkat dan harga jual cabe di Kabupaten Boyolali relatif stabil, sehingga tanaman cabe dinilai cukup menguntungkan dari sisi ekonomi.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan masa tanam cabai mundur, selain itu kemarau berkepanjangan juga menyebabkan kekurangan air di beberapa daerah penghasil cabe yaitu di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu sehingga menyebabkan turunnya produksi cabe;
- Terdapat serangan penyakit pada cabe diantaranya serangan cendawan *Colletrotichum sp* yang menyebabkan penyakit Patek atau Antraknosa. Cendawan tersebut biasa menyerang saat musim hujan, dimana kelembaban area tanam akan semakin meningkat;
- Serangan Gemini Virus atau petani sering menyebutnya Virus Kuning. Penyebaran Virus Kuning dapat berasal dari benih varietas lokal yang sudah terserang Virus Kuning sebelumnya;

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan :

- Pengaturan jadwal tanam agar saat panen cabe tidak jatuh pada musim penghujan;
- Memperlebar jarak tanam bila tanaman cabe ditanam di musim peghujan, hal ini untuk mengurangi kelembaban area pertanaman;
- Pengendalian penyakit Patek dengan penyemprotan fungisida;
- Penggunaan benih cabe yang berlabel dan bersertifikat untuk mengurangi penyebaran penyakit melalui benih;
- Sanitasi lahan guna membersihkan gulma sekitar tanaman;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Pemberian sarana prasarana pemasaran berupa kendaraan roda tiga untuk petani sayur;
- Pemberian sarana prasarana alat pengolahan hasil pertanian;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,27% dari anggaran sebesar Rp. 196.475.000,00 digunakan sebesar Rp. 188.095.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN-TP) dengan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi cabe berupa pengembangan kawasan cabe besar dan cabe rawit.
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan:
  - ✓ Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemberian sarana prasarana pemasaran (kendaraan roda 3).
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian sarana prasarana alat pengolahan hasil pertanian.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

6) Bawang Merah

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena terdapat pengembangan tanaman bawang merah baik bersumber dana dari APBN-TP maupun APBD.

Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekurangan air sehingga memundurkan jadwal tanam sehingga terdapat produksi bawang merah yang *cary over* pada tahun 2019;
- Belum ada produsen benih bawang merah yang bersertifikasi di Kabupaten Boyolali, dalam penggunaan benih bawang merah, masih mendatangkan benih dari Desa Purworejo, Kecmatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pengembangan produksi bawang merah melalui pengembangan kawasan bawang merah melalui anggaran APBN-TP dan APBD.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:

- Memberikan bantuan berupa mulsa plastik sebanyak 12 roll, Pupuk NPK 400 Kg/ha Pupuk ZA 200 Kg/ha Dolomit 800 Kg/ha, benih bawang merah;
- Memberikan pelatihan pengolahan pasca panen bawang merah;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,67% dari anggaran sebesar Rp. 1.181.115.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.149.620.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN-TP) pada Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi bawang merah adalah pengembangan kawasan bawang merah seluas 10 hektare di Kecamatan Selo. Bantuan yang diberikan berupa mulsa plastik sebanyak 12 roll, Pupuk NPK 400 Kg/ha Pupuk ZA 200 Kg/ha Dolomit 800 Kg/ha, benih bawang merah;
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pelatihan pengolahan pasca panen bawang merah;
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan kawasan bawang merah seluas 4 ha di Desa Jombong (Kecamatan Cepogo) dengan memberikan benih bawang merah sebanyak 4.500 kg, pupuk organik sebanyak 9.000 kg, serta mulsa sebanyak 48 roll.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

7) Jahe

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena masih tingginya permintaan pasar akan komoditas jahe baik daam bentuk rimpang segar, simplisia, maupun bentuk bubuk. Jahe merupakan bahan baku dalam pembuatan jamu.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Harga bibit jahe yang relatif mahal, antara Rp 45.000,-/kg sehingga sebagian petani beralih komoditas ke tanaman jagung;
- Petani berganti komoditas ke tanaman rumput gajah karena untuk memebuhi kebutuhan pakan ternak.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Pemberian bantuan berupa pengembangan kawasan jahe, bersumber dari kegiatan APBT-TP dab APBD;
- Tanam mundur.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Membentuk sentra pengembangan produksi jahe;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,45% dari anggaran sebesar Rp. 99.250.000,00 digunakan sebesar Rp. 98.800.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah adalah pembentukan sentra pengembangan produksi jahe di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Desa Seboto Ampel pada lahan seluas 2 ha. Bantuan yang diberikan berupa benih jahe sebanyak 1.125 kg dan pupuk organik sebanyak 12.000 kg. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

8) Kencur

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena masih tingginya permintaan kencur dalam bentuk segar maupun simplisia san bubuk. Bubuk kencur dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan jamu.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Alih komoditas ke tanaman pangan baik padi maupun jagung;
- Usia tanam yang relatif panjang, mencapai satu tahun sehingga perputaran modal cukup lama;
- Belum terdapat program dan kegiatan yang mendukung pengembangan tanaman kencur.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Pembinaan teknis kepada petani mengenai budidaya kencur dan penanganan pasca panen kencur;

- Sanitasi kebun agar saat musim hujan, agar drainase kebun lebih baik, dan mengurangi serangan OPT;
- Meningkatkan kemitraan dengan pedagang maupun produsen jamu agar dapat menyerap hasil panenan kencur baik dalam bentuk segar maupun simplisia.

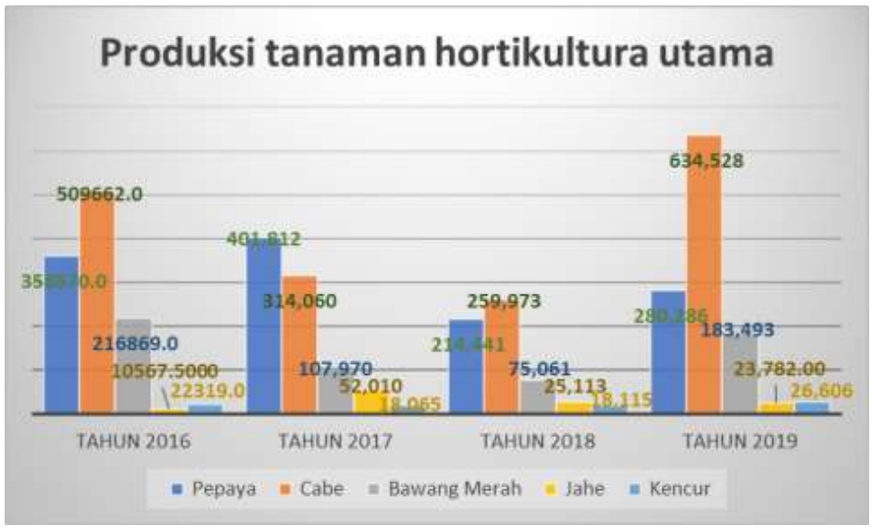
b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melaksanakan pembinaan teknis kepada petani mengenai budidaya kencur serta penanganan pasca panennya, walaupun tidak terdapat program dan kegiatan yang mendukung pengembangan budidaya kencur.

c. Walaupun tidak terdapat program dan kegiatan yang mendukung pengembangan budidaya kencur akan tetapi tetap dilaksanakan:

- Pembinaan teknis kepada petani mengenai budidaya kencur serta penanganan pasca panennya;
- Meningkatkan kemitraan dengan pedagang maupun produsen jamu agar dapat menyerap hasil panenan kencur baik dalam bentuk segar maupun simplisia.

Budidaya kencur di Kabupaten Boyolali sepenuhnya dilaksanakan dengan biaya swadaya dari petani.

Berikut grafik produksi tanaman hortikultura utama (pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dari tahun 2016 -2019:



Gambar 3.49 Grafik produksi tanaman hortikultura utama (pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dari tahun 2016 -2019

Jumlah produksi tanaman perkebunan:

9) Cengkeh

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilakukan pemberian bantuan bibit, sarana angkut, dan pestisida kepada petani. Tanaman cengkeh dapat menghasilkan bunga kering dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak atsiri.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Tanaman cengkeh tergolong rentan terhadap perubahan cuaca, apabila musim hujan berkepanjangan maka produksi bunga kering dapat menurun drastis hingga tanaman dapat gagal berbunga;

- Kurangnya pemeliharaan tanaman cengkeh, baik dari segi sanitasi lingkungan, pemupukan, maupun pengendalian terhadap OPT, sehingga hasil produksinya kurang maksimal;
- Terdapat gangguan OPT pada cengkeh, hama yang menyerang diantaranya Penggerek Batang, Cabang, dan Ranting yang disebabkan oleh Nothopeus hemipterus dan Perusak Daun yang disebabkan oleh Kutu Tempurung atau *Coccus viridis* serta beberapa penyakit seperti Cacar Daun Cengkeh (CDC) yang disebabkan cendawan jamur *Phyllostica syzygii* dan Embun Jelaga yang disebabkan cendawan *Capnodium sp*;
- Banyak tanaman yang sudah tua sehingga sudah tidak produktif.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Pemberian bibit cengkeh guna peremajaan tanaman cengkeh yang sudah tua dan tidak produktif;
- Pemberian sarana angkut pasca panen cengkeh berupa kendaraan roda tiga;
- Pemberian bantuan pestisida beserta alat pengendalian OPT perkebunan berupa hand *sprayer* dan *power sprayer*.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya

- Pengadaan kendaraan roda 3 untuk komoditas cengkeh;
- Pemberian bibit cengkeh;
- Pemberian obat-obatan dan pestisida, *handsprayer* untuk petani cengkeh
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,71% dari anggaran sebesar Rp. 1.131.622.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.112.228.550,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Hasil, Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pengadaan kendaraan roda 3 untuk komoditas cengkeh sebanyak 3 unit yang dibagikan ke Kecamatan Ampel dan Musuk.
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan :
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit cengkeh sebanyak 7.000 batang guna peremajaan tanaman yang sudah tua, dibagikan ke Kec. Karanggede, Musuk, dan Ampel.
  - ✓ Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian obat-obatan dan pestisida, *handsprayer* untuk petani cengkeh di 5 Kelompok Tani/ Gapoktan sebanyak 20 unit, *power sprayer* untuk petani cengkeh sebanyak 8 unit dibagikan ke 8 Kelompok Tani.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

10) Kopi

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena tingginya permintaan kopi menyebabkan animo petani untuk menanam kopi semakin tinggi. Harga biji kopi saat ini juga sudah mulai tinggi, permintaan pasar baik dalam bentuk kopi *roasting* dan dan kopi bubuk semakin meningkat.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Pemberian bibit kopi untuk memperluas lahan pertanaman kopi;
- Pelatihan budidaya dan pasca panen kopi hingga pemasarannya baik melalui pameran, promosi, maupun diikutsertakan di berbagai event kegiatan;
- Pemberian bantuan pestisida beserta alat pengendalian OPT perkebunan berupa handsprayer;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,71% dari anggaran sebesar Rp. 1.043.018.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.025.149.550,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada kegiatan Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan alat pasca panen kopi di Kecamatan Ampel.
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit kopi jenis Kopi Arabika sebanyak 3.000 batang di Kecamatan Selo dan Cepogo, Kopi Robusta sebanyak 2.125 batang di Kecamatan Ampel dan Cepogo guna perluasan dan peremajaan tanaman kopi;

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

11) Kelapa

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena banyak tanaman kelapa yang sudah tua sehingga produksinya menurun serta lamanya waktu yang dibutuhkan kelapa dari mulai tanam hingga dapat mulai produksi.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah :

- Banyaknya tanaman kelapa yang sudah tua sehingga produksinya menurun.
- Bantuan bibit yang disalurkan belum berbuah, karena tanaman kelapa baru mulai produksi ketika umur sekitar 5 tahun.
- Banyak petani yang memetik kelapa dalam bentuk kelapa muda (degan) karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan kelapa yang sudah tua.
- Petani enggan menanam kelapa karena tajuk kelapa yang lebar sehingga membutuhkan lahan yang luas.
- Terdapat serangan hama, utamanya Kumbang Badak.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Bantuan bibit kelapa 6.000 batang ke Kecamatan Ampel, Andong, Karanggede, Nogosari untuk peremajaan tanaman kelapa, utamanya bibit kelapa genjah yang lebih cepat berbuah.
- Pemberian bantuan pestisida beserta alat pengendalian OPT pada tanaman kelapa;
- Pemberian bantuan bibit kelapa kopyor ke Kecamatan Kemusu, Sawit, Wonosegoro, Ngemplak, Klego, Karanggede, Nogosari, Boyolali, Mojosongo.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

- Memberikan bantuan bibit kelapa 6.000 batang;
- Pemberian bantuan pestisida beserta alat pengendalian OPT;
- Pemberian bantuan bibit kelapa kopyor;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,11% dari anggaran sebesar Rp. 1.466.172.000,00 digunakan sebesar Rp. 1.435.283.259,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Hasil, Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pengadaan kendaraan roda 3 untuk komoditas kelapa sebanyak 1 unit yang dibagikan ke Kecamatan Kemusu;
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan :
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit kelapa sebanyak 6.000 batang. Bantuan bibit kelapa dialokasikan ke petani di Kecamatan Ampel, Karanggede, Andong, dan Nogosari;
  - ✓ Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian obat-obatan dan pestisida serta *handsprayer* sebanyak 20 unit didistribusikan ke kelompok tani , *power sprayer* sebanyak 8 unit.
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan percontohan budidaya dan teknologi pertanian khususnya komoditas kelapa kopyor di Kecamatan Kemusu, Sawit, Wonosegoro, Ngemplak, Klego, Karanggede, Nogosari, Boyolali, Mojosongo.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

12) Tembakau

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena banyaknya bantuan untuk komoditas tembakau, baik yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Bantuan berupa sarana penunjang budidaya serta bantuan pasca panen tembakau.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

   - Sistem budidaya komoditas tembakau yang dilakukan petani masih tradisional belum sesuai dengan Good Agri Cultura Practices (GAP);
   - Sulitnya mencari tenaga kerja di Bidang Pertanian;
   - Harga jual panen tembakau ditentukan oleh pabrik/tengkulak;
   - Varietas tembakau yang ditanam petani berasal dari biji yang tidak murni dan tidak bersertifikat.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

   - Pelatihan pengembangan budidaya tembakau rajangan dan asepan;
   - Bantuan alat pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan;
   - Bantuan sarana pengolahan tembakau mesin perajang tembakau dan para-para (widik) dan keranjang;
   - Pelatihan pasca panen tembakau rajangan dan asepan;
   - Perlunya mempererat hubungan kemitraan tembakau dengan pedagang maupun perusahaan tembakau sehingga petani lebih termotivasi dalam melakukan budidaya tembakau.
   - Bantuan sarana angkut tembakau berupa kendaraan roda tiga sebanyak 9 unit untuk Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melaksanakan :

   - Pelatihan pengembangan budidaya tembakau rajangan dan asepan;
   - Bantuan alat pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan;
   - Bantuan sarana pengolahan tembakau mesin perajang tembakau dan para-para (widik) dan keranjang;
   - Pelatihan pasca panen tembakau rajangan dan asepan;
   - Bantuan sarana angkut tembakau berupa kendaraan roda tiga;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 12,94% dari anggaran sebesar Rp. 2.467.960.000,00 digunakan sebesar Rp. 2.148.503.085,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu:

   - Program Pengembangan Agribisnis, dengan :
     - ✓ Kegiatan Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah. Kegiatan bersumber dana dari APBD Provinsi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan transfer pupuk ke petani tembakau berupa Pupuk KNO3 sebanyak 12.900 kg dan Pupuk NPK sebanyak 60.900 kg;

- ✓ Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku. Kegiatan bersumber dana dari APBD Provinsi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan transfer Pupuk NPK Non Chlor/Rendah Chlor sebanyak 1.200 kg dan Pupuk KNO3 sebanyak 600 kg;.

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Hasil, Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bantuan kendaraan roda tiga untuk komoditas tembakau sebanyak 9 unit yang dibagikan ke petani di Kecamatan Selo , Ampel , Cepogo , Musuk . Selain sarana angkut, juga diberikan mesin perajang tembakau sebanyak 10 unit untuk Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Juwangi, keranjang panen sebanyak 550 buah;

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada :

  - ✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan budidaya tembakau, Pupuk KNO3 sebanyak 12.000 kg, Pupuk NPK sebanyak 35.900 kg. Hand Sprayer 54 unit Bantuan diberikan ke petani tembakau di Kecamatan Ampel, Juwangi, Cepogo, Sawit, Musuk, Selo, Teras;

  - ✓ Kegiatan Fasilitasi Pengggunaan dan Pengelolaan Alat Mesin Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan alat mesin pertanian guna menunjang budidaya tembakau diantaranya cultivator sebanyak 12 unit untuk petani tembakau di Kec. Mojosongo, Teras, Musuk, Cepogo, Ampel dan Selo. Handsprayer sebanyak 24 diperuntukan di Kecamatan Banyudono, Ampel, Selo dan Cepogo.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

13) Tebu

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena berkurangnya areal pertanaman tebu serta usia ratoon yang sudah cukup tua sehingga produksinya menurun.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

   - Berkurangnya lahan pertanaman tebu, beralih komoditas ke tanaman padi dan jagung, juga pengurangan lahan dikarenakan terkena pembangunan jalan tol;

   - Usia ratoon idealnya maksimal empat tahun, kondisi di lapang sebagian ratoon sudah berusia lebih dari lima tahun sehingga sudah cukup tua dan produksinya menurun;

   - Pabrik gula hanya mampu membeli gula kristal seharga Rp.9.700,-/kg, sedangkan harga di pasaran umumnya lebih tinggi, rendahnya harga jual menyebkan turunnya minat petani dalam menanam tebu.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian bantuan pupuk guna meningkatkan produksi tebu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan pemberian bantuan pupuk guna meningkatkan produksi tebu, serta dari sisi anggaran tidak ada efesiensi karena tidak ada program dan kegiatan yang secara langsung dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator ini;

c. Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi Dinas Pertanian memberikan bantuan pupuk guna meningkatkan produksi tebu. Kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

14) Lada

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena terdapat serangan OPT pada tanaman lada sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mati.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Banyak tanaman lada yang terserang OPT, utamanya penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh cendawan *Phytophthora capsici* yang mengakibatkan tanaman mati. Selain itu juga terdapat penyakit layu kuning yang disebabkan oleh serangan *nematoda (Radopholus similis dan Meloidogyne incognita)* dan jamur parasit *(Fusarium oxysporum*), serta serangan hama penghisap bunga *(Diconocoris hewetti)* dan hama penghisap buah *(Dasynus piperis);*
- Bantuan bibit tanaman lada yang disalurkan belum produksi. Tanaman ada dapat mulai produksi pada umur 2 tahun;
- Kondisi lahan pertanaman lada yang kurang sanitasi, sehingga menjadi tenpat perkembangbiakan OPT.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Memberikan bantuan bibit lada kepada petani;
- Bantuan perawatan calon pohon induk lada melalui pemberian bantuan pembelian air, Pupuk Organik, Pupuk NPK, hand sprayer serta sarana penunjang kebun perbanyakan bibit lada.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

- Memberikan bantuan bibit lada kepada petani;
- Bantuan perawatan calon pohon induk lada;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,94% dari anggaran sebesar Rp. 341.960.000,00 digunakan sebesar Rp. 335.324.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan:

✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit lada sebanyak 8.000 batang ke petani lada di Kecamatan Musuk, Ampel dan Cepogo;

- ✓ Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Perbenihan Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan bantuan perawatan calon pohon induk berupa pembelian air sebanyak 10 kali, pemberian pupuk organik sebanyak 2.000 kg, NPK sebanyak 4.200 kg, gerobag dorong/angkong 2 unit, serta bantuan pada kebun perbanyakan berupa *polybag* sebanyak 50 kg, dan bantuan bibit lada sebanyak 8.000 batang. Bantuan diberikan ke petani lada di Kec. Musuk. Ampel, Cepogo, Tamansari.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

15) Atsiri

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena tersedianya bahan baku pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri yang diproduksi di Kabupaten Boyolali diperoleh dari beberapa jenis bahan baku diantaranya daun nilam, daun cengkeh, bunga kenanga, bunga kantil, daun adas, dan biji wijen.

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terdapat serangan OPT pada tanaman cengkeh yang merupakan salah satu bahan baku minyak atsiri. Selain itu tanaman cengkeh yang sudah tua mengakibatkan berkurangnya daun cengkeh yang dihasilkan.

   Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

   - Pembinaan kepada petani untuk melakukan pemeliharaan tanaman utamanya tanaman nilam dan tanaman cengkeh sehingga dapat menyediakan bahan baku secara berkelanjutan.
   - Bantuan bibit tanaman cengkeh dan tanaman nilam sebagai sumber bahan baku minyak atsiri.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

   - Memberkan pembinaan kepada petani untuk melakukan pemeliharaan tanaman utamanya tanaman nilam dan tanaman cengkeh;
   - Memberikan bantuan sarana pengangkut berupa kendaraan roda tiga untuk mengangkut hasil tanaman cengkeh;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yag benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,52% dari anggaran sebesar Rp. 731.938.000,00 digunakan sebesar Rp. 720.822.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan:

   - ✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit cengkeh sebanyak 6.000 batang guna peremajaan tanaman yang sudah tua, dibagikan ke Kec. Karanggede, Musuk, dan Ampel;
   - ✓ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian bibit cengkeh sebanyak 10.750 batang guna peremajaan tanaman yang sudah tua, dibagikan ke Kec. Karanggede, Musuk, dan Ampel;

- ✓ Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian obat-obatan dan pestisida, *handsprayer* untuk petani cengkeh di Kecamatan Musuk sebanyak 20 unit, *power sprayer* untuk petani cengkeh sebanyak 8 unit.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja.

Berikut grafik produksi tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, lada, dan Atsiri) dari tahun 2016-2019:



	Cengkeh	Kopi	Kelapa	Tembakau	Tebu	Lada	Atsiri
TAHUN 2016	411.974	247.172	5726.23	4102.17	213315.	18.8900	6.16500
TAHUN 2017	0	247.57	3,279.38	3,867	20,690.6	19.79	10.301
TAHUN 2018	583.44	368.65	2,781.7	4,718.4	20,380.	12.80	6.26
TAHUN 2019	547.70	370.62	2,851.7	7,404.5	17,157.	12.90	5.74

Gambar 3.50 Grafik produksi tanaman perkebunan dari tahun 2016-2019

Selain pencapaian kinerja di atas, Kabupaten Boyolali juga terdapat inovasi kinerja atau prestasi di bidang pertanian yaitu:

a. Neraca ketersedian dan kebutuhan pangan terutama komoditas padi (beras) di Kabupaten Boyolali tahun 2017 surplus 59.493,53 Ton Beras; tahun 2018 tercapai surplus beras sebesar 60.399,03 Ton; dan tahun 2019 surplus sebesar 63.807,16 Ton;

b. Perbup No. 10 tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keringanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan berkelnajutan di Kabupaten Boyolali berupa bantuan keringanan PBB 90% dan lahan irigasi teknis dengan kepemilikan ≤ 5.000 m2;

c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosongo sebagai Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kategori Balai Penyuluhan Kecamatan berprestasi;

d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosongo sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan berprestasi Tingkat Nasional;

e. Tahun 2019 Dinas Pertanian membangun Aplikasi Asset dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Asset;

f. Pemasaran Padi Organik Tahun 2018. Penjualan beras organik ke daerah Jakarta, Tangeang, Bekasi dan Jogja sebanyak 15 ton/bulan. Beras organik yang dipasarkan pada pasar dalam negeri dengan jenis Pandan Wangi Putih sebanyak 4 Ton/bulan; Pandan Wangi Coklat sebanyak 3 Ton/bulan; Beras Merah sebanyak 6 Ton/bulan; Bderas hitam sebanyak 2 Ton/bulan. Beras organik yang dijual di dalam negeri umumnya dijual di pasar modern, dengan kemasan 1 kg/pack, dengan harga Rp 20.000-/kg.

16) Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena keberhasilan penumbuhan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) sebanyak 5 kelompok sehingga secara keseluruhan sudah ada 60 kelompok LPMD di Kabupaten Boyolali (23,22 dari jumlah desa/ kelurahan se Kabupaten Boyolali). Adapun kelompok penumbuhan LPMD pada tahun 2019 yaitu:

- LPMD Darmo Tani Desa Pager Jurang Kecamatan Musuk;
- LPMD Sumber Makmur Desa Kadipaten Kecamatan Andong;
- LPMD Desa Asri Desa Mojo Kecamatan Andong;
- LPMD Ngudi Rahayu Desa Krobokan Kecamatan Juwangi;
- LPMD Amrih Tentrem Desa Sempulur Kecamatan Karanggede.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Masih kurangnya kemampuan SDM dan anggota kelompok dalam hal administrasi dan pelaporan, serta masih kurangnya fasilitas gabah untuk stimulan cadangan pangan;
- Masih kurangnya kemampuan kelompok dalam mengembangkan ekonomi produktif;
- Banyaknya pengurus dari generasi tua

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Memberikan fasilitas, pembinaan dan pengembangan kelembagaan lumbung pangan (LPMD dan PUPM);
- Mendorong kelompok untuk melakukan revitaslisasi pengurus;
- Pemberian stimulan gabah untuk disimpan dipinjamkan serta pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Melibatkan bidang distribusi, cadangan, dan harga pangan dan juga melibatkan kelembagaan cadangan pangan yang ada di masyarakat;
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi vertikal dalam pembinaan dan pendampingan kelembagaan lumbung pangan masyarakat;
- Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.093.000,00 (0,66%) dari total anggaran Rp. 929.600.000,00 dapat terealisasi Rp. 923.507.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

- Pengembangan cadangan pangan daerah dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu penumbuhan kelembagaan LPMD baru sebanyak 5 kelompok, serrta pemberian stimulan gabah dan pelatihan anggota kelompok;
- Pengembangan lumbung pangan desa, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu fasilitas pembangunan gudang cadangan pangan untuk kelompok LPMD, yaitu LMPD Tani Mulyo Desa Sangge Kecamatan Klego untuk meningkatkan kualitas gabah yang disimpan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perbesaran dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok LPMD, LPMD dan PUPM agar bisa lestari dan berkembang.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan sudah menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil memenuhi target kinerja.

17) Presentase peningkatan Cadangan Pangan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena tercapainya surplus ketersediaan beras di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 sebesar 54.880 ton, sehingga cadangan pangan di Kabupaten Boyolali sebesar 2.553 ton per hari (160%).

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terjadinya tidak tercapainya produksi beras, karena kegagalan panen di beberapa tempat akibat bencana kekeringan yang mempengaruhi pada produksi dan produktivitas padi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Merekomendasikan kepada instansi terkait untuk meningkatkan produksi pangan dan penanggulangan permasalahan yang ada melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
- Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan yang ada, dan mengelola distribusi pangan secara rapi dan terpantau.

Kabupaten Boyolali mampu surplus 7 dari 10 komoditas strategis mampu swasembada pangan yakni padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur ayam.

Berikut tabel neraca neraca ketersedian dan kebutuhan pangan tahun 2016 dan 2019 Kabupaten Boyolali

Tabel 3.24 Neraca Ketersedian dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016 dan 2019 Kabupaten Boyolali

No	Tahun	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Surplus/ Minus (Ton)	Keterangan
1.	2019	Padi	48.317	275.771	1.054.362	152.914	98.034	54.880	Susut GKP 11,62%
2.	2018	Padi (GKG)	51.891	87.524	1.026.034	254.114	95.626	158.488	Susut GKP 11,62%
		Beras		159.431	1.026.034	159.431	95.626	63.805	Konversi GKG ke beras 62,74 Tk. Konsumsi beras 93,2 kg/kap/tahun Jumlah penduduk 2018 data dari Capil

No	Tahun	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Surplus/ Minus (Ton)	Keterangan
3.	2017	Padi (GKG)	52.876,60	275.059,00	963.690,0	243.097,14	92.417,87	150.679,27	Susut GKP (Hilang tercecer dll : 11,62%
		Beras		151.911,41	963.690,0	151.911,41	92.417,87	59.493,53	Konversi GKG ke Beras : 62,74%
4.	2016	Padi (GKG)	50.548,40	300.123,00	957.913,0	265.248,71	92.417,87	172.830,83	Tk. Konsumsi Beras : 95,90 kg/kap/th
		Beras		165.753,92	957.913,0	165.753,92	92.417,87	73.336,04	

Sumber Dinas Pertanian Kab.Boyolali Tahun 2019

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Melibatkan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan bidang distribusi, cadangan, dan harga pangan serta Dinas Pertanian terkait dengan produksi komoditas pangan terutama beras;
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan;
- Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.620.260,00 (13,28%) dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 69.379.740,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

- Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu penghitungan ketersediaan pangan (Neraca Bahan Makanan) di Kabupaten Boyolali, berdasarkan data produksi dan data kebutuhan pangan, sehingga diperoleh data surplus atau minus ketersediaan pangan.
- Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu rapat-rapat koordinasi anggota dewan ketahanan pangan Kabupaten Boyolali serta stakeholder dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Selain itu juga tersusunnya dokumen Naskah Akademis Ranperda Ketahanan Pangan dan Gizi. Termasuk didalmnya kegiatan ini adalah penyelenggaraan hari pangan sedunia dan gelar pangan lokal.

Pelaksanaan program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

18) Skor Pola Pangan Harapan

a. Keberhasilan capaian kinerja Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019, disebabkan karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Konsumsi Pangan yang B2SA ditingkat keluarga jika diaplikasikan ke seluruh lapisan masyarakat akan meningkatkan kualitas pangan penduduk, secara umum terdapat peningkatan konsumsi pangan hewani seperti daging, telur, susu dan konsumsi sayur dan buah. 2 (dua) komoditas pangan tersebut mampu meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain:

- Melaksanakan sosialisasi pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- Peningkatan pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- Peningkatan teknologi pengolahan pangan lokal;
- Peningkatan intensitas kompetisi/lomba dalam hal konsumsi pangan bergizi beragam seimbang dan aman (B2SA) agar lebih dikenal masyarakat dan pentingnya pola makan yang sehat;
- Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi sayur dan buah.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Melakukan sosialisasi dan promosi tentang konsumsi pangan lokal melalui beberapa media (surat edaran, baliho, pameran, dll);
- Pelatihan pengolahan pangan lokal;
- Membentuk tim survey dan analisis Pola Pangan Harapan, serta pelatihan yang memadai;
- Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.665.000,00 (0,84%) dari anggaran Rp. 552.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 547.835.000,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan), dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, yaitu survey konsumsi pangan masyarakat untuk mengetahui skor PPH (Pola Pangan Harapan);
- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, yaitu Pelatihan pembuatan olahan pangan berbasis pangan lokal yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), Pelaku Usaha Pangan LOkal;
- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, yaitu pemberian bantuan hibah berupa benih golden mama/labu jepang, benih tomat, benih cabe merah, benih terong dan batuan polybag;
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan, yaitu pemberian hibah berupa bantuan benih sayur, bahan bangunan dan polybag dan bantuan bibit buah berupa : Pisang, Jambu dan Klengkeng;
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan, yaiitu melaksanakan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional, retail dan kantin sekolah dan fasiltasi peralatan keamanan pangan untuk gapoktan/kantin sekolah;

- Penyelenggaraan lomba dan pameran ketahanan pangan, yaitu lomba cipta menu bergizi beragam seimbang dan aman (B2SA) tingkat Provinsi, lomba cipta menu bergizi beragam seimbang dan aman (B2SA) tingkat Kabupaten, penyelenggaraan HPS Tingkat ProVinsi, penyelenggaraan Hari Pangan Se Dunia Tingkat Kabupaten, dan lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah.

Target belum tercapai namun secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

17. SASARAN 17 : Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional

Tabel 3.25 Pencapaian Kinerja Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Produksi ikan	ton	33.602	35.346	134,60	37.155	134,41	37.162	128,03	30.478	36.975	121,32	A	DISNAKKAN
Produksi hasil peternakan													DISNAKKAN
2 - Produksi daging	ton	8.460	11361	138,38	11.960	144,97	13.294	160,27	8.345	14.148	169,54	A	DISNAKKAN
3 - Produksi susu (kilo liter)	kilo liter	48.201	49000	104,75	49.129	104,58	49.540	104,90	47.526	49.717	104,61	A	DISNAKKAN
4 Populasi ternak	ekor	320.731	324623	104,63	332.064	106,39	338.312	107,70	316.181	357.517	113,07	A	DISNAKKAN
5 - Sapi potong	ekor	90.000	95.651	109,94	96.066	109,79	99.311	112,79	88.650	106.599	120,25	A	DISNAKKAN
6 - Sapi perah	ekor	89.310	89.844	103,99	92.619	106,57	92.856	106,19	88.010	94.088	106,91	A	DISNAKKAN
7 - Kambing dan domba	ekor	141.421	139.128	101,65	143.379	104,11	146.145	105,43	139.521	156.830	112,41	A	DISNAKKAN
Capaian				**113,99**		**115,83**		**117,90**			**121,16**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 121,16% (kategori baik) terdiri dari 7 (tujuh) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 17 (tujuh belas) per indikator:

1) Produksi ikan

a. Keberhasilan capaian target kinerja ini dipengaruhi oleh:

- Produksi ikan kelompok pembudidaya yang baru, di Kecamatan Andong, Mojosongo, Nogosari, Ngemplak dan Sambi. Penambahan kelompok pembudidaya ikan yang baru ini menyumbang 15-20% total produksi ikan;
- Perluasan usaha budidaya ikan untuk kelompok pembudidaya ikan yang lama, seperti perluasan kelompok pembudidaya ikan di kawasan kampung lele Kecamatan Sawit dan Teras. Selain perluasan lahan usaha, sistem kerjasama dan menejemen usaha kelompok pembudidaya juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas ikan tersebut. Menejemen usaha dan perluasan lahan usaha ini menyumbang 80-85% total produksi ikan;
- Peran serta Petugas Lapangan Disnakkan dalam rangka kegiatan rutin pembinaan kelompok pembudidaya ikan;

- Penguatan usaha budidaya ikan yang bersumber dari APBN KKP RI tahun 2019 yang diwujudkan dalam bentuk sarpras budidaya ikan, diantaranya bioflok di Pondok Pesantren dan kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Ngemplak dan Sambi. Penguatan usaha tersebut tahun 2019 juga menyasar pada Bantuan Hatchery di kelompok UPR di Teras dan Banyudono;
- Peningkatan sarpras UPT BBI Boyolali tahun 2019 berupa rehabilitasi gedung dan sarpras produksi serta pemuliaan genetis induk ikan nila dan hias;
- Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Boyolali yang meningkat dari tahun 2018 sebesar 20,21 kg/kapita/tahun menjadi 20,28 kg/kapita/tahun di tahun 2019 atau meningkat 0,07 kg/kapita/tahun.

Selain produksi perikanan, kabupaten Boyolali juga melakukan produk olahan ikan dengan realisasi 150 ton di tahun 2019. Realisasi tersebut dapat dicapai dikarenakan:

- Peningkatan produksi pengolahan ikan, untuk kelompok pengolahan ikan yang lama menyumbang produksi 90% total produksi. Kelompok pengolah ini yang lama ini berada di Kecamatan Sawit, Teras, Boyolali, Banyudono, Ampel dan kemusu;
- Adanya penambahan produksi dari kelompok pengolaha ikan yang baru tahun 2019 yang menyumbang produksi 10% total produksi, yaitu di Kecamatan Ampel sebanyak 1 kelompok dan Boyolali 2 kelompok;
- Pemberian peralatan pengolahan ikan untuk 2 kelompok di Kecamatan Ampel;
- Kegiatan Gemarikan yang menumbuhkan kecintaan masyarakat boyolali akan pentingnya mengkonsumsi ikan;
- Adanya kompetisi dan apresiasi berupa kegiatan lomba pengolahan ikan tahun 2019;
- Pembinaan rutin Disnakkan melalui petugas lapangan.

Kabupaten Boyolali ada icon lele, berupa Demplot Kampung Lele dengan produksi 34-40 ton per hari. Produksi tangkap diperoleh data dari penangkapan ikan menggunakan jaring dan pancing ikan, yang berlokasi di Waduk Kedung Ombo sebesar 4 ton per hari atau 1.460 ton tahun 2019, sedangkan waduk cengklik, bade dan sungai sebesar 1-2 ton per hari atau 730 ton tahun 2019. Untuk produksi budidaya didukung dengan kegiatan budidaya pembesaran ikan, baik itu melalui media kolam yang berlokasi 19 Kecamatan yang didominasi oleh kecamatan sawit sebesar 11.544 ton, kec, teras 9.047 ton, Kec. Kemusu 5.361 ton, Kec. Ngemplak 3.005 ton dan sisanya untuk budidaya pembesaran (kolam) menyeluruh di 14 Kecamatan sebesar 1.235 ton, serta untuk Keramba jaring apung (KJA) yang berlokasi di Kec. Kemusu dan ngemplak sebesar 5.888 ton.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

- Memaksimalkan SDM Bidang Perikanan, Penyuluh dari KKP RI;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dari 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan terdapat efisiensi 0,96% dari total anggaran Rp. 1.725.430.000,00 digunakan Rp. 1.708.946.142,00.

c. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan pengembangan bibit unggul, pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan dan pembinaan dan pengembangan perikanan, dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya pencetakan benih ikan sebanyak 1.714.000 ekor, pembinaan kelompok perikanan/ nelayan sebnyak 3 kelompok, rehabilitasi BBI dan sarprasnya sebnyak 1 paket pekerjaan, pembinaan kelompok pengolah ikan sebanyak 3 kelompok, 1 paket kegiatan sosialisasi gemar ikan dan 1 paket kegiatan lomba masak tingkat kabupaten. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Produksi hasil peternakan

2) Produksi daging

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan pertama meningkatnya meningkatnya jumlah populasi sapi potong hasil kegiatan Upsus Siwab, yang mendukung pertambahan populasi sapi potong, sehingga jumlah pemotongan tidak mempengaruhi jumlah populasi sapi potong. Kedua pemotongan betina tidak produktif dan yang ketiga permintaan daging sapi yang meningkat diwilayah boyolali baik tahun 2016, 2017 dan 2018. Data dan informasi jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari UPT RPH Ampel maupun sumber tidak tercatat lainnya (rumah jagal). Keempat didukung pula dengan kegiatan pelatihan kualitas dan gizi pakan ternak, sehingga sebagai peternak mampu menyediakan pakan yang berkualitas dalam jumlah memadai dan berkelanjutan.

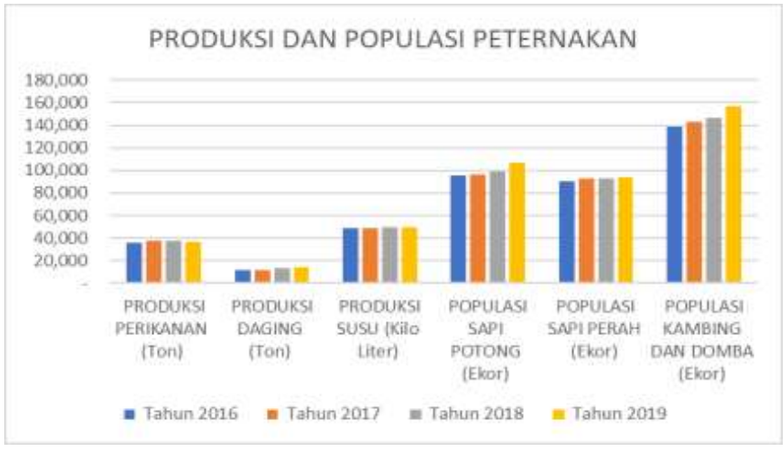
Produksi daging dan populasi sapi perah Boyolali terbesar di Jawa Tengah. Dengan produksi daging sebesar 14.148 ton dan populasi sapi perah sebesar 94.088 ekor pada tahun 2019.

3) Produksi susu (kilo liter)

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- Adanya jaminan kehidupan keseharian masyarakat peternak sapi perah karena harga jual susu yang cukup menguntungkan/ dapat disisihkan untuk kebutuhan lain (tabungan);
- Dominansi kebijakan pemerintah Kab. Boyolali akan fokus memulihkan icon Kab. Boyolali sebagai Kota Susu, dengan pengendalian penyakit ternak dan kegiatan Upsus Siwab/ IB yang bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran sapi perah;
- Teknik pemberian pakan yang berkualitas, pemilihan genetis ternak sapi perah, tata laksana/ tata usaha, umur, ukuran/ bobot tubuh ternak sapi perah dan periode laktasi;
- Faktor usaha/ pengembangan usaha yaitu adanya program asuransi usaha ternak sapi (AUTS).

Berikut grafik Produksi dan populasi peternakan dari tahun 2016 – 2019:



Gambar 3.51 Grafik produksi dan populasi peternakan dari tahun 2016 – 2019

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan:

   - Memaksimalkan SDM Bidang Usaha Peternakan, SDM Petugas Data, SDM UPT RPH/ Puskeswan;
   - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 8,39% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 147.502.400,00 di gunakan sebesar Rp. 135.133.064,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pengembangan angribisnis peternakan dan program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan, pembangunan sarpras hasil produksi peternakan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarpras pasar produksi peternakan. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan sebanyak 3 kegiatan, tersedianya 2 unit sarpras pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, terlaksananya sosialisasi produk yang ASUH sebanyak 10 kegiatan, 1 paket kegiatan hari susu nasional, 1 paket kegiatan fasilitasi usaha peternakan, terbangunnya 1 unit pengelolaan limbah UPT RPH Ampel, terbitnya 1 dokumen sertifikat halal UPT RPH Ampel dan terlayaninya pemotongan ternak di UPT RPH Ampel selama 12 bulan. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja

   Selain itu juga dilakukan:

   - Pengobatan ternak (ekor)

     Pengobatan ternak (ekor) tidak tercapai disebabkan karena kejadian penyakit hewan menular (PHM) di Kabupaten Boyolali. Adapun hambatan kegiatan ini, biasanya timbulnya kejenuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi ternaknya. Solusi akan kegagalan capaian kinerja ini, dapat dilakukan dengan menggerakkan Kepala Desa dan Perangkatnya untuk dapat memikirkan/ menganggarkan kegiatan di Bidang Peternakan khususnya kesehatan hewan ternak yang menggunakan dana desa. Selain itu juga bisa dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan aparat desa, BPD dan Tenaga Pendamping Desa.

- Pengobatan ternak (Sampel)

  Pengobatan ternak (smapel) berhasil mencapai target dikarenakan kejadian penyakit hewan menular (PHM) di Kabupaten Boyolali berkurang, dengan didukung kegiatan surveilans/ pengamatan penyakit secara rutin, vaksinasi dan pengobatan ternak, desinfeksi, KIE kepada masyarakat peternak dan petugas lapangan. Disamping itu, didukung juga dengan kegiatan one health (OH) yang melibatkan lintas sektor, diantaranya lingkup kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam pengendalian penyakit hewan menular (PHM).

- Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan pada pengobatan ternak (ekor dan sampel) dengan memaksimalkan SDM Bidang Keswan, SDM UPT Puskeswan dan peningkatan sarpras pendukung kegiatan pengendalian PHM, serta dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 0,65% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 462.055.000,00 di gunakan sebesar Rp. 459.053.566,00.

- Dilaksanakan dengan program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan kegiatan pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan pengawasan perdagangan ternak antar daerah. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan 300 sampel/ uji, tersusunnya 1 paket Naskah Akademik, terlaksananya kegiatan pengobatan/ vaksinasi di 19 Kecamatan, terlaksananya pengawasan perdagangan ternak selama 12 bulan dan penguatan kapasitas 15 orang tenaga pelayanan keswan.

4) Populasi ternak

   Indikator ini merupakan jumlah dari ketiga indikator dibawah ini.

5) Sapi potong

   Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan karena keberhasilan kegiatan IB/ Upsus Siwab yang telah menyumbang peningkatan populasi sebanyak 20% (17.949 ekor) dengan.

6) Sapi perah

   Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini karena keberhasilan kegiatan IB/ Upsus Siwab yang telah menyumbang peningkatan populasi sebanyak 7% (6.078 ekor).

7) Kambing dan domba

   Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan karena keberhasilan pembinaan kelompok/ masyarakat peternak kambing dan keberhasilan kegiatan IB petugas lapangan/ UPT Puskeswan, sehingga kegiatan tersebut telah menyumbang peningkatan populasi sebanyak 12% (10.685 ekor).

Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :

- Memaksimalkan SDM Peternakan, SDM Petugas Data, SDM UPT RPH/ Puskeswan, kelembagaan kelompok, komunikasi dengan stakeholder kelurahan/ desa;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 2,83% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 166.595.000,00 di gunakan sebesar Rp. 161.886.589,00.

b. Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan ternak melalui PKB/ ATR sebnyak 3.000 ekor, terbayarnya bantuan premi AUTS sebanyak 500 ekor ternak, 1 kegiatan sosialisasi AUTS, kegiatan pelatihan kualitas pakan ternak untuk 8 kelompok dan 12 bulan kegiatan Upsus Siwab/ Gangrep.

18. SASARAN 18 : Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.26 Pencapaian Kinerja Sasaran 18

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	%	77	39	100	40	100	57	100	65,00	84	129,23	A	DISKOMINFO
2 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	93	89	100	90	100	90	100	91	91	100	B	DISKOMINFO
3 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	52	40	85,11	48	100	49	100	50	50	100	B	DISKOMINFO
Capaian				**95,04**		**100,00**		**100,00**			**109,74**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 109,74% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (33,33%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (66,67%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 18 (delapan belas) per indikator:

1) Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena misi dan visi Bupati tentang Smart City sehingga dalam pelaksanaanya Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali telah mengembangkan aplikasi E-goverment terutama di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat mempermudah kinerja atau memberi pelayanan nyaman terhadap masyarakat.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

- Masih perlunya perangkat untuk mengengembangkan internet serta SDM yang belum memadai di bidang IT;
- Pembangunan gedung data center baru selesai di akhir tahun 2017.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan memanfaatkan perangkat yang ada serta mengadakan teknisi di bidang IT.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,4% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.963.530.000,00 di gunakan sebesar Rp. 8.857.906.944,00.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Pemasangan kabel FO di Kecamatan-Kecamatan, Optimalisasi data center, dan Pemasangan CCTV dan wifi di area publik;
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Tata kelola smart city, Layanan peta digital, Perencanaan integritas system informasi/aplikasi, Pembuatan Roadmap smart city, dan Bintek IT;
- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pengembangan aplikasi berbasis system informasi.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

a. Keberhasilan dalam capaian indikator ini disebabkan karena telah terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah peralatan dokumentasi yang masih kurang memadai serta kurangnya personil dalam mencapai target kinerja.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan pengoptimalan peralatan serta personil yang ada dalam mendokumenkan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Boyolali.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,55% dengan anggaran sebesar Rp. 251.970.000,00 di gunakan sebesar Rp. 248.067.919,00;

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dan Kegiatan Penyebarluasan hasil-hasil pembangunan dengan bentuk kegiatan adalah pendokumentasian kegiatan pemerintah serta masyarakat Boyolali. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif

a. Keberhasilan dalam capaian indikator ini disebabkan karena adanya penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- Masih kurangnya strategi pentebaran informasi;
- Jumlah personil masih kurang;
- Masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan perkembangan Teknologi terutama masyarakat yang tergolong tua.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Memanfaatkan media yang ada seperti media sosial dan media cetak;
- Memanfaatkan personil yang ada.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,5% dengan anggaran sebesar Rp. 2.821.340.000,00 di gunakan sebesar Rp. 2.779.420.948,00;

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Untuk mencapai indikator ini ada program untuk mempercepat pecapaian target yaitu Program kerjasama informasi dengan mass media dengan kegiatan:

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyiaran informasi melalui media radio Merapi FM;
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Publikasi kegiatan pemerintah daerah melaluin media elektronik;
- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dengan bentuk kegiatan Fasilitasi kegiatan TMMD, Fasilitasi kegiatan FK Mitra, dan Studi komparasi Pengelolaan Forum Komunikasi Media Tradisional.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Inovasi kinerja atau prestasi di bidang komunikasi dan informatika:

a. Pemkab Boyolali membangun gedung server (pusat penyimpanan data) yang pertama di Indonesia. Bangunan yang akan menjadi induk program ”Boyolali Smart City” ini, dibangun mirip dengan gedung Pentagon di Virginia Amerika Serikat;

b. Sampai tahap infratruktur mulai data center, jaringan, pengembangan sistem dan berbagai aplikasi yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Boyolali juga telah menerapkan pilkades elektronik;

c. Rekapitulasi RUP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2019:

Tabel 3.27 Rekapitulasi RUP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Penyedia		Swakelola		Total	
Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
70	11.707.000.000	2	31.000.000	72	11.738.000.000

Sumber Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019



Gambar 3.52 Gedung server (pusat penyimpanan data) Boyolali

19. SASARAN 19 : Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali.

Tabel 3.28 Pencapaian Kinerja Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)	KATEGORI	
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Kunjungan Wisatawan	orang	2.662.370	556.255	128,53	525.686	120	651.739	148	445.875	598.174	134,16	A	DISPORAPAR
2 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata	Rp (.000)	1.470.000	1.329.212	93,21	1.219.981	85,13	1.884.310	131	1.450.000	1.618.298	111,61	A	DISPORAPAR
3 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	%	100	99	108,68	92	100	94,00	100	96,00	96,00	100	B	DISDIKBUD
Capaian				**110,14**		**101,80**		**126,15**			**115,25**	**A**	

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 115,25% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (66,67%), dan 1 (satu) indikator kategori baik (33,33%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 19 (Sembilan belas) per indikator:

1) Kunjungan Wisatawan.

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan adanya event-event yang dilaksanakan di lokasi obyek wisata, perbaikan sarana dan prasarana Obyek Wisata, peningkatan manajemen pengelolaan obyek wisata. Dengan cataatn bahwa kunjungan yang diseburtkan adalah kujungan wisatawan yang melalui retribusi dan beberapa obyek wisata yang di kelola Pemerintah Daerah Kab. Boyolali. Dan untuk Obyek wisata non retribusi dan beberapa obyek wisata yang dikelola pihak swasta total kunjungan diperkirakan mencapai 910.505 orang.

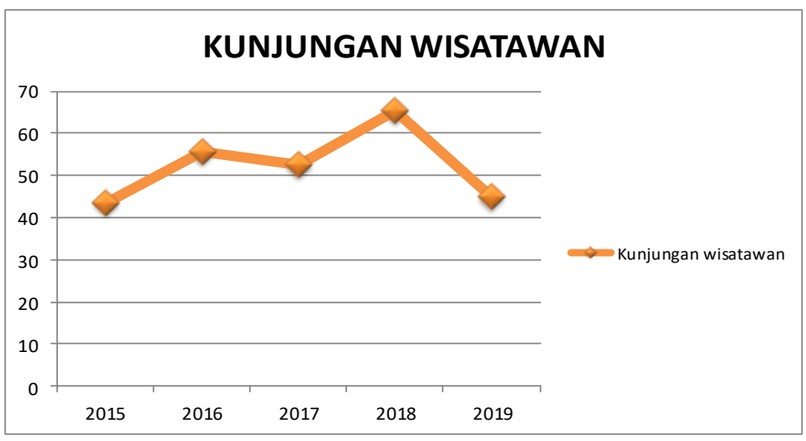
Kendala dan hambatannya antara lain :

- Belum adanya obyek wisata iconik yang bertaraf nasional selain merapi- merbabu;
- Aksesbilitas menuju ke Obyek Wisata yang masih terbatas;
- Kurangnya Tempat Parkir kendaraan di Obyek Wisata;
- Minimnya Papan Penunjuk arah menuju ke Obyek Wisata;
- Belum optimalnya pengemasan dan Periklanan untuk obyek wisata.

Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah:

- Peningkatan perawatan dan pemeliharaan obyek wisata;
- Penataan obyek Wisata;
- Pengembangan Obyek wisata;
- Menarik Investor;
- Koordinasi dengan DPU-ESDM;
- Kerjasama melalui Forum Komunikasi, Dinas Pariwisata se-Solo Raya, Java Promo maupun travel dialog.

Berikut grafik Pengunjung Wisatawan dari Tahun 2015-2019 :



Gambar 3.53 Grafik Pengunjung Wisatawan dari Tahun 2015-2019

2) Meningkatnya PAD bidang Pariwisata

Keberhasilan capaian target kinerja ini dikarenakan perbaikan sarana prasarana di beberapa daerah tujuan wisata dan adanya event-event yang dilaksanakan di daerah

tujuan wisata baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah. Angka Pad bidang Pariwisata yang terctatat di Disporapar merubakan hasil dari pendapatan retribusi yang berada di obyek wisata, belum termasuk pendapatan bidang usaha pariwisata yang dikelola oleh OPD pendapatan lain, sebagai contoh pajak usaha pariwisata dan parker-parkir di lokasi destinasi pariwisata non retribusi.

Kendala dan hambatannya antara lain:

- Aksesbilitas menuju ke daerah tujuan wisata masih terbatas;
- Pertumbuhan daerah tujuan wisata baik perorangan maupun desa namun manajemennya masih kurang dikelola dengan baik;
- Beberapa event yang lokasinya masih mengumpul/belum merata di DTW yang ada.

Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah:

- Peningkatan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana di daerah tujuan wisata;
- Penataan Daerah Tujuan Wisata;
- Pengembangan obyek wisata;
- Menarik investor;
- Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada pelaku DTW yang baru;
- Memecah lokasi event di beberapa tempat DTW;
- Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait.

Berikut perkembangan PAD bidang pariwisata dari tahun 2016-2019:



Gambar 3.54 Perkembangan PAD bidang pariwisata dari tahun 2016-2019

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas:

a. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan:
   - Kerjasama dengan stakeholder (desa, UPTD, masyarakat, Asita, Forum Komunikasi Solo Raya) untuk menginformasikan obyek wisata yang ada dengan sebaik-baiknya;
   - Melakukan kerjasama dengan pengembang DTW baik perorangan, desa maupun swasta;

- Melakukan kerjasama dengan stakeholders dalam melakukan promosi;
- Melakukan evisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar dapat meningkatkan capaian target;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 0,36% dengan anggaran sebesar Rp. 6.837.059.000,00 di gunakan sebesar Rp. 6.812.736.750,00;

b. Untuk melaksanakan kedua indikator di atas dilaksanakan dengan 3 (tiga) program yaitu:

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan :
  - ✓ Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Pembangunan gedung bungalow dan Pembuatan Lanscape selo;
  - ✓ Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Belanja sewa tempat-tempat wisata dan olahraga, dan Pemeliharaan obyek-obyek wisata;
  - ✓ Pengembangan Jenis dan paket wisata Unggulan, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Event-event kepariwisataan;
  - ✓ Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Survey potensi Obyek wisata;
  - ✓ Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Sosialisasi standarisasi obyek wisata, dan Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata.
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :
  - ✓ Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan Forum Pariwisata Solo Raya, dan Travel dialog;
  - ✓ Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan Promosi pariwisata (duta Wisata);
  - ✓ Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan Promosi pariwisata melalui : papan promosi, media promosi, road show, promosi di media sosial.
- Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan:
  - ✓ Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Website;
  - ✓ Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan Pelatihan pemandu wisata, alam, budaya dan buatan;

- ✓ Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan bentuk kegiatan adalah dengan melaksanakan Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Tingkat Kabupaten, Festival Desa Wisata, Jambore/ Apresiasi Pokdarwis, Sarana prasarana Homestay, Pemasyarakatan Sapta Pesona bagi Pokdarwis, Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Sedangkan inovasi kinerja atau prestasi yang telah dilakukan adalah:

a. Membangun Boyolali menjadi Kota kecil yang paling seksi di dunia;
b. Setelah Boyolali berhasil menata perkantoran pemerintah dalam satu kawasan dan membangun lima tempat ibadah dalam satu kompleks serta membangun Gedung Lembu Sora, Museum R. Hamong Wardoyo, Kebun Raya Indrokilo, DOM, Patung Arjuna Wijaya, pada tahun 2018 Kabupaten Boyolali juga membangun Sirkuit Gokart, Tugu Susu Sumpah, dan replika 7 (tujuh) keajaiban dunia (di simpang Srikanto dipasang Menara Pisa, Menara Eiffel, dan Patung Liberty. Sedangkan di Alun-Alun Lor dipasang replika Candi Borobudur, Masjid Taj Mahal, Spinx, dan, Piramida), di tahun 2019 Kabupaten Boyolali membangun Stadion Kebo Giro di Kecamatan Cepogo, Relokasi Rumah Sakit Simo, Simpang Lima Selo, Relokasi Pasar Pengging dan beberapa pasar lainnya, serta Relokasi terminal.



Gambar 3.55 Replika (tujuh) keajaiban dunia

c. Mengirim duta seni ke eropa (spanyol dan perancis);



Gambar 3.56 Pengiriman duta seni ke Eropa

d. Merealisasikan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga dan Pariwisata di Kabupaten Boyoalali pada Tahun 2019 sebesar Rp. 21.370.635.000,00.

Berikut tabel Rekapitulasi Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019:

Tabel 3.29 Rekapitulasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Boyolali dari Tahun 2016 - 2019

NO	TAHUN	KETERANGAN	PAGU ANGGARAN	HPS	HARGA KONTRAK
1	2016	Pembangunan Kawasan Olah Raga Poncobudoyo	4.931.950.000	4.931.923.000	4.874.714.000
2	2016	Pembangunan Gedung Arena Kesenian (Sendra Tari)	2.390.000.000	2.389.500.000	2.370.183.000
3	2016	Pembangunan Lapangan Basket di Eks. Gedung DPU & ESDM	1.210.685.000	1.073.210.000	1.062.500.000
4	2016	Pembangunan Sarana Olahraga dan Penataan Lingkungan Ngebong	853.750.000	853.650.000	844.317.000
5	2016	Penataan Sarana Prasarana Gedung Olah Raga Kabupaten Boyolali	750.000.000	724.990.000	721.333.000
		Tahun 2016 terdapat 5 paket Kegiatan Senilai	**10.136.385.000**	**9.973.273.000**	**9.873.047.000**
1	2017	Pembangunan Gedung Pertemuan Convention Hall Lanjutan Tahap II Kabupaten Boyolali	4.922.225.000	4.916.972.000	4.913.274.000
2	2017	Pembangunan Taman di Lingkungan Anuraga	992.575.000	990.907.000	962.827.000
3	2017	Pembangunan Gelanggang Atletik	1.422.600.000	1.422.464.000	1.416.680.000
4	2017	Pembangunan Sirkuit Go Kart	2.242.631.500	2.242.399.000	2.206.869.000
5	2017	Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	2.191.710.000	2.150.109.000	2.117.172.400
		Tahun 2017 terdapat 5 paket Kegiatan Senilai	**11.771.741.500**	**11.722.851.000**	**11.616.822.400**
1	2018	Pembangunan Stadion Paras	6.893.218.500	6.892.960.000	6.809.441.000
2	2018	Pembangunan Sarpras Gelanggang Atletik	1.372.683.000	1.371.812.000	1.364.980.000
3	2018	Gelanggang Atletik Pengadaan Sirkuit Gokart	2.424.800.000	2.424.472.000	2.393.000.000
		Tahun 2018 terdapat 3 paket Kegiatan Senilai	**10.690.701.500**	**10.689.244.000**	**10.567.421.000**
1	2019	Pembangunan sirkuit Gokart	1.914.400.000	1.914.400.000	1.899.453.000
2	2019	Pembangunan Gelanggang Atletik	1.914.400.000	1.914.400.000	1.894.484.000
3	2019	Pembangunan Fisik Tribun Stadion DISPORAPAR	3.437.700.000	3.437.700.000	3.410.923.000

NO	TAHUN	KETERANGAN	PAGU ANGGARAN	HPS	HARGA KONTRAK
4	2019	Pembangunan Fisik Lapangan Stadion DISPORAPAR	3.928.800.000	3.928.800.000	3.903.288.000
5	2019	Pembangunan Fisik Drainase Stadion DISPORAPAR	4.419.900.000	4.419.309.000	4.406.915.000
6	2019	Pembelian Tanah Stadion	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
7	2019	Penataan Amenitas Pariwisata Bungallow Selo	1.362.021.000	1.361.720.000	1.355.572.000
		Tahun 2019 terdapat 7 paket kegiatan senilai	**21.477.221.000**	**21.476.329.000**	**21.370.635.000**
		Jumlah total (Tahun 2016 s/d Tahun 2019)	**54.076.049.000**	**53.861.697.000**	**53.427.925.400**

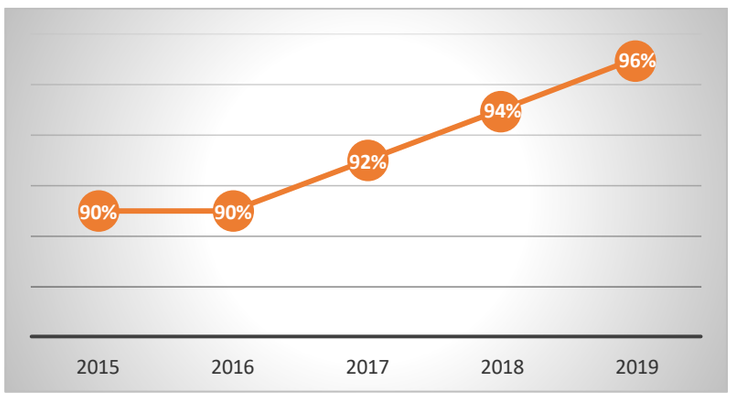
Sumber Disporapar Tahun 2019

3) Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan adanya pendataan benda situs cagar budaya dan tersosialisasinya UU RI Nomor : 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya kepada desa dan kecamatan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah adanya laporan ditemukannya benda- benda yang dianggap sebagai benda cagar budaya namun belum terdaftar atau belum diketahui kepastiannya, apakah benda tersebut termasuk benda cagar budaya atau bukan. Upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang ada di Boyolali maupun di Yogyakarta.

Perkembangan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan Tahun 2015 sd 2019 :



Gambar 3.57 Perkembangan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain dengan:

- Bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pelestarian benda cagar budaya;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sebesar Rp. 719.435.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 660.865.850,00 sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,14%.

c. Untuk mempercepat pencapaian Indikator ini ada program yang dilaksanakan yaitu program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Dengan kegiatan:

- Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dimana cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan Museum Hamong Wardoyo dan benda cagar budaya, dalam upaya pemeliharaan/perawatan, perlindungan/pengamanan, pemanfaatan, pengembangan, mempertahankan dan konservasi (pelestarian) peninggalan sejarah berupa benda cagar budaya.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain kinerja tersebut di atas terdapat inovasi kinerja atau prestasi di bidang kebudayaan yaitu:

a. Terciptanya kreasi seni/tari baru, seperti: Tari Kolo Krido, Tari Sekar Merapi, Tari Gotong Royong, Tari Kusuma Bangsa, Tari Boyolali Tani, Tari Ikon Boyolali. Kreasi tari-tari tersebut telah ditampilkan di luar negeri (Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, spanyol dan perancis) dalam event pengiriman Duta Seni Kabupaten Boyolali;

b. Duta Seni Boyolali 2019 diumumkan sebagai juara pertama kategori Folk Dance usia 16-19 tahun. Para pelajar berprestasi itu berhasil mengalahkan peserta-peserta lain yang berasal dari 10 negara, di antaranya Rusia, Ukraina, Iran, dan Meksiko. Duta Seni Boyolali yang terdiri dari 18 pelajar SMA berprestasi Boyolali itu menarikan dua tarian, yakni Topeng Ireng dan Soreng. Penampilan mereka berhasil memukau para juri yang merupakan maestro-maestro tari internasional;

c. Mendorong munculnya kreasi wayang baru : Wayang Religi (grup kesenian/kebudayaan di Kecamatan Andong).



Gambar 3.58 Tari Topeng Ireng Khas Boyolali

3.2 Penilaian Kinerja

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Lebih dari 100 % = Sangat Baik
2. 76% sampai 100% = Baik
3. 56% sampai 75 % = Cukup
4. Kurang dari 55 % = Kurang

Berikut penilaian capaian kinerja per indikator kinerja, per sasaran, dan per organisasi pelaksana (Organisasi Perangkat Daerah/ OPD) :

A. Penilaian Capaian Indikator Kinerja

Analisis data pengukuran capaian kinerja pada Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dari 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator kinerja, diketahui :

1. Seratus tujuh (107) indikator kinerja (58,47%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Enam puluh empat (64) indikator kinerja (34,97%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Enam (6) indikator kinerja (3,28%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);
4. Lima (5) indikator kinerja (2,73%) dengan capaian kurang dari 55% (kategori Kurang);
5. Satu (1) Indikator Kinerja (0,55%) yang tidak memasang target di tahun 2019 ini.

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 secara keseluruhan 138,96% (kategori sangat baik).

Beberapa target kinerja yang capaian kinerjanya sangat baik dan capaiannya diatas 150% yang perlu dijelaskan antara lain :

Tabel 3.30 Capaian Kinerja yang Sangat Baik di atas 150%

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah investor	Investor	983	2.223	226,14	dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor diatas berpengaruh terhadap faktor peningkatan nilai realisasi investasi.Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi diantaranya dengan menyelenggarakan pameran investasi, mengembangkan potensi unggulan daerah,melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Cakupan pengelolaan sampah mandiri	desa/kel	2	3	150	karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah serta perubahan paradigma pengelolaan sampah yang semula sampah dipandang sebelah mata sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi barang yang dapat dimanfaatkan bahkan dapat bernilai ekonomis, terutama sampah non organik, selain itu adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) sub bidang Lingkungan Hidup yang dapat menambah jumlah bangunan bank sampahyang dibangun
3	Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	72	202,96	281,89	karena adanya bantuan buku dari Badan Arpus Propinsi Jawa Tengah dan anggaran APBD II serta bantuan dari masyarakat yang peduli dengan pendidikan
4	Cakupan pembinaan perpustakaan desa	%	10,55	100	947,87	karena adanya kerja keras petugas dan mulai tumbuh kesadaran dari pejabat/pengelola perpustakaan desa akan manfaat keberadaan perpustakaan
5	Prosentase Peningkatan PAD	%	10,45	16,53	158,20	Dikarenakan meningkatnya kesadaran wajib pajak, bertambahnya objek pajak baru, dan lebih mengintensipkan pemungutan/penagihan kepada wajib pajak
6	Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	temuan/ rekomendasi	27	11	159,26	Telah dilakukan pendampingan kepada OPD dalam melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Audit oleh BPK baik tahun yang bersangkutan maupun tahun - tahun sebelumnya
7	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	dokuman	5	11	220	karena telah dilakukan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan Bagian Organisasi, serta dilakukan faslitasi dengan Bagian Hukum dan dengan Biro Organisasi serta Biro Hukum di Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya indikator ini kurang relevan, karena penyusunan kebijakan tidak bisa ditarget dikarenakan kebijakan itu bisa dari paraturan dari pusat atau sesuai kebutuhan
8	Prosentase sanggahan lelang	%	4,80	2,33	151,46	karena komitmen pelayanan di unit kerja pengadaan barang/jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga menghasilkan penyedia barang/jasa yang handal
9	Cakupan penanganan PMKS	%	35,77	89,70	250,77	telah dilakukan penanganan terhadap PMKS melalui pembinaan, penyuluhan sosial, pelatihan dan pemberian bantuan sosial kepada PMKS seperti, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin dan PMKS yang lainnya serta penanganan korban bencana
10	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	orang	240	1.092	455	Karena tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) Boyolali yang didukung dengan instruktur ahli serta peralatan pendukung pelatihan yang memadai, termasuk diantaranya Mobile Training Unit (MTU) yang memungkinkan pelatihan kerja dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat
11	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	1,65	39,77	2410,30	karena adanya sinergitas dari semua pihak baik oleh pemerintahan desa,pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dan dimana semua berperan dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh
12	Desa layak anak	desa	28	67	239,29	karena komitmen para pimpinan wilayah di Kecamatan dengan melakukan Deklarasi Kecamatan dan Desa layak anak

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
13	Angka kematian DBD (CFR)	% dari jumlah penderita	1,70	0,23	186,47	karena meningkatnya kemampuan SDM dalam mendiagnosa dan tatalaksana kasus DBD. Meningkatnya jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten Boyolali serta Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera ke Fasyankes
14	Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	%	30	77	256,67	Karena adanya kerjasama dengan LSM yang bergerak dibidang HIV AIDS seperti: SPEKHAM, KPA dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), dan adanya Tim di 20 Puskesmas, Klinik serta 3 Rumah Sakit Pemerintah yang berkolaborasi dengan Tim Dinkes untuk melaksanakan skrining pada kelompok risiko HIV AIDS
15	Puskesmas Terakreditasi	puskesmas	6	10	166,67	komitmen yang tinggi dari Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung dengan pembimbingan dari Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
16	Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	%	15	25	166,67	karena kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dan yang lebih diharapkan adalah kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan bukan merupakan kunjungan sakit namun kunjungan sehat, sejalan dengan perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat
17	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	60	100	166,67	karena semua Puskesmas telah memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia untuk melaksanakan sistem informasi Puskesmas secara online
18	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0,26	0,11	157,69	telah dijalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta
19	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	unit	85	175	205,88	karena adanya alokasi anggaran program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
20	Ekspor bersih perdagangan	US $	150.491	370.193,74	245,99	disebabkan adanya pelaksanaan pencarian data dengan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan eksportir dan juga melalui tagihan surat dan media sosial lain untuk memperoleh data ekspor impor dari perusahaan
	Produksi tanaman hortikultura utama					
21	- Pepaya	kuintal	123.636	280.286	226,70	karena masih tingginya animo petani untuk menanam tanaman pepaya, peningkatan produksi pepaya yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan karena musim yang mendukung sehingga panen melimpah
22	- Cabe	kuintal	113.333	634.528	559,88	karena banyaknya petani yang antusias untuk menanam tanaman cabe karena kebutuhan pasar yang terus meningkat dan harga jual cabe di Kabupaten Boyolali relatif stabil
23	- Bawang Merah	kuintal	30.909	183.493	593,66	karena terdapat pengembangan tanaman bawang merah baik bersumber dana dari APBN-TP maupun APBD
24	- Jahe	kuintal	10.561	23.782	225,19	karena masih tingginya permintaan pasar akan komoditas jahe baik daam bentuk rimpang segar, simplisia, maupun bentuk bubuk
25	- Kencur	kuintal	17.000	26.606	156,51	karena masih tingginya permintaan kencur dalam bentuk segar maupun simplisia san bubuk

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah produksi tanaman perkebunan :					
26	- Cengkeh	ton	347,29	547,70	157,71	telah dilakukan pemberian bantuan bibit, sarana angkut, dan pestisida kepada petani
27	- Kopi	ton	138,92	370,62	266,79	karena tingginya permintaan kopi menyebabkan animo petani untuk menanam kopi semakin tinggi
28	- Tembakau	ton	4.747,42	7.404,51	155,97	karena banyaknya bantuan untuk komoditas tembakau, baik yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Bantuan berupa sarana penunjang budidaya serta bantuan pasca panen tembakau
29	Presentase peningkatan Cadangan Pangan	%	97	160	164,95	tercapainya surplus ketersediaan beras di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 sebesar 54.880 ton, sehingga cadangan pangan di Kabupaten Boyolali sebesar 2.553 ton per hari
	Produksi hasil peternakan					
30	- Produksi daging	ton	8.345	14.148	169,54	dikarenakan pertama meningkatnya meningkatnya jumlah populasi sapi potong hasil kegiatan Upsus Siwab, yang mendukung pertambahan populasi sapi potong, sehingga jumlah pemotongan tidak mempengaruhi jumlah populasi sapi potong

Sumber : Analisis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Boyolali, 2020

Beberapa target kinerja yang capaian kinerjanya kurang dan capaiannya di bawah 55% yang perlu dijelaskan antara lain :

Tabel 3.31 Capaian Kinerja yang Masih Kurang di bawah 55%

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang pembangunan jalan baru	m	5.000	2.744	54,88	karena alokasi dana untuk pembangunan jalan baru yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi harga yang berlaku di pasaran
2	Drainase dalam kondisi baik	m	7.240	3.315	45,79	karena kurangnya dukungan dana sehingga untuk pembangunan drainase hanya dapat dibangun sepanjang 3.315 m
3	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	35	15	42,86	disebabkan pada awal perencanaan, mengalokasikan pendanaan dari APBN (DAK Bid LH), namun adanya keterbatasan menu di rincian usulan DAK, yang mana IPAL Biogas tidak termasuk dalam skala prioritas dari dana DAK, sehingga anggaran pembangunan IPAL Biogas hanya bersumber dari APBD Kab. Boyolali, yang berdampak pada berkurangnya jumlah biogas ternak yang dibangun pada tahun 2019
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,037	0,002	5,41	disebabkan perbandingan pertambahan jumlah panjang jalan yang dikelola pemerintah daerah dengan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan, dan pembangunan jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali yang masih belum optimal

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah produksi tanaman perkebunan :					
5	- Tebu	ton	32.876,55	17.157	52,19	karena berkurangnya areal pertanaman tebu serta usia ratoon yang sudah cukup tua sehingga produksinya menurun

Sumber : Analisis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Boyolali, 2020

B. Penilaian Capaian Organisasi Pelaksana

Analisis data pengukuran kinerja, dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan tingkat kabupaten diketahui :

Tabel 3.32 Prosentase Capaian Kinerja per OPD

No.	Nama OPD	Prosentase Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	126,20	A
2	Sekretariat DPRD	100,00	B
3	Inspektorat Daerah	119,75	A
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105,79	A
5	Dinas Kesehatan	116,46	A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,88	B
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1255,25	A
8	Dinas Sosial	250,77	A
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	126,59	A
10	Dinas Ketahanan Pangan	121,69	A
11	Dinas Lingkungan Hidup	100,31	A
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86	B
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,60	B
14	Dinas Perhubungan	68,33	C
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	104,87	A
16	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	171,73	A
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	148,57	A
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	133,60	A
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	309,76	A
20	Dinas Pertanian	193,28	A
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	121,16	A
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	141,63	A
23	Satuan Polisi Pamong Praja	112,19	B
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	104,67	A
25	Badan Keuangan Daerah	129,10	A

No.	Nama OPD	Prosentase Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	98,68	B
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,24	B
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	108,05	B
29	Rumah Sakit Pandan Arang	92,65	B
30	Rumah Sakit Simo	100,87	A
31	Rumah Sakit Waras Wiris	92,10	B

Sumber : Analisis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Boyolali, 2020

Analisis data pengukuran kinerja pada Tabel 3.32 di atas, dari 31 (tiga puluh satu) OPD diketahui:

1. Tujuh belas (20) OPD (64,52%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
2. Tiga belas (10) OPD (32,26%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
3. Satu (1) OPD (3,22%) dengan capaian 55% sampai 75% (kategori cukup);

Prosentase capaian sasaran oleh OPD secara keseluruhan 125,28% (kategori sangat baik).

C. Penghargaan

Penghargaan merupakan penilaian kinerja lain Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tidak termasuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2019. Beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 antara lain:

a. Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini WTP;

b. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boyolali atas Prestasinya sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019;

c. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019 (Nomor 1 Nasional dengan Skor 97 dari Skor maksimal 100);

d. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019;

e. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik" Tahun 2019;

f. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik" Tahun 2019;

g. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Boyolali atas prestasi sebagai Kabupaten/ Kota Paling Aktif Melakukan Verifikasi dan Validasi Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;

h. Piagam Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2019 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali kategori PRATAMA;

i. Piagam Penghargaan dari Kepala Kenwil DJPb Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Boyolali sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Pertama dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 se Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

j. Piagam Penghargaan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan Penghargaan ADIBRATA PARAMESTI kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten/ Kota Terupdate 10 dalam Membangun Pusat Inovasi Kepemimpinan melalui Eproper (Inovasi Center) 2017 – 2019;

k. Penghargaan Natamukti Award dari International Council for Small Business (ICSB) kepada Kabupaten Boyolali 7 Oktober 2019 karena mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Boyolali;

l. Penghargaan dari International Council for Small Business (ICSB), kepada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, kategori Policy Maker (Pembuat Kebijakan) yang mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Boyolali;

m. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Peringkat III Kategori Sumber Daya Manusia/ Human Capital Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

n. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019;

o. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Terbaik II untuk Kategori Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur pada Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2019.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 untuk belanja sebesar Rp. 2.468.421.561.000,00, dana yang terealisasi digunakan sebesar Rp. 2.381.601.864.739,00 atau 96,48%. Berikut perbandingan anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sampai dengan 2019:

Tabel 3.33 Perbandingan Anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s.d 2019

URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA	**2.207.164.867.000**	**2.057.281.803.197**	**2.291.888.106.000**	**2.148.446.103.500**	**2.327.157.536.000**	**2.172.049.704.009**	**2.468.421.561.000**	**2.381.601.864.739**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.435.413.802.000**	**1.351.533.307.622**	**1.366.701.756.000**	**1.293.979.707.754**	**1.335.071.944.000**	**1.270.091.702.399**	**1.358.103.022.000**	**1.336.037.460.407**
▪ Belanja Pegawai	1.060.167.821.000	990.782.325.624	939.974.418.000	879.658.459.901	925.867.147.000	876.421.273.040	913.499.441.000	897.931.292.050
▪ Belanja Hibah	26.336.715.000	23.365.711.000	35.209.287.000	31.007.099.990	42.094.665.000	34.486.830.000	**39.865.235.000**	**39.492.443.000**
▪ Belanja Bantuan Sosial	10.950.000.000	10.147.775.000	21.690.000.000	21.190.966.000	15.895.000.000	15.563.237.500	14.529.000.000	14.338.500.000
▪ Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	9.068.266.000	8.897.316.650	10.341.662.000	5.841.497.000	18.510.930.000	14.953.727.000	**15.051.567.000**	**11.021.120.500**
▪ Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	326.891.000.000	318.340.179.348	357.436.389.000	355.452.860.585	330.704.202.000	328.665.722.335	373.157.779.000	372.588.827.717
▪ Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	-	2.050.000.000	828.824.278	2.000.000.000	912.524	2.000.000.000	665.277.140
BELANJA LANGSUNG	**771.751.065.000**	**705.748.495.575**	**925.186.350.000**	**854.466.395.746**	**992.085.592.000**	**901.958.001.610**	**1.110.318.539.000**	**1.045.564.404.332**
▪ Belanja Pegawai	68.758.038.000	63.318.185.712	76.473.848.000	71.345.135.754	67.119.389.000	59.399.384.366	59.135.407.000	57.114.483.207
▪ Belanja Barang dan Jasa	306.891.555.000	268.514.703.481	404.740.231.000	362.973.311.432	403.620.741.000	350.619.103.801	496.165.179.000	457.856.077.605
▪ Belanja Modal	396.101.472.000	373.915.606.382	443.972.271.000	420.147.948.560	521.345.462.000	491.939.513.443	555.017.953.000	530.593.843.520

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, 2019 (Realisasi sebelum pemeriksaan BPK menuju audited)

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran yang benar – benar digunakan untuk mencapai target kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2019
untuk melaksanakan sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	287.200.000	281.405.006	97,98	2,02	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	141.596.250	117.083.564	82,69	17,31	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	15.210.191.000	12.796.631.995	84,13	15,87	DLH
		Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH	253.500.000	246.425.392	97,21	2,79	DLH
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.224.521.000	1.184.811.754	96,76	3,24	DLH

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH	75.000.000	61.808.931	82,41	17,59	DLH
		Peningkatan Pengendalian Polusi	65.000.000	44.439.897	68,37	31,63	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	Pembangunan jalan dan jembatan	163.648.404.000	161.873.147.328	98,92	1,08	DPUPR
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	19.407.821.000	19.077.858.250	98,30	1,70	DPUPR
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	13.556.847.000	13.406.984.600	98,89	1,11	DPUPR
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.325.000.000	3.307.417.000	99,47	0,53	DPUPR
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	6.085.135.000	5.925.721.000	97,38	2,62	DPUPR
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.300.000.000	1.254.811.000	96,52	3,48	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	26.940.000	26.096.825	96,87	3,13	DPUPR
		Perencanaan tata Ruang	733.503.500	700.488.300	95,50	4,50	DPUPR
		Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum	5.964.321.000	5.886.192.340	98,69	1,31	DISHUB
		Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.359.365.000	1.336.834.584	98,34	1,66	DISHUB
		Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	250.000.000	245.022.180	98,01	1,99	DISHUB
		Peningkatan Pengendalian Polusi	405.000.000	396.410.716	97,88	2,12	DLH
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	790.000.000	788.360.000	99,79	0,21	DISPORAPAR
		Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	16.125.000.000	16.021.301.000	99,36	0,64	DISPORAPAR
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	285.336.000	275.238.700	96,46	3,54	DINAS ARPUS
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Perencanaan Pembangunan Daerah	726.013.000	671.790.121	92,53	7,47	BP3D
		Pengembangan Data/Informasi	348.700.000	268.173.418	76,91	23,09	BP3D
		Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	95.750.000	61.619.800	64,35	35,65	BP3D
		Kerjasama Pembangunan	210.000.000	196.293.307	93,47	6,53	BP3D
		Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	90.000.000	89.825.986	99,81	0,19	BP3D
		Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	175.000.000	167.498.555	95,71	4,29	BP3D
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	293.433.000	283.930.720	96,76	3,24	BP3D
		Perencanaan Sosial dan Budaya	350.959.000	340.341.450	96,97	3,03	BP3D
		Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	50.625.000	49.902.000	98,57	1,43	BP3D
		Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	45.000.000	34.564.768	76,81	23,19	BP3D
		Perencanaan pembangunan daerah	316.509.250	298.696.032	94,37	5,63	SETDA
		Kerjasama informasi dengan media massa	41.852.500	41.800.000	99,87	0,13	SETDA
		Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.321.408.700	5.650.151.898	89,38	10,62	BKD
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	13.141.000	11.037.600	83,99	16,01	BKD
		Pengendalian Kerugian Daerah	21.350.000	12.979.300	60,79	39,21	BKD
		Peningkatan Sistim dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	30.200.000	23.063.012	76,37	23,63	INSPEKTORAT
		Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30.250.000	26.588.530	87,90	12,10	INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Penataan Daerah Otonomi Baru	34.540.000	25.725.647	74,48	25,52	SETDA
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	25.010.000	1.838.000	7,35	92,65	SETDA
		program Penataan Peraturan Perundang-undangan	126.750.000	94.593.677	74,63	25,37	SETDA
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	50.800.000	26.174.464	51,52	48,48	SETDA
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.765.813.000	1.493.323.584	84,57	15,43	SETDA
		Penataan penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah	15.000.000	6.658.600	44,39	55,61	SETDA
		Pendidikan Politik Mayarakat	35.985.000	19.465.400	54,09	45,91	SETDA
		Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan	20.170.000	11.446.200	56,75	43,25	SETDA
		Perencanaan pembangunan daerah	1.552.500	1.552.500	100,00	0,00	SETDA
		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	108.500.000	76.417.901	70,43	29,57	SETDA
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	161.600.000	146.000.050	90,35	9,65	SETDA
		Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	4.775.000	3.288.000	68,86	31,14	SETDA
		Pengembangan wilayah transmigrasi	1.500.000	991.500	66,10	33,90	SETDA
		Pengembangan data/informasi	72.000.000	57.626.320	80,04	19,96	SETDA
		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	150.000.000	52.791.472	35,19	64,81	SETDA
		Peningkatan Pelayanan Publik	139.950.000	49.145.117	35,12	64,88	SETDA
		Kerjasama pembangunan	227.926.250	185.814.973	81,52	18,48	SETDA
		Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	577.209.600	541.391.490	93,79	6,21	SETDA
		Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.857.973.200	728.024.288	39,18	60,82	BKP2D
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1.530.000.000	1.414.490.000	92,45	7,55	BKP2D
		Penataan Administrasi Kependudukan	6.099.709.000	5.762.841.143	94,48	5,52	DISPENDUKCAPIL
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	122.400.000	93.516.500	76,40	23,60	DISKOMINFO
		Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	345.750.000	345.562.275	99,95	0,05	DISKOMINFO
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	128.090.000	126.985.208	99,14	0,86	DISKOMINFO
		Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	491.032.000	483.613.400	98,49	1,51	BP3D
		Perbaikan sistem administrasi kearsipan	205.750.000	192.799.555	93,71	6,29	DINAS ARPUS
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	128.281.000	123.345.050	96,15	3,85	DINAS ARPUS
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	27.000.000	25.597.080	94,80	5,20	DINAS ARPUS
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.887.593.653	24.678.240.182	99,16	0,84	SEKRETARIAT DPRD
		Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	136.820.000	133.200.375	97,35	2,65	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	28.750.000	24.352.000	84,70	15,30	KANKESBANGPOL
		Pendidikan Politik Masyarakat	242.376.000	213.154.500	87,94	12,06	KANKESBANGPOL
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	806.065.000	757.725.251	94,00	6,00	KANKESBANGPOL
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.050.585.000	2.020.113.121	98,51	1,49	SATPOL PP
		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.411.750.000	1.297.518.372	91,91	8,09	SATPOL PP
		Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	142.948.000	9.156.000	6,41	93,59	BPBD
		Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	29.184.750	28.068.250	96,17	3,83	BPBD
		Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	744.781.250	465.350.300	62,48	37,52	BPBD

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	132.794.500	124.947.821	94,09	5,91	BPBD
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	95.057.250	87.413.300	91,96	8,04	BPBD
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	182.816.000	285.048.500	155,92	-55,92	BPBD
		Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	99.557.000	80.550.000	80,91	19,09	BPBD
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	515.547.500	490.970.962	95,23	4,77	DINSOS
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.368.892.900	1.153.820.386	84,29	15,71	DINSOS
		Pembinaan Anak Terlantar	970.000.000	962.895.000	99,27	0,73	DINSOS
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	115.200.000	113.775.250	98,76	1,24	DINSOS
		Pembinaan panti asuhan/panti jompo	95.000.000	91.525.000	96,34	3,66	DINSOS
		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	552.025.000	528.294.050	95,70	4,30	DINSOS
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	205.664.000	200.407.725	97,44	2,56	DISKOPNAKER
		Peningkatan Kesempatan Kerja	162.145.000	160.493.350	98,98	1,02	DISKOPNAKER
		Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	49.930.000	47.694.933	95,52	4,48	DISKOPNAKER
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.789.932.000	1.772.592.909	99,03	0,97	DISKOPNAKER
		Peningkatan Kesempatan Kerja	50.699.000	50.320.750	99,25	0,75	DISKOPNAKER
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4.643.507.000	4.256.304.185	91,66	8,34	DISKOPNAKER
		Pengembangan Perumahan	12.658.053.500	12.629.298.033	99,77	0,23	DPKP
		Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	620.720.000	537.348.000	86,57	13,43	DP2KBP3A
		Keluarga Berencana	1.296.500.000	1.231.559.000	94,99	5,01	DP2KBP3A
		Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	22.000.000	17.450.000	79,32	20,68	DP2KBP3A
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	110.000.000	99.100.000	90,09	9,91	DP2KBP3A
		Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	35.265.000	35.054.000	99,40	0,60	DP2KBP3A
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28.500.000	25.005.000	87,74	12,26	DP2KBP3A
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	393.050.000	388.006.811	98,72	1,28	DISKOPNAKER
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	127.600.000	122.840.278	96,27	3,73	DISKOPNAKER
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	116.700.000	115.829.430	99,25	0,75	DISKOPNAKER
		Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	926.214.858	916.023.059	98,90	1,10	DISPERMASDES
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	80.000.000	67.237.200	84,05	15,95	DISPERMASDES
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan	39.827.000	38.747.550	97,29	2,71	DISPERMASDES
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	39.827.000	38.747.550	97,29	2,71	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	102.000.000	85.976.600	84,29	15,71	DINKES
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.754.168.000	7.618.181.160	98,25	1,75	DINKES
		Upaya Kesehatan Masyarakat	20.768.750.000	15.872.805.172	76,43	23,57	DINKES
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	331.000.000	329.083.565	99,42	0,58	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Lingkungan Sehat	335.000.000	334.419.034	99,83	0,17	DINKES
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	470.000.000	450.646.098	95,88	4,12	DINKES
		pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	4.751.408.000	4.486.126.000	94,42	5,58	DINKES
		pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	8.891.000	8.851.100	99,55	0,45	DINKES
		Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	2.936.000.000	2.226.563.660	75,84	24,16	DINKES
		Pembiayaan kesehatan masyarakat	14.666.629.000	14.640.806.709	99,82	0,18	DINKES
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.516.145.000	1.873.739.195	74,47	25,53	DINKES
		Pengembangan sumber daya kesehatan	167.086.000	161.633.995	96,74	3,26	DINKES
		Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	134.000.000	118.477.350	88,42	11,58	DINKES
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	47.026.071.000	44.572.955.930	94,78	5,22	DINKES
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	111.347.434.000	101.209.744.083	90,90	9,10	RSUD PANDAN ARANG
		Pengadaan, peningkatan srana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.	3.840.000.000	3.734.511.818	97,25	2,75	RSUD PANDAN ARANG
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	15.441.047.000	12.792.141.410	82,85	17,15	RSUD SIMO
		Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	11.805.719.000	11.103.084.971	94,05	5,95	RSUD WARAS WIRIS
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	11.642.353.000	9.654.046.966	82,92	17,08	RSUD WARAS WIRIS
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.028.000.000	4.967.517.973	98,80	1,20	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	Pendidikan Anak Usia Dini	1.250.900.000	1.154.855.690	92,32	7,68	DISDIKBUD
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	54.405.335.000	53.079.188.942	97,56	2,44	DISDIKBUD
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.890.000.000	2.844.038.150	98,41	1,59	DISDIKBUD
		Pendidikan Non Formal	976.807.000	662.596.500	67,83	32,17	DISDIKBUD
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.865.280.000	1.716.955.486	92,05	7,95	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.274.880.000	2.166.918.136	95,25	4,75	DISDAGPERIN
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	110.200.000	97.554.670	88,53	11,47	DISDAGPERIN
		Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	64.500.000	55.222.411	85,62	14,38	DISDAGPERIN
		Penyiapan sumber daya sarana dan prasarana daerah	75.000.000	70.030.880	93,37	6,63	DISDAGPERIN
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	85.925.000	84.518.240	98,36	1,64	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	54.944.471.200	54.557.021.425	99,29	0,71	DISDAGPERIN
		Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	104.105.000	81.993.635	78,76	21,24	DISDAGPERIN
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.954.979.000	1.573.683.813	80,50	19,50	DISDAGPERIN
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	582.500.000	221.825.266	38,08	61,92	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Peningkatan Kesejahteraan Petani	916.376.000	900.964.286	98,32	1,68	DISPERTAN
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	154.475.000	151.475.000	98,06	1,94	DISPERTAN
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	259.000.000	250.357.709	96,66	3,34	DISPERTAN
		Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN-TP)	890.000.000	861.113.000	96,75	3,25	DISPERTAN
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	8.309.425.000	8.215.829.868	98,87	1,13	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	EFESIENSI (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN-TP)	1.128.200.000	1.118.290.800	99,12	0,88	DISPERTAN
		Penigkatan Ketahanan Pangan	1.562.100.000	1.540.721.740	98,63	1,37	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	462.055.000	459.053.566	99,35	0,65	DISNAKKAN
		Peningkatan produksi hasil peternakan	1.037.247.000	1.011.880.139	97,55	2,45	DISNAKKAN
		Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	959.639.000	911.167.783	94,95	5,05	DISNAKKAN
		Pengembangan budidaya perikanan	1.664.873.000	1.649.273.142	99,06	0,94	DISNAKKAN
		Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	60.557.000	59.673.000	98,54	1,46	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.215.500.000	9.105.974.863	89,14	10,86	DISKOMINFO
		Kerjasama informasi dengan mas media	2.821.340.000	2.779.420.948	98,51	1,49	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.022.021.000	5.001.526.750	99,59	0,41	DISPORAPAR
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.063.000.000	1.061.228.000	99,83	0,17	DISPORAPAR
		Pengembangan Kemitraan	752.038.000	749.982.000	99,73	0,27	DISPORAPAR
		Pengembangan Nilai Budaya	2.398.000.000	2.280.830.000	95,11	4,89	DISDIKBUD
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	719.435.000	660.865.850	91,86	8,14	DISDIKBUD
		Pengelolaan Keragaman Budaya	2.239.169.700	2.215.076.227	98,92	1,08	DISDIKBUD

Sumber : Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, 2020

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Boyolali tahun 2019 ini disusun dengan sungguh-sungguh agar dapat menjadi cerminan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali selama tahun 2019, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2019 melalui pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*. Simpulan tingkat capaian indikator kinerja dari dari 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Seratus tujuh (107) indikator kinerja (58,47%) dengan capaian lebih dari 100% (kategori sangat baik);
b. Enam puluh empat (64) indikator kinerja (34,97%) dengan capaian 76% sampai 100% (kategori baik);
c. Enam (6) indikator kinerja (3,28%) dengan capaian 56% sampai 75% (kategori cukup);
d. Lima (5) indikator kinerja (2,73%) dengan capaian kurang dari 55% (kategori Kurang);
e. Satu (1) Indikator Kinerja (0,55%) yang tidak memasang target di tahun 2019 ini.

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 secara keseluruhan 138,96% (kategori sangat baik).

4.2. Saran Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan capaian dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan, antara lain:

1) Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan kinerja (Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan sebagian Indikator Kinerja Utama dapat menjadi indikator kinerja tiap tahun;
2) Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;
3) Menajamkan program/kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar pelaksanaan program/ kegiatan efektif dan efesien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
4) Menyediakan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian sasaran, terutama untuk target yang belum dipenuhi tahun sebelumnya;

5) Mempertimbangkan kendala faktor eksternal (analisis resiko) seperti musim, cuaca, curah hujan, hama penyakit, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, LSM, dan lain-lain agar pelaksanaan program/ kegiatan berjalan lancar dan pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan;

6) Memperbaiki Sistem Informasi tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja;

7) Meningkatkan capaian kinerja Output dan Outcome capaian kinerja bidang kesehatan, Pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya.

Boyolali, 30 Maret 2020

BUPATI BOYOLALI

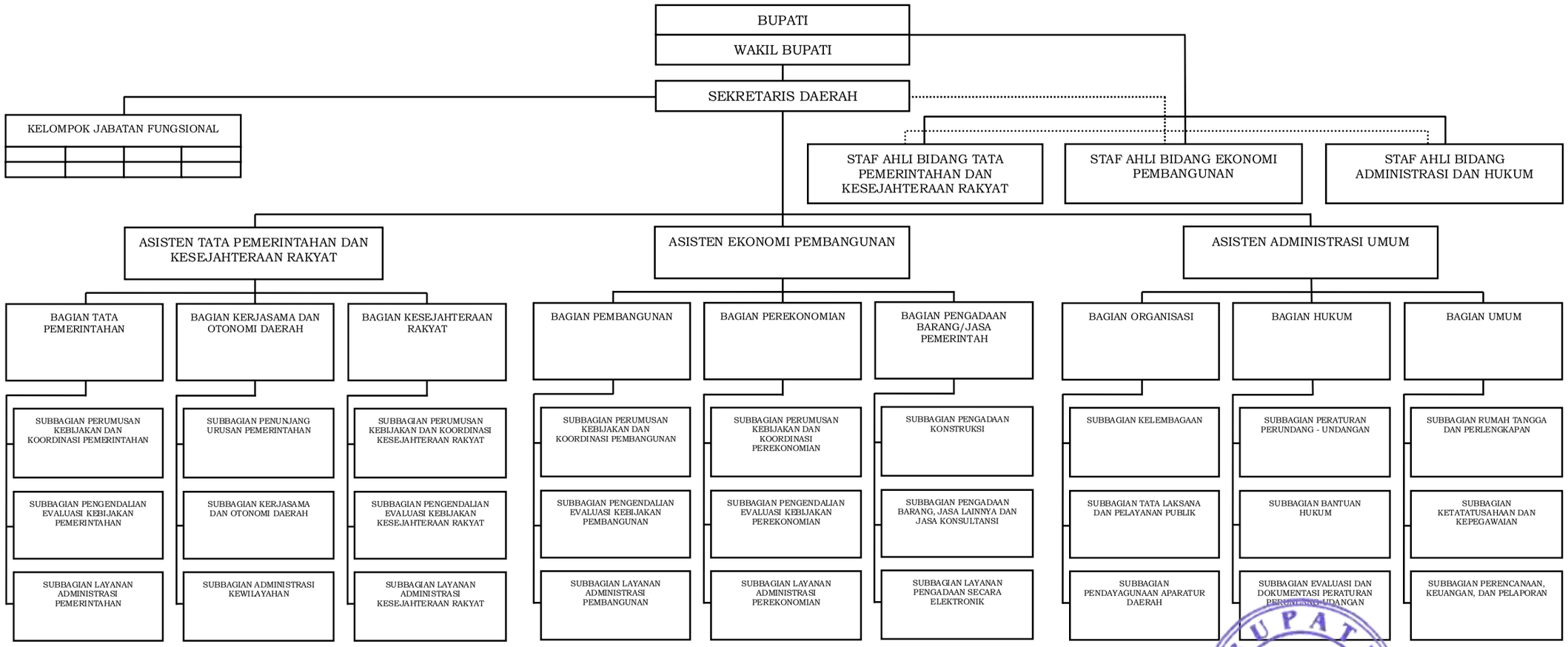
Drs. SENO SAMODRO

LAMPIRAN I

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH

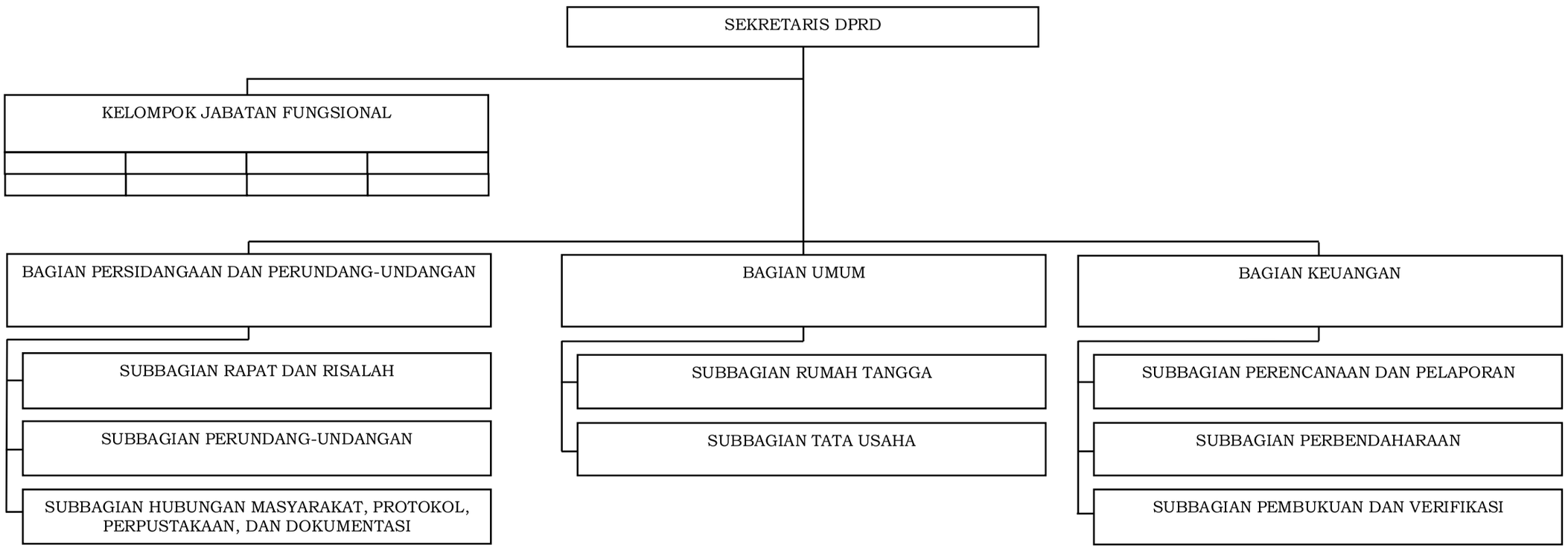


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

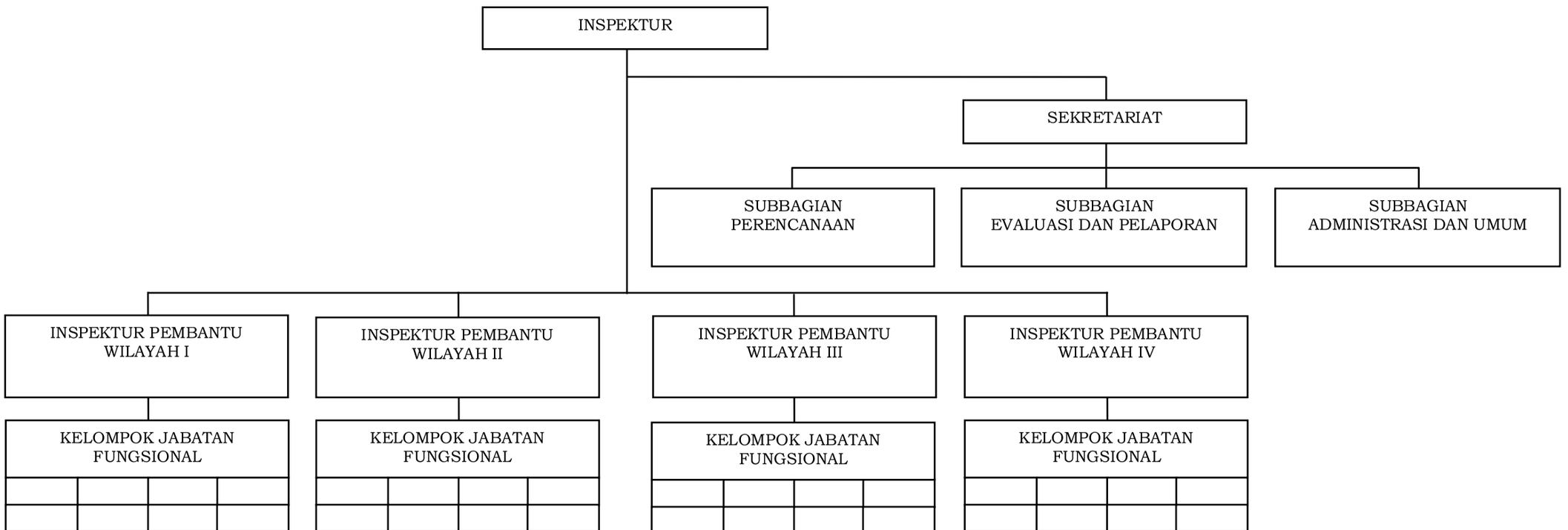


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

INSPEKTORAT DAERAH

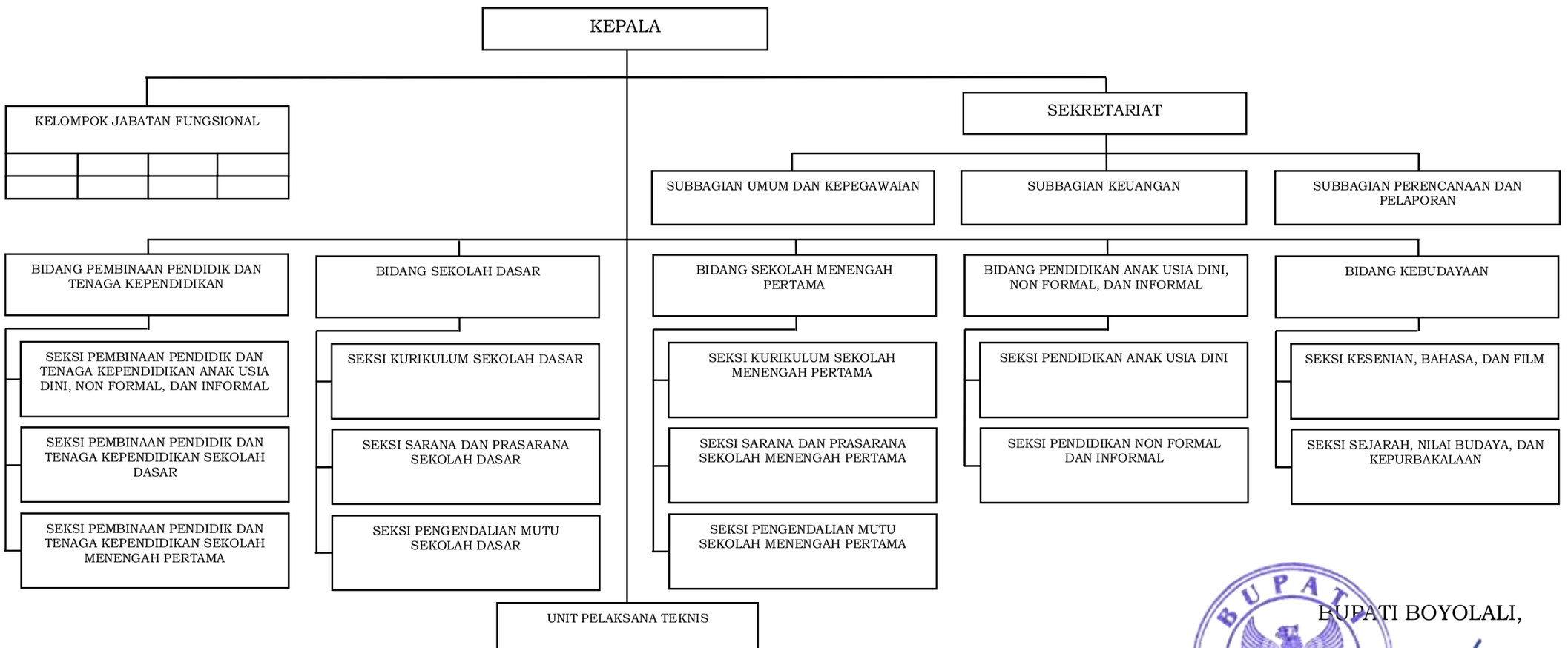


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

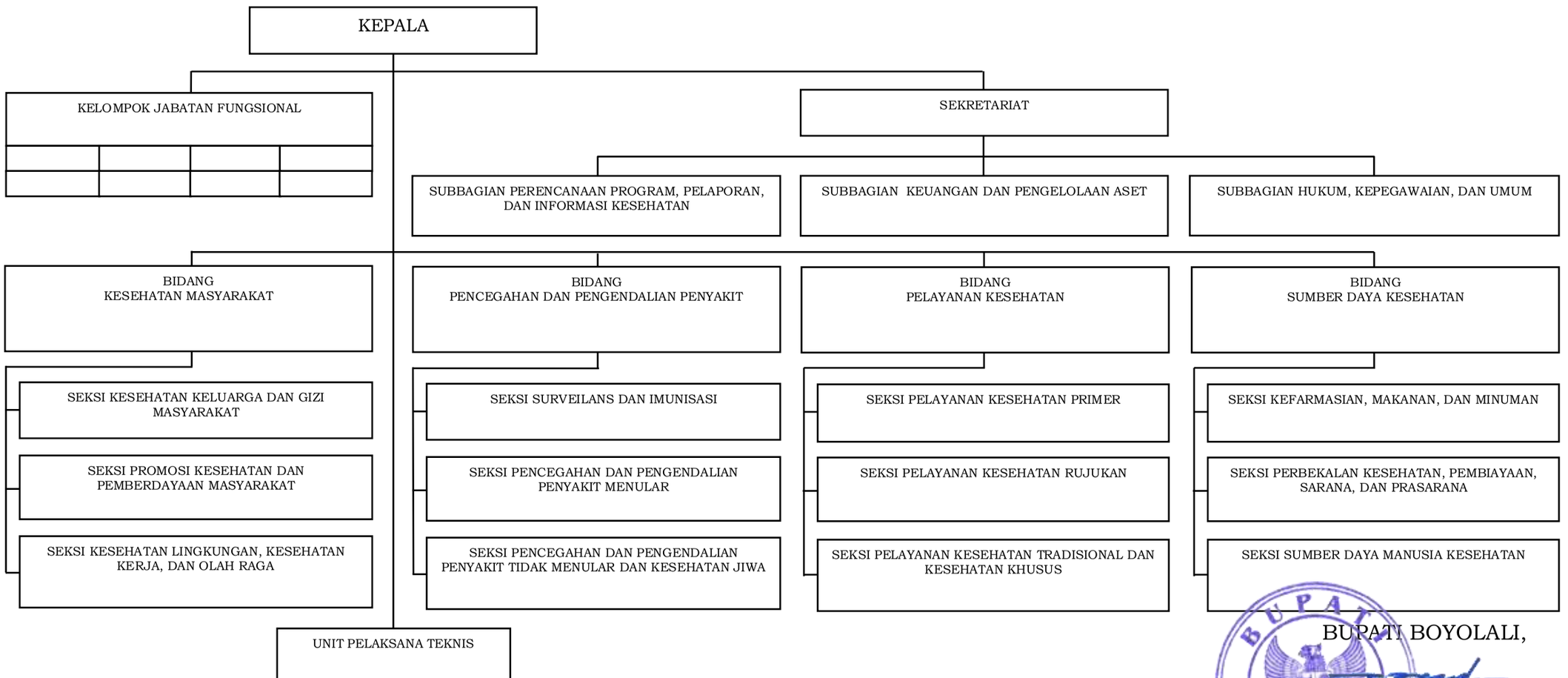


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KESEHATAN

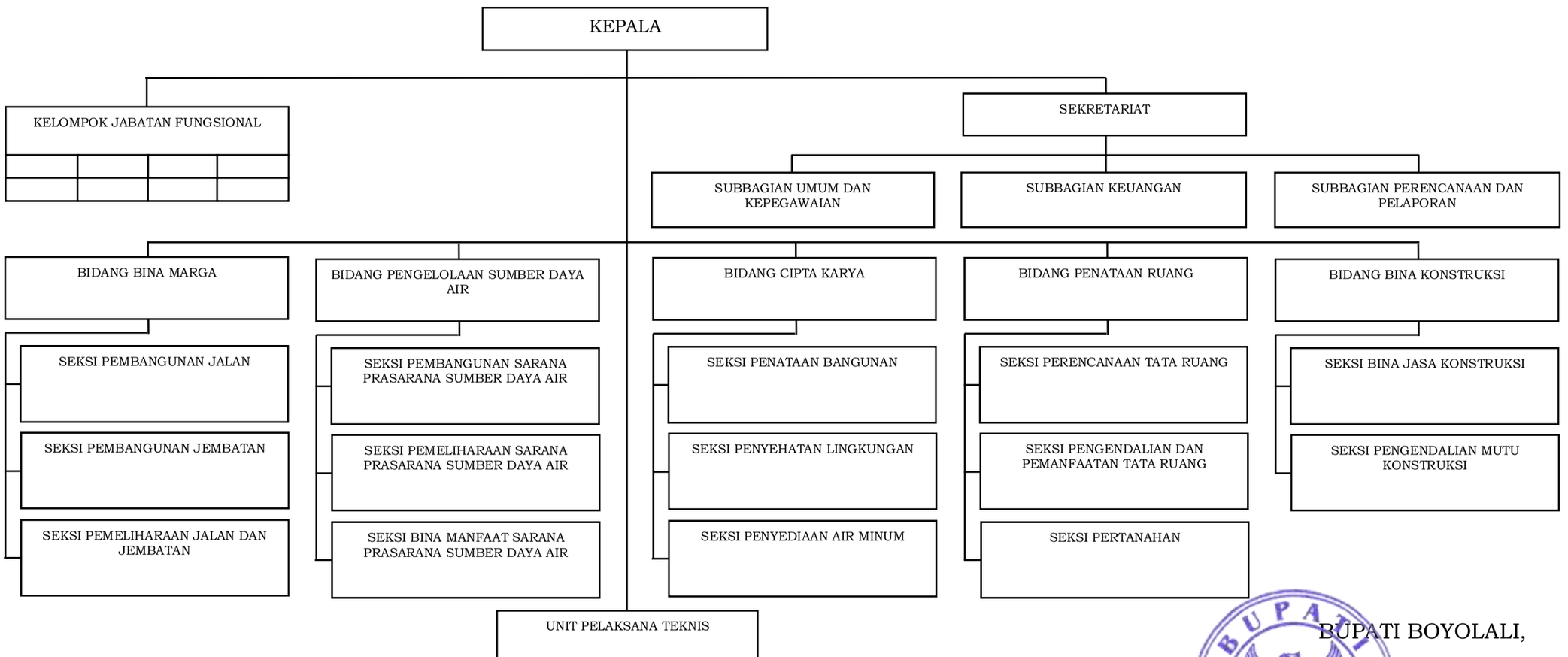


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

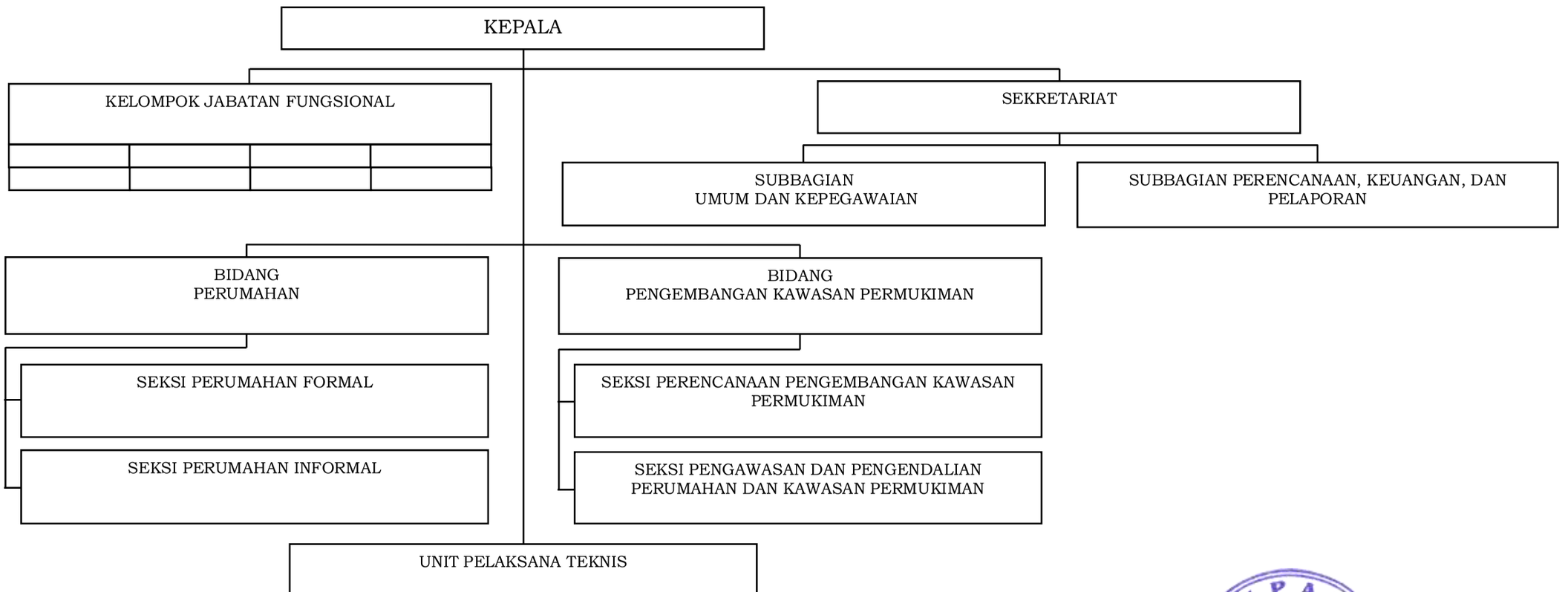


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

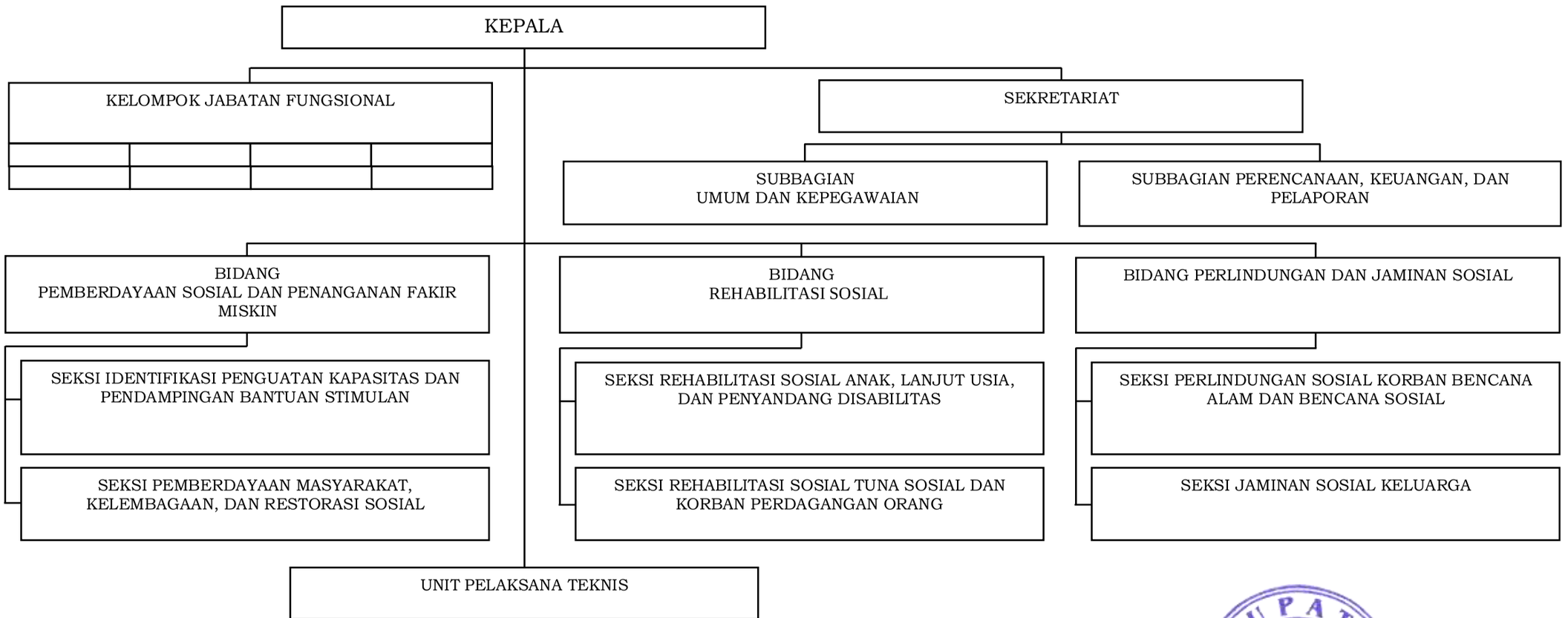


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS SOSIAL

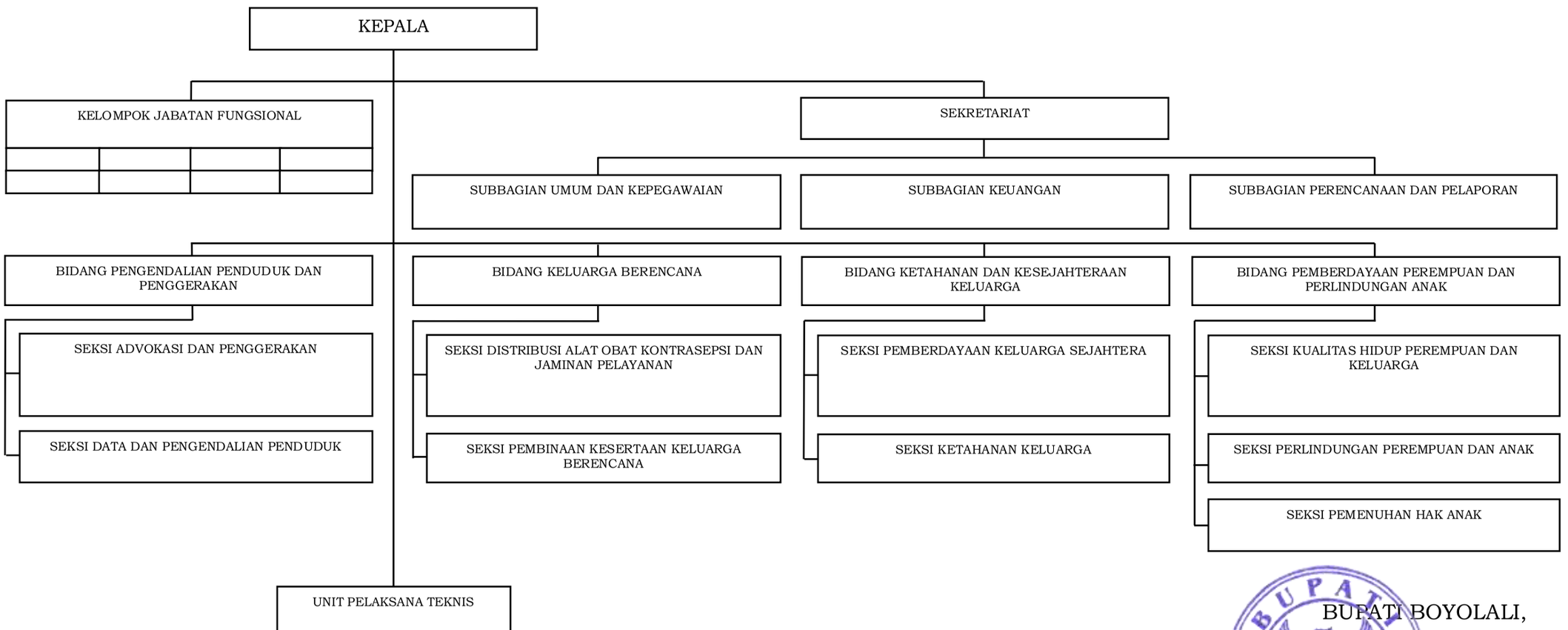


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

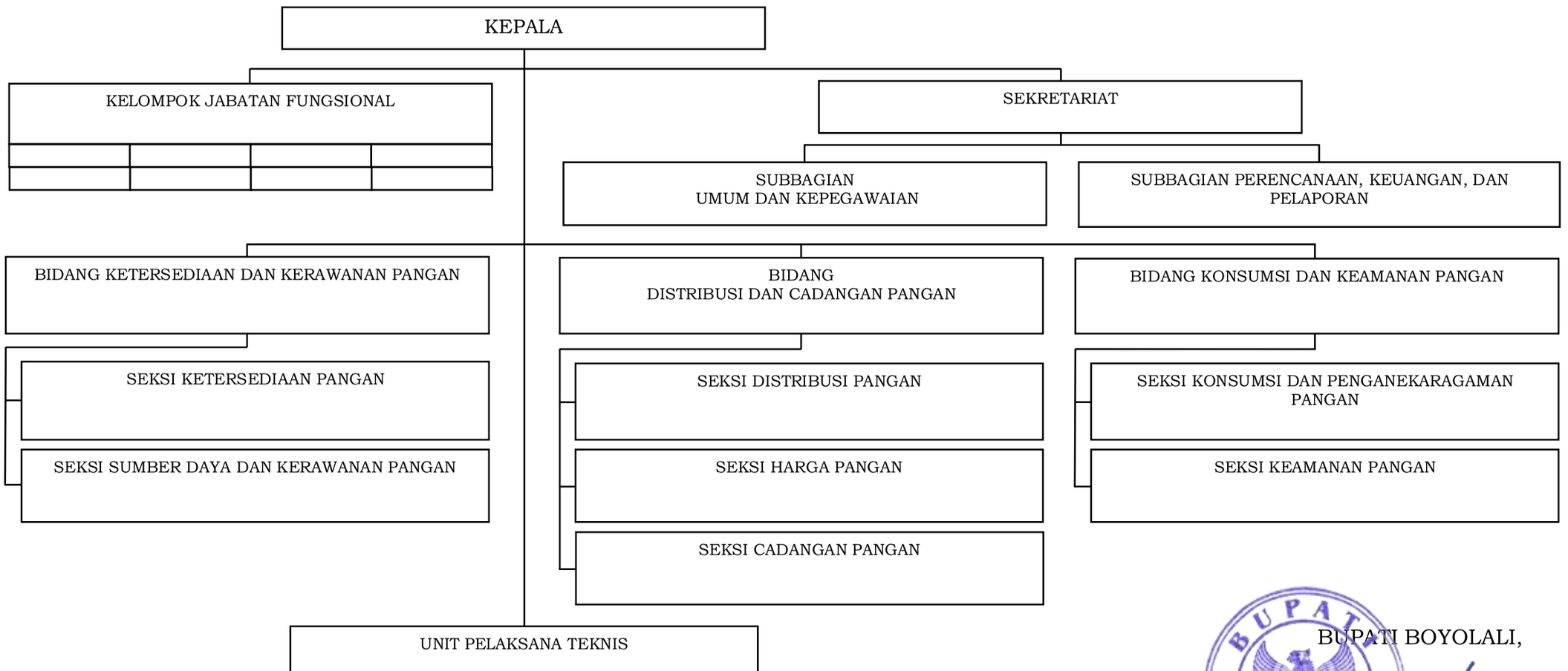


BUPATI BOYOLALI,

...ENO SAMODRO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KETAHANAN PANGAN

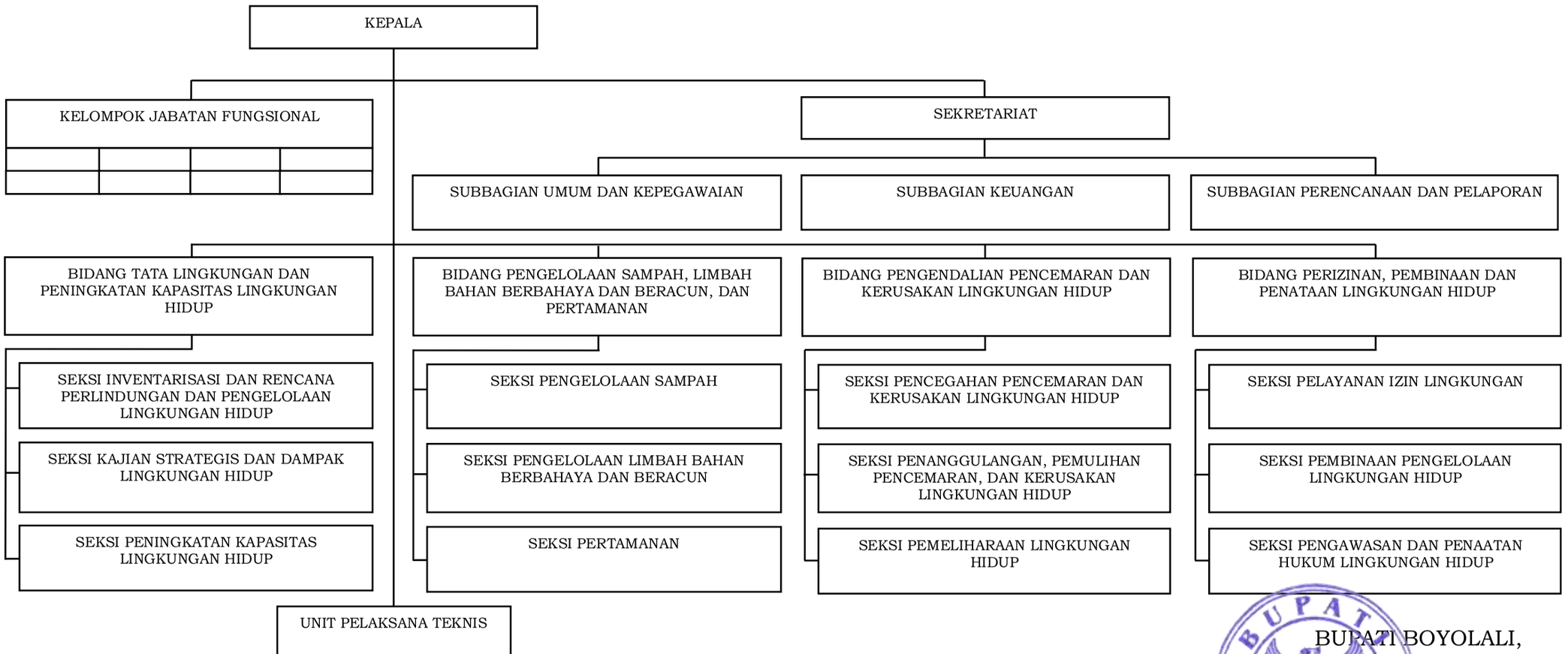


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

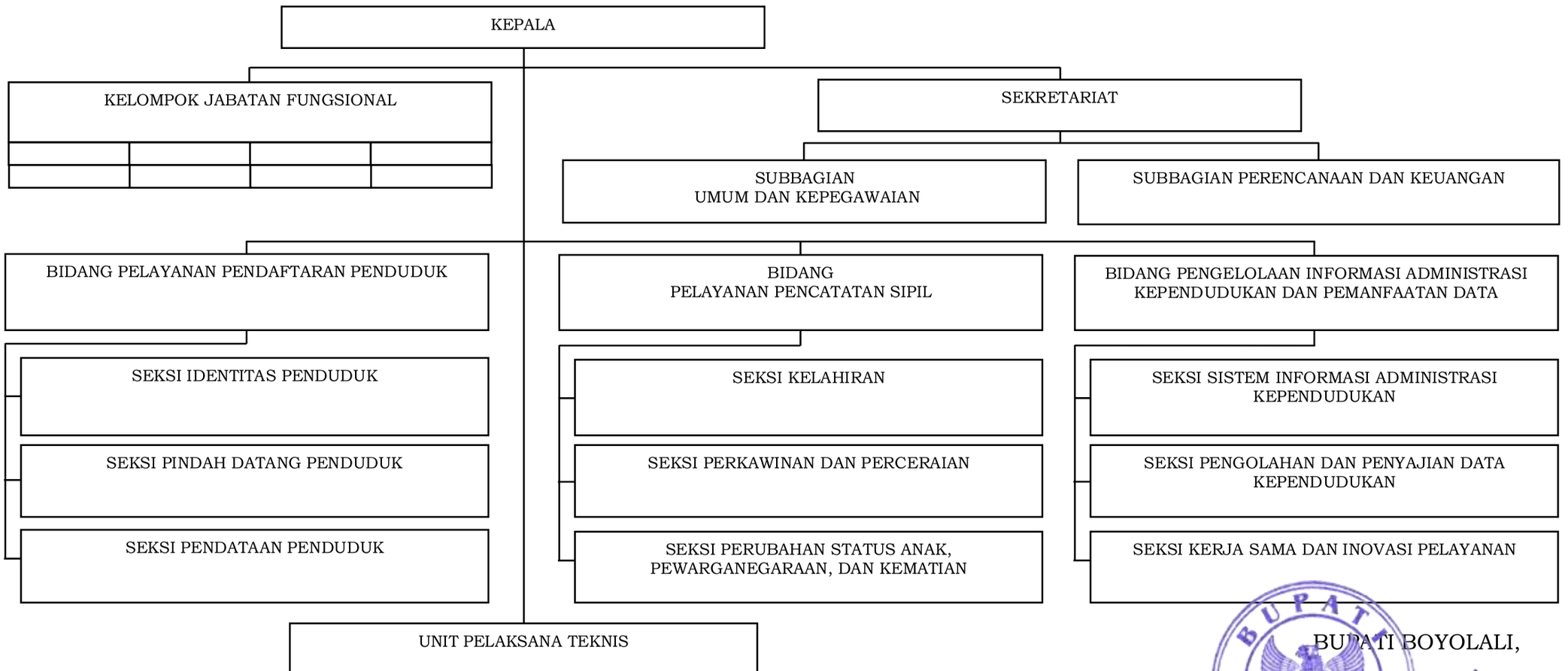


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

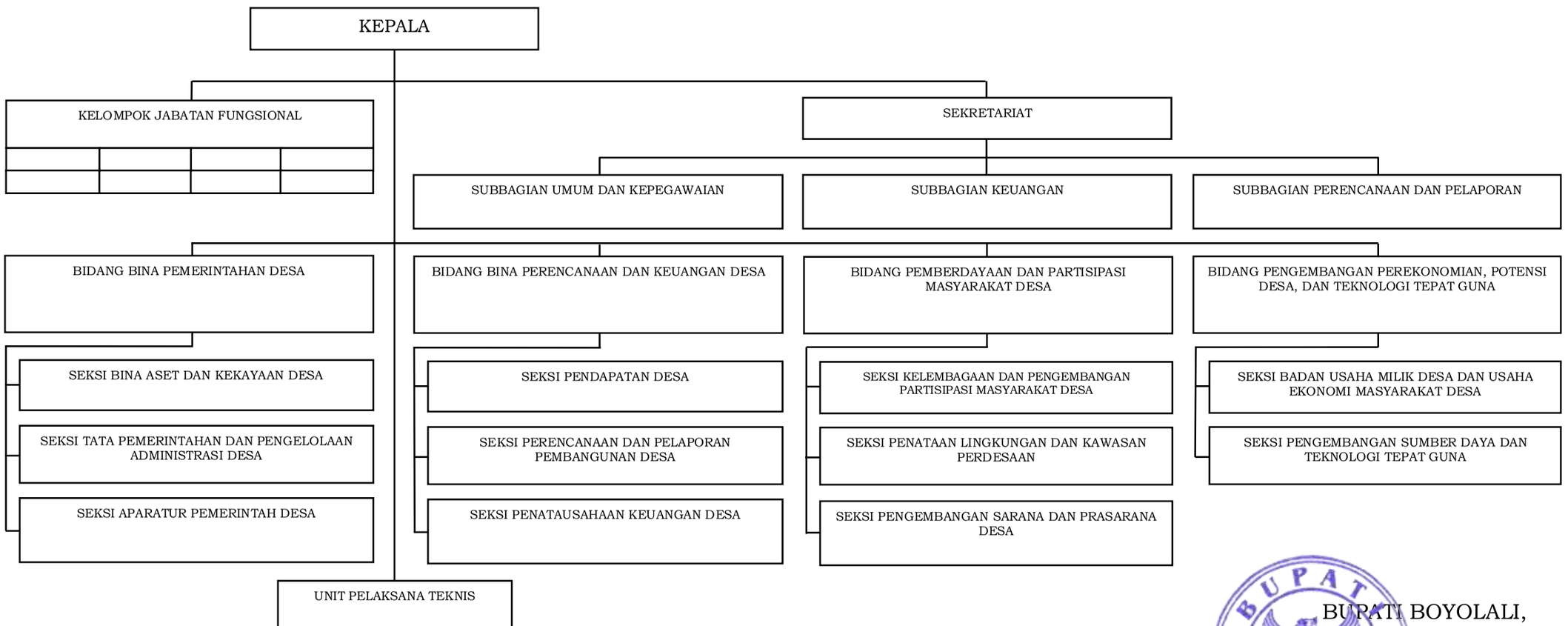


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

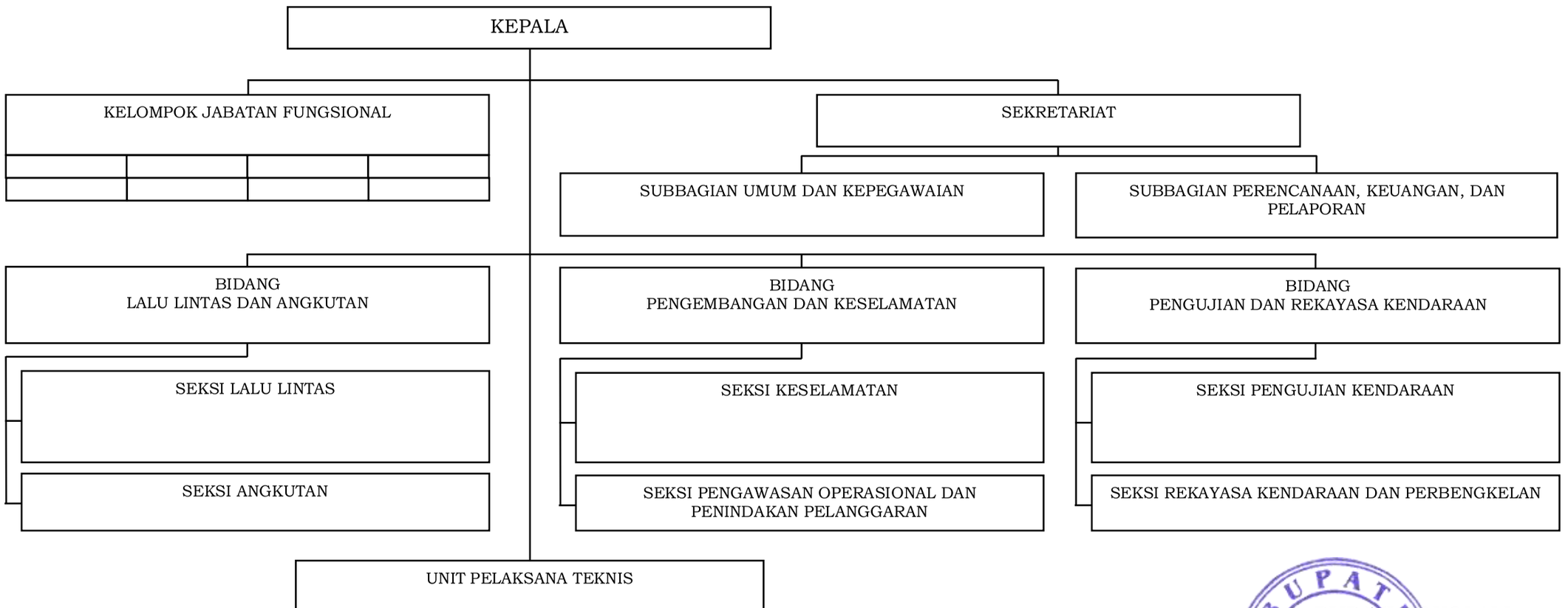


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERHUBUNGAN

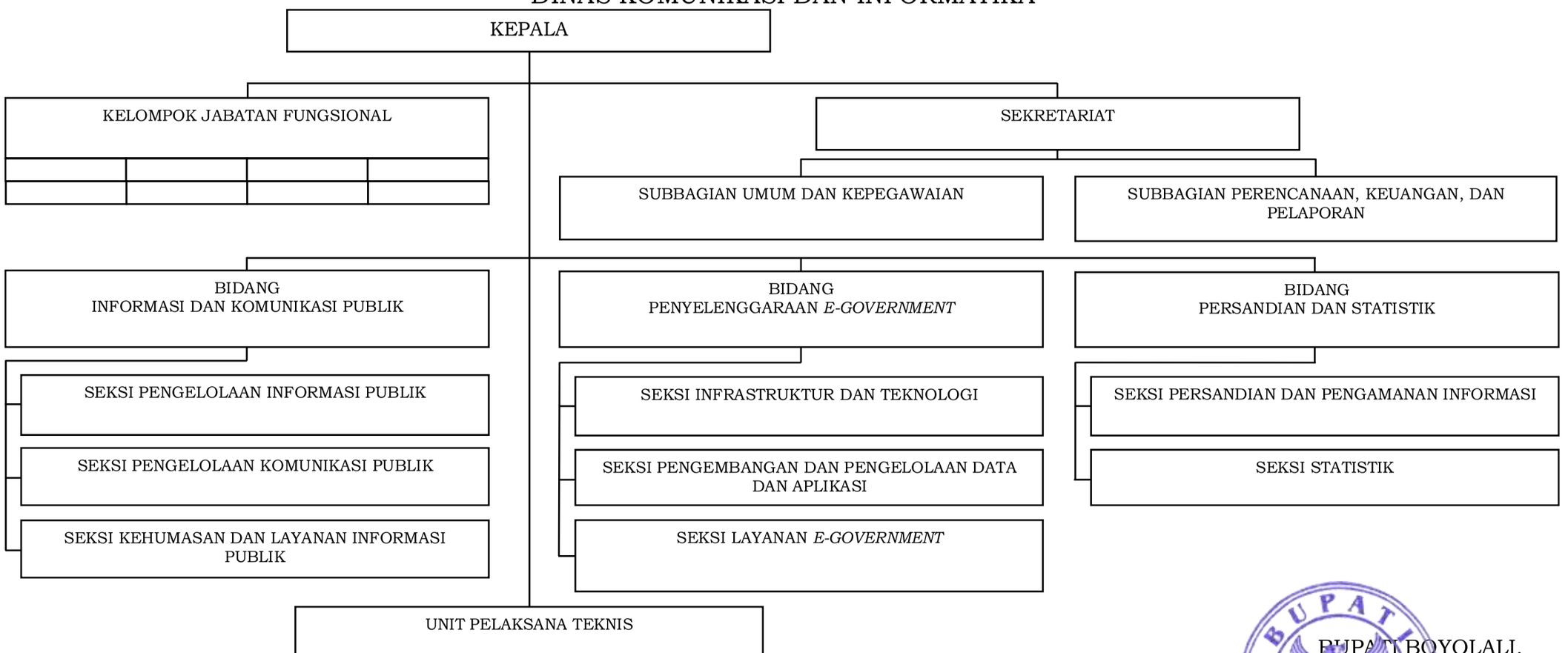


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

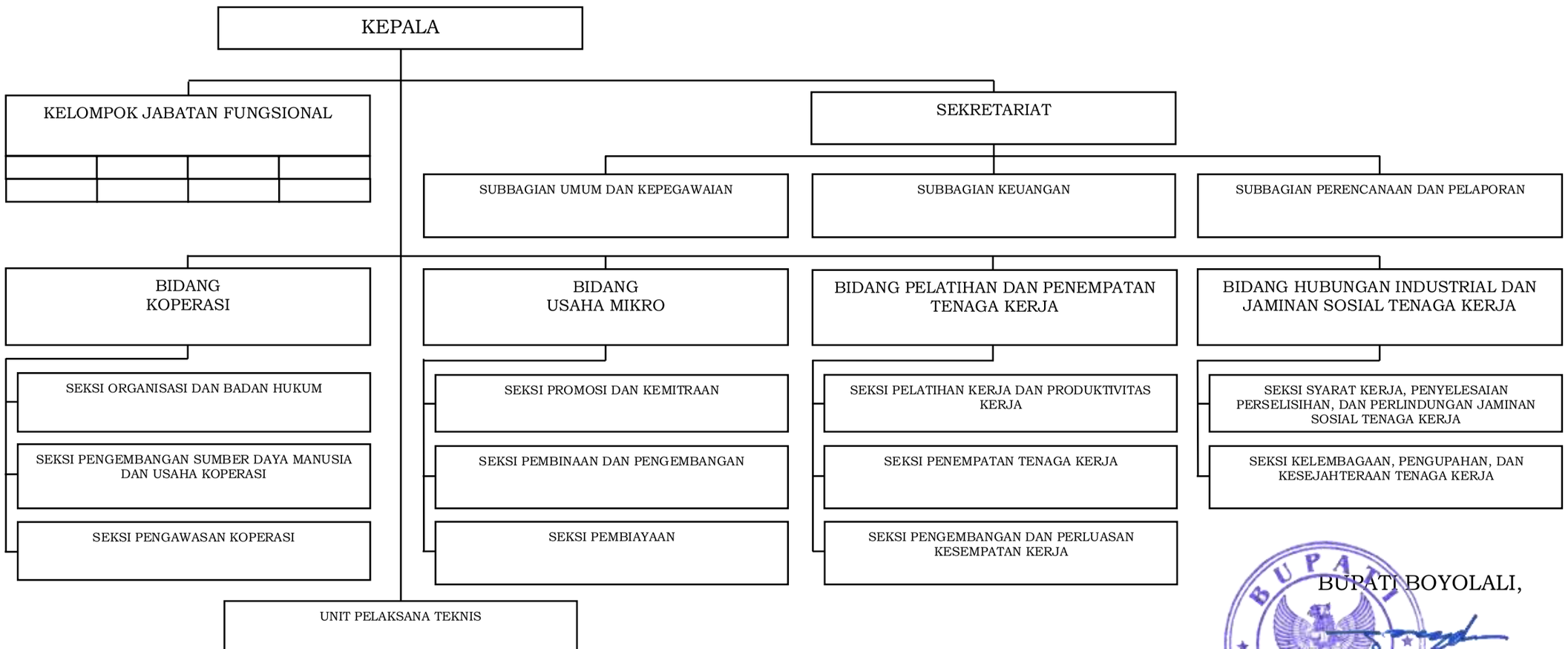


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

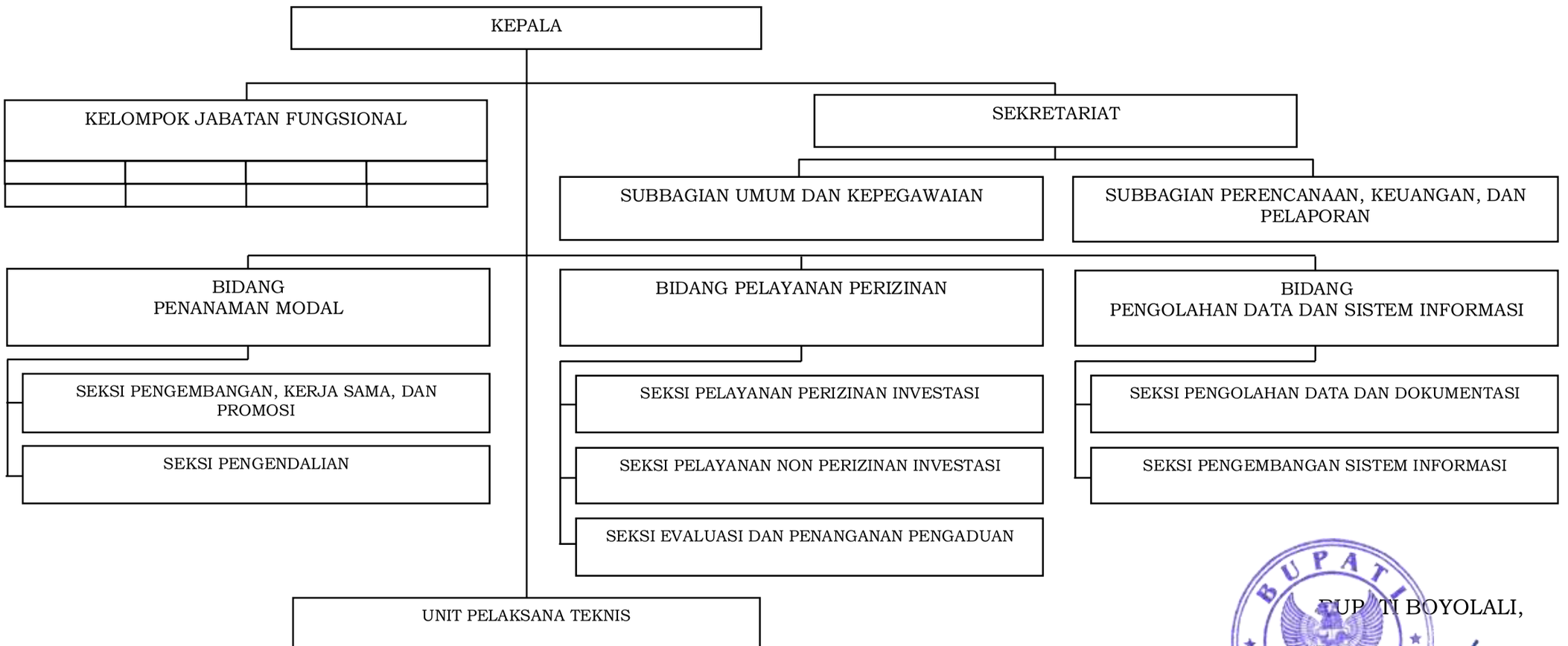


BUPATI BOYOLALI,

ENO SAMODRO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

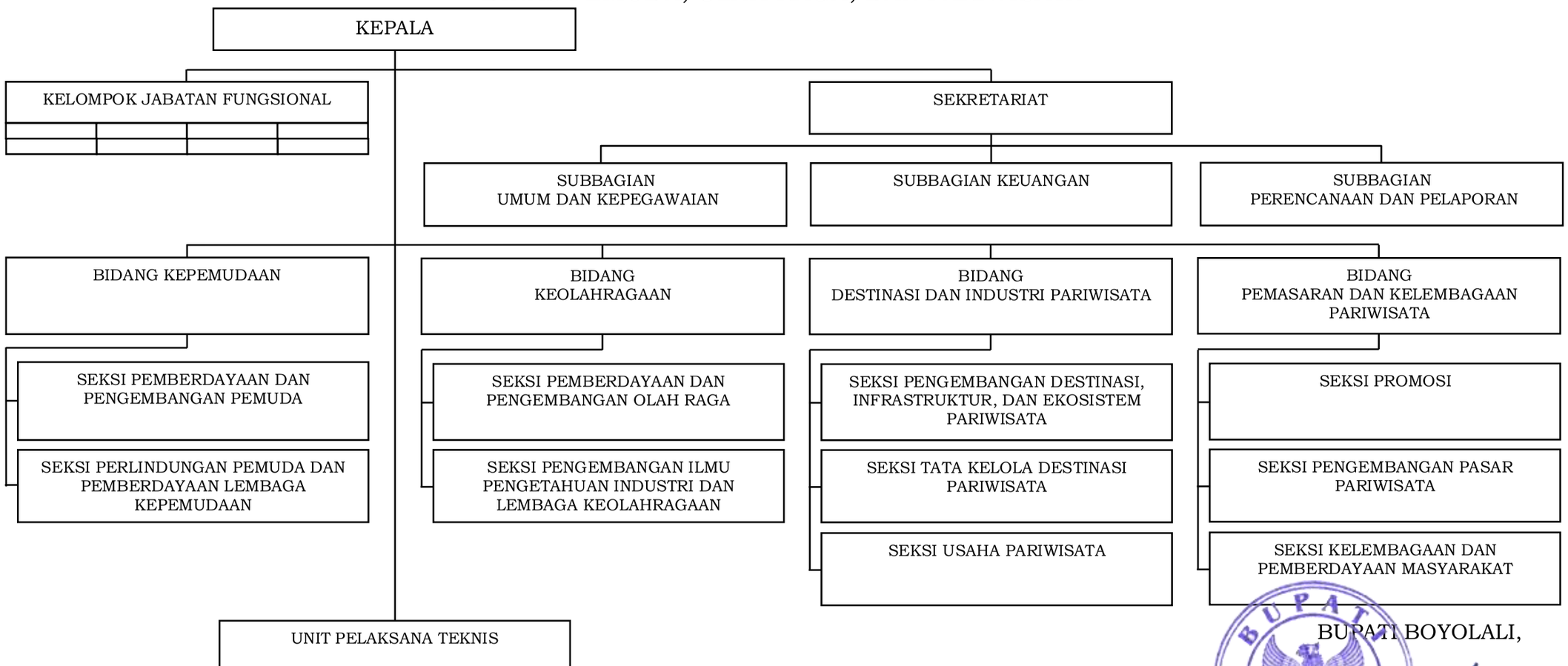


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

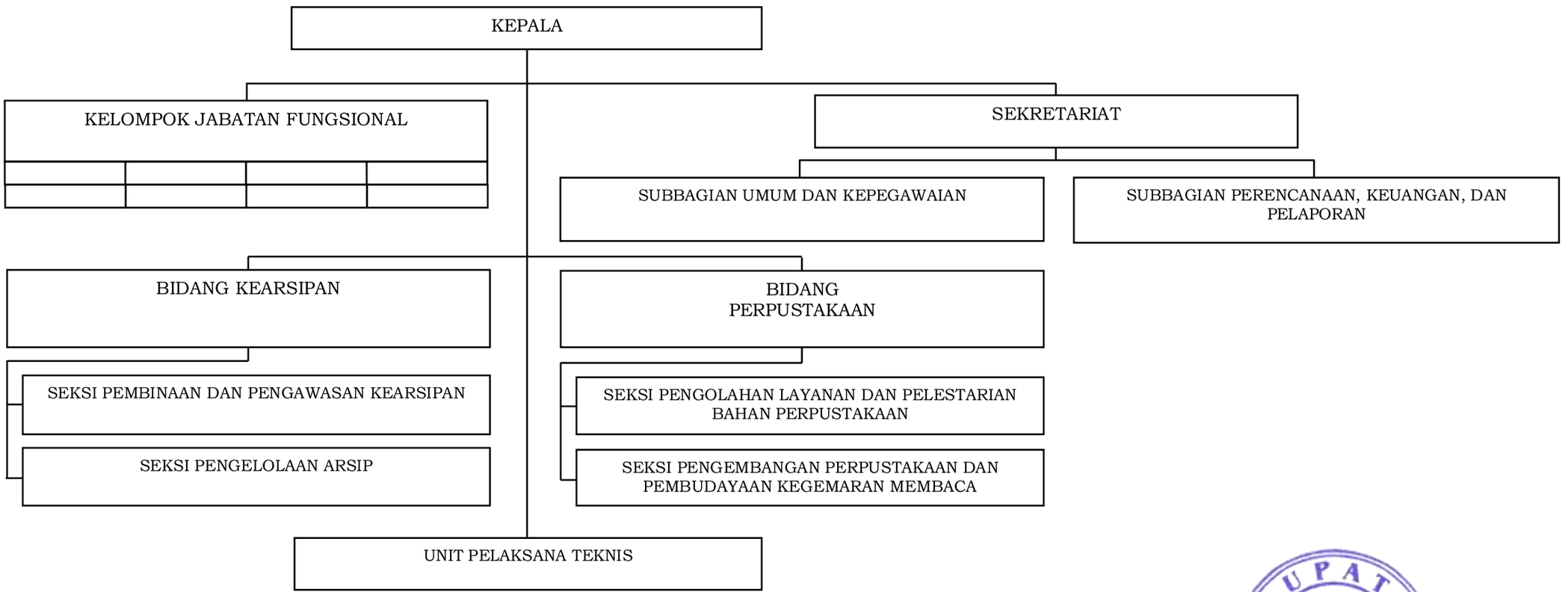


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

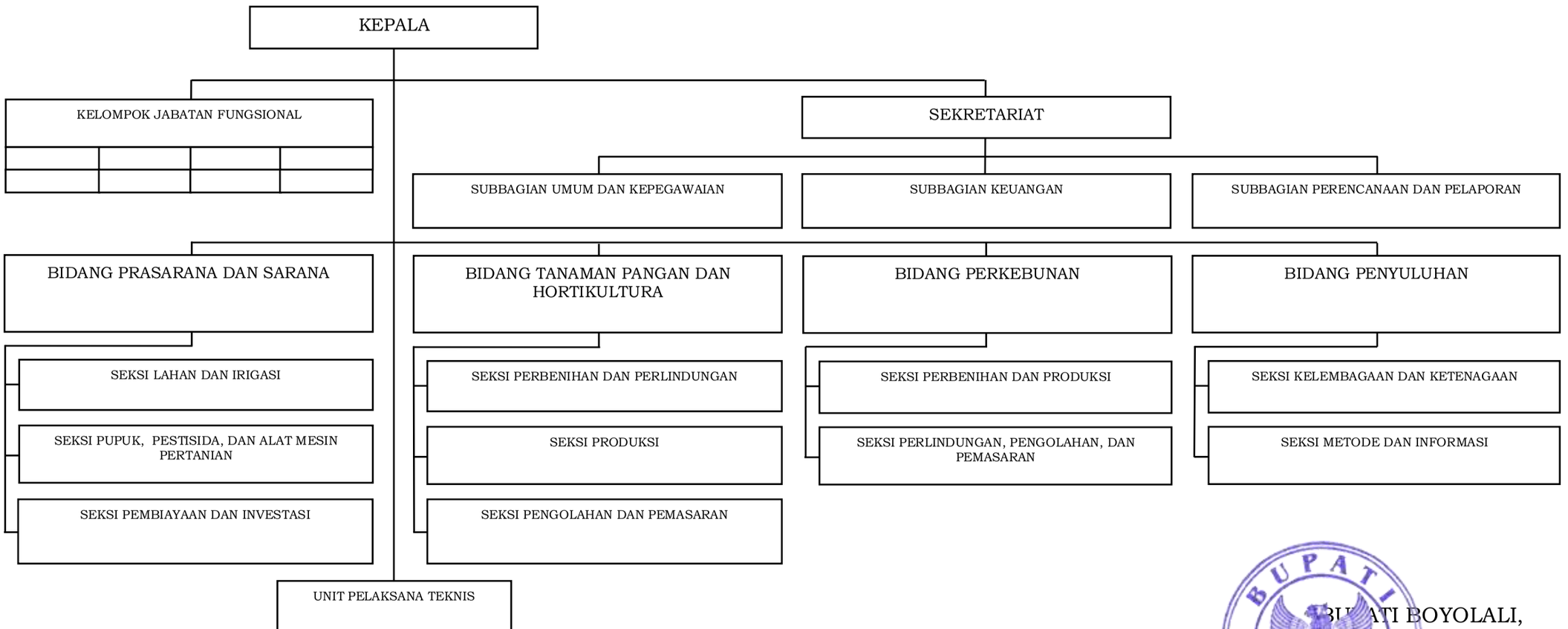


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERTANIAN

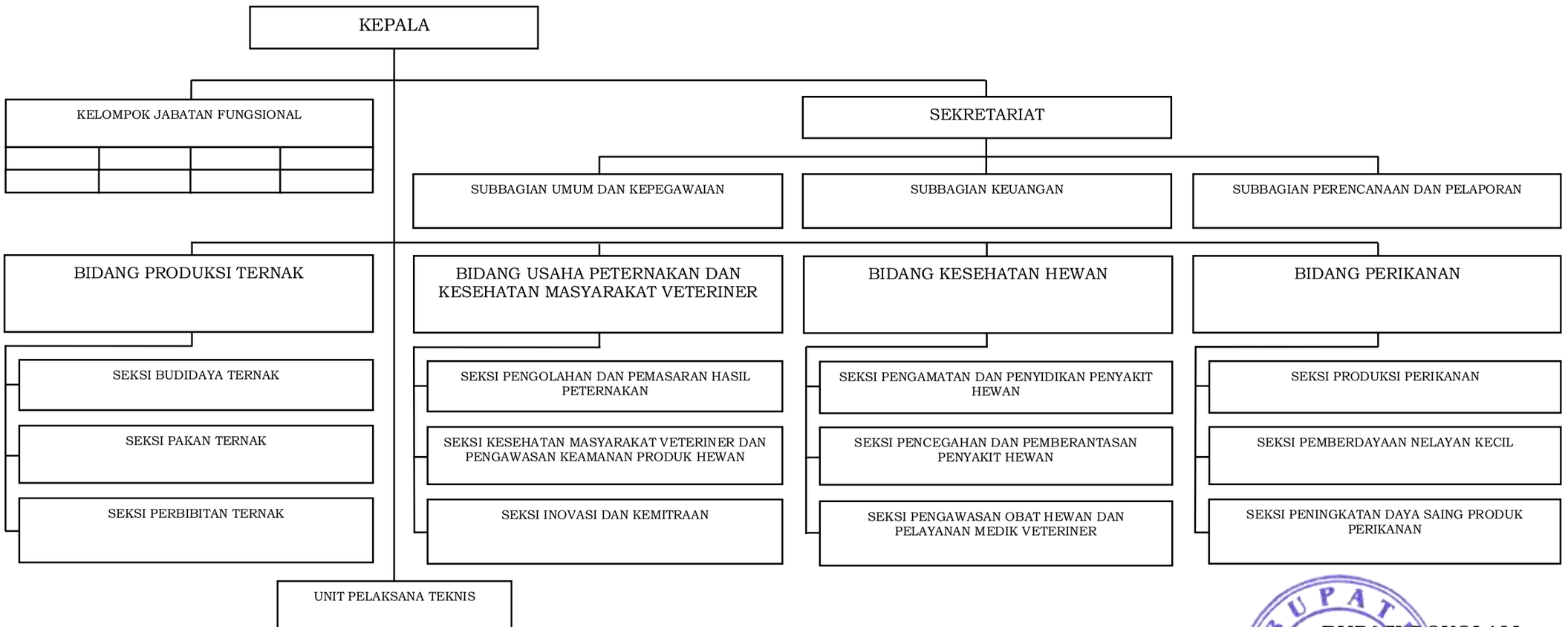


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

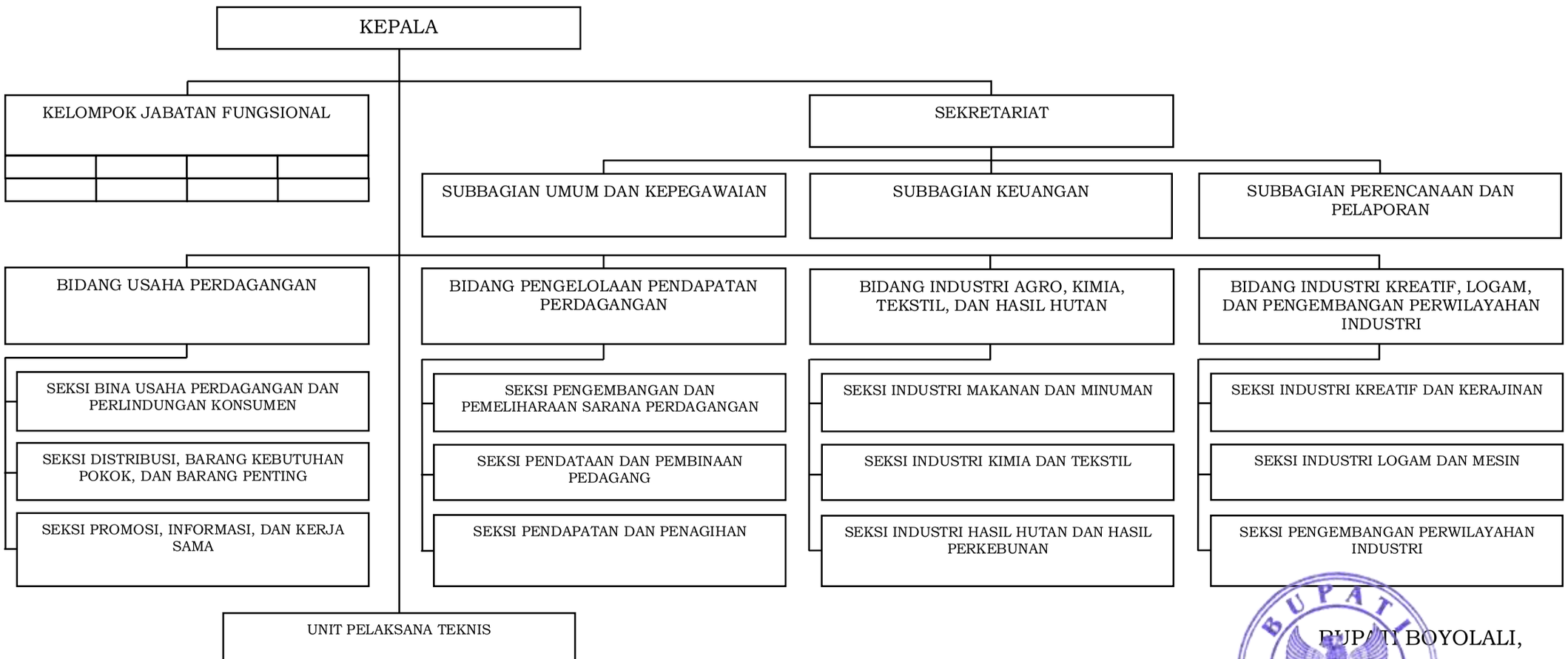


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

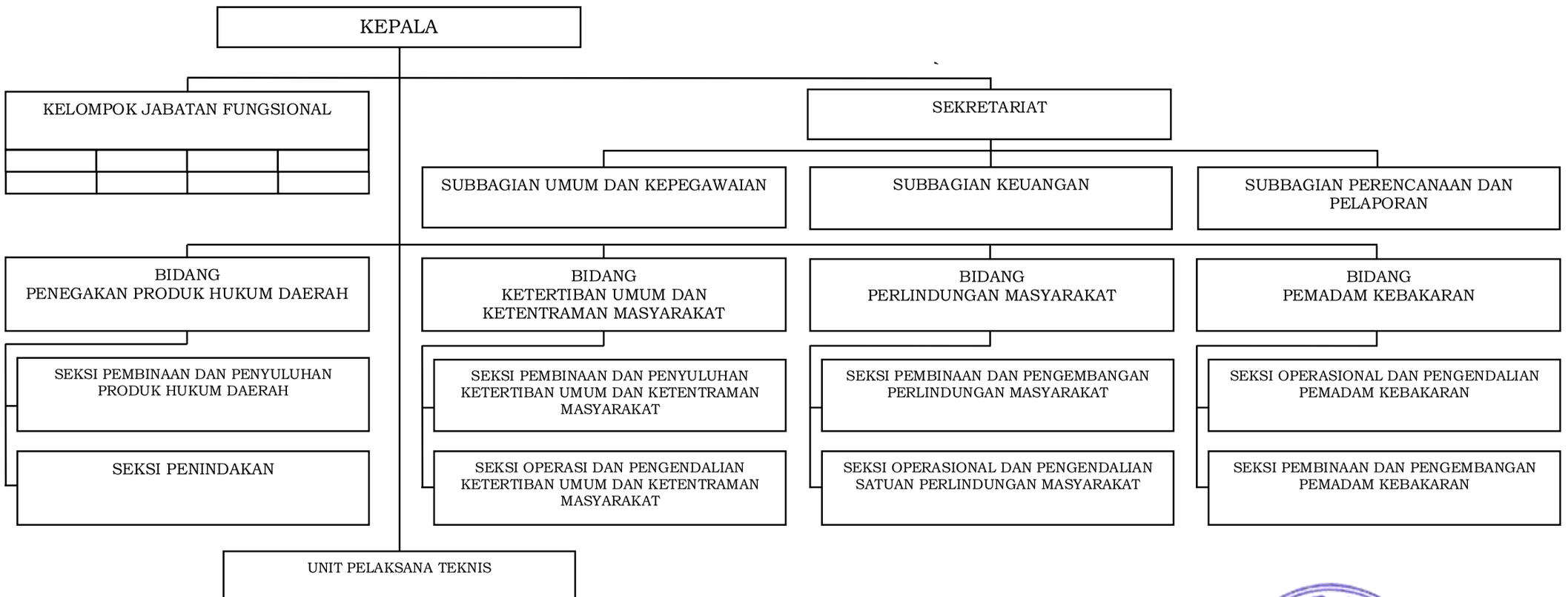


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

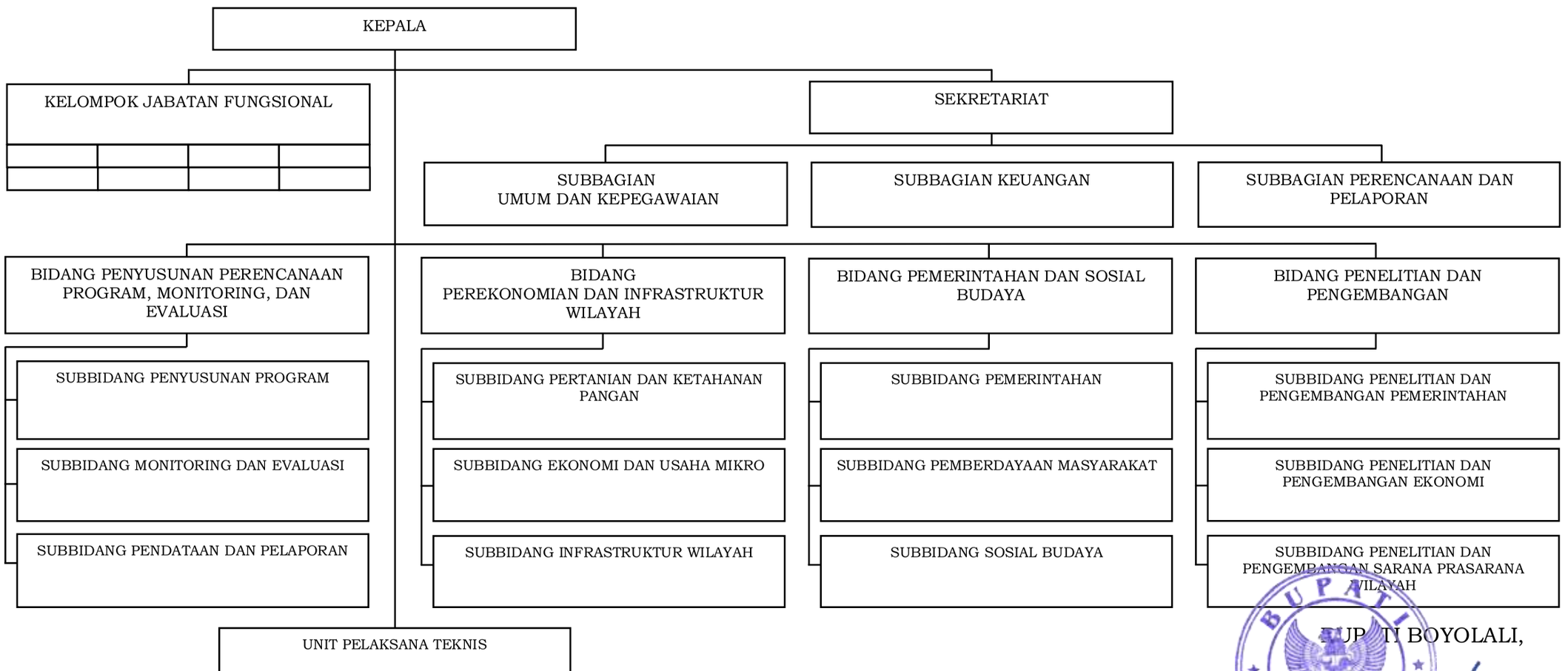


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

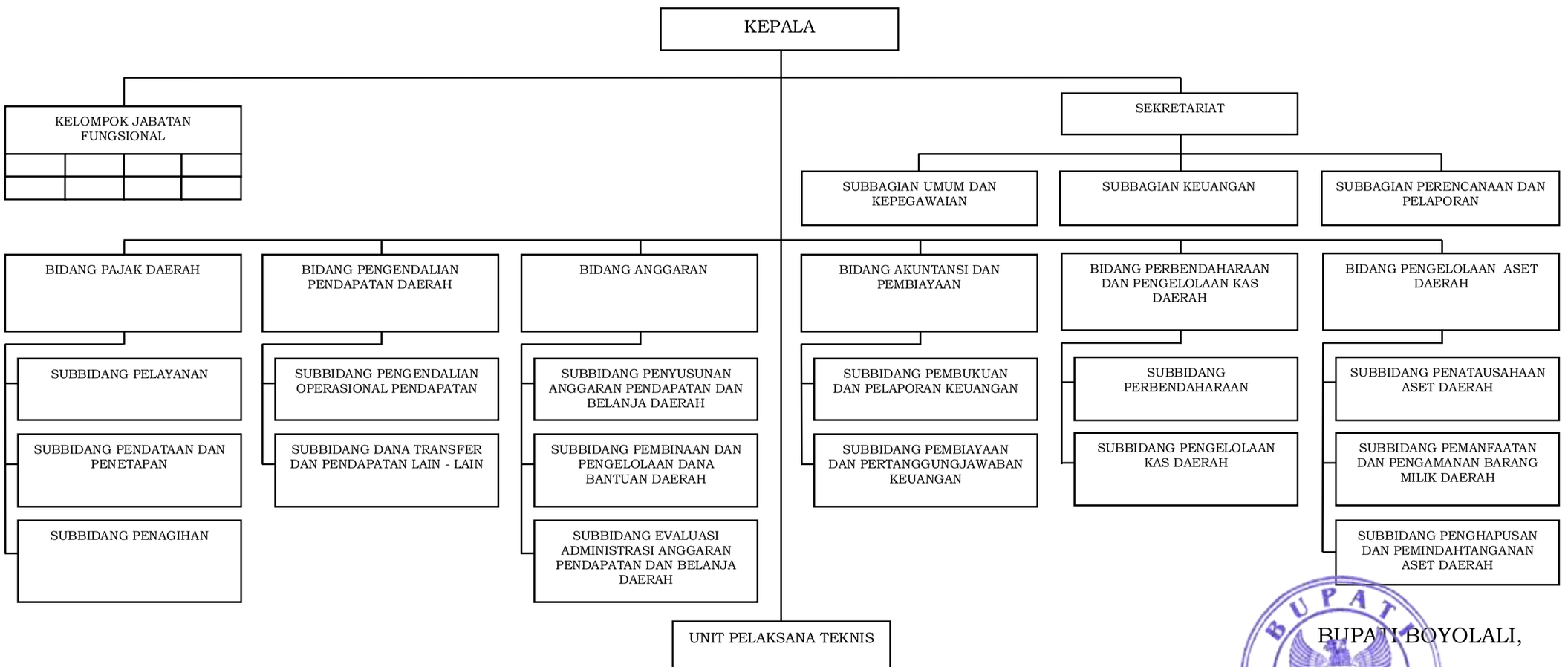


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

BADAN KEUANGAN DAERAH

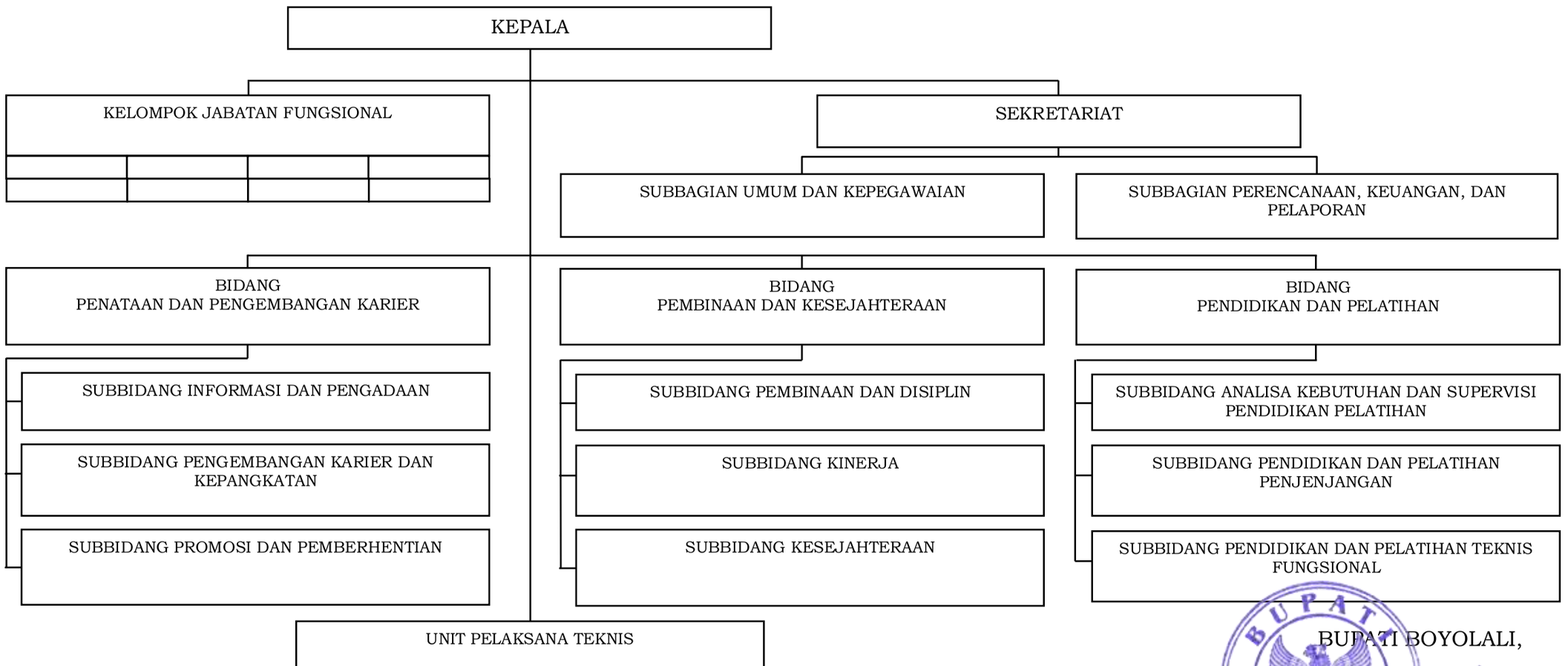


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

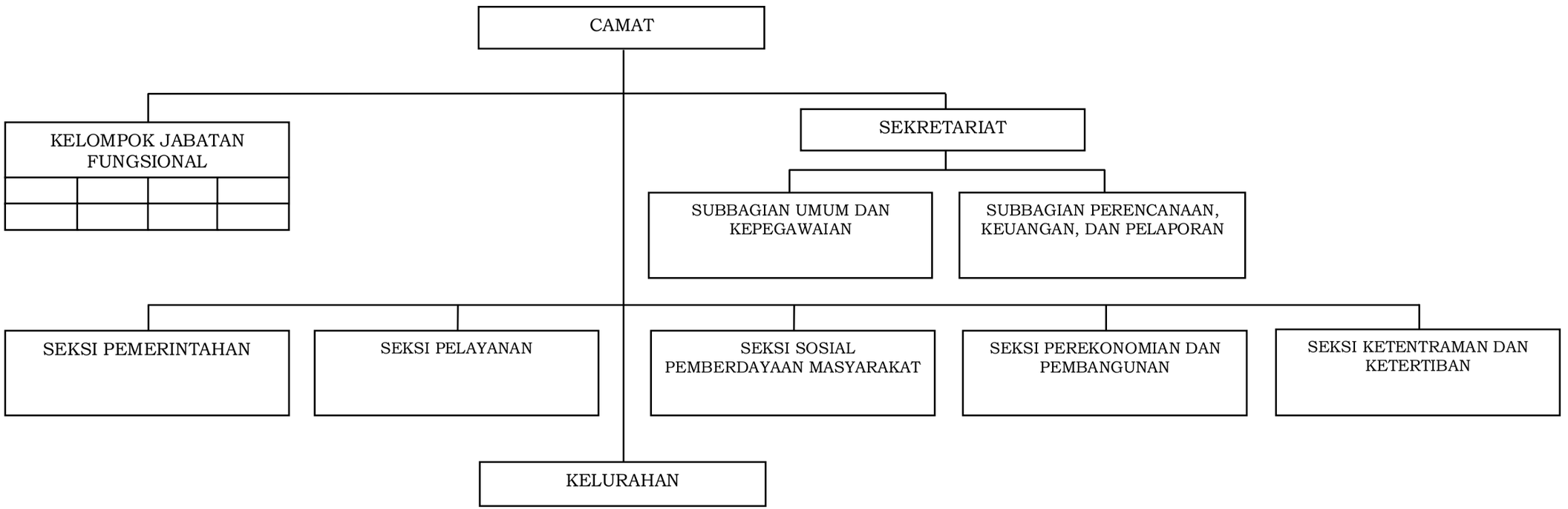


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN

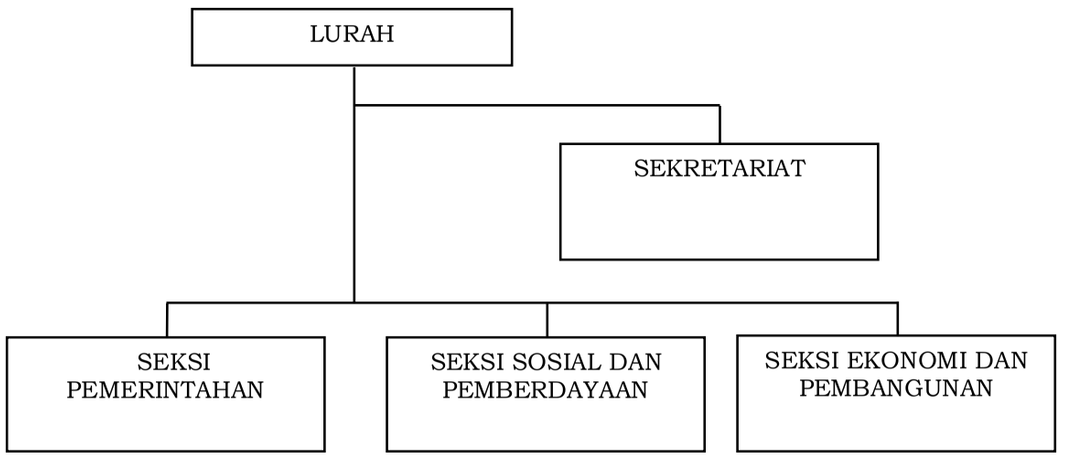


BUPATI BOYOLALI,

...NO SAMODRO

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KELURAHAN

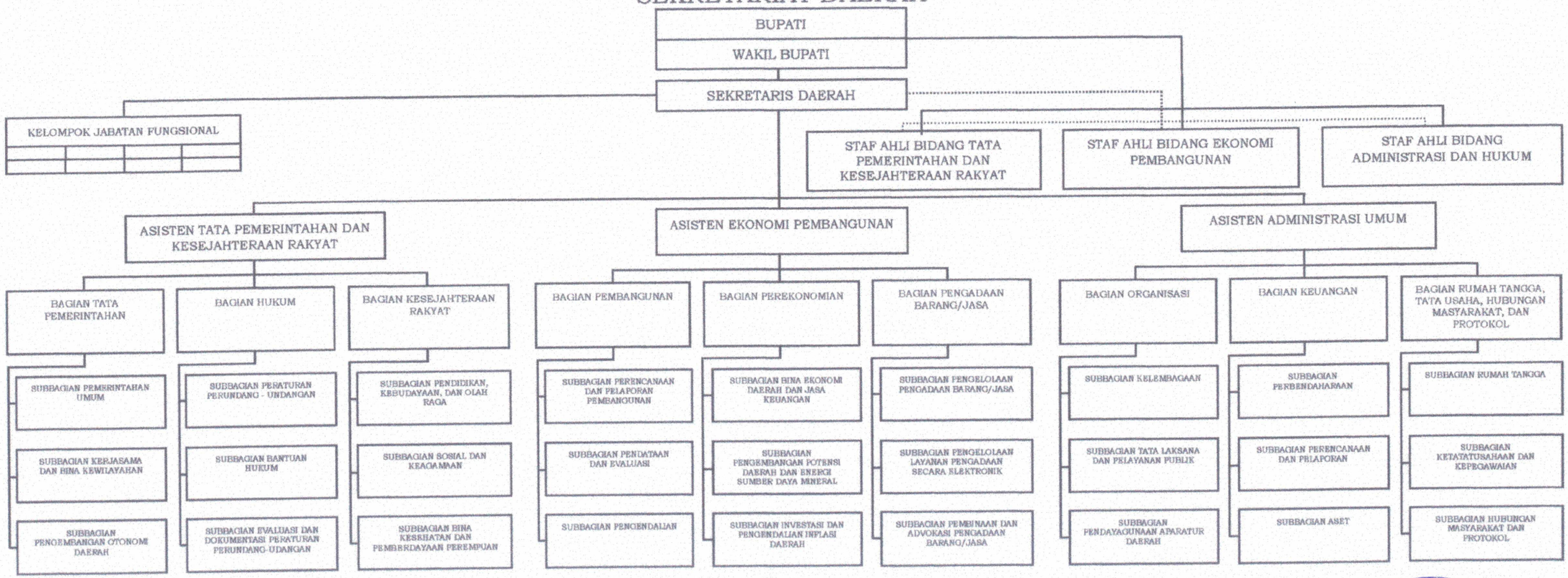


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH

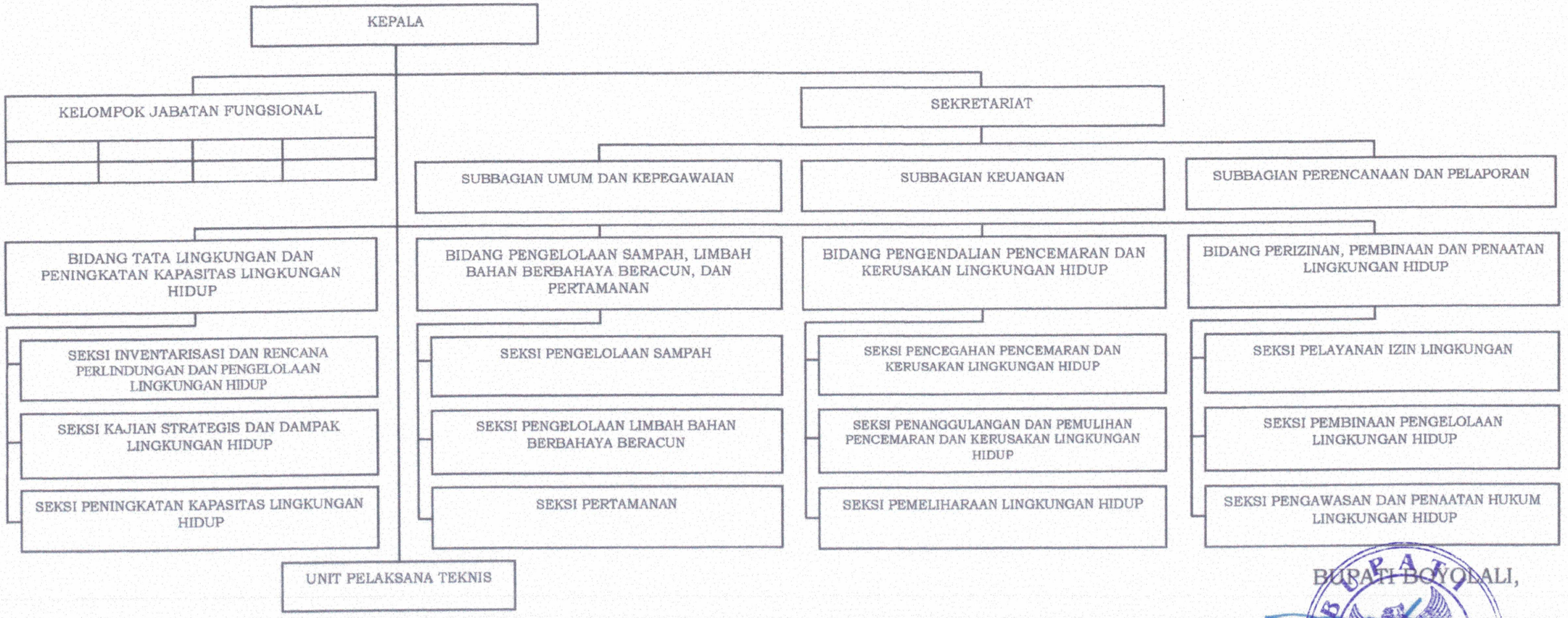


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

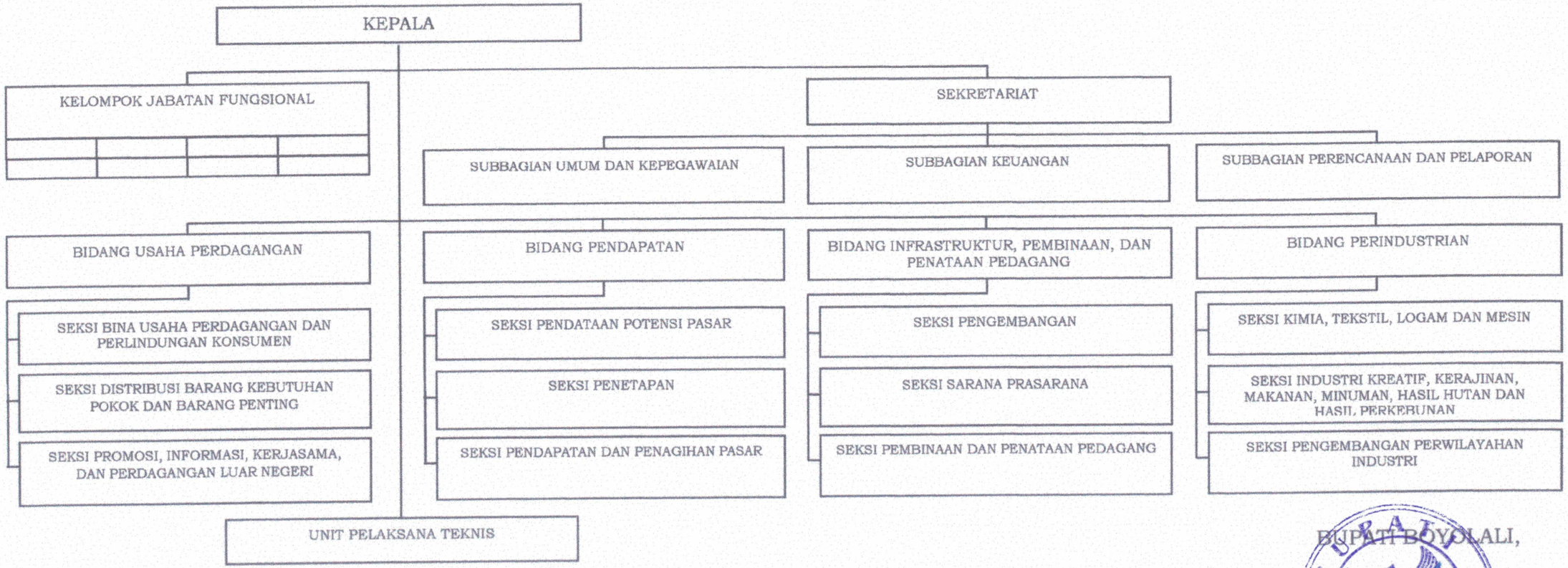


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

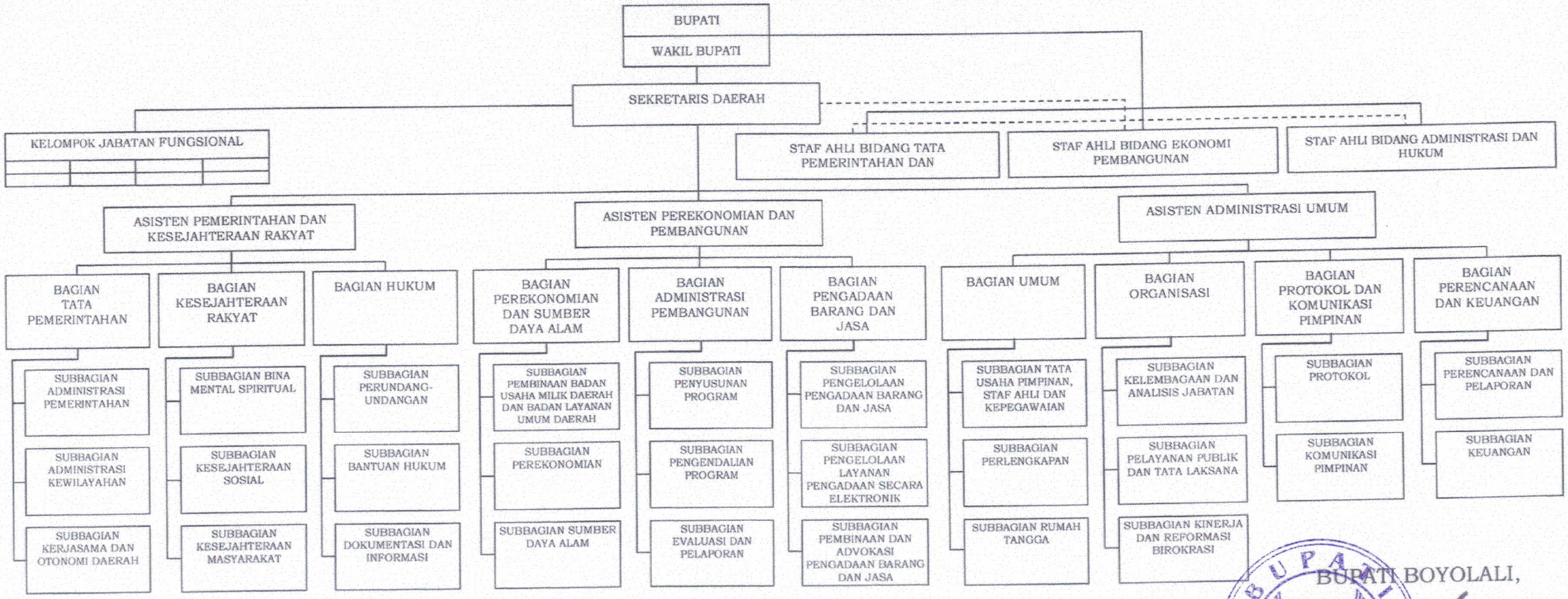


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH

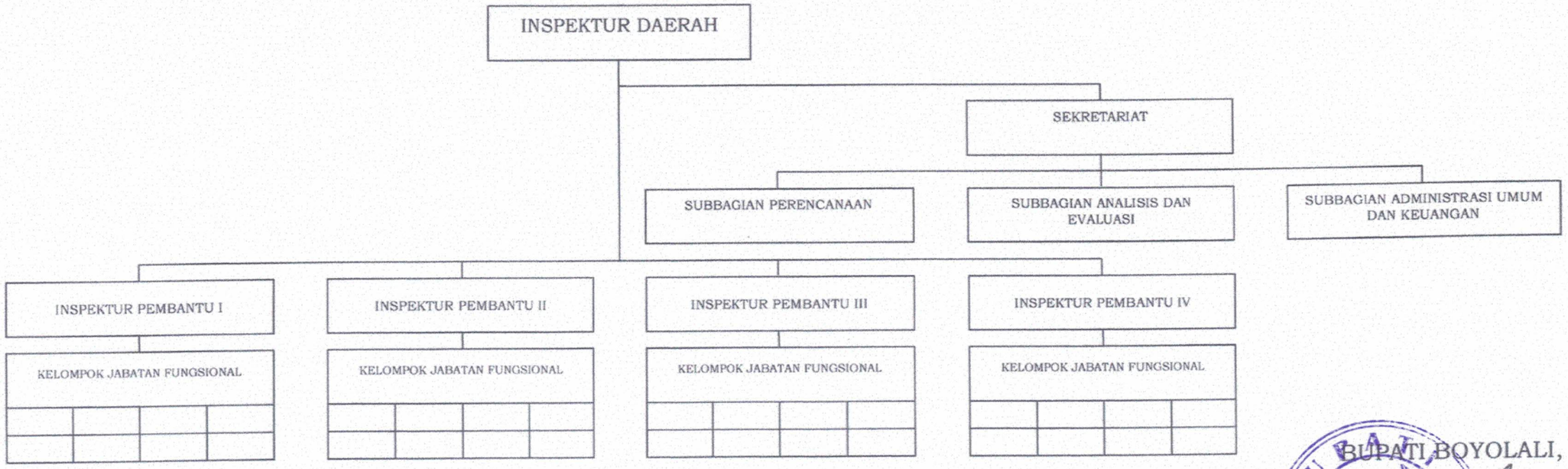


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

INSPEKTORAT DAERAH

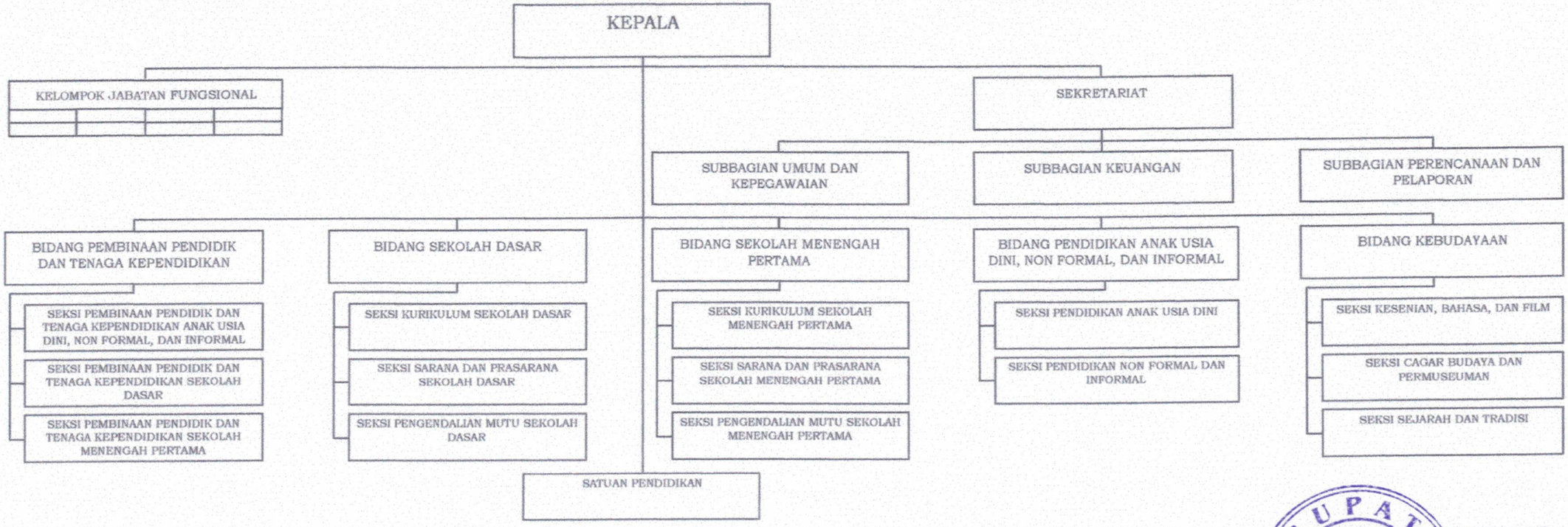


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

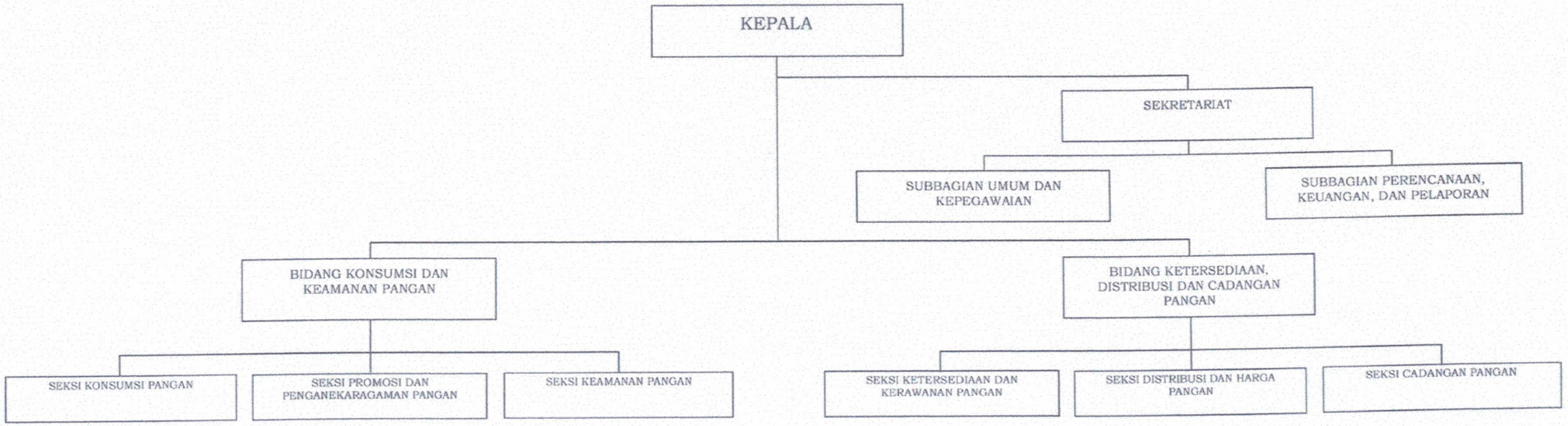


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KETAHANAN PANGAN

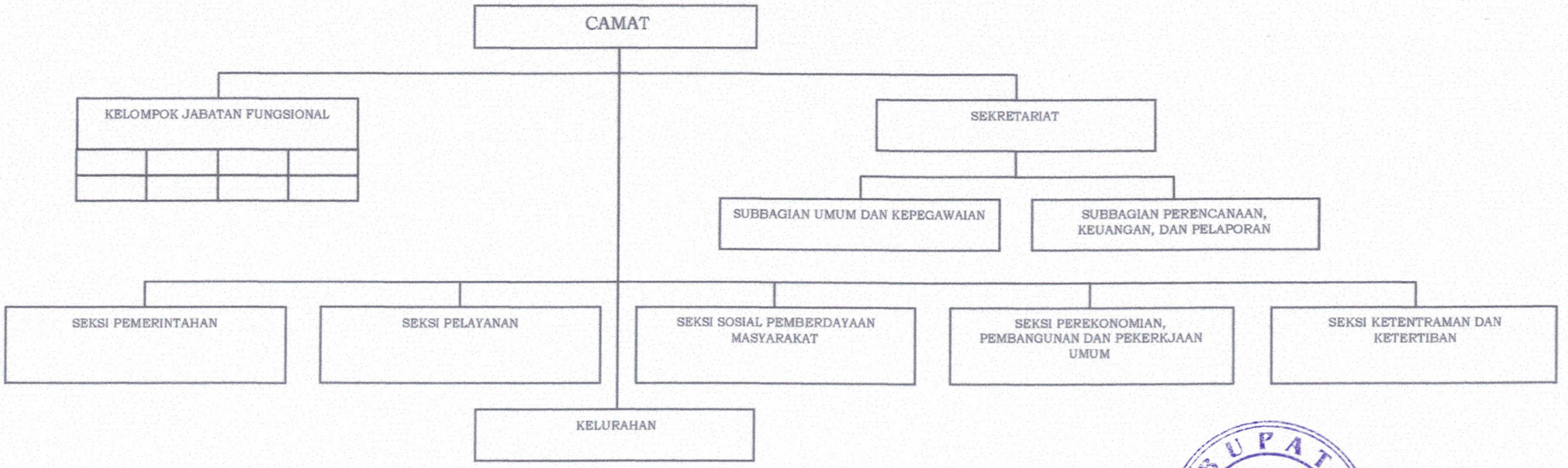


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN



BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN II

MATRIK RPJMD KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 2016-2021

Tabel V.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi	1.1.Meningkat-kan jumlah nilai investasi	1.1.1. Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	81.51	82,06	82,17	82,18	82,19	82,2	82,21	Skor	82,21
			1.1.2. Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	1.096.545.000.000	1.151.372.250.000	1.208.940.862.500	1.275.387.905.625	1.340.857.300.906	1.402.500.165.952	1.475.475.174.249	Rp	1.475.475.174.249
				Jumlah investor	941	900	927	955	983	1.013	1.043	Investor	1.043
		1.2. Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersahabat dengan lingkungan	1.2.1. Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.190.322	1.289.322	1.324.322	1.354.322	1.384.322	1.414.322	1.437.322	m2	1.437.322
				% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	2,65	2,88	2,95	3,02	3,09	3,15	3,21	%	3,21
				Sumur resapan dan sejenisnya	5930	1540	1540	1540	1540	1540	1540	unit	9240
				Cakupan pengelolaan sampah mandiri	5	2	2	2	2	2	2	desa/ kel	12
			1.2.2. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	5	7	10	12	15	18	20	%	20
2.	Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan	2.1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah	2.1.1. Terpenuhinya infrastruktur dasar	Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,00	71,24	72,09	72,96	73,84	74,72	75,62	%	75,62
				Panjang pembangunan jalan baru	3.945	-	5.000	6.000	5.000	3.500	3.000	m	22.500
				Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	79,98	80,98	82,98	84,98	86,98	88,98	90,98	%	90,98
				Drainase dalam kondisi baik	2.976	5.740	6.240	6.740	7.240	7.740	8.240	m	8.240
				Prosentase ketersedianya air baku	0,60	3,28	4,78	6,27	7,76	9,26	10,75	%	10,75
				Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	77	79	82	84	87	90	92	%	92
				Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	12,65	12,97	13,28	13,59	13,90	14,05	14,29	%	14,29
				Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	70,04	71,82	73,57	75,28	76,98	79,98	81,73	%	81,73
			2.1.2. Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	76,59	78,09	80,59	83,09	85,59	88,09	89,59	%	89,59
				Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	58	58	68	79	89	95	100	%	100
				Penambahan titik lampu	11.933	240	2000	2000	2000	2000	2000	titik lampu	10.240
				Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	271	50	35	35	35	35	35	unit	225

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	%	0,039
			2.1.3. Terpenuhinya infrastruktur sosial	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	11	10	10	9	9	8	8	Peringkat	8
				Bertambahnya Cabang Olahraga	1	1	1	1	1	1	1	Pengurus Cabang	6
				Bertambahnya lapangan olahraga	1	2	2	3	3	4	4	Lapangan	18
				Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan tertib administrasi pelayanan perpustakaan dan bahan pustaka serta pembinaan perpustakaan :									
				a. Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	60	65	67	70	72	74	76	%	76
				b. Cakupan pembinaan perpustakaan desa	3,79	5,48	7,17	8.86	10,55	12,66	14,77	%	14,77
				c. Cakupan layanan perpustakaan keliling	100	100	100	100	100	100	100	%	100
3.	Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera	3.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel	3.1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban pembangunan daerah sesuai dengan regulasi									
				a. Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Ada
				b. Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Ada
				c. Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Ada
				d. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	1	1	1	1	1	1	skor	1
				Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Prosentase Peningkatan PAD	6,52	3,55	10,24	10,40	10,45	10,50	10,54	%	10,54
				Opini laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP
				Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	NA	1	2	2	3	3	3	Level	3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	NA	2	2	2	3	3	3	Level	3
				Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	31	30	29	28	27	26	25	Temuan/ Rekomen-dasi	25
			3.1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	NA	NA	5	5	5	5	5	Dokumen	25
				Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	NA	3	35	5	5	5	5	Dokumen	58
				Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NA	55,03	58	61	64	67	70	Skor	70
				Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	80	80	81	81,5	82	82,5	83	%	83
				Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	68	68	70	72	74	76	80	%	80
				Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	51	57	66	62	62	62	62	dokumen	371
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	78,77	78	79	79,25	79,5	79,75	80	skor IKM	80
				Persentase kerjasama (MoU,Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	100	100	90	90	90	90	90	%	90
				Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	NA	NA	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	NA	25	45	75	100	100	100	%	100
				Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Kualitas layanan e-procurement	78,97	79,00	79,50	79,75	80,00	80,50	81,00	%	81,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	5	6	6	7	7	8	9	Media	43
				Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7	7	7	7	7	7	7	dokumen	42
				Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	50	50	50	60	75	85	85	%	85
				Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan Pengelolaan arsip daerah	30	35	40	45	50	55	60	%	60
				Prosentase sanggahan lelang	6	5,95	5,6	5,2	4,8	4,4	4	%	4
				Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	75	90	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	34	41	48	55	62	69	80	%	80
		3.2. Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	3.2.1. Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	NA	28,55	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	%	100,00
				Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	80	80	83	85	87	90	90	%	90
				Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketemtraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	67	85	90	90	90	95	95	%	95
				Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	NA	78,00	93,90	96,34	97,56	98,78	100,00	%	100,00
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	NA	30,00	78,00	80,00	80,00	82,00	82,00	%	82,00
				Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100,00	42,00	30,23	65,12	76,74	88,37	100,00	%	100,00
				Indeks Resiko Bencana	140	130	120	110	100	90	80	%	80
				Cakupan kebakaran yang tertangani	60	65	68	71	74	77	80	%	80
				Cakupan penanganan PMKS	29,77	29,77	31,77	33,77	35,77	37,77	39,77	%	39,77
				Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70	NA	70	70	70	70	70	Perusahaan	70
				Tingkat penyerapan tenaga kerja	42,6	36,5	36,7	37,1	37,2	37,2	37,2	%	37,2

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240	240	240	240	240	240	240	Orang	1440
				Rasio rumah layak huni			85	86	87	88	89	%	89
				Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	2,75	0	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	ha	2,75
				Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	21	21	21	42	63	84	100	%	100
				Cakupan Peserta KB.	75	75	75	77	77	80	80	%	80
				Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.	0,93	0,93	2	1,8	1,6	1,4	1,2	%	1,2
				Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif.	9	17	24	34	47	63	83	Kelompok	83
					10,84	20,48	28,92	40,96	56,63	75,90	100,00	%	100,00
				Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	7	7	10	14	16	21	21	%	21
				Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	5	15	26	42	57	78	100	%	100
				Desa layak anak	NA	19	22	25	28	31	34	Desa	159
4.	Boyolali, sehat, produktif, berdaya saing	4.1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah	4.1.1. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	20	20	30	30	30	30	30	UMKM	170
				Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	40	45	50	50	50	50	50	koperasi	295
				Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	39	44	49	54	54	54	54	%	54
				Kelompok binaan PKK	286	287	287	287	287	287	287	Kelompok	287
				Jumlah LSM	267	267	267	267	267	267	267	Lembaga	267
				Jumlah PKK aktif	287	287	287	287	287	287	287	Kelompok	287
				Posyandu aktif	1143	1209	1275	1341	1407	1473	1539	Unit	1539
				Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	10	17	34	51	67	84	100	%	100
				Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	121	141	161	181	201	221	241	Lembaga	241
			4.1.2. Meningkatnya Derajad kesehatan	Penurunan Angka Kematian Bayi	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,4	8,4	per 1000 kh	8,4
				Kasus Kematian Ibu	21	21	21	20	20	19	19	Kasus	19
				Penurunan Angka Kematian Balita	11,8	11,8	11,4	11,2	11	10,5	10	per 1000	10
				Cakupan kunjungan bayi	NA	80	82	85	87	90	95	%	95
				Cakupan pelayanan anak balita	NA	NA	92	93	94	95	95	%	95
				Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	NA	NA	100	100	100	100	100	%	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	NA	NA	80	85	90	90	90	%	90
				Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	36,9	38,3	38,6	38,9	39,2	39,6	40	%	40
				Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	NA	90	92	94	96	98	100	%	90
				Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	NA	20	25	35	40	45	45	%	45
				Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	NA	20	25	35	40	45	45	%	45
				Cakupan Penanggulangan & pencegahan penyakit:									
				Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	50.4	50	49,5	49	48,5	48	47,5	per 100,000	47,5
				Angka kematian DBD (CFR)	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	% dari jumlah penderita	1,6
				Prosentase Jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	NA	5	10	20	30	40	50	%	50
				Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	NA	> 60	> 65	> 70	> 75	> 80	> 85	%	> 85
				Persentase desa/kel. Yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	NA	10	20	30	40	50	50	%	50
				Cakupan Desa UCI	100	100	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar Pemerintah:									
				Puskesmas Terakreditasi	NA	-	2	4	6	8	10	puskesmas	29
				Cakupan Rawat Jalan (pusk)	NA	15	15	15	15	15	15	%	15
				Cakupan Rawat Inap (pusk)	NA	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	%	1,5
				Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	NA	NA	90	90	90	90	90	%	90
				Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat	NA	100	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	NA	100	100	100	100	100	100	%	100
				Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	NA	3,45	6,89	10,35	13,79	17,24	20,69	%	20,69
				Rasio dokter	15,1	15,1	15,2	15,6	16,0	16,4	17,0	%	17,0
				Rasio dokter gigi	3,9	3,9	4,5	4,8	5,1	5,4	5,9		5,9
				Rasio perawat	87,5	87,5	90,7	92,4	95,3	97,6	100,3		100,3
				Rasio bidan	56,5	56,5	56,7	57,0	57,2	57,8	58,4		58,4

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	NA	NA	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	%	100,0
				Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	NA	NA	66	80	93	106	120	Desa	120
				Proporsi Rumah tangga sehat	NA	NA	71	72	73	74	75	%	75
				Cakupan Desa STBM	NA	5	40	75	160	200	267	Desa	267
				Cakupan pelayanan rumah sakit :									
				RSUD Pandan Arang	81,62	97,28	98,02	99,18	99,46	99,85	100	%	100
				RSUD Simo	66,4	68,11	71,57	74,27	79,23	83,25	88,33	%	88,33
				RSUD Banyudono	50	54	63	69	81	90	100	%	100
			4.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	APK PAUD	69,80	71,20	75,00	78,80	79,87	80,93	82,00	%	82,00
				APK SD	99,35	99,50	99,50	99,80	101,00	102,00	102,50	%	102,50
				APK SMP	94,20	94,80	95,00	96,80	97,60	98,40	100,20	%	100,20
				APM SD	86,01	86,05	86,10	86,25	86,50	86,75	87,50	%	87,50
				APM SMP	69,95	70,00	70,15	70,50	71,50	73,50	75,50	%	75,50
				Angka Putus Sekolah SD	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%	0,03
				Angka Putus Sekolah SMP	0,27	0,26	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	%	0,15
				Angka Melanjutkan SD ke SMP	98,40	98,50	98,75	99,00	99,15	99,25	99,50	%	99,50
				Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,06	94,10	94,15	94,20	94,22	94,61	95,00	%	95,00
				Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	96,60	97,20	97,50	97,80	98,10	98,40	98,70	%	98,70
				Persentase guru SD bersertifikat pendidik	50,58	53,70	54,10	55,12	56,14	57,16	62,50	%	62,50
				Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	53,92	57,95	66,97	67,46	67,95	68,44	75,00	%	75,00
				Rasio Siswa terhadap Guru SD	12,23	13,00	14,75	16,50	18,25	20,00	20,00	Orang	20,00
				Rasio Siswa terhadap Guru SMP	13,71	14,00	15,75	17,50	19,25	20,00	20,00	Orang	20,00
				Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,34	0,32	0,32	0,3	0,26	0,21	0,15	%	0,15
				Presentase SD Berakreditasi minimal B	87,00	88,50	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00	%	95,00
				Presentase SMP berakreditasi minimal B	78,26	79,35	80,00	81,25	82,50	83,75	85,00	%	85,00
			4.1.4. Meningkatnya daya saing industri	IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	124	270	345	366	386	408	430	IKM	430
				Pembentukan kawasan peruntukkan industri	1	0	0	1	0	1	0	Kawasan	2
				Meningkatnya Industri	8974	9064	9154	9246	9338	9432	9573	Unit	9573
			4.1.5. Meningkatnya daya saing perdagangan	Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	60	70	75	80	85	90	95	Unit	95
				Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	NA	17	33	50	67	83	100	%	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	pelaku usaha	25.200
				Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	4.989.335	4.989.335	5.039.335	5.089.335	5.139.335	5.189.335	5.239.335	Rp	30.686.010
				Nilai ekspor barang (USD)	125.000	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016	165.917	US $	884.249
				Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%)	13,10	13,25	13,50	13,75	14,00	14,25	14,50	%	14,50
5.	Boyolali, Lumbung Padi dan Pangan Nasional	5.1. Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional	5.1.1. Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	279.260	284.548	287.334	290.147	292.987	295.855	298.751	Ton	298.751
				Produksi pangan lainnya :								Ton	
				- Jagung	109.430	135.046	135.721	136.400	137.082	137.767	138.456		138.456
				- Kedelai	5.062	6.728	6.762	6.795	6.829	6.864	6.898		6.898
				Produksi tanaman hortikultura utama								Kuintal	
				- Pepaya	214.217	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872	126.121		126.121
				- Cabe	103.318	110.000	111.100	112.211	113.333	114.466	115.611		115.611
				- Bawang Merah	104.357	32.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530		31.530
				- Jahe	10.180	10.250	10.353	10.457	10.561	10.667	10.773		10.773
				- Kencur	12.140	16.500	16.665	16.832	17.000	17.170	17.342		17.342
				Jumlah produksi tanaman perkebunan :								Ton	
				- Cengkeh	413	300	315	330,75	347,29	364,65	382,88		382,88
				- Kopi	241	120	126	132,30	138,92	145,86	153,15		153,15
				- Kelapa	4.366	4.366	4.584	4.813,52	5.054,19	5.306,90	5.572,25		5.572,25
				- Tembakau	4.101	4.101	4.306,05	4.521,35	4.747,42	4.984,79	5.234,03		5.234,03
				- Tebu	28.410	28.410	29.820	31.311	32.876,55	34.520,38	36.246,40		36.246,40
				- Lada	20	20	19,95	20,95	21,99	23,09	24,25		24,25
				- Atsiri	13	47	49,35	51,82	54,41	57,13	59,99	Kw Minyak	59,99
				Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	16,85	17,6	19,46	21,35	23,22	25,09	26,97	%	26,97
				Meningkatnya Cadangan Pangan	91,68	91,75	92	95	97	100	100	%	100
				Skor Pola Pangan Harapan	87,1	88	89	89,5	90	91	92	Skor	92
6.	Boyolali, kota susu, produsen daging dan hasil ternak	6.1. Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan/ Perikanan	6.1.1. Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	Produksi ikan	33.655	26.261	27.644	29.027	30.478	32.002	33.602	ton	33.602
				Produksi hasil peternakan									
				a. Produksi daging	8.209	8.210,00	8.250,00	8.295,00	8.345,00	8.400,00	8.460	ton	8.460
				b. Produksi susu (kilo liter)	45.540	46.776,00	46.976,00	47.226,00	47.526,00	47.851,00	48.201	kilo liter	48.201
				c. Populasi ternak	310.040	310.271,00	312.131,00	314.116,00	316.181,00	318.381,00	320.731	ekor	320.731
				Sapi potong	86.990	87.000	87.500	88.050	88.650	89.275	90.000		90.000
				Sapi perah	86.360	86.400	86.910	87.445	88.010	88.635	89.310		89.310
				Kambing dan domba	136.690	136.871	137.721	138.621	139.521	140.471	141.421		141.421

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal periode perencanaan	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir periode perencanaan
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Boyolali Lebih maju dan bertehnologi	7.1. Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui tehnologi informasi menuju Kota Cerdas (*smart city*)	7.1.1. Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	Prosentase Perangkat Daerah yang mengembang kan aplikasi E-governance	38	39	40	57	65	71	77	%	77
				Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	88	89	90	90	91	92	93	%	93
				Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	47	47	48	49	50	51	52	%	52
			7.1.2. Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Kunjungan Wisatawan	432.767	432.767	437.087	441.458	445.875	450.335	454.848	orang	2.662.370
				Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	1.419.153	1.426.000	1.433.130	1.440.296	1.450.000	1.457.000	1.470.000	Rp (.000)	1.470.000
				Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	90	91	92	94	96	98	100	%	100

LAMPIRAN III

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2016-2021

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR : 050 / 369 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 Juni 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2016-2021

Visi : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera
Misi : 1. Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi
: 2. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan
: 3. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera
: 4. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing
: 5. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional
: 6. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
: 7. Boyolali lebih maju dan berteknologi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
Misi 1	: Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi				
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	Nilai	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Hasil survey IKM pelayanan perijinan	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	Nilai	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Penanaman Modal Formulasi penghitungan : Nilai investasi Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPMPTSP	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	Investor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Penanaman Modal Formulasi penghitungan : Jumlah investor Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPMPTSP	DPMPTSP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	m2	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Penataan Ruang Formulasi penghitungan : Luas RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : RTRW, RDTR	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Penataan Ruang Formulasi penghitungan : (Luasan RTH publik sebesar 20% dibagi luasan wilayah kota/kawasan perkotaan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : RTRW, RDTR	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	unit	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Lingkungan Hidup Formulasi penghitungan : Jumlah sumur resapan dan sejenisnya Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DLH	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	desa/kel	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Lingkungan Hidup Formulasi penghitungan : Jumlah desa/kel yang menerapkan pengelolaan sampah mandiri Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DLH	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Lingkungan Hidup Formulasi penghitungan : (Jumlah aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) di kali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DLH	DLH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Lingkungan Hidup Formulasi penghitungan : (Jumlah usaha/kegiatan yang ramah lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha/kegiatan) dikali 100% Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DLH	DLH
Misi 2	: Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan				
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jaringan jalan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	m	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : Panjang pembangunan jalan baru Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi jaringan irigasi seluruhnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	m	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		14 Prosentase ketersediannya air baku	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Jumlah ketersediaan air baku dibagi jumlah kebutuhan ketersediaan air baku) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk yang terlayani penggunaan air baku dibagi jumlah penduduk yang membutuhkan air baku) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan dibagi jumlah penduduk Perkotaan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pekerjaan Umum Formulasi penghitungan : (Jumlah Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan dibagi Penduduk Perdesaan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	%	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Bidang Urusan Penataan Ruang Formulasi penghitungan : (Jumlah pemanfaatan ruang sesuai RTR dibagi Jumlah pemanfaatan ruang) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	%	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Bidang Urusan Penataan Ruang Formulasi penghitungan : (Jumlah wilayah yang telah mempunyai RDTR dibagi Jumlah wilayah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : RDTR	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	Titik lampu	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perhubungan Formulasi penghitungan : Jumlah penambahan titik lampu Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dishub	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Formulasi penghitungan : Jumlah unit sumber Energi Baru terbarukan yang dibangun Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DLH	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perhubungan Formulasi penghitungan : (Jumlah sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan yang harus ada) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dishub	DISHUB
		23 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perhubungan Formulasi penghitungan : (Jumlah kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor yang ada dibagi jumlah kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor jalan yang harus ada) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dishub	DISHUB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Bidang Urusan Perhubungan Formulasi penghitungan : (panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dishub	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Klub olahraga	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Seni Budaya dan Olahraga, Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Formulasi penghitungan : Peringkat PORDA tingkat Provinsi Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	Klub olahraga	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Seni Budaya dan Olahraga, Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Formulasi penghitungan : Jumlah Cabang Olahraga Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	Lapangan	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Formulasi penghitungan : (Jumlah lapangan olahraga di kabupaten dibagi jumlah penduduk) dikali 1000 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISPORAPAR
		28 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perpustakaan Formulasi penghitungan : Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dibagi Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dinas Arpus	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perpustakaan Formulasi penghitungan : Jumlah pembinaan perpustakaan desa dibagi jumlah perpustakaan desa yang ada dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dinas Arpus	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perpustakaan Formulasi penghitungan : (Jumlah layanan perpustakaan keliling dibagi jumlah layanan perpustakaan keliling seharusnya dilakukan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dinas Arpus	DINAS ARPUS
Misi 3	: Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera				
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Formulasi penghitungan : Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD) Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD	SETDA
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Formulasi penghitungan : Jumlah Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)) Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : RKPD, RPJMD	BP3D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP) Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	skor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kemenpan dan RB Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Hasil nilai Evaluasi SAKIP dari Kemenpan dan RB	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Formulasi penghitungan : (Jumlah data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan dibagi data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang seharusnya dipublikasikan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BP3D	BP3D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		36 Prosentase Peningkatan PAD	%	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : ((PAD tahun ini dikurangi PAD Tahun kemarin) dibagi PAD tahun ini) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BKD	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	Opini	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Hasil evaluasi/penilaian dari BPK Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Hasil evaluasi/penilaian dari BPK	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	level	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	level	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan INSPEKTORAT	INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	temuan/ rekomendasi	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan yang tersusun Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Perda, Perbub, dan SK tentang administrasi kewilayahan	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah kebijakan teknis bidang kelembagaan yang tersusun Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Perda, Perbub, dan SK tentang kelembagaan	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	skor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Nilai Pelaksanaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Nilai Pelaksanaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Inspektorat	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi dibagi Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menempati jabatan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BKP2D	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah Aparatur Sipil Negara yang taat terhadap peraturan kepegawaian dibagi Jumlah Aparatur Sipil Negara) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BKP2D	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda dibagi produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BAGIAN HUKUM	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	skor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah rata-rata nilai unsur pelayanan di unit pelayanan dibagi jumlah unsur pelayanan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Laporan Hasil SKM	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi dibagi Jumlah kerjasama (MoU,Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Formulasi penghitungan : ((capaian penerbitan kartu keluarga ditambah cakupan penerbitan KTP ditambahn capaian penerbitan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun ditambah cakupan penerbitan akte kelahiran ditambah capaian penerbitan kartu akte kematian) dibagi jumlah indikator) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Dokumen pelayanan kependudukan	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL dibagi Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 th dan atau pernah/sudah menikah)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data Kepemilikan KTP-EL Kabupaten	DISPENDUKCAPIL
		52 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Formulasi penghitungan : (Jumlah fasilitasi layanan persandian dibagi jumlah layanan persandian yang seharusnya difasililtasi) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOMINFO	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah pengajuan e-procurement yang masuk dibagi jumlah pengajuan e-procurement yang terlayani) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Media	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Jumlah kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : PERDA, PERBUP, SK tentang Pemberitaan, Pengumpulan dan Distribusi Informasi, dan Protokol	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	dokuman	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Statistik Formulasi penghitungan : Jumlah dokumen statistik daerah yang dipublikasikan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOMINFO	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Formulasi penghitungan : Jumlah dokumen tentang hasil implementasi penelitian dan inovasi daerah yang dipublikasikan Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Jurnal Kelitbangan, Website Pemerintah Daerah (BP3D)	BP3D
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kearsipan Formulasi penghitungan : (Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibagi jumlah Perangkat Daerah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINAS ARPUS	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kearsipan Formulasi penghitungan : (Jumlah arsip daerah yang dikelola dibagi jumlah arsip daerah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINAS ARPUS	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah sanggahan lelang dibagi jumlah lelang) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan dibagi jumlah pelaksanaan layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan yang seharusnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pertanahan Formulasi penghitungan : (Jumlah permasalahan pertanahan yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPUPR	DPUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Formulasi penghitungan : (Jumlah konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani dibagi jumlah konflik antar kelompok masyarakat yang masuk) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan KANKESBANGPOL	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : ((Jumlah kejadian kriminalitas tahun lalu dikurangi jumlah kriminalitas tahun ini) dibagi jumlah kejadian kriminalitas tahun lalu)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan SATPOL PP	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan SATPOL PP	SATPOL PP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah pelanggaran perda di kabupaten yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran perda di kabupaten) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan SATPOL PP	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Formulasi penghitungan : (Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dibagi jumlah masyarakat di kabupaten) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan KANKESBANGPOL	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Formulasi penghitungan : (Jumlah sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA dibagi jumlah sekolah setingkat SLTA) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan KANKESBANGPOL	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : Indeks resiko bencana Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan BPBD	BPBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Formulasi penghitungan : (Jumlah kebakaran yang tertangani dibagi jumlah kejadian kebakaran) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan SATPOL PP	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Sosial Formulasi penghitungan : (Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINSOS	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	perusahaan	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Ketenagakerjaan Formulasi penghitungan : (Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Ketenagakerjaan Formulasi penghitungan : (Jumlah tenaga kerja yang terserap dibagi jumlah pelamar kerja) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	orang	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Sumber Daya Manusia, Bidang Urusan Ketenagakerjaan Formulasi penghitungan : Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		74 Rasio rumah layak huni	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perumahan Formulasi penghitungan : (Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPKP	DPKP
		75 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Perumahan Formulasi penghitungan : Luas Lingkungan pemukiman kumuh Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DPKP	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) dibagi jumlah desa) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah PUS peserta KB dibagi jumlah PUS) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah PUS yang istrinya dibawah 20 tahun dibagi jumlah PUS) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif dibagi jumlah Kelompok KRR) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif dibagi jumlah desa) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Formulasi penghitungan : (Jumlah Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi dibagi jumlah Kecamatan dikali) 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	desa	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Formulasi penghitungan : Jumlah Desa layak anak Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DP2KBP3A	DP2KBP3A
Misi 4	: Boyolali, sehat, produktif, berdaya saing				
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	UMKM	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Formulasi penghitungan : Jumlah UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	koperasi	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Formulasi penghitungan : Jumlah Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Formulasi penghitungan : Jumlah penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM yang berhasil dibagi jumlah penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISKOPNAKER	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	kelompok	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : Jumlah kelompok binaan PKK Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	lembaga	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : Jumlah LSM Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	kelompok	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : Jumlah PKK aktif Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		89 Posyandu aktif	unit	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : Jumlah Posyandu aktif Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : (Jumlah Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif dibagi Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES
		91 Jumlah lembaga yang meningkatnya kemampuan pengelolaan sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	lembaga	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Formulasi penghitungan : Jumlah lembaga yang meningkatnya kemampuan pengelolaan sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DISPERMASDES	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	per 1000 kh	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Angka Kematian Bayi tahun kemarin dikurangi Angka Kematian Bayi tahun ini Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	kasus	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Jumlah Kasus Kematian Ibu Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	per 1000	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : ((Angka Kematian Balita tahun lalu dikurangi Angka Kematian Balita tahun ini) dibagi Angka Kematian Balita tahun lalu) dikali 100/1001 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (jumlah kunjungan bayi dibagi jumlah bayi yang seharusnya berkunjung/diperiksa yang seharusnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah pelayanan anak balita dibagi jumlah anak balita) dikali 1100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia dibagi jumlah puskesmas) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan dibagi jumlah balita kurus) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dibagi jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang seharusnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian dibagi jumlah pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian yang seharusnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman dibagi jumlah pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman yang seharusnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	per 100.000	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	% dari jumlah penderita	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Angka kematian DBD (CFR) Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil dibagi jumlah orang yang ditest HIV) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dibagi jumlah desa/kel) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		108 Cakupan Desa UCI	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah desa yang menjalani UCI atau seluruh anak di desa itu telah diimunisasi dibagi jumlah desa) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	puskesmas	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan Rawat Jalan (pusk) Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan Rawat Inap (pusk) Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani dibagi jumlah aduan kegawat daruratan kesehatan yang masuk) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan SPM di Puskesmas Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan SPM di Puskesmas Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes dibagi jumlah Puskesmas) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		116 Rasio dokter	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah dokter dibagi jumlah penduduk) dikali 1000 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah dokter gigi dibagi jumlah penduduk) dikali 1000 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		118 Rasio perawat	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah perawat dibagi jumlah penduduk) dikali 1000 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		119 Rasio bidan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah bidan dibagi jumlah penduduk) dikali 1000 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi dibagi jumlah puskesmas) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	desa	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : (Jumlah Rumah tangga sehat dibagi jumlah rumah tangga) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		123 Cakupan Desa STBM	desa	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Jumlah Desa STBM Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan DINKES	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan RSUD PANDAN ARANG	RSUD PANDAN ARANG
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan RSUD Simo	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Kesehatan Formulasi penghitungan : Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan RSUD Waras Wiris	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah anak didik PAUD dibagi jumlah penduduk umur 0-6 tahun) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		128 APK SD	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk yang sekolah di SD dibagi Jumlah penduduk umur 7—12 tahun) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		129 APK SMP	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk yang sekolah di Sekolah Menengah Pertama dibagi Jumlah penduduk umur 13—18 tahun) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		130 APM SD	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk umur 7—12 yang sekolah di SD dibagi Jumlah penduduk umur 7—12 tahun) dikali 101 Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		131 APM SMP	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk umur 13—18 yang sekolah di SLTP dibagi Jumlah penduduk umur 13—18 tahun) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk usia 7—12 yang tidak ber sekolah lagi dibagi Jumlah penduduk usia 7—12 tahun yang pernah/sedang bersekolah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		133 Angka Putus Sekolah SMP	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk usia 13—18 yang tidak ber sekolah lagi dibagi Jumlah penduduk usia 13—18 tahun yang pernah/sedang bersekolah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan SMP dibagi Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran sebelumnya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah Ruang Kelas SD kondisi baik dibagi Ruang Kelas SD) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah Ruang Kelas SMP kondisi baik dibagi Ruang Kelas SMP) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah guru SD bersertifikat pendidik dibagi guru SD) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah guru SMP bersertifikat pendidik dibagi guru SMP) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	orang	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : Perbandingan antara setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 20 peserta didik Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	orang	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : Perbandingan antara setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 20 peserta didik Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	Alasan : Memenuhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa menulis dibagi Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah SD Berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SD) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Pendidikan Formulasi penghitungan : (Jumlah SMP Berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SMP) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdikbud	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perindustrian Formulasi penghitungan : Jumlah IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	kawasan	Alasan : Memenuhi Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Bidang Urusan Penataan Ruang Formulasi penghitungan : Jumlah kawasan peruntukkan industri Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : RTRW, RDTR	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	unit	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perindustrian Formulasi penghitungan : ((Jumlah industri tahun n dikurangi Jumlah Industri tahun (n-1)) dibagi jumlah industri s/d tahun n) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	unit	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : Jumlah Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll). Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : (Jumlah lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata dibagi lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	pelaku usaha	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : Jumlah Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Rp.	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : Jumlah Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
		151 Nilai ekspor barang (USD)	US $	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : Nilai ekspor dikurangi nilai impor Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Perdagangan Formulasi penghitungan : (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi Jumlah PDRB) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disdagperin	DISDAGPERIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
Misi 5	: Boyolali, Lumbung Padi dan Pangan Nasional				
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : (Produksi tanaman padi (ton) dibagi Luas areal tanaman padi (ha)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:			DISPERTAN
		154 - Jagung	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : (Produksi jagung (ton) dibagi Luas areal tanaman jagung (ha)) dikali 100% Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		155 - Kedelai	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : (Produksi kedelai (ton) dibagi Luas areal tanaman kedelai (ha)) dikali 100% Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama			DISPERTAN
		156 - Pepaya	kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Pepaya Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		157 - Cabe	kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Cabe Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		158 - Bawang Merah	kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Bawang Merah Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		159 - Jahe	kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Jahe Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		160 - Kencur	kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Kencur Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :			DISPERTAN
		161 - Cengkeh	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Cengkeh Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		162 - Kopi	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Kopi Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		163 - Kelapa	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Kelapa Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		164 - Tembakau	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Tembakau Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		165 - Tebu	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Tebu Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		166 - Lada	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Lada Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN
		167 - Atsiri	Kuintal	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi Atsiri Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Dispertan	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Ketahanan Pangan Formulasi penghitungan : (jumlah desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dibagi jumlah desa) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data kelompok LPMD di Kabupaten Boyolali	DKP
		169 Presentase peningkatan Cadangan Pangan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Ketahanan Pangan Formulasi penghitungan : (jumlah Cadangan Pangan daerah dibagi standar cadangan pangan kabupaten) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data cadangan pangan yang ada di kabupaten Boyolali	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	skor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Ketahanan Pangan Formulasi penghitungan : Skor Pola Pangan Harapan Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Analisa hasil survey konsumsi pangan	DKP
Misi 6	: Boyolali, kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan				
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Formulasi penghitungan : (Jumlah produksi ikan (ton) dibagi Target daerah (ton)) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan			DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	ton	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi daging Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		173 - Produksi susu (kilo liter)	kilo liter	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah produksi susu Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	ekor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah populasi ternak Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN
		175 Sapi potong	ekor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah sapi potong Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN
		176 Sapi perah	ekor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah sapi perah Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN
		177 Kambing dan domba	ekor	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pertanian Formulasi penghitungan : Jumlah kambing dan domba Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disnakkan	DISNAKKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
Misi 7	: Boyolali lebih maju dan berteknologi				
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Formulasi penghitungan : (Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance dibagi jumlah Perangkat Daerah) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Diskominfo	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Formulasi penghitungan : (Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah dibagi jumlah informasi pembangunan daerah yang harus disebarluaskan) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Diskominfo	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Formulasi penghitungan : (Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif dibagi jumlah kelompok informasi masyarakat) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Diskominfo	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisatawan	orang	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pariwisata Formulasi penghitungan : (Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dibagi Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISPORAPAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6
		182 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata	Rp (.000)	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pariwisata Formulasi penghitungan : Jumlah PAD bidang Pariwisata meningkat Tipe penghitungan : Non Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	%	Alasan : Memenuhi Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Bidang Urusan Pariwisata Formulasi penghitungan : (Jumlah benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah benda, situs dan kawasan budaya) dikali 100% Tipe penghitungan : Komulatif Sumber data : Data hasil olahan Disporapar	DISDIKBUD

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN N

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,19 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.340.857.300.906 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	983 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.384.322 m2	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,09 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	15 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	73,84 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	5.000 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	86,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	7.240 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	7,76 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	87 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	13,90 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	76,98 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	85,59 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	89,47 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,037 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	9 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	3 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	72 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	10,55 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokuman	BP3D
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokuman	BP3D
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokuman	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65 skor	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36 Prosentase Peningkatan PAD	10,45 %	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	27 temuan/ rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5 dokuman	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	64 skor	SETDA
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	82 %	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	74 %	SETDA
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	79,50 skor	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	80 skor	SETDA
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	7 Media	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	75 %	BP3D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS
		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	50 %	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	4,8 %	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	62 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	71,43 %	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	87 %	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	90 %	SATPOL PP
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	97,56 %	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	80 %	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	76,74 %	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	100 %	BPBD
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	74 %	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	35,77 %	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74 Rasio rumah layak huni	87 %	DPKP
		75 Luas Lingkungan pemukiman kumuh	1,65 Ha	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	63 %	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	77 %	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,6 %	DP2KBP3A
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	56,63 %	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	16 %	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	57 %	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	28 desa	DP2KBP3A
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89 Posyandu aktif	1407 unit	DISPERMASDES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	67 %	DISPERMASDES
		91 Jumlah lembaga yang meningkat kemampuan pengelolaan sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	201 lembaga	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	20 kasus	DINKES
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	11 per 1000	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	87 %	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	94 %	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	39,2 %	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	96 %	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	40 %	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	40 %	DINKES
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	48,5 per 100.000	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	1,7 % dari jumlah penderita	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	30 %	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 75 %	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	40 %	DINKES
		108 Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	6 puskesmas	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	13,79 %	DINKES
		116 Rasio dokter	16,0 %	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	5,10 %	DINKES
		118 Rasio perawat	95,3 %	DINKES
		119 Rasio bidan	57,20 %	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	60 %	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	93 desa	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	73 %	DINKES
		123 Cakupan Desa STBM	160 desa	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	99,46 %	RSUD PANDAN ARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	79,23 %	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	81 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	79,87 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	101,00 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	97,60 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	86,50 %	DISDIKBUD
		131 APM SMP	71,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,20 %	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,15 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,22 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,10 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	56,14 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	67,95 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	18,25 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	19,25 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,26 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	92,50 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	82,50 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	386 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	0 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9338 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	85 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	67 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.139.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Nilai ekspor barang (USD)	150.491 US $	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	14,00 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	292.987 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	137.082 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.829 ton	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	123.636 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	113.333 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	30.909 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.561 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.000 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	347 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	139 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.054 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	4.747,42 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	32.877 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	21,99 ton	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		167 - Atsiri	54,41 Kuintal	DISPERTAN
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	23,22 %	DKP
		169 Presentase peningkatan Cadangan Pangan	97 %	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	90 skor	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	30.478 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.345 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	47.526 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	316.181 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	88.650 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	88.010 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	139.521 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	65 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	91 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	50 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisatawan	445.875 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata	1.450.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	96 %	DISDIKBUD

Boyolali, 31 Januari 2018

BUPATI BOYOLALI

Ttd.

SENO SAMODRO

LAMPIRAN V

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,19 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.340.857.300.906 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	983 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.384.322 m2	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,09 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	15 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	73,84 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	5.000 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	86,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	7.240 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	7,76 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	87 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	13,90 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	76,98 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	85,59 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	89 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,037 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	9 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	3 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	72 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	10,55 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokuman	BP3D
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokuman	BP3D
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokuman	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65 skor	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36 Prosentase Peningkatan PAD	10,45 %	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	27 temuan/ rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5 dokuman	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	64 skor	SETDA
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	82 %	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	74 %	SETDA
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	79,5 skor	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	80,00 skor	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	7 Media	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	75 %	BP3D
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS
		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	50 %	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	4,8 %	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	62 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	71,43 %	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	87 %	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	90 %	SATPOL PP
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	97,56 %	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	80 %	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	76,74 %	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	100 %	BPBD
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	74 %	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	35,77 %	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74 Rasio rumah layak huni	87 %	DPKP
		75 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	1,65 Ha	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	63 %	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	77 %	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,6 %	DP2KBP3A
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	56,63 %	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	16 %	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	57 %	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	28 desa	DP2KBP3A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89 Posyandu aktif	1407 unit	DISPERMASDES
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	67 %	DISPERMASDES
		91 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	201 lembaga	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	20 kasus	DINKES
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	11 per 1000	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	87 %	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	94 %	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	39,2 %	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	96 %	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	40 %	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	40 %	DINKES
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	48,5 per 100.000	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	1,7 % dari jumlah penderita	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	30 %	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 75 %	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	40 %	DINKES
		108 Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	6 puskesmas	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	13,79 %	DINKES
		116 Rasio dokter	16,0 %	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	5,1 %	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		118 Rasio perawat	95,3 %	DINKES
		119 Rasio bidan	57 %	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	60 %	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	93 desa	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	73 %	DINKES
		123 Cakupan Desa STBM	160 desa	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	99,46 %	RSUD PANDAN ARANG
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	79,23 %	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	81 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	79,87 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	101,00 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	97,60 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	86,50 %	DISDIKBUD
		131 APM SMP	71,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,20 %	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,15 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,22 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,10 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	56,14 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	67,95 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	18,25 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	19,25 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,26 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	92,50 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	82,50 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	386 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	0 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9338 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	85 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	67 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.139.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Nilai ekspor barang (USD)	150.491 US $	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	14,00 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	292.987 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	137.082 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.829 ton	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	123.636 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	113.333 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	30.909 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.561 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.000 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	347 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	139 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.054 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	4.747,42 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	32.877 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	21,99 ton	DISPERTAN
		167 - Atsiri	54,41 Kuintal	DISPERTAN
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	23,22 %	DKP
		169 Meningkatnya Cadangan Pangan	97 %	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	90 skor	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	30.478 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.345,00 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	47.526,00 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	316.181,00 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	88.650 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	88.010 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	139.521 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	65 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	91 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	50 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisatawan	445.875 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	1.450.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	96 %	DISDIKBUD

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	546.787.250		DPMPTSP
2	Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	141.596.250		DPMPTSP
3	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	13.223.250		DPMPTSP
4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.797.121.000	APBD dan DAK	DLH
5	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.976.000.000		DLH
6	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	428.500.000		DLH
7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.000.000		DLH
8	Peningkatan Pengendalian Polusi	615.000.000	APBD dan DAK	DLH
9	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	27.999.404.000		DLH
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan	140.240.583.000	APBD, DAK, Bankeu Provinsi, DBHCHT dan DID	DPUPR
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.325.000.000		DPUPR
12	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.845.000.000		DPUPR
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.407.821.000	APBD dan DAK	DPUPR
14	Pengembangan Sistem Informasi pertanahan	136.820.000		DPUPR
15	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	11.551.203.000	APBD dan DAK	DPUPR
16	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	6.085.135.000	APBD dan DAK	DPUPR

17	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	26.833.000.000		DPUPR
18	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.300.000.000		DPUPR
19	Pengawasan Jasa Konstruksi	106.411.000		DPUPR
20	Perencanaan Tata Ruang	733.503.500		DPUPR
21	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	26.940.000		DPUPR
22	Pengembangan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan	165.000.000		Dishub
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	185.000.000		Dishub
24	Peningkatan Pelayanan Angkutan	107.580.000		Dishub
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	300.000.000		Dishub
26	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.374.365.000		Dishub
27	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	320.000.000		Dishub
28	Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	5.964.321.000		Dishub
29	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	292.750.000		Disporapar
30	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.063.000.000		Disporapar
31	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.022.021.000	DAK dan APBD	Disporapar
32	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	287.250.000		Disporapar
33	Pengembangan Kemitraan	757.038.000	DAK dan APBD	Disporapar
34	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	790.000.000		Disporapar
35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	16.175.000.000		Disporapar
36	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	205.750.000		Dinas Arpus
37	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	128.281.000		Dinas Arpus
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	27.000.000		Dinas Arpus
39	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	36.250.000		Dinas Arpus
40	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.073.080.500		Dinas Arpus
41	Penelitian dan Pengembangan Daerah	491.032.000		BP3D
42	Pengembangan Data/Informasi	348.700.000		BP3D
43	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	95.750.000		BP3D
44	Kerjasama Pembangunan	210.000.000		BP3D
45	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	90.000.000		BP3D
46	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	175.000.000		BP3D
47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000		BP3D
48	Perencanaan Pembangunan Daerah	726.013.000		BP3D
49	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	293.433.000		BP3D
50	Perencanaan Sosial dan Budaya	35.099.000		BP3D
51	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	50.625.000		BP3D
52	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	45.000.000		BP3D
53	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	4.775.000		Sekretariat Daerah
54	Pengembangan data/informasi	72.000.000		Sekretariat Daerah
55	Pengembangan wilayah transmigrasi	1.500.000		Sekretariat Daerah
56	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	108.500.000		Sekretariat Daerah
57	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	210.600.000		Sekretariat Daerah
58	Kerjasama Pembangunan	227.926.250		Sekretariat Daerah
59	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	96.750.000		Sekretariat Daerah
60	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	15.000.000		Sekretariat Daerah
61	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	161.600.000		Sekretariat Daerah
62	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.166.105.000		Sekretariat Daerah
63	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	666.950.000		Sekretariat Daerah
64	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	150.000.000		Sekretariat Daerah
65	Kerjasama informasi dengan mas media	41.852.500		Sekretariat Daerah
66	Penataan Peraturan Perundang-undangan	565.010.200		Sekretariat Daerah
67	Penataan Daerah Otonomi Baru	34.540.000		Sekretariat Daerah
68	Pendidikan politik masyarakat	35.985.000		Sekretariat Daerah
69	Peningkatan Pelayanan Publik	220.030.000		Sekretariat Daerah
70	Perencanaan Pembangunan Daerah	328.007.750		Sekretariat Daerah
71	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	646.489.600		Sekretariat Daerah
72	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	20.170.000		Sekretariat Daerah
73	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92.865.000		BKD
74	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.321.408.700		BKD

75	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	13.141.000		BKD
76	Pengendalian Kerugian Daerah	21.350.000		BKD
77	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	787.154.000		Inspektorat
78	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30.250.000		Inspektorat
79	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.530.000.000		BKP2D
80	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	234.046.250		BKP2D
81	Pendidikan Kedinasan	547.502.000		BKP2D
82	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.706.713.000		BKP2D
83	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.345.379.200		BKP2D
84	Penataan Administrasi Kependudukan	6.099.709.000		Dispendukcapil
85	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.337.900.000		Diskominfo
86	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	345.750.000		Diskominfo
87	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	128.090.000		Diskominfo
88	Kerjasama informasi dengan mas media	2.821.340.000		Diskominfo
89	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.887.593.653		Sekretariat DPRD
90	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	28.750.000		Kankesbangpol
91	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	806.065.000		Kankesbangpol
92	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	66.610.000		Kankesbangpol
93	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	23.540.000		Kankesbangpol
94	Pendidikan Politik Masyarakat	242.376.000		Kankesbangpol
95	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.154.285.000		Satpol PP
96	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	92.150.000		Satpol PP
97	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.411.750.000		Satpol PP
98	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	173.600.000		Satpol PP
99	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	1.499.176.320		BPBD
100	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	515.547.500		Dinsos
101	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.368.892.900		Dinsos
102	Pembinaan Anak Terlantar	970.000.000		Dinsos
103	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	115.200.000		Dinsos
104	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	95.000.000		Dinsos
105	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	552.025.000		Dinsos
106	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	44.000.000	DBHCHT dan APBD	Diskopnaker
107	Pengembangan Wilayah Trasmigrasi	121.300.000		Diskopnaker
108	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.789.932.000		Diskopnaker
109	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	393.050.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
110	Peningkatan Kesempatan Kerja	351.240.000		Diskopnaker
111	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	177.600.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
112	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	291.664.000		Diskopnaker
113	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	512.373.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
114	Pengembangan Perumahan	2.354.153.500		DPKP
115	Lingkungan Sehat Perumahan	25.000.000		DPKP
116	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	57.930.000		DPKP
117	Bansos RTLH (lewat BKD)	11.313.000.000	DAK dan APBD	DPKP
118	Keluarga Berencana	6.027.148.000	DAK dan APBD	DP2KBP3A
119	Keserasian Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.000.000		
120	Kesehatan Reproduksi Remaja	110.865.000		DP2KBP3A
121	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50.000.000		DP2KBP3A
122	Pelayanan Kontrasepsi	57.000.000		DP2KBP3A
123	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	17.000.000		DP2KBP3A
124	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	110.000.000		DP2KBP3A
125	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	64.500.000		DP2KBP3A
126	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	35.265.000		DP2KBP3A
127	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	17.000.000		DP2KBP3A
128	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	5.000.000		DP2KBP3A
129	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	620.720.000		DP2KBP3A

130	Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB	67.000.000		DP2KBP3A
131	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	628.228.450		Dispermasdes
132	Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100.000.000		Dispermasdes
133	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	102.000.000		Dispermasdes
134	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	171.578.500		Dispermasdes
135	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	307.486.704		Dispermasdes
136	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6.482.165.200		Dispermasdes
137	Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.754.168.000	APBD dan APBN	Dinkes
138	Upaya Kesehatan Masyarakat	20.768.750.000	APBD dan APBN	Dinkes
139	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	331.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
140	Pengembangan Lingkungan Sehat	335.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
141	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	470.000.000	APBN	Dinkes
142	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	4.751.408.000	APBD dan APBN	Dinkes
143	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	8.891.000		Dinkes
144	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	2.936.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
145	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	14.666.629.000		Dinkes
146	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.516.145.000	APBD dan APBN	Dinkes
147	Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	167.086.000		Dinkes
148	Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	134.000.000		Dinkes
149	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	47.026.071.000		Dinkes
150	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	111.347.434.000		RSUD PA
151	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	3.840.000.000	DAK, Bankeu, dan DBHCHT	RSUD PA
152	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	15.441.047.000	BLUD	RSUD Simo
153	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	24.526.887.000	APBD dan DAK	RSUD Simo
154	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	11.805.719.000	DID dan DAK	RSUD Waras Wiris
155	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.028.000.000	Pajak Rokok	RSUD Waras Wiris
156	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	11.642.353.000	BLUD	RSUD Waras Wiris
157	Pendidikan Anak Usia Dini	1.250.900.000	BOP PAUD dan DAK Non Fisik (APBN)	Disdikbud
158	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	125.265.618.000	BOS SD dan SMP, DAK SD, DAK SMP (APBN), dan Bankeu (APBD Prov)	Disdikbud
159	Pendidikan Non Formal	1.056.807.000	DAK SKB (APBN) dan APBD	Disdikbud
160	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.890.000.000		Disdikbud
161	Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.941.716.000		Disdikbud
162	Pengembangan Nilai Budaya	2.398.000.000	DBHCHT (APBN) dan APBD	Disdikbud
163	Pengelolaan Kekayaan Budaya	719.435.000	DAK Non Fisik BOP Museum (APBN) dan APBD	Disdikbud
164	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.239.169.700		Disdikbud
165	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	61.500.000		Disdagperin
166	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.030.000.000	APBD, DAK dan DBHCHT	Disdagperin
167	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.274.180.000		Disdagperin
168	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.000.000		Disdagperin
169	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	110.200.000		Disdagperin
170	Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	55.128.076.000	APBD dan DAK	Disdagperin
171	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	104.105.000		Disdagperin
172	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	75.000.000		Disdagperin
173	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.064.376.000		Dispertan
174	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	256.075.000		Dispertan
175	Peningakatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	259.000.000		Dispertan
176	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	8.386.200.000	APBD dan DAK	Dispertan
177	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	123.150.000		Dispertan

178	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.815.363.000		Dispertan
179	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3.017.393.000	APBN	Dispertan
180	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hasil Tanaman Pangan	42.200.000	APBN	Dispertan
181	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	887.900.000	APBN	Dispertan
182	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.720.500.000	DAK dan APBD	DKP
183	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	462.055.000		Disnakkan
184	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.664.873.000	DAK KKP RI dan APBD	Disnakkan
185	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.037.247.000	DAK Pertanian dan APBD	Disnakkan
186	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	959.639.000	DAK Pertanian dan APBD	Disnakkan
187	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	60.557.000		Disnakkan

Boyolali, 1 Agustus 2019

BUPATI BOYOLALI

ors. SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI

PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2019

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1	Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	Nilai	82,21	82,10	100,05	82,18	100,01	82,19	100,01	82,19	82,24	100,06	A	DPMPTSP
			Capaian				**100,05**		**100,01**		**100,01**			**100,06**	**A**	
2.	Meningkatnya nilai investasi	1	Nilai investasi	Rp. (Juta)	1.475.475	1.827.844	158,75	1.260.731	104,28	1.534.761	120,34	1.340.857,30	1.602.525,46	119,51	A	DPMPTSP
		2	Jumlah investor	Investor	1.043	568	63,11	357	38,51	302	31,62	983	2.223	226,14	A	DPMPTSP
			Capaian				**110,93**		**71,40**		**75,98**			**172,83**	**A**	
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	1	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	m2	1.437.322	1.289.322	100	1.314.322	99,24	1.395.834	103,07	1.384.322	1.417.734	102,41	A	DLH
		2	Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	3,21	2,88	100	2,93	99,20	3,11	102,96	3,09	3,15	102,03	A	DLH
		3	Sumur resapan dan sejenisnya	unit	9.240	1540	100	1.056	68,57	912	59,22	1.540	1.615	104,87	A	DLH
		4	Cakupan pengelolaan sampah mandiri	desa/kel	12	2	100	2	100	2	100,00	2	3	150	A	DLH
			Capaian				**100,00**		**91,75**		**91,31**			**114,83**	**A**	
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (*green economy)*	1	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	B	DLH
		2	Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	%	20	0	0	3	30	14	116,67	15	15	100	B	DLH
			Capaian				**50**		**65,00**		**108,33**			**100**	**B**	
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	1	Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75,62	71,24	100	73	101,26	73,06	100,14	73,84	74	100,22	A	DPUPR
		2	Panjang pembangunan jalan baru	m	22.500	-	-	5.650	113,00	3.225	53,75	5.000	2.744	54,88	D	DPUPR
		3	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	90,98	80,98	100	82,36	99,25	84,73	99,71	86,98	88,31	101,53	A	DPUPR
		4	Drainase dalam kondisi baik	m	8.240	5.740	100	9.500	152,24	6.622	98,25	7.240	3.315	45,79	D	DPUPR
		5	Prosentase ketersediannya air baku	%	10,75	3,28	100	6,88	143,99	6,27	100,00	7,76	6,70	86,29	B	DPUPR
		6	Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	%	92	79	100	84,66	103,24	94,00	111,90	87	89,90	103,33	A	DPUPR
		7	Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	14,29	12,97	100	13,76	103,60	15,19	111,77	13,90	14,50	104,33	A	DPUPR
		8	Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	%	81,73	71,82	100	74,77	101,63	75,28	100,00	76,98	77,90	101,19	A	DPUPR
			Capaian				**100**		**114,78**		**96,94**			**87,20**	**B**	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	%	89,59	78,09	100	80,59	100	84,50	101,70	85,59	86,10	100,60	A	DPUPR
		2 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	%	100	58	100	68	100	79	100,06	89,47	81	90,53	B	DPUPR
		3 Penambahan titik lampu	Titik lampu	10.240	240	100	452	22,6	668	33,4	2.000	1358	67,90	C	DISHUB
		4 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	Unit	225	81	162	15	42,86	46	131,43	35	15	42,86	D	DLH
		5 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	B	DISHUB
		6 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	B	DISHUB
		7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,04	0,034	100	0,006	17,14	0,01	22,22	0,037	0,002	5,41	D	DISHUB
		Capaian				**108,86**		**68,94**		**84,12**			**72,47**	**C**	
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	1 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	Peringkat	8	10	100	-	0	17	11,11	9	7	122,22	A	DISPORAPAR
		2 Bertambahnya Cabang Olahraga	Klub olahraga	6	1	100	31	3100	1	100	1	2	200	A	DISPORAPAR
		3 Bertambahnya lapangan olahraga	Lapangan	18	2	100	9	450	3	100	3	3	100	B	DISPORAPAR
		4 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	%	76	69	106,15	223	332,84	71	101,43	72	202,96	281,89	A	DINAS ARPUS
		5 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	%	14,77	5,48	100	22,3	311,02	21,00	237,02	10,55	100	947,87	A	DINAS ARPUS
		6 Cakupan layanan perpustakaan keliling	%	100	100	100	100	100	100	100	100	97,62	97,62	B	DINAS ARPUS
		Capaian				**101,03**		**715,64**		**108,26**			**291,60**	**A**	
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	1 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	BP3D
		2 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	BP3D
		3 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	dokuman	Ada	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	Ada	100	B	SETDA
		4 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	skor	65	56,46	94,10	61,24 (B)	102,07	66,45	110,75	65	67,18	103,35	A	SETDA
		5 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	B	BP3D
		6 Prosentase Peningkatan PAD	%	10,54	3,55	100	12,72	124,17	12,72	122,32	10,45	16,53	158,20	A	BKD
		7 Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	WTP	100	B	BKD
		8 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	level	3	1	100	3	150	3	150	3	3	100	B	INSPEKTORAT
		9 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	level	3	1	50	3	150	3	150	3	3	100	B	INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		10 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	temuan/ rekomendasi	25	29	103,33	20	131,03	19	132,14	27	11	159,26	A	INSPEKTORAT
		Capaian				**94,74**		**115,73**		**116,52**			**112,08**	**A**	
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	dokuman	25	NA	NA	5	100	5	100	5	5	100	B	SETDA
		2 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	dokuman	58	33	1100	1	2,86	30	600,00	5	11	220	A	SETDA
		3 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	skor	70	62,04	113	63,26	109,07	85,30	139,84	64	65,01	101,58	A	SETDA
		4 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	%	83	80,16	100	80,47	99,35	80	98,16	82	80	97,56	B	BKP2D
		5 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	%	100	99,80	100	99,8	99,80	98	98,00	100	99,80	99,80	B	BKP2D
		6 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	%	80	85	125	68,97	98,53	87,50	121,53	74	122,2	165,14	A	SETDA
		7 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	dokuman	371	218	382	153	231,82	68	109,68	62	86	138,71	A	SETDA
		8 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	skor	80	78,17	100,22	78,8	99,75	80,25	101,26	79,50	81,97	103,11	A	SETDA
		9 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	%	90	100	100	90	100	90	100	90	90	100	B	SETDA
		10 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	182	100	91,05	91,05	95,11	95,11	100	90,99	90,99	B	DISPENDUKCAPIL
		11 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	%	100	25	100	47	104,44	79	105,33	100	81	81	B	DISPENDUKCAPIL
		12 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	%	100	100	100	77	77	100	100	100	100	100	B	DISKOMINFO
		13 Kualitas layanan e-procurement	skor	81	86,61	109,63	83,28	104,75	83,13	104,24	80	83,87	104,84	A	SETDA
		14 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	Media	43	6	100	6	100	7	100	7	7	100	B	DISKOMINFO, BAGIAN UMUM SETDA
		15 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	dokuman	42	7	100	7	100	7	100	7,00	7	100	B	DISKOMINFO
		16 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	%	85	50	100	40	80	67,00	111,67	75	89	118,67	A	BP3D
		17 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	84,91	84,91	B	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		18 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	%	60	40	114,29	41,4	103,5	45	100	50	68,25	136,49	A	DINAS ARPUS
		19 Prosentase sanggahan lelang	%	4	1,88	168,44	1,73	169,07	1,62	168,81	4,80	2,33	151,46	A	SETDA
		20 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	%	100	100	111,11	88	88	100,00	100	100	100	100	B	SEKRETARIAT DPRD
		21 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	80	41	100	48	100	55	100,00	62	62	100	B	DPUPR
		Capaian				**163,04**		**102,81**		**131,12**			**114,01**	**A**	
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	1 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	100	28,55	100	42,86	100	57,14	100	71,43	83	116,20	A	KANKESBANGPOL
		2 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	%	90	76	105	83	100	85	100	87	87	100,00	B	SATPOL PP
		3 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	%	95	85	100	90	100	90	100	90	100	111,11	A	SATPOL PP
		4 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten	%	100	76	97,44	93,9	100	96,34	100	97,56	100	102,50	A	SATPOL PP
		5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	82	30	100	78	100	80	100	80	84	105,00	A	KANKESBANGPOL
		6 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	100	42	100	30,23	100	65,12	100	76,74	79	102,94	A	KANKESBANGPOL
		7 Indeks Resiko Bencana	%	80	130	100	130	91,67	137	75,45	100	130,76	69,24	C	BPBD
		8 Cakupan kebakaran yang tertangani	%	80	100	153,85	68	100	71	100	74	100	135,14	A	SATPOL PP
		9 Cakupan penanganan PMKS	%	39,77	35,70	119,92	78,12	245,89	77,67	230,00	35,77	89,70	250,77	A	DINSOS
		10 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	perusahaan	70	36	100	72	102,86	65	92,86	70	67	95,71	B	DISKOPNAKER
		11 Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	37,20	40,5	110,96	52,85	144,01	47,94	129,22	37,20	51,89	139,49	A	DISKOPNAKER
		12 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	orang	1.440	240	100	240	100	896	373,33	240	1.092	455	A	DISKOPNAKER
		13 Rasio rumah layak huni	%	89	-	-	81,34	95,69	84,19	97,89	87,00	87,17	100,20	A	DPKP
		14 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	2,75	-	-	7,40	1345,45	10,70	972,73	1,65	39,77	2410,30	A	DPKP
		15 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	%	100	21	100	21	100	42	100	63	63	100	B	DP2KBP3A
		16 Cakupan Peserta KB.	%	80	75	100	75	100	71,22	92,49	77	77	100	B	DP2KBP3A
		17 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	%	1,20	0,93	100	2	100	1,01	143,89	1,60	1,03	135,63	A	DP2KBP3A
		18 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) Yang Aktif.	%	100	20,48	100	28,92	100	40,96	100	56,63	57	100,66	A	DP2KBP3A
		19 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	%	21	7	100	10	100	14	100	16	16	100	B	DP2KBP3A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		20 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	%	100	15	100	26	100	42	100	57	63	110,53	A	DP2KBP3A
		21 Desa layak anak	desa	159	19	100	22	100	26	104	28	67	239,29	A	DP2KBP3A
		Capaian				**104,59**		**167,88**		**162,47**			**246,65**	**A**	
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	1 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	UMKM	170	20	100	30	100	30	100,00	30	30	100	B	DISKOPNAKER
		2 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	koperasi	295	50	111,11	50	100	50	100,00	50	46	92,00	B	DISKOPNAKER
		3 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	%	54	45	102,27	64	130,61	97	179,63	54	80	148,15	A	DISKOPNAKER
		4 Kelompok binaan PKK	kelompok	287	287	100	90	31,36	287	100,00	287	290	101,05	A	DISPERMASDES
		5 Jumlah LSM	lembaga	267	267	100	267	100	267	100,00	267	267	100	B	DISPERMASDES
		6 Jumlah PKK aktif	kelompok	287	287	100	287	100	287	100,00	287	290	101,05	A	DISPERMASDES
		7 Posyandu aktif	unit	1.539	1209	100	1809	141,88	1341	100,00	1.407	1.407	100	B	DISPERMASDES
		8 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	%	100	17	100	100	296,67	50,56	100,00	67,42	67,42	100	B	DISPERMASDES
		9 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	lembaga	241	141	100	161	100	181	100,00	201	192	95,52	B	DISPERMASDES
		Capaian				**101,49**		**122,28**		**108,85**			**104,20**	**A**	
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	1 Penurunan Angka Kematian Bayi	per 1000 kh	8,40	8,2	104,65	9,4	90,70	8,81	96,35	8,40	8,89	94,17	B	DINKES
		2 Kasus Kematian Ibu	kasus	19	16	123,81	16	123,81	15,00	125,00	20	13,00	135	A	DINKES
		3 Penurunan Angka Kematian Balita	per 1000	10	8,7	126,27	11	103,51	9,97	110,98	11	10,43	105,18	A	DINKES
		4 Cakupan kunjungan bayi	%	95	92	115	99,4	121,22	93,73	110,27	87	99,96	114,90	A	DINKES
		5 Cakupan pelayanan anak balita	%	95	80	100	85,9	93,37	93,30	100,32	94	99,96	106,34	A	DINKES
		6 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100	97,70	97,70	B	DINKES
		7 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	90	100	100	100	125	100	117,65	90	95,00	105,56	A	DINKES
		8 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	40	60	156,66	38,6	100	42,98	110,49	39,20	43,14	110,05	A	DINKES
		9 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	90	80	88,89	97	105,43	93,00	98,94	96	86	89,58	B	DINKES
		10 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	%	45	53,99	269,95	30	120	35	100,00	40	42	105	A	DINKES
		11 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	%	45	13,9	69,50	35	140	35	100,00	40	48	120	A	DINKES
		12 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	per 100.000	47,50	50	100	10	179,80	12,70	174,08	48,50	43,17	110,99	A	DINKES
		13 Angka kematian DBD (CFR)	% dari jumlah penderita	1,60	2	94,74	1	144,44	1,50	116,67	1,70	0,23	186,47	A	DINKES
		14 Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil	%	50	70,4	1408,00	100	1000	100,00	500,00	30	77	256,67	A	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		15 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	%	> 85	86	100	98,6	100	95,77	136,81	> 75	84,27	112,36	A	DINKES
		16 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	%	50	10,8	108	21	105	41,19	137,30	40	50	125	A	DINKES
		17 Cakupan Desa UCI	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	B	DINKES
		18 Puskesmas Terakreditasi	puskesmas	29	7	100	3	150	6	150,00	6	10	166,67	A	DINKES
		19 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	%	15	15	100	25,44	169,60	45,41	302,73	15	25	166,67	A	DINKES
		20 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	%	1,50	1,3	86,67	0,94	62,67	0,97	64,67	1,50	0,91	60,67	C	DINKES
		21 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	%	90	100	100	100	111,11	100,00	111,11	90	100	111,11	A	DINKES
		22 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	B	DINKES
		23 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	B	DINKES
		24 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	%	20,69	0	0	6,89	100	11,54	111,48	13,79	13,79	100	B	DINKES
		25 Rasio dokter	%	17	14,7	97,35	26,35	173,36	24,07	154,29	16	15,60	97,50	B	DINKES
		26 Rasio dokter gigi	%	5,90	3,94	101,03	4,2	93,33	3,51	73,13	5,10	5,20	101,96	A	DINKES
		27 Rasio perawat	%	100,30	87,15	100	79,02	87,12	93,76	101,47	95,30	86,80	91,08	B	DINKES
		28 Rasio bidan	%	58,40	56,5	100	49,26	86,88	57,00	100,00	57,20	53,60	93,71	B	DINKES
		29 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	%	100	NA	-	20	100	38,46	96,15	60	100	166,67	A	DINKES
		30 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	desa	120	69	100	92	139,39	94,00	117,50	93	107	115,05	A	DINKES
		31 Proporsi Rumah tangga sehat	%	75	81,9	100	79,9	112,54	83,30	115,69	73	85,40	116,99	A	DINKES
		32 Cakupan Desa STBM	desa	267	3	60	46	115,00	97,00	129,33	160	102	63,75	C	DINKES
		33 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	%	100	104,02	106,93	90,08	91,90	97,21	98,01	99,46	92,15	92,65	B	RSUD PANDAN ARANG
		34 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	%	88,33	88,21	129,51	71,45	99,83	75,12	101,14	79,23	79,92	100,87	A	RSUD SIMO
		35 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	%	100	59,58	110,33	58,14	92,29	60,43	87,58	81	74,60	92,10	B	RSUD WARAS WIRIS
		Capaian				**147,18**		**138,21**		**127,12**			**114,64**	**A**	
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	1 APK PAUD	%	82	71,80	100,84	74,41	99,21	75,22	95,46	79,87	75,60	94,65	B	DISDIKBUD
		2 APK SD	%	102,50	99,53	100,03	99,65	100,15	99,76	99,96	101,00	101,60	100,59	A	DISDIKBUD
		3 APK SMP	%	100,20	94,35	99,53	95,06	100,06	96,45	99,64	97,60	100,80	103,28	A	DISDIKBUD
		4 APM SD	%	87,50	86,00	99,94	87,92	102,11	90,33	104,73	86,50	91,83	106,16	A	DISDIKBUD
		5 APM SMP	%	75,50	68,10	97,29	69,96	99,73	74,54	105,73	71,50	75,75	105,94	A	DISDIKBUD
		6 Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,03	100	0,01	166,67	0,01	166,67	0,03	0,03	100	B	DISDIKBUD
		7 Angka Putus Sekolah SMP	%	0,15	0,09	165,38	0,02	192	0,01	196,00	0,20	0,09	155	A	DISDIKBUD
		8 Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	99,50	98,16	99,65	98,64	99,89	99,75	100,76	99,15	99,59	100,44	A	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		9 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	%	95	93,36	99,21	95,87	101,83	91,82	97,47	94,22	93,69	99,44	B	DISDIKBUD
		10 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	%	98,70	96,66	99,44	94,8	97,23	85,32	87,24	98,10	88,90	90,62	B	DISDIKBUD
		11 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	62,50	57,02	106,18	51,4	95,01	55,61	100,89	56,14	55,30	98,50	B	DISDIKBUD
		12 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	75	75,90	130,97	67,26	100,43	72,02	106,76	67,95	73,10	107,58	A	DISDIKBUD
		13 Rasio Siswa terhadap Guru SD	orang	20	12,25	94,23	12,68	85,97	14,25	86,36	18,25	13,73	75,23	B	DISDIKBUD
		14 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	orang	20	13,83	98,79	16,11	102,29	16,50	94,29	19,25	16,91	87,84	B	DISDIKBUD
		15 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0,15	0,32	100	0,32	100	0,32	93,33	0,26	0,11	157,69	A	DISDIKBUD
		16 Presentase SD Berakreditasi minimal B	%	95	92,79	104,85	94,78	105,31	87,79	96,21	92,50	98,30	106,27	A	DISDIKBUD
		17 Presentase SMP berakreditasi minimal B	%	85	83,56	105,31	93,62	117,03	82,11	101,06	82,50	94,80	114,91	A	DISDIKBUD
		Capaian				**105,98**		**109,70**		**107,80**			**106,13**	**A**	
14.	Meningkatnya daya saing industri	1 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	IKM	430	300	111,11	395	114,49	395	107,92	386	400	103,63	A	DISDAGPERIN
		2 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	kawasan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDAGPERIN
		3 Pertumbuhan industri	unit	9.573	9064	100	9.214	100,66	9.237	99,90	9338	9600	102,81	A	DISDAGPERIN
		Capaian				**105,56**		**107,57**		**69,28**			**103,22**	**A**	
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	1 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	unit	95	70	100	163	217,33	218	272,50	85	175	205,88	A	DISDAGPERIN
		2 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	%	100	17	102	33,33	100,00	70	140	66,67	67	100,50	A	DISDAGPERIN
		3 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	pelaku usaha	25.200	4.429	105,45	856	20,38	794	18,90	4.200	4.179	99,50	B	DISDAGPERIN
		4 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	Rp. (000)	30.686.010	5.219.768	104,62	5.889.175	116,86	7.111.897,82	139,74	5.139.335	9.405.173,01	183	A	DISDAGPERIN
		5 Nilai ekspor barang (USD)	US $	884.249	242.684	186,68	9.629	7,05	(274.079,82)	-191,23	150.491	370.193,74	245,99	A	DISDAGPERIN
		6 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	%	14,50	12,70	95,85	12,94	95,85	13,52	98,33	14	12,84	91,71	B	DISDAGPERIN
		Capaian				**115,77**		**92,91**		**79,71**			**154,43**	**A**	
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	1 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	ton	298.751	300.123	105,47	275.073	95,73	295.736	101,93	292.987	293.695	100,24	A	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:													DISPERTAN
		2 - Jagung	ton	138.456	180.439,98	133,61	124.904	92,03	149.976	109,95	137.082	139.506	101,77	A	DISPERTAN
		3 - Kedelai	ton	6.898	4.803,72	71,40	5.587	82,62	3.488	51,33	6.829	5.608	82,12	B	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama													DISPERTAN
		4 - Pepaya	kuintal	126.121	358.570	298,81	401.812	331,53	214.441	175,18	123.636	280.286	226,70	A	DISPERTAN
		5 - Cabe	kuintal	115.611	509.662	463,33	314.060	282,68	259.973	231,68	113.333	634.528	559,88	A	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6 - Bawang Merah	kuintal	31.530	216.869	677,72	107.970	356,34	75.061	245,27	30.909	183.493	593,66	A	DISPERTAN
		7 - Jahe	kuintal	10.773	10.567,50	103,10	52.010	502,37	25.113	240,15	10.561	23.782	225,19	A	DISPERTAN
		8 - Kencur	kuintal	17.342	22.319	135,27	18.065	108,40	18.115	107,62	17.000	26.606	156,51	A	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :													DISPERTAN
		9 - Cengkeh	ton	382,88	411,97	137,32	0	0	583,44	176,40	347,29	547,70	157,71	A	DISPERTAN
		10 - Kopi	ton	153,15	247,17	205,98	247,57	196,48	368,65	278,65	138,92	370,62	266,79	A	DISPERTAN
		11 - Kelapa	ton	5.572,25	5.726,23	131,16	3.279,38	71,54	2.781,71	57,79	5.054,19	2.851,73	56,42	C	DISPERTAN
		12 - Tembakau	ton	5.234,03	4.102,18	100,03	3.867	89,80	4.718,42	104,36	4.747,42	7.404,51	155,97	A	DISPERTAN
		13 - Tebu	ton	36.246,40	213.315,93	750,85	20.690,64	69,39	20.380,17	65,09	32.876,55	17.157	52,19	D	DISPERTAN
		14 - Lada	ton	24,25	18,89	95,50	19,79	99,20	12,80	61,10	21,99	12,90	58,66	C	DISPERTAN
		15 - Atsiri	Kuintal	59,99	61,65	131,17	103,01	208,73	62,60	120,80	54,41	57,38	105,46	A	DISPERTAN
		16 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	26,97	17,6	100	19,47	100,05	21,35	100,00	23,22	23,22	100	B	DKP
		17 Presentase peningkatan Cadangan Pangan	%	100	113,64	123,86	149,67	162,68	174,81	184,01	97	160	164,95	A	DKP
		18 Skor Pola Pangan Harapan	skor	92	86,5	98,30	86,8	97,53	86,90	97,09	90	90,10	100,11	A	DKP
		Capaian				**214,60**		**163,73**		**139,36**			**181,35**	**A**	
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	1 Produksi ikan	ton	33.602	35.346	134,60	37.155	134,41	37.162	128,03	30.478	36.975	121,32	A	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan													DISNAKKAN
		2 - Produksi daging	ton	8.460	11361	138,38	11.960	144,97	13.294	160,27	8.345	14.148	169,54	A	DISNAKKAN
		3 - Produksi susu (kilo liter)	kilo liter	48.201	49000	104,75	49.129	104,58	49.540	104,90	47.526	49.717	104,61	A	DISNAKKAN
		4 Populasi ternak	ekor	320.731	324623	104,63	332.064	106,39	338.312	107,70	316.181	357.517	113,07	A	DISNAKKAN
		5 - Sapi potong	ekor	90.000	95.651	109,94	96.066	109,79	99.311	112,79	88.650	106.599	120,25	A	DISNAKKAN
		6 - Sapi perah	ekor	89.310	89.844	103,99	92.619	106,57	92.856	106,19	88.010	94.088	106,91	A	DISNAKKAN
		7 - Kambing dan domba	ekor	141.421	139.128	101,65	143.379	104,11	146.145	105,43	139.521	156.830	112,41	A	DISNAKKAN
		Capaian				**113,99**		**115,83**		**117,90**			**121,16**	**A**	
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	1 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	%	77	39	100	40	100	57,00	100	65	84	129,23	A	DISKOMINFO
		2 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	93	89	100	90	100	90,00	100	91	91	100	B	DISKOMINFO
		3 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	52	40	85,11	48	100	49,00	100	50	50	100	B	DISKOMINFO
		Capaian				**95,04**		**100,00**		**100,00**			**109,74**	**A**	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2021	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019			KATEGORI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	1 Kunjungan Wisatawan	orang	2.662.370	556.255	128,53	525.686	120	651.739	148	445.875	598.174	134,16	A	DISPORAPAR
		2 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata	Rp (.000)	1.470.000	1.329.212	93,21	1.219.981	85,13	1.884.310	131	1.450.000	1.618.298	111,61	A	DISPORAPAR
		3 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	%	100	99	108,68	92	100	94,00	100	96	96	100,00	B	DISDIKBUD
		Capaian				**110,14**		**101,80**		**126,15**			**115,25**	**A**	

Boyolali, Januari 2020

BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII

PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Memberikan Penghargaan Kepada
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini WTP
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan
SRI MULYANI INDRAWATI
RAKERNAS
2019



PIAGAM PENGHARGAAN

MAJU LAWAN KORUPSI.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boyolali

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Jakarta, 10 Desember 2019

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019

Jakarta, 11 Desember 2019
MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali
Sebagai
Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2019
A-
Jakarta, 5 November 2019
Tjahjo Kumolo



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Boyolali

Sebagai

Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Baik"
Tahun 2019

Jakarta, 5 November 2019
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali
Kabupaten Boyolali

Sebagai

***Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik**
Kategori "Baik"
Tahun 2019

Jakarta, 5 November 2019
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

KABUPATEN BOYOLALI

Atas prestasi sebagai

KABUPATEN/KOTA PALING AKTIF MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Jakarta, 27 Juni 2019

Menteri Sosial RI

MENTERI SOSIAL

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



PENGHARGAAN

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

Kepada

Pemerintah Kabupaten Boyolali

Kategori

PRATAMA

Makassar, 23 Juli 2019

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Yohana Yembise



PIAGAM PENGHARGAAN

DJPb

Diberikan kepada :

KABUPATEN BOYOLALI

sebagai

Pemerintah Daerah Terbaik Pertama
Dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Se- Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Mengetahui,
Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo

Semarang, November 2019
Kepala Kanwil DJPb
Prov. Jawa Tengah

Sulaimansyah

GUBERNUR JAWA TENGAH

Piagam Penghargaan

Nomor : **002.5/0025587**

Dasar: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor **002.5/66** tanggal **11 November 2019** tentang Penerima Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan kepada :

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

sebagai :

PERINGKAT III KATEGORI SUMBER DAYA MANUSIA/*HUMAN CAPITAL*
Anugerah Indeks Daya Saing Daerah
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Semarang, 11 November 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP


ICSB
ACSB
natamukti
Award 2019 Presented to
KABUPATEN BOYOLALI
Bogor, 7 October 2019
Dr. Jacky Mussry
President of ICSB Indonesia
Hermawan Kartajaya
President of ACSB


ICSB
International Council for Small Business
INDONESIA
ICSB INDONESIA PRESIDENTIAL AWARD
2019
BOYOLALI
DINAS KOPERASI & TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI
Category:
Policy Maker
Boyolali, 7 November 2019
Jacky Mussry
President
International Council for Small Business
Indonesia
Hermawan Kartajaya
Chairman
International Council for Small Business
Indonesia

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0022556

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberian Penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019.

Diberikan kepada :

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

sebagai :

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019.

Semarang, 7 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0028751

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/72 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2019.

Diberikan kepada :

Pemerintah Kabupaten Boyolali

Sebagai :

Terbaik II untuk Kategori Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Manajemen Sumber Daya Aparatur pada Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019.

Semarang, 6 Desember 2019.
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP.